



**SALINAN**

**PEMERINTAH KOTA MATARAM**

RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
(RPJMD)  
KOTA MATARAM  
TAHUN 2016-2021



WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MATARAM TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;
  - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 tahap III yang memuat analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta kebijakan umum dan program pembangunan daerah, yang dimaksudkan sebagai pelaksana dan tujuan pembangunan daerah selama lima tahun mendatang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 99);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota Mataram.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 adalah Rencana Pembangunan Daerah yang bersifat strategis untuk periode lima tahunan karena merupakan komitmen bersama masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah.

#### Pasal 2

RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama periode Tahun 2016-2021.

#### Pasal 3

- (1) RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - BAB I PENDAHULUAN
  - BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  - BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
  - BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
  - BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
  - BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  - BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
  - BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
  - BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
  - BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- (2) RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur kelembagaan/susunan perangkat daerah dan struktur anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdampak pada Peraturan Daerah ini, penanggungjawab urusan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 6


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 15 Agustus 2016  
WALIKOTA MATARAM

  
H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 15 Agustus 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

  
H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016 NOMOR 9 SERI E

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (55 /2016)

# BAB 1

## PENDAHULUAN

RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah Kota Mataram untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025 dan RTRW Kota Mataram tahun 2011-2031 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018.

---

### 1.1 LATAR BELAKANG

---

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 Kota Administratif Mataram yang pada saat itu berada dibawah wilayah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II pada tanggal 31 Desember 1993 yang selanjutnya ditetapkan menjadi hari jadi Kota Mataram. Peningkatan status tersebut karena Kota Administratif Mataram dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang sesuai dengan peranan dan fungsinya, dan juga menggambarkan mengenai peningkatan potensi wilayah dan kemampuannya untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk menyusun rencana pembangunan yang bersinergi menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah harus berkaitan, baik dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun berdasarkan undang-undang tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dengan telah terpilih dan dilantiknya Walikota Mataram dan Wakil Walikota Mataram masa bakti periode 2016-2021, pada tanggal 17 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.52.676 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 12 Februari 2016 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.52.677 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 12 Februari 2016, maka melekat kewajiban untuk menyusun RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun.

RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran tahapan Pembangunan lima tahun Ketiga dari Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025, dan menjadi RPJMD tahap kedua dari kepemimpinan Kepala Daerah periode sebelumnya, sehingga pilihan yang tepat adalah "*Melanjutkan Kepemimpinan*" dalam bingkai perubahan untuk penyempurnaan, bukan memulainya dari meniadakan yang sudah mampu dicapai.

RPJMD yang disusun ini didesain agar dapat bersesuaian dengan revisi rencana tata ruang yang sedang disempurnakan, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Kota Mataram, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan Nasional. Penyusunan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut:

1. **Pendekatan Politik**, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah.

Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD.

Pendekatan ini juga disempurnakan melalui pembahasan di DPRD Kota Mataram, yang mengacu pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu: Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota kepada DPRD Kabupaten/Kota untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.

2. **Pendekatan Teknokratik**, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Naskah teknokratik RPJMD Kota Mataram disusun sejak Tahun 2015 atau sebelum Walikota Mataram terpilih sesuai dengan arahan dalam Permendagri 54 Tahun 2010. Naskah Teknokratik berisi evaluasi pelaksanaan RPJMD yang lalu hingga isu strategis. Selain naskah teknokratik, pendekatan teknokratik dilakukan dengan melaksanakan diskusi tematik dan konsultasi publik yang membahas secara lebih dalam tentang suatu tema bersama pakar-pakar sesuai dengan bidang keahlian.

3. **Pendekatan Partisipatif**, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan.

Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi masyarakat berupa masukan, saran dan tanggapan dalam penyusunan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021. Tahapan pelaksanaan pendekatan partisipatif, adalah:

1. Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring ASMARA);
2. Musrenbang RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021.

4. **Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up)**, pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

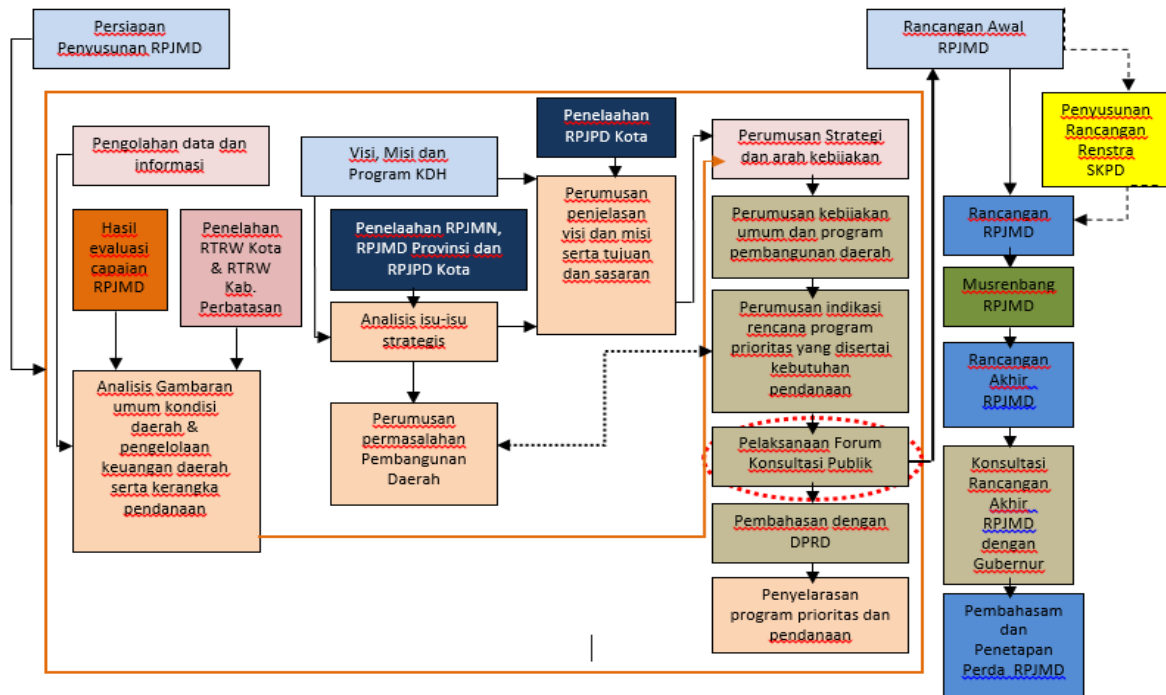
Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dilaksanakan dengan menjabarkan dokumen perencanaan nasional yaitu RPJMN ke dalam rencana pembangunan jangka menengah Kota Mataram dalam wilayah dan kewenangannya. Rencana yang berada di "bawah" adalah penjabaran rencana induk yang berada di "atas". Pendekatan lain adalah dengan pendekatan sektoral/isu strategis, dengan memperhatikan target yang ditentukan secara nasional serta penjabarannya ke dalam rencana kegiatan di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang mengacu kepada pencapaian target nasional tersebut.

Sedangkan Pendekatan Bawah-Atas (*bottom-up*) selain memuat pendekatan partisipatif yaitu Jaring ASMARA dan Musrenbang RPJMD, juga melibatkan Perangkat Daerah dengan mengoptimalkan peran Forum Perencana Kota Mataram yang beranggotakan Kepala Subbagian Perencana di seluruh Perangkat Daerah. Dengan adanya forum perencana, rancangan Renstra Perangkat Daerah dapat dijadikan input dalam penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021.

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 serta lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, telah dilaksanakan secara konsisten serta pelaksanaan inovasi terhadap optimalisasi atas amanat pendekatan perencanaan pembangunan daerah.

Proses penting lainnya dalam penyusunan RPJMD Kota Mataram ini adalah pemahaman awal posisi Kota Mataram yang berbeda dengan daerah lain pada umumnya di Provinsi NTB, yakni Kota Mataram merupakan Ibukota Provinsi NTB juga merupakan Pusat Pemerintahan, Pusat Pendidikan dan Pusat Perekonomian Barang dan Jasa.

Penyusunan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 jika dirunut berdasarkan proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1. **Proses Penyusunan RPJMD Kota Mataram**

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu:

1. RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan alat atau instrument pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda;

5. RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan instrument untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 (lima) tahun;
6. RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Provinsi;
7. RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

---

## **1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

---

Dasar hukum Penyusunan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

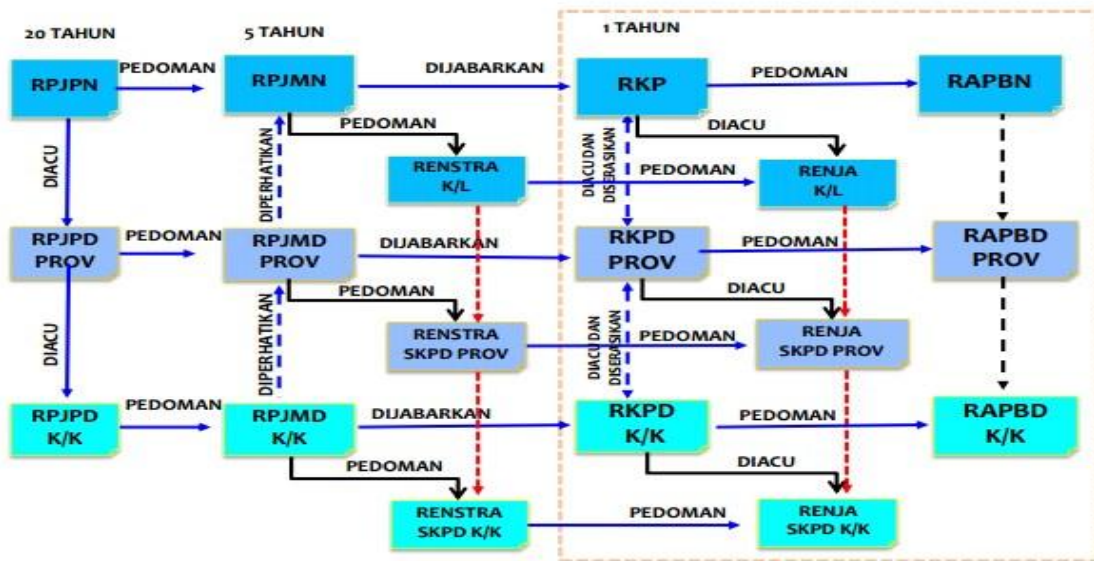
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029;
26. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
27. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;
28. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025.
29. Peraturan Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram 2011-2031.

### 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyusunan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025 dan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



Gambar 1.2. Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/ Daerah

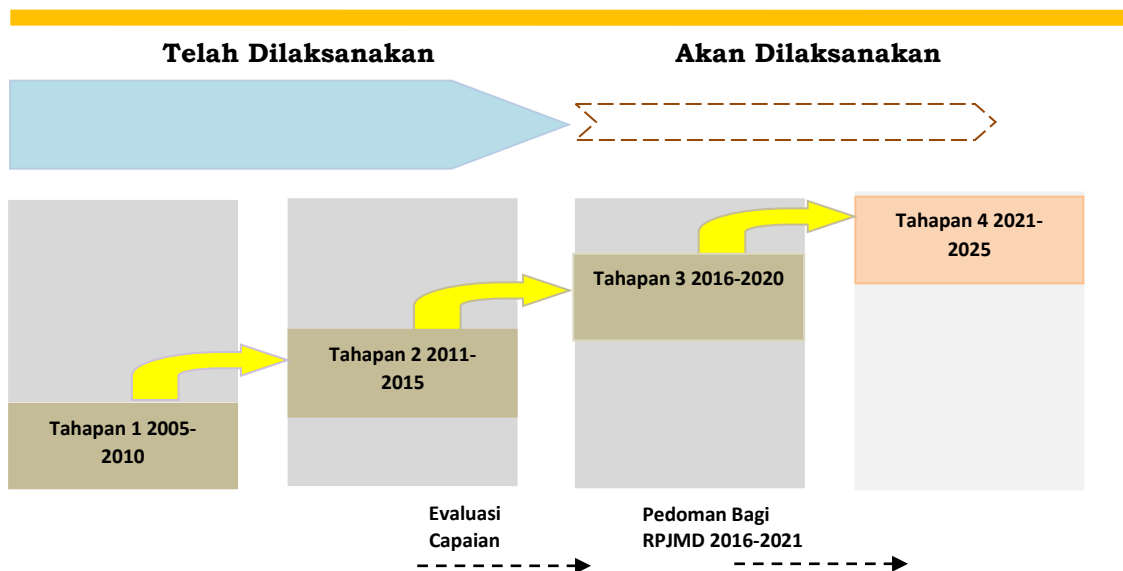
Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

#### 1. RPJMD Kota Mataram dengan RPJPD Kota Mataram

RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 adalah rencana pembangunan tahap ketiga dan keempat dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Kota Mataram periode 2016-2021, juga berpedoman RPJPD Kota Mataram 2005-2025. Dengan kata lain dengan menyelaraskan pencapaian visi,

misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.



Gambar 1.3. **Tahapan RPJPD Kota Mataram**

## 2. **RPJMD Kota Mataram dengan Renstra Perangkat Daerah**

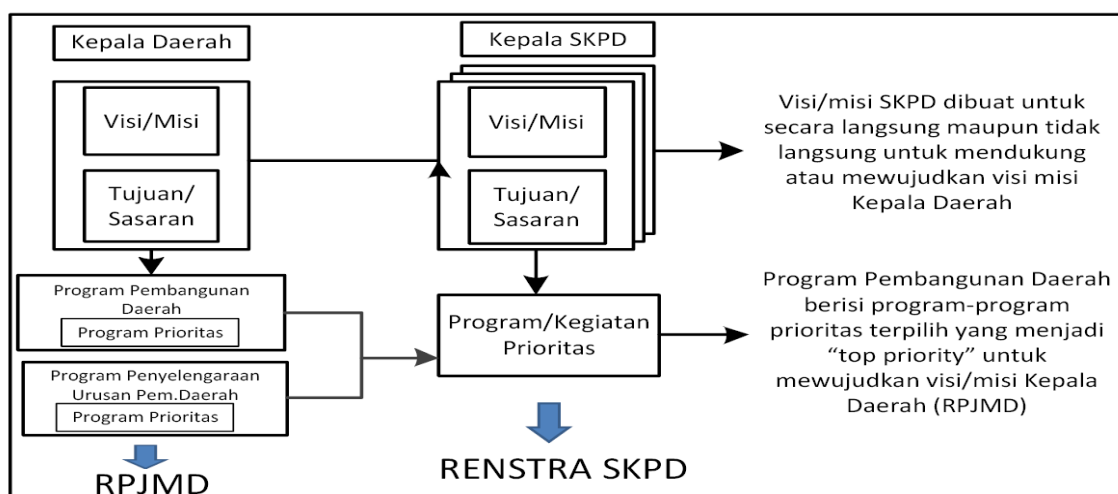
Berdasarkan Pasal 85 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang pada pokoknya mengamanatkan Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi

pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram.

Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Visi Perangkat Daerah merupakan keadaan yang ingin diwujudkan Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.

Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah tersebut bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

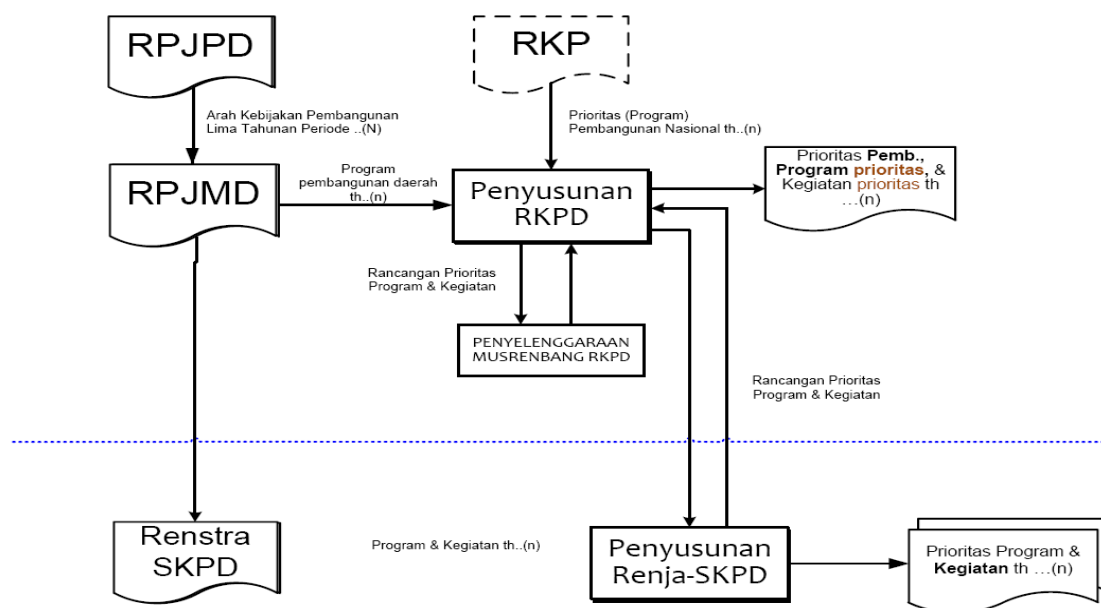


Gambar 1.4. Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

### 3. RPJMD Kota Mataram dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam RKPD, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Mataram yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama Musrenbang atau yang dikenal dengan MPBM Kota Mataram yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kota Mataram, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.



Gambar 1.5. **Bagan Alir Hubungan Antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah**

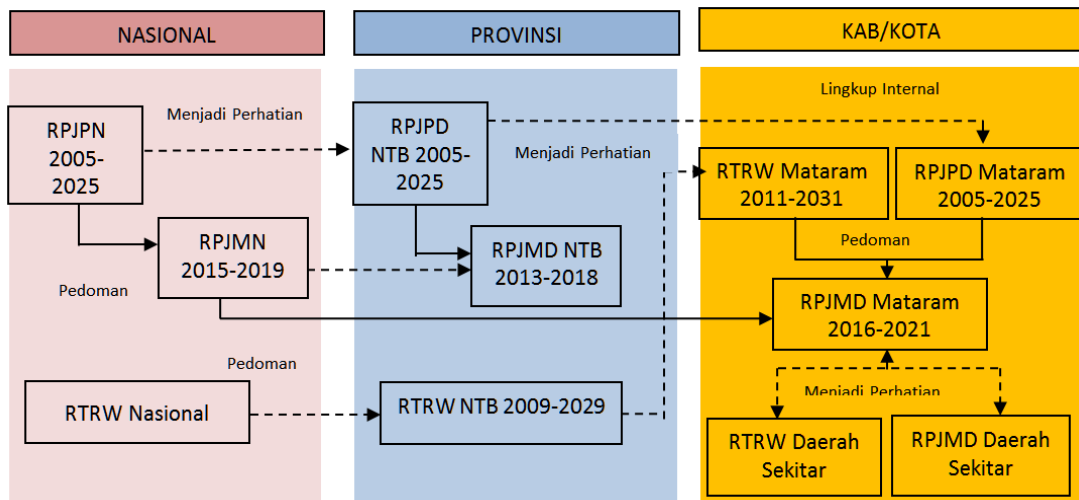
Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

#### 4. RPJMD Kota Mataram dengan Perencanaan Lainnya

Sebagai subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 juga perlu ditelaah baik dokumen pada level nasional, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten/Kota di sekitar Kota Mataram, yaitu:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD wilayah sekitar Kota Mataram seperti Kabupaten Lombok Barat;
5. Dokumen terkait lainnya (yang bersifat perencanaan sektoral).

Skema hubungan antara RPJMD Kota Mataram 2016-2021 dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam Gambar berikut ini.



Gambar 1.6. **Hubungan Antara RPJMD Kota Mataram Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Penyusunan RPJMD Kota Mataram berpedoman pada RTRW Kota Mataram yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten/Kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW Kota Mataram, juga perlu memperhatikan RTRW Provinsi NTB dan Kabupaten sekitarnya, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka

menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/ kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

---

## 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

---

### 1. Maksud

RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Mataram sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan Walikota terpilih masa bakti 2016-2021, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

### 2. Tujuan

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Mataram dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2016-2021;
- b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
- c. Menerjemahkan Visi dan Misi Walikota Mataram dan Wakil Walikota Mataram ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025;
- d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021.
- e. Menetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah dan Indikator kinerja Walikota Mataram dan Wakil Walikota Mataram sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Mataram periode 2016-2021.

---

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

---

Sistematika penulisan RPJMD Kota Mataram yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari 10 (sepuluh) bab, sebagai berikut:

- BAB I      PENDAHULUAN**
- BAB II     GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
- BAB III    GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN**
- BAB IV    ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**
- BAB V     VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**
- BAB VI    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VII   KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**
- BAB VIII  INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS**
- BAB IX    PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**
- BAB X     PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN**

# BAB 2

## GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran Umum Kondisi Daerah menjelaskan tentang kondisi daerah mencakup *Aspek Geografi dan Demografi*, *Aspek Kesejahteraan Masyarakat*, *Aspek Pelayanan*, dan *Aspek Daya Saing* dengan indikator makro, sebagai berikut:



## 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

### 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

#### a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Mataram memiliki luas daratan 61,30 Km<sup>2</sup> (6.130 Ha) dan 56,80 Km<sup>2</sup> perairan laut serta garis pantai sepanjang 9 km. Luas wilayah Kota Mataram tersebut hanya 0,30 persen dari luas Provinsi NTB secara keseluruhan yaitu 20.153,15 Km<sup>2</sup>, sehingga menjadikan Kota Mataram sebagai kota dengan wilayah terkecil dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTB.

Secara administrasi Kota Mataram terbagi dalam 6 wilayah kecamatan, 50 kelurahan dan 322 lingkungan, dengan wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Selaparang dengan luas 10,77 km<sup>2</sup> dan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Ampenan dengan luas wilayah 9,46 km<sup>2</sup>, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1  
**Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2015**

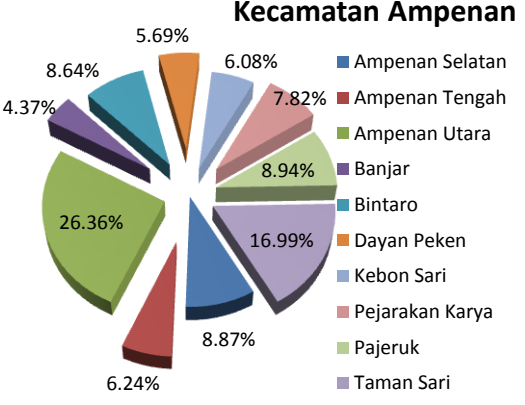
Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Lingkungan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
Ampenan	10	55	9,46	15,43
Cakranegara	10	72	9,67	15,77
Sekarbela	5	35	10,32	16,84
Mataram	9	55	10,76	17,55
Selaparang	9	61	10,77	17,57
Sandubaya	7	44	10,32	16,84
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>322</b>	<b>61,30</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

Secara lebih rinci, luas wilayah Kota Mataram menurut kecamatan dan kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2  
**Luas Wilayah Kota Mataram menurut Kecamatan dan Kelurahan**

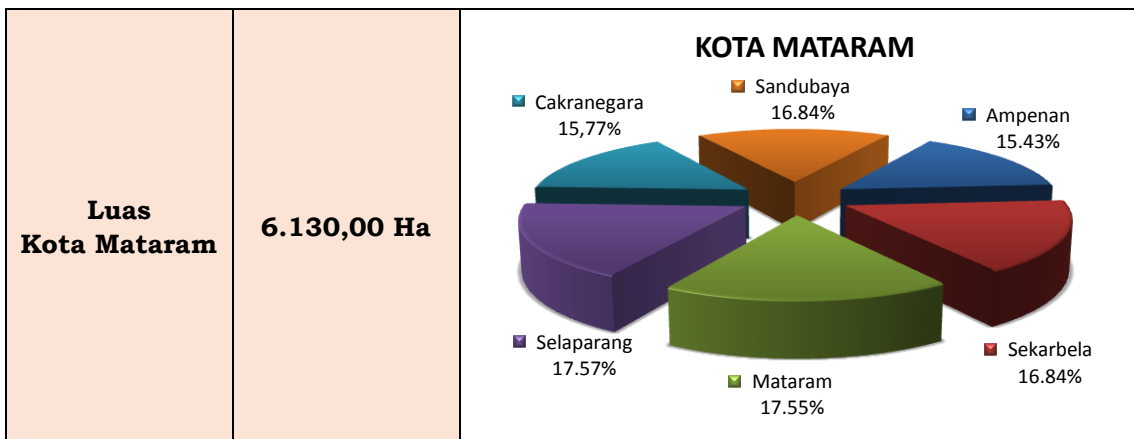
No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )
1.	Kecamatan Ampenan	Ampenan Selatan	0,84
		Ampenan Tengah	0,59
		Ampenan Utara	2,49
		Banjar	0,41
		Bintaro	0,82
		Dayan Peken	0,54
		Kebon Sari	0,58
		Pejarakan Karya	0,74
		Pajeruk	0,85
		Taman Sari	1,61
<b>Luas Kecamatan Ampenan</b>			<b>9,46</b>



**Kecamatan Ampenan**

- Ampenan Selatan
- Ampenan Tengah
- Ampenan Utara
- Banjar
- Bintaro
- Dayan Peken
- Kebon Sari
- Pejarakan Karya
- Pajeruk
- Taman Sari

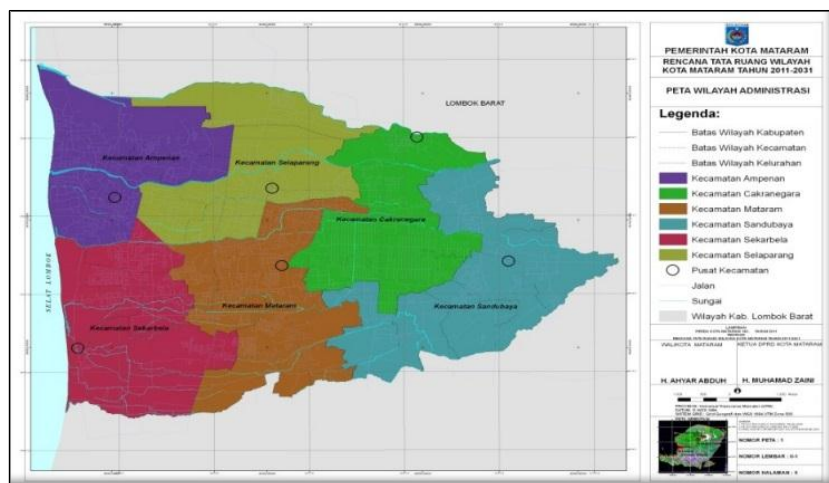
2.	Kecamatan Cakranegara	Kelurahan Cakranegara Barat	0,51	<b>Kecamatan Cakranegara</b> 		
		Cilinaya	1,29			
		Sapta Marga	0,86			
		Cakranegara Timur	0,67			
		Mayura	1,02			
		Cakranegara Selatan	0,73			
		Cakranegara Selatan Baru	0,56			
		Cakranegara Utara	1,29			
		Karang Taliwang	0,62			
		Sayangsayang	2,12			
		<b>Luas Kecamatan Cakranegara</b>			<b>9,67</b>	
3.	Kecamatan Mataram	Kelurahan Pejaggik	1,03	<b>Kecamatan Mataram</b> 		
		Mataram Timur	1,24			
		Pagesangan	1,96			
		Pagesangan Barat	0,75			
		Pagesangan Timur	1,10			
		Pagutan Barat	0,91			
		Pagutan	1,86			
		Pagutan Timur	1,03			
		Punia	0,88			
		<b>Luas Kecamatan Mataram</b>			<b>10,76</b>	
		4.	Kecamatan Sandubaya		Kelurahan Selagalas	2,99
Bertais	1,04					
Mandalika	1,00					
Babakan	1,10					
Turida	1,97					
Dasan Cermen	1,58					
Abian Tubuh Baru	0,64					
<b>Luas Kecamatan Sandubaya</b>				<b>10,32</b>		
5.	Kecamatan Sekarbela	Kelurahan Kekalik Jaya	1,35	<b>Kecamatan Sekarbela</b> 		
		Tanjung Karang Permai	0,68			
		Tanjung Karang	2,57			
		Karang Pule	1,07			
		Jempong Baru	4,65			
		<b>Luas Kecamatan Sekarbela</b>			<b>10,32</b>	
6.	Kecamatan Selaparang	Kelurahan Rembiga	3,15	<b>Kecamatan Selaparang</b> 		
		Karang Baru	2,37			
		Monjok Timur	0,37			
		Monjok	1,35			
		Monjok Barat	0,50			
		Mataram Barat	0,69			
		Gomong	0,39			
		Dasan Agung	0,79			
		Dasan Agung Baru	1,16			
		<b>Luas Kecamatan Selaparang</b>			<b>10,77</b>	



Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram, batas-batas wilayah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat
- Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat
- Sebelah Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
- Sebelah Barat : Selat Lombok



Gambar 2.1. **Peta Wilayah Administrasi Kota Mataram**

### b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Mataram terletak pada ujung sebelah barat Pulau Lombok dan secara astronomis terletak pada posisi antara 08°33' dan 08°38' Lintang Selatan dan antara 116°04' dan 116°10' Bujur Timur, dengan panjang garis pantai 9 km.



Gambar 2.2. **Lokasi Kota Mataram dalam Peta Provinsi NTB**

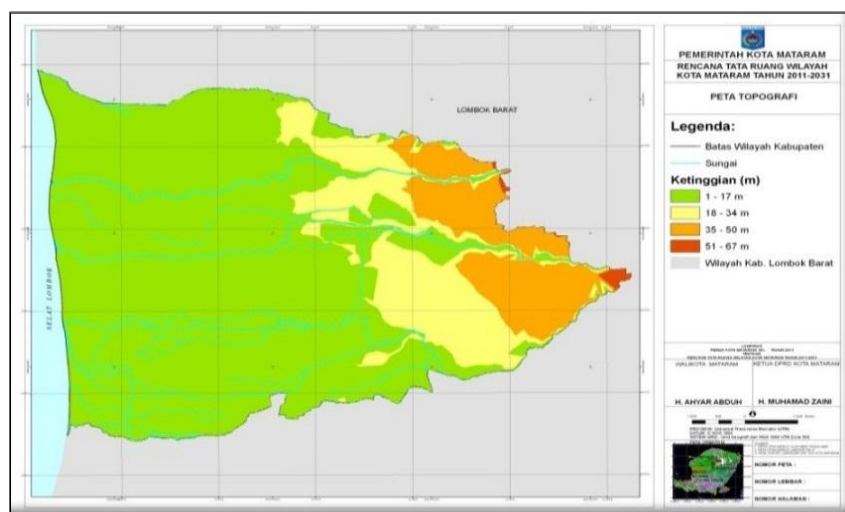
### c. Topografi

Bentuk topografi wilayah Kota Mataram bervariasi dari datar sampai agak curam dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Lereng 0–2%, bentuk wilayah datar, seluas 4.652,057 Ha (75,9 %)
- Lereng 2–8%, bentuk wilayah agak landai, seluas 1.299,147 Ha (21,20%)
- Lereng 8-15%, bentuk wilayah bergelombang, seluas 174,283 Ha (2,84 %)
- Lereng 15-25%, bentuk wilayah curam, seluas 4,568 Ha (0,07%)

Kondisi diatas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Mataram merupakan hamparan datar.

Sementara ketinggian tanah bervariasi yaitu Kecamatan Cakranegara mencapai  $\pm$  25 meter diatas permukaan laut (dpl), Kecamatan Mataram  $\pm$  15 meter dpl dan Kecamatan Ampenan  $\pm$  5 meter dpl termasuk daerah pantai.



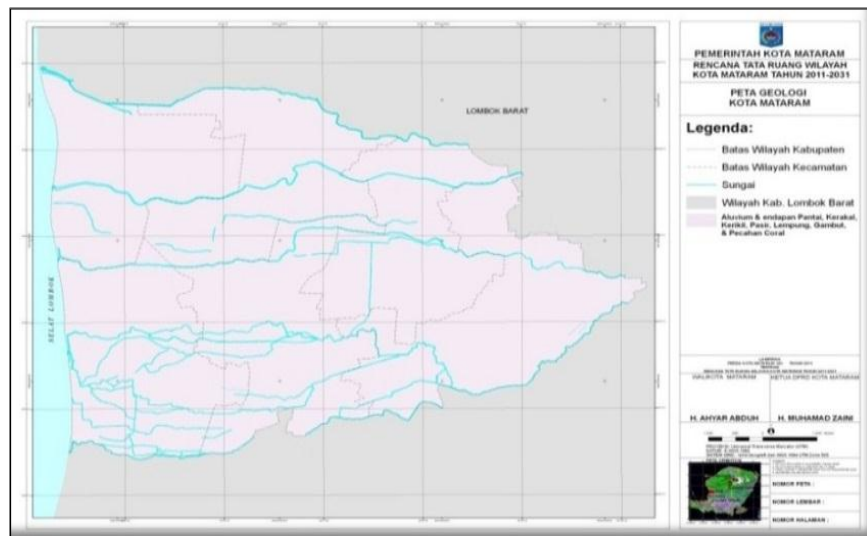
Gambar 2.3. **Peta Topografi Administrasi Kota Mataram**

#### d. Geologi dan Jenis Tanah

Satuan batuan yang ada di Kota Mataram terdiri dari batuan gunung api, batuan sedimen, serta batuan terobosan yang umurnya berkisar dari jaman tersier sampai kuartar. Formasi batuan yang terbentuk adalah Formasi Kalipalung (*TQp*) yaitu anggota Selayar (*TQs*), Formasi Kalibalak (*TQb*), dan Formasi Lekopiko (*Qv*) dengan jenis batuan sebagai berikut:

- Formasi Kalipalung : Breksi gampingan dan lava.
- Anggota Selayar : Batu pasir tuffan dan batu lempung tuffan dengan sisipan tipis karbon.
- Formasi Kalibabak : Breksi dan lava.
- Formasi Lekopiko : Tuff berbatu apung, breksi lahar, dan lava.

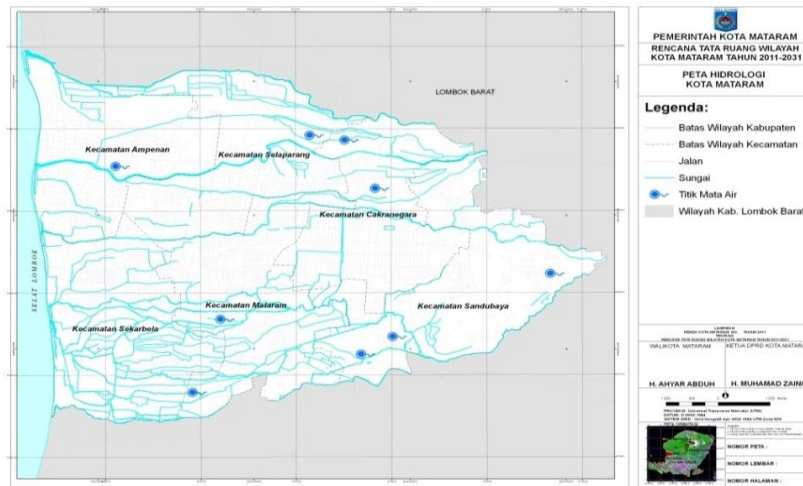
Qa Alluvium yang terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lempung, gambut, dan pecahan koral tersebar hampir di seluruh Kota Mataram, khususnya di daerah muara sungai. Kota Mataram termasuk dalam Busur Bergunung Api Nusa Tenggara Barat, yang merupakan bagian dari Busur Sunda sebelah timur dan Busur Banda sebelah barat. Busur tersebut terbentang dari Pulau Jawa ke Nusa Tenggara dan melengkung mengitari Laut Banda.



Gambar 2.4. Peta Geologi Kota Mataram

#### e. Hidrologi

Kota Mataram memiliki potensi air tanah (akuifer) yang cukup besar, tersebar di beberapa bagian wilayah Kota Mataram, seperti Kelurahan Rembiga, Kelurahan Sayang-sayang dan Kecamatan Mataram dengan kedalaman akuifer 5-7 meter. Sedangkan Kelurahan Monjok dan Kelurahan Dasan Agung bagian Utara memiliki kedalaman air tanah hingga 15 meter. Titik-titik mata air tersebar di Kelurahan Pejeruk, Karang Baru, Sayang-sayang, Cakranegara Utara, Dasan Cermen, Babakan, Mandalika, dan Pagesangan Tengah.



Gambar 2.5. **Peta Hidrologi Kota Mataram**

Kota Mataram dialiri empat sungai besar yang berfungsi sebagai drainase alam, yaitu Sungai Jangkok (86 km dengan luas 1.712,12 Ha), Sungai Ancar (21 km dengan luas 858,47 Ha), Sungai Brenyok (42 km dengan luas 2.277,55 Ha), dan Sungai Midang (26 km dengan luas 562,47 Ha). Hulu sungai-sungai tersebut berada di sekitar lereng Gunung Rinjani dan bermuara di Selat Lombok.

#### f. **Klimatologi**

Kota Mataram sebagaimana kota-kota lain di Indonesia merupakan wilayah yang memiliki iklim tropis, sehingga secara umum tidak ada perbedaan iklim yang terjadi di setiap tahunnya. Secara lebih lengkap kondisi klimatologi Tahun 2011-2015, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.3  
**Suhu, Tekanan dan Kelembaban Tahun 2011-2015**

Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Temperatur Rata-rata:						
▪ Maks	°C	31,42	30,54	26,62	31,6	22,25
▪ Min	°C	22,75	22,48	21,03	22,5	31,95
Tekanan Udara		1.009,5	1.10,52	1.010,67	1.010,6	1.007,2
Kelembaban	%	81,75	87,17	82,75	82,83	82,83
Curah Hujan	mm	220,25	133,33	174,92	156,39	171,55
Penyinaran Matahari	%	68	74	66	73	77

Sumber: BMKG dan BPS Kota Mataram, 2015

#### g. **Penggunaan Lahan**

Pola guna lahan di Kota Mataram dalam kurun waktu 10 tahun terakhir berkembang secara linier, konsentrik, dan parsial. Perkembangan pola linear terjadi karena tata guna lahan mengikuti pola jaringan jalan seperti pada koridor utama Kota Mataram di Jalan Yos Sudarso – Jalan Langko –

Jalan Pejanggik – Jalan Selaparang – Jalan Sandubaya. Perkembangan lahan secara konsentrik yang berbentuk *grid* (mengelompok) tersebar di Kawasan Cakranegara dan sekitarnya. Pola guna lahan yang berkembang secara parsial terjadi di Kelurahan Rembiga, Sayang-Sayang di bagian utara, Kelurahan Jempong Baru, Pagutan, dan pusat permukiman di Kawasan Bertais. Pada pola linier, konsentrik, dan parsial tersebut terjadi penyatuan guna lahan, sehingga terbentuklah kawasan terbangun yang telah berkembang seperti saat ini.

Dalam perkembangannya konversi lahan sebagian besar untuk fungsi perumahan, perkantoran, pendidikan serta untuk pertokoan. Hal ini tentunya terjadi dengan semakin pesatnya dinamika perkembangan dan pertumbuhan Kota yang berimplikasi pada penyesuaian terhadap kebutuhan lahan untuk pengembangannya, sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.4  
**Penggunaan Lahan Menurut Kesesuaian dengan RUTR (Ha)  
 Tahun 2011 - 2015**

No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Perumahan	2.338,56	2.352,18	2.405,23	2,414.48	2.426.64
2	Lapangan Olahraga	46,10	46,10	46,10	46,10	46.10
3	Kuburan	51,64	51,64	51,64	51,64	51.64
4	Perkantoran	115,36	115,45	115,45	115,45	116.13
5	Pendidikan	146,50	151,82	151,82	151,82	152.47
6	Kesehatan	20,95	23,37	23,37	23,37	23.62
7	Ibadah	63,33	63,33	63,33	63,33	63.33
8	Jasa	0	0,26	0,26	0,38	0,38
9	Pasar/Terminal	67,35	68,35	68,35	68,35	68.35
10	Pertokoan/SPBU	97,80	101,98	102,78	104,57	104.94
11	Warung/Rumah Makan	0,40	1,06	1,55	1,55	1.55
12	Hotel	18,91	18,91	18,91	18,91	19.23
13	Pergudangan	50,60	50,60	52,24	52,24	52.40
14	Industri dan Jasa	51,75	51,75	51,75	51,75	51.75
15	Taman Kota	6,07	6,07	6,07	6,07	6.07
16	Tanah Diperuntukan	125,32	125,82	125,88	129,88	129.88
17	Tanah Pertanian	2.847,47	2.819,42	2.763,49	2,748.22	2.733.62
18	Tanah Tidak Diusahakan	81,89	81,89	81,89	81,89	81.89
<b>Kota Mataram</b>		<b>6.130,00</b>	<b>6.130,00</b>	<b>6.130,00</b>	<b>6.130,00</b>	<b>6.130,00</b>

Sumber: BPS Kota Mataram dan BPN Kota Mataram, 2015

Dalam Perda Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 disebutkan bahwa pola ruang wilayah di Kota Mataram terdiri dari pengelolaan Kawasan Lindung dan pengembangan Kawasan Budidaya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5  
**Pola Ruang Wilayah Kota Mataram**

No	Rencana Pola Ruang Wilayah	Uraian	Keterangan
1	<b>Pengembangan Kawasan Lindung</b>	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Kawasan resapan air di Kelurahan Bintaro, Kel. Ampenan Selatan, Kel. Taman Sari, Kel. Ampenan Utara, Kel. Pejeruk, Kel. Kebon Sari, Kel. Rembiga, Kel. Karang Baru, Kel. Monjok, Kel. Monjok Barat, Kel. Mataram Timur, Kel. Cakranegara Timur, Kel. Cakranegara Selatan Baru, Kel. Tanjung Karang, Kel. Jempong Baru, Kel. Sayang Sayang, Kel. Selagalas, dan Kel. Dasan Cermen.
		Kawasan perlindungan setempat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kawasan sempadan pantai;</li> <li>• kawasan sempadan sungai;</li> <li>• kawasan sekitar mata air</li> </ul>
		Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RTH konservasi, terdiri dari hutan kota di Kel. Selagalas; daerah tangkapan air di Kel. Selagalas, Kel. Jempong Baru, dan Kel. Ampenan Utara;</li> <li>• RTH lingkungan, terdiri dari taman kota di Kel. Kebon Sari, Kel. Pejarakan Karya, Kel. Karang Baru, Kel. Mataram Barat, taman lingkungan dan pekarangan, serta RTH taman atap;</li> <li>• RTH jalur, terdiri dari jaringan jalan di sepanjang Jalan Udayana, Jalan Langko – Jalan Pejanggik, Jalan Arya Banjar Getas – Jalan Dr. Sujono, Jalan Sriwijaya – Jalan Majapahit, dan Jalan Jend. Ahmad Yani serta jalur jaringan listrik tegangan tinggi di Kecamatan Sekarbela;</li> <li>• RTH khusus, terdiri dari Tempat Pemakaman Umum (TPU), pekarangan perkantoran, kawasan penyangga seperti sempadan pantai, sempadan sungai, pekarangan kawasan pendidikan, kawasan pariwisata alam, dan kawasan rekreasi hijau.</li> </ul>
		Kawasan Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Cagar Budaya Taman Mayura - Pura Meru di Kelurahan Cakranegara Utara;</li> <li>• Kawasan Cagar Budaya Makam Van Ham di Kel. Cilinaya;</li> <li>• Kawasan Cagar Budaya Kota Tua di Kel. Ampenan Utara;</li> <li>• Kawasan Cagar Budaya Makam Loang Baloq di Kel. Tanjung Karang;</li> <li>• Kawasan Cagar Budaya Makam Bintaro di Kel. Bintaro Ampenan.</li> </ul>
		Kawasan rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kawasan rawan banjir;</li> <li>• kawasan rawan gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai;</li> <li>• kawasan rawan gempa bumi;</li> <li>• kawasan rawan kebakaran</li> </ul>
2	<b>Pengembangan Kawasan Budidaya</b>	Kawasan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kawasan perumahan berkepadatan tinggi;</li> <li>• kawasan perumahan berkepadatan sedang;</li> <li>• kawasan perumahan berkepadatan rendah</li> </ul>
		Kawasan perdagangan dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kawasan perdagangan dan jasa skala internasional dan nasional, di Kel. Cakranegara Barat, Kel. Mayura, Kel. Cilinaya, Kel. Cakranegara Timur, Kel. Mandalika, Kel. Bertais</li> <li>• kawasan perdagangan dan jasa skala regional dan lokal, di Kel. Dayan Peken, Kel. Ampenan Tengah, Kel. Cakranegara Selatan, Kel. Cakranegara Selatan Baru, Kel. Sapta Marga, Kel. Abian Tubuh, Kel. Dasan Cermen</li> </ul>
		Kawasan perkantoran (perkantoran pemerintahan dan swasta)	di Kel. Dasan Agung Baru, Kel. Dasan Agung, Kel. Gomong, Kel. Punia, Kel. Mataram Timur, Kel. Mataram Barat, Kel. Pejanggik, Kel. Monjok Barat, Kel. Sayang Sayang, Kel. Jempong Baru
		Kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kawasan industri menengah dengan skala regional dan lokal, di Kel. Pagesangan, Kel. Pagutan, Kel. Dasan Cermen, Kel. Cakranegara Selatan Baru, Kel. Sayang Sayang, Kel. Mandalika, dan Kel. Bertais,</li> <li>• kawasan industri kecil dengan skala lokal dan lingkungan dilakukan di seluruh kelurahan di Kota.</li> </ul>
		Kawasan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kawasan pariwisata pantai, di Kel. Ampenan Selatan, Kel. Tanjung Karang Permai, Kel. Tanjung Karang, Kel. Jempong Baru atau kawasan di pesisir pantai bagian barat Kota sepanjang ± 9 km;</li> </ul>

No	Rencana Pola Ruang Wilayah	Uraian	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• kawasan pariwisata belanja khususnya produk kerajinan, dilakukan di Kel. Pagesangan, Kel. Pagesangan Barat, Kel. Karang Pule, Kel. Tanjung Karang, Kel. Cilinaya, dan Kel. Sayang Sayang;</li> <li>• kawasan pariwisata budaya, di Kel. Cilinaya, Kel. Mayura, Kel. Tanjung Karang, Kel. Ampenan Tengah;</li> <li>• kawasan pariwisata religi, di Kel. Bintaro, Kel. Tanjung Karang, Kel. Cilinaya, dan Kel. Mayura;</li> <li>• kawasan pariwisata buatan, di Kel. Pejarakan Karya, Kel. Kebon Sari, Kel. Jempong Baru, Kel. Pagesangan Timur dan Kel. Tanjung Karang;</li> <li>• kawasan pariwisata kuliner, di Kel. Sayang Sayang, Kel. Selagalas, dan Kel. Karang Taliwang.</li> </ul>
		Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	dilakukan untuk memberikan dukungan terhadap fungsi kegiatan-kegiatan perkantoran dan kegiatan permukiman, serta terselenggaranya keserasian kehidupan lingkungan dan sosial
		Kawasan ruang evakuasi bencana	dilakukan untuk memberikan ruang yang aman sebagai tempat berlindung dan tempat penampungan penduduk sementara dari bencana banjir, bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai, bencana gempa bumi, serta bencana kebakaran
		Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal	dilakukan di areal taman dan Makam Loang Baloq, areal Lapangan Malomba, areal Taman Kota Udayana, areal Taman Kota Selagalas, areal GOR Turida, Jln. Pabean, Jln. HOS Cokroaminoto, Jln. Airlangga, Jln. Pemuda, Jln. Panjtilar Negara, Jln. Bung Karno, Jln. Pejanggik, Jln. Selaparang, dan Jln. Jayengrana
		Kawasan pendidikan (skala nasional, regional dan lokal)	untuk melayani kebutuhan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dilakukan di Kel. Dasan Agung Baru, Kel. Pagesangan, Kel. Jempong Baru, Kel. Pagutan, Kel. Dasan Cermen, Kel. Cakranegara Utara, Kel. Turida, dan Kel. Pagutan Barat
		Kawasan Kesehatan (skala nasional, regional dan lokal)	untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat Kota dan/atau Provinsi NTB dilakukan di Kel. Pejanggik, Kel. Mataram Timur, Kel. Pagesangan Timur, Kel. Banjar, dan Kel. Pejeruk
		Kawasan Peribadatan (skala internasional, nasional, regional dan lokal)	Dilakukan pada: Masjid Raya dan Pusat Kajian Islam (Islamic Centre) di Kel. Dasan Agung Baru dan Kel. Dasan Agung; Gereja di Kel. Pejanggik dan Kel. Mataram Timur; Pura di Kel. Cilinaya, Kel. Cakranegara Timur dan Kel. Mataram Barat; Vihara di Kel. Mayura dan Kel. Bintaro
		Kawasan Pertahanan dan Keamanan (skala Kota dan/atau Provinsi NTB)	di Kel. Rembiga, Kel. Ampenan Selatan, Kel. Taman Sari, Kel. Pejanggik, Kel. Sapta Marga, Kel. Pagesangan Timur, dan Kel. Jempong Baru
		Kawasan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kawasan peruntukan pertanian untuk budidaya hortikultura dilakukan Kel. Rembiga, Kel. Sayang Sayang, Kel. Salagalas, Kel. Bertais, Kel. Mandalika, Kel. Jempong Baru, dan Kel. Turida;</li> <li>• kawasan peruntukan perikanan air tawar di Kel. Sayang Sayang, Kel. Selagalas, dan Kel. Bertais;</li> <li>• kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budidaya air laut di Kel. Bintaro, Kel. Ampenan Tengah, Kel. Banjar, Kel. Ampenan Selatan, Kel. Tanjung Karang Permai, Kel. Tanjung Karang, dan Kel. Jempong Baru</li> </ul>

Sumber: RTRW Kota Mataram 2011-2031

### 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional. Sementara, dalam RTRW Provinsi NTB, Kota Mataram ditetapkan

sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mataram Metro di bidang pertumbuhan ekonomi.

Secara kewilayahan Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam RTRW Kota Mataram, dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan dengan fungsi utama adalah:

- 1) Wilayah Ampenan berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan dan jasa serta pariwisata;
- 2) Wilayah Mataram berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial, seperti pendidikan;
- 3) Wilayah Cakranegara berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan dan pusat bisnis.

Selain itu, Kota Mataram memiliki beberapa kawasan strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah baik dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, dan/atau lingkungan, yaitu:

**1. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi cepat yang meliputi:**

**a. Kawasan strategis bidang pariwisata;**

Kawasan pariwisata biasanya akan menimbulkan efek berganda, sehingga mampu menghasilkan pemasukan bagi suatu wilayah. Kawasan strategis bidang pariwisata di Kota Mataram ditetapkan di beberapa lokasi berikut ini:

- 1) Kawasan eks. Bandar Udara Selaparang di Kelurahan Rembiga dan Kelurahan Ampenan Utara sebagai kawasan pariwisata dengan konsep MICE (*Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions*) yang berbasis lingkungan dan telah diatur dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 12 Tahun 2014, sebagai solusi alih fungsi Bandara Selaparang yang berpindah ke Bandara Internasional Lombok (BIL) di Lombok Tengah pada 20 Oktober Tahun 2011;
- 2) Kawasan Mayura yang terdiri dari Taman Mayura, Pura Meru, dan kolam pemandian Mayura di Kelurahan Mayura sebagai kawasan pariwisata budaya dan spiritual keagamaan;
- 3) Kawasan Mutiara Sekarbela di Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat (Kecamatan Mataram), dan Kelurahan Karang Pule (Kecamatan Sekarbela) sebagai kawasan pariwisata belanja;
- 4) Kawasan Mapak di Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela terdiri dari pariwisata pantai, situs makam Loang Baloq, taman rekreasi dan kawasan pelabuhan wisata sebagai kawasan pariwisata alam, religi dan buatan;
- 5) Kawasan Kota Tepian Air di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, dan Kelurahan Ampenan Selatan (Kecamatan Ampenan) sebagai kawasan pariwisata buatan;

- 6) Kawasan Sayang-Sayang di Kelurahan Rembiga dan Kelurahan Sayang-sayang (Kecamatan Sandubaya) serta Kawasan Udayana di Kelurahan Kebonsari dan Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan sebagai kawasan pariwisata kuliner.

**b. Kawasan strategis bidang perdagangan dan jasa.**

Kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi bidang perdagangan dan jasa ditetapkan di lokasi berikut:

- 1) Pusat perdagangan Ampenan di Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Ampenan Tengah, dan Kelurahan Ampenan Selatan (Kecamatan Ampenan);
- 2) Pusat perdagangan grosir dan pusat bisnis Cakranegara di Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Mayura, Kelurahan Cakranegara Timur, dan Kelurahan Cakranegara Selatan;
- 3) Kawasan Bertais dan Kawasan Mandalika.

**2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya**

Dalam RTRW Kota Mataram tahun 2011-2031, kawasan strategis di bidang sosial budaya ditetapkan pada sebuah kawasan yang memenuhi kriteria memiliki nilai historis, tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya lokal, merupakan prioritas peningkatan sosial dan budaya serta jati diri daerah, merupakan aset daerah yang harus dilindungi dan dilestarikan, tempat perlindungan terhadap keanekaragaman budaya lokal. Kawasan strategis ini juga merupakan aset wisata sejarah yang dapat menunjukkan jati diri maupun penanda Kota Mataram. Kawasan-kawasan tersebut adalah:

- 1) Kawasan Bintaro di Kelurahan Bintaro (Kecamatan Ampenan);
- 2) Kawasan Makam Van Ham di Kelurahan Cilinaya (Kecamatan Cakranegara);
- 3) Kawasan Pusat Kajian Islam (*Islamic Center*) di Kelurahan Dasan Agung Baru dan Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Mataram;
- 4) Kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan Ampenan Tengah dan Ampenan Selatan (Kecamatan Ampenan).

**3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup**

Berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031, kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu merupakan tempat perlindungan beraneka ragam hayati, merupakan aset kota berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna terutama yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan atau dilestarikan, memberikan perlindungan keseimbangan tata

guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian, memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim mikro dan menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Mataram adalah:

- 1) Kawasan sempadan Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus;
- 2) Kawasan konservasi sempadan pantai di pesisir barat wilayah Kota sepanjang 8 - 9 km;
- 3) Kawasan lindung di Kelurahan Pagutan Timur (Kecamatan Mataram) serta Kelurahan Sayang-sayang dan Selagalas (Kecamatan Sandubaya);
- 4) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di tiap tanah pecatu yang terdapat di Kota Mataram.

### **2.1.3 Kawasan Rawan Bencana**

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Kawasan rawan bencana di Kota Mataram yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, antara lain:

- 1) Longsor, Genangan, dan Banjir

Kondisi topografi Kota Mataram yang sebagian besar merupakan daerah datar-landai dan dilalui oleh empat sungai besar, menyebabkan tiap daerah aliran sungai menjadi daerah rawan longsor terutama di musim penghujan. Selain bencana longsor, beberapa titik di Kota Mataram terutama di Kecamatan Sekarbela, Mataram, dan Cakranegara kerap terjadi genangan dan banjir. Genangan air ini juga disebabkan oleh banyaknya saluran drainase yang tidak berfungsi secara optimal dan beralihnya fungsi dari saluran irigasi menjadi drainase/ air buangan.

- 2) Gelombang Pasang dan Tsunami

Wilayah-wilayah yang rentan terkena bencana gelombang pasang dan tsunami adalah wilayah yang dekat dengan pantai (Selat Lombok) atau dengan kata lain adalah kawasan pesisir. Wilayah Kota Mataram yang masuk dalam kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami adalah Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Jempeng Baru.

3) Abrasi Pantai

Abrasi pantai terjadi karena tergerusnya pantai oleh gelombang atau ombak tinggi pada waktu tertentu yang terus menerus. Kawasan yang rawan abrasi pantai di Kota Mataram adalah wilayah pesisir sebagaimana kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami. Salah satu dampak abrasi pantai adalah terjadinya intrusi air laut yang dapat mempengaruhi kondisi air tanah di wilayah Kota Mataram.

4) Gempa Bumi

Kondisi tektonik di wilayah Kota Mataram merupakan jalur tumbukan lempeng Hindia-Australia dengan lempeng Euro-Asia menyebabkan wilayah ini memiliki ancaman kegempaan yang potensial. Selain itu terdapat ancaman dari utara berupa patahan busur belakang. Kedalaman pusat gempa di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya adalah sekitar 50 km.

### 2.1.4 Kondisi Demografis

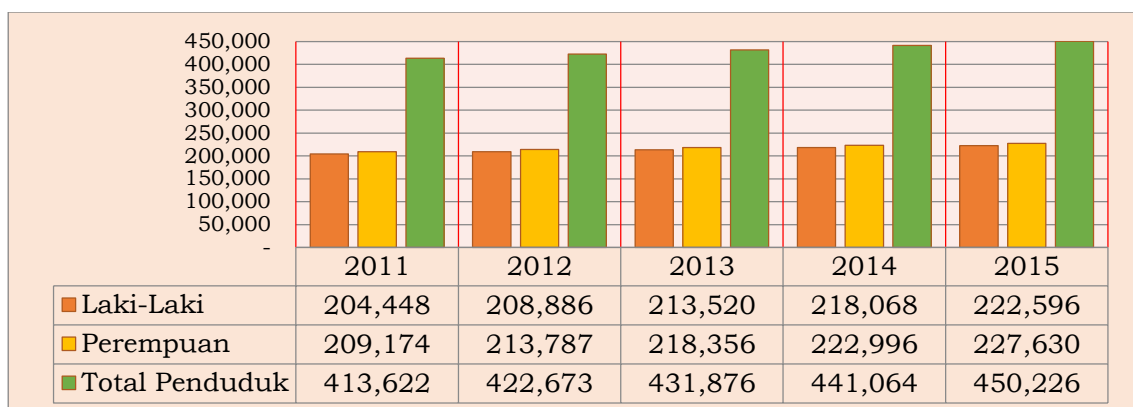
Demografi meliputi ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat peristiwa kelahiran, kematian, migrasi serta penuaan.

#### a. Jumlah Penduduk

Kota Mataram merupakan daerah otonom dengan luas wilayah terkecil di Provinsi NTB, namun dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif besar. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk tahun 2015 mengalami peningkatan 9.162 jiwa dari tahun 2014.

Lebih jelas mengenai gambaran komposisi jumlah penduduk Kota Mataram tahun 2011 hingga tahun 2015 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sebagaimana gambar berikut.

Grafik 2.1  
Jumlah Penduduk Kota Mataram Berdasarkan Jenis Kelamin  
Tahun 2011 - 2015



Sumber : BPS Kota Mataram, 2015

## b. Pertumbuhan Penduduk

Tingginya tingkat migrasi penduduk ke Kota Mataram menjadikan jumlah penduduk Kota Mataram terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu penyebab tingginya migrasi penduduk ke Kota Mataram adalah kedudukan dan fungsi Kota Mataram sebagai ibukota provinsi, PKN, KSP, pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan serta perdagangan dan jasa.

Adapun gambaran pertumbuhan penduduk tahun 2014-2015 dirinci per Kecamatan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6  
**Pertumbuhan Penduduk dirinci per Kecamatan Tahun 2014-2015**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Pertumbuhan (%)
		2014	2015	
1	Ampenan	86.052	87.746	1,97
2	Sekarbela	62.508	64.946	3,90
3	Mataram	81.450	83.479	2,49
4	Selaparang	74.513	74.795	0,38
5	Cakranegara	66.516	66.983	0,70
6	Sandubaya	70.025	72.277	3,22
<b>Jumlah Total</b>		<b>441.064</b>	<b>450.226</b>	<b>2,08</b>

Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

Pada tahun 2015 penyebaran penduduk di Kota Mataram masih terkonsentrasi di Kecamatan Ampenan. Jika dilihat dari sisi pertumbuhan penduduk dari tahun 2014 ke tahun 2015 maka Kecamatan Sekarbela memiliki pertumbuhan penduduk yang paling tinggi dibanding dengan kecamatan lainnya. Kepadatan penduduk dari tahun 2011 sampai tahun 2015 tertinggi berada pada Kecamatan Ampenan dimana pada tahun 2015 kepadatan penduduknya sebesar 9.275 jiwa/km. Sedangkan Kecamatan Sekarbela memiliki kepadatan penduduk yang paling rendah yaitu 6.293 jiwa/km pada tahun 2015. Kepadatan penduduk per kecamatan pada tahun 2011-2015, sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.7  
**Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2011-2015**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Kepadatan Penduduk (Jiwa /Km <sup>2</sup> )				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Ampenan	9,46	79.367	82.585	84.324	86.052	87.746	8.390	8.730	8.914	9.096	9.275
2	Sekarbela	10,32	53.946	57.792	60.123	62.508	64.946	5.227	5.600	5.826	6.057	6.293
3	Mataram	10,76	73.921	77.397	79.420	81.450	83.479	6.870	7.193	7.381	7.570	7.758
4	Selaparang	10,77	73.222	73.806	74.181	74.513	74.795	6.799	6.853	6.888	6.919	6.945
5	Cakranegara	9,67	64.771	65.488	66.026	66.516	66.983	6.698	6.772	6.828	6.879	6.927
6	Sandubaya	10,32	61.683	65.605	67.802	70.025	72.277	5.977	6.357	6.570	6.785	7.004
<b>Jumlah/Total</b>		<b>61,30</b>	<b>413.662</b>	<b>422.673</b>	<b>431.876</b>	<b>441.064</b>	<b>450.226</b>	<b>6.749</b>	<b>6.895</b>	<b>7.045</b>	<b>7.195</b>	<b>7.345</b>

Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

### c. Struktur dan Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk Kota Mataram Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 menurut kelompok umur terbanyak pada kelompok umur 20-24 dan komposisi penduduk terkecil pada kelompok umur 70-74 tahun.

Adapun jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel dan Grafik berikut:

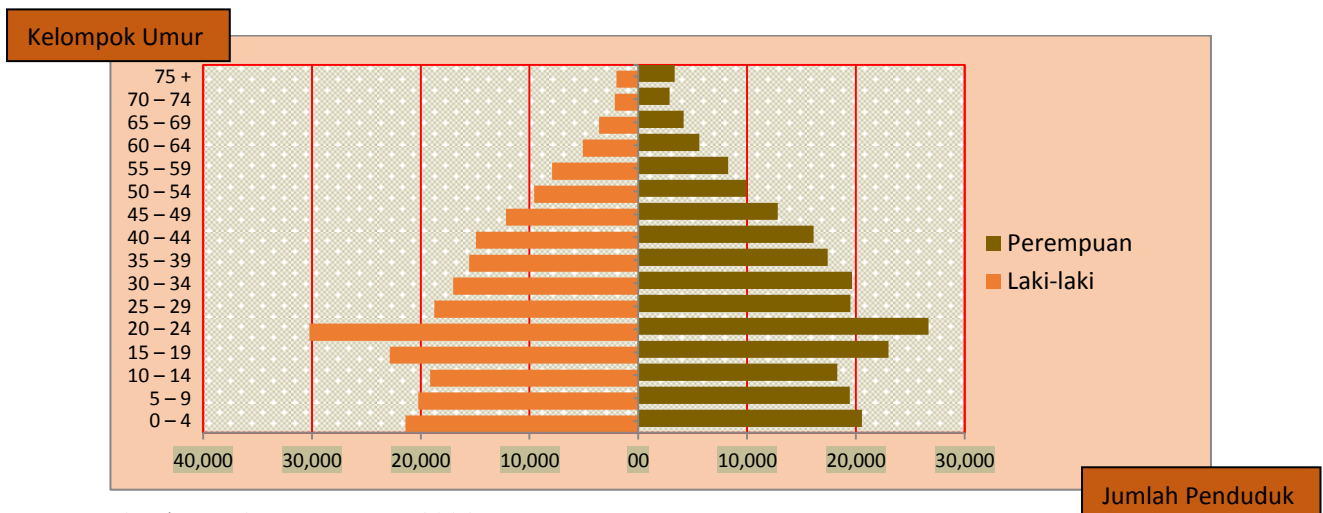
Tabel 2.8  
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
Tahun 2011-2015

Kelompok Umur	Laki-laki					Perempuan				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
0 - 4	20.783	21.027	21.216	21.347	21.386	19.589	19.924	20.209	20.428	20.561
5 - 9	18.495	18.857	19.307	19.760	20.216	17.731	18.118	18.540	18.988	19.447
10 - 14	18.302	18.493	18.662	18.861	19.144	17.370	17.561	17.756	17.990	18.286
15 - 19	21.061	21.569	22.063	22.487	22.856	22.172	22.358	22.552	22.767	22.993
20 - 24	27.377	28.046	28.789	29.523	30.221	26.266	26.402	26.491	26.582	26.665
25 - 29	17.654	17.859	18.097	18.394	18.748	18.985	19.132	19.245	19.352	19.493
30 - 34	16.347	16.508	16.673	16.852	17.019	18.161	18.604	19.021	19.384	19.635
35 - 39	14.519	14.811	15.090	15.312	15.546	15.541	16.007	16.463	16.925	17.415
40 - 44	13.207	13.663	14.121	14.541	14.914	13.864	14.437	15.014	15.578	16.109
45 - 49	10.617	10.973	11.362	11.762	12.171	10.904	11.348	11.813	12.306	12.817
50 - 54	8.374	8.660	8.947	9.246	9.575	8.395	8.787	9.160	9.541	9.950
55 - 59	6.612	6.944	7.287	7.615	7.924	6.514	6.940	7.398	7.853	8.267
60 - 64	4.309	4.480	4.680	4.891	5.114	4.665	4.843	5.039	5.290	5.612
65 - 69	3.018	3.130	3.258	3.408	3.586	3.477	3.629	3.803	3.985	4.161
70 - 74	1.963	2.016	2.069	2.121	2.173	2.555	2.630	2.700	2.775	2.862
75 +	1.810	1.850	1.899	1.948	2.003	2.985	3.067	3.152	3.252	3.357
<b>Jumlah</b>	<b>204.448</b>	<b>208.886</b>	<b>213.520</b>	<b>218.068</b>	<b>222.596</b>	<b>209.174</b>	<b>213.787</b>	<b>218.356</b>	<b>222.996</b>	<b>227.630</b>

Sumber: BPS Kota Mataram, Tahun 2015

Jika disusun dalam struktur piramida, penduduk Kota Mataram termasuk dalam Piramida Penduduk Muda yaitu kondisi penduduk yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cepat dimana angka kelahiran jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian.

Hal ini tergambar dalam piramida penduduk berikut, dimana jumlah penduduk kelompok usia 20-24 tahun lebih besar dibandingkan dengan kelompok umur lainnya.



Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

Gambar 2.6 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015

Kondisi struktur umur penduduk Kota Mataram pada tahun 2015 masuk dalam transisi demografi yang menguntungkan karena proporsi penduduk terbesar adalah usia produktif yang berusia 15-64 tahun. Kondisi ini disebut menguntungkan karena berpeluang menciptakan kesejahteraan bila penduduk produktif tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Proporsi penduduk wanita yang lebih besar dan tingginya penduduk usia produktif perlu diantisipasi oleh pemerintah dengan kebijakan pembangunan daerah yang *pro gender* dan *pro job*.

---

## 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

---

Kesejahteraan Masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi: (1) aspek kesejahteraan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan fokus kesejahteraan sosial, dan (3) aspek kesejahteraan fokus seni budaya dan olahraga. Kinerja pada masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat Kota Mataram adalah sebagai berikut:

### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat dari beberapa indikator utama ekonomi, yaitu pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB perkapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin. Dalam bagian ini akan diuraikan indikator-indikator tersebut yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kota Mataram.

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

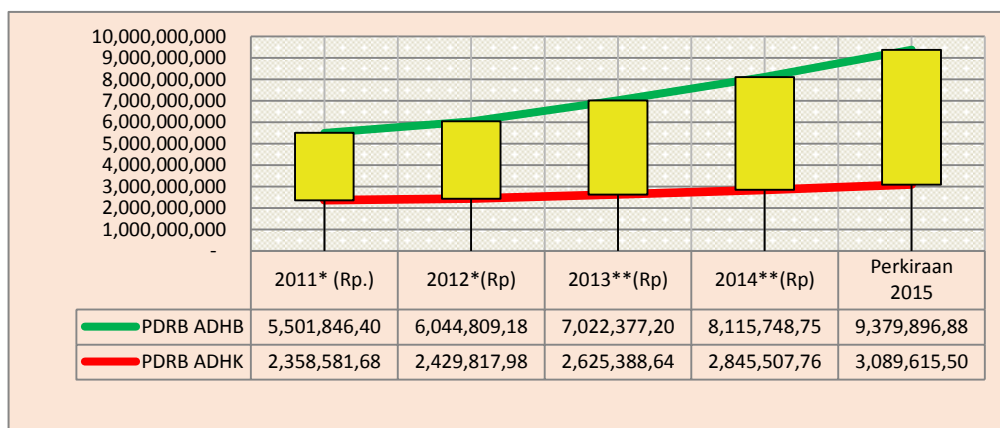
PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah (*value added*) barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian di suatu daerah dalam periode tertentu. Dengan kata lain, PDRB menggambarkan keberhasilan pemerintah suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki guna menciptakan nilai tambah bagi sektor perekonomiannya.

Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Gambaran peningkatan PDRB Kota Mataram, selama kurun waktu tahun 2011-2015 baik ADHB maupun ADHK tergambar dari grafik berikut ini:

Grafik 2.2

**Grafik PDRB Kota Mataram Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2011- Perkiraan 2015 (ribu Rp.)**



\*angka sementara

\*\*angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

Dengan ditetapkannya Kota Mataram sebagai PKN dalam RTRW Nasional yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta sebagai KSP dalam RTRW Provinsi NTB, sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan kontribusi kategori usaha perdagangan besar dan eceran yang terus menjadi *leading business* bagi perekonomian di Kota Mataram baik pada PDRB ADHB maupun ADHK selama kurun waktu 4 (*empat*) tahun.

Secara lebih rinci kontribusi masing-masing kategori usaha terhadap pembentukan PDRB ADHB tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9  
**Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHB  
Tahun 2011- 2015 Kota Mataram**

Kategori	Lapangan Usaha	2011		2012		2013		2014		2015*)	
		Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	368.593	4,63	422.315	4.63	439.860	4.33	473.149	4.07	525.151	3.97
B	Pertambangan dan Penggalian	796.097	0,01	825,29	0.01	847,72	0.01	886,39	0.01	925.119	0.01
C	Industri Pengolahan	837.494	10,52	959.824	10.52	1.014.983	10.00	1.073.886	9.23	1.191.105	9.00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,36	0,08	7,40	0.08	6,62	0.07	9,27	0.08	10,66	0.08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,71	0,21	19,45	0.21	21,65	0.21	25,41	0.22	28,64	0.22
F	Konstruksi	808.038	10,15	925.799	10.15	1.012.736	9.97	1.169.123	10.05	1.356.604	10.25
G	Perdag. Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.532.487	19,25	1,756.291	19.25	1.979.155	19.49	2.318.528	19.92	2.644.473	19.97
H	Transportasi dan Pergudangan	488.803	6,14	559.877	6.14	613.382	6.04	696.942	5.99	805.031	6.08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	116.230	1,46	132.903	1.46	164.864	1.62	207.263	1.78	241.723	1.83
J	Informasi dan Komunikasi	540.549	6,79	619.251	6.79	672.264	6.62	738.756	6.35	797.340	6.02

Kategori	Lapangan Usaha	2011		2012		2013		2014		2015*)	
		Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	727.632	9,14	833.762	9.14	983.414	9.69	1.133.622	9.74	1.304.843	9.86
L	Real Estate	381.330	4,79	436.719	4.79	515.242	5.07	603.709	5.19	685.043	5.17
M,N	Jasa Perusahaan	32.639	0,41	37.518	0.41	43.691	0.43	50.917	0.44	57.499	0.43
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sos Wajib	706.934	8,88	810.022	8.88	884.831	8.71	1.077.077	9.25	1.231.853	9.30
P	Jasa Pendidikan	648.023	8,14	742.306	8.14	848.664	8.36	979.782	8.42	1.121.322	8.47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	370.185	4,65	424.528	4.65	467.736	4.61	531.507	4.57	605.822	4.58
R,S,T,U	Jasa lainnya	379.738	4,77	435.516	4.77	483.373	4.76	548.854	4.72	631.181	4.77
<b>PDRB</b>		<b>7.962.562</b>	<b>100</b>	<b>9.124.323</b>	<b>100.00</b>	<b>10.153.328</b>	<b>100.00</b>	<b>11.638.705</b>	<b>100.00</b>	<b>13.239.239</b>	<b>100.00</b>

\*angka sementara

\*\*angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

Kategori usaha perdagangan besar dan eceran mendominasi terhadap pembentukan PDRB ADHK. Penyumbang PDRB ADHK terbesar kedua adalah kategori usaha konstruksi, diikuti oleh kategori usaha jasa keuangan dan asuransi. Secara lebih rinci kontribusi masing-masing kategori usaha terhadap capaian PDRB ADHK tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10  
**Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHK  
Tahun 2011- 2015 Kota Mataram**

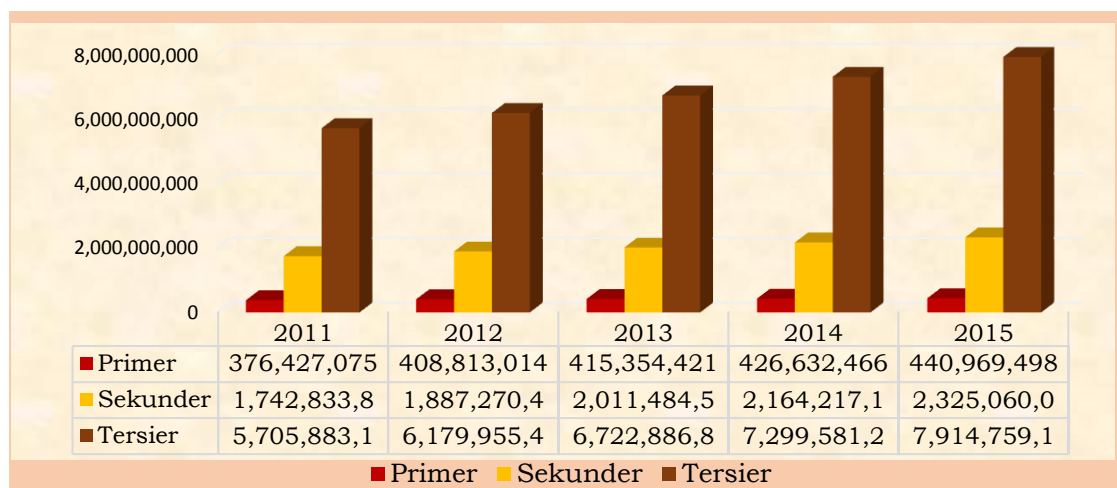
Kategori	Lapangan Usaha	2011		2012		2013		2014		2015*)	
		Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	376.427	4,81	408.019	4.81	414.558	4.53	425.833	4.31	440.169	4.12
B	Pertambangan dan Penggalian	782.592	0,01	793,79	0.01	796,25	0.01	798,48	0.01	800,28	0.01
C	Industri Pengolahan	873.373	11,16	945.566	11.16	989.286	10.81	1.043.343	10.55	1.104.769,	10.34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.043	0,09	8,00	0.09	8,47	0.09	11,77	0.12	11,87	0.11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15.651	0,20	17,12	0.20	18,05	0.20	19,63	0.20	21,11	0.20
F	Konstruksi	845.982	10,81	916.572	10.81	995.672	10.88	1.089.464	11.02	1.187.298	11.12
G	Perdag. Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.469.709	18,78	1.592.159	18.78	1,751,855	19.15	1.914.487	19.36	2.070.187	19.38
H	Transportasi dan Pergudangan	496,163	6,34	537.461	6.34	568.777	6.22	609.406	6.16	660.864	6.19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	108.780	1,39	117.772	1.39	131.903	1.44	144.229	1.46	156.270	1.46
J	Informasi dan Komunikasi	559.553	7,15	605.851	7.15	659.590	7.21	718,228	7.26	782.078	7.32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	668.334	8,54	723.754	8.54	805.101	8.80	873.544	8.83	971.222	9.09
L	Real Estate	358.427	4.58	388.158	4.58	430.390	4.70	469.857	4.75	511.533	4.79
M,N	Jasa Perusahaan	32.868	0,42	35.816	0.42	39.293	0.43	42,64	0.43	46.121	0.43
O	Adm. Pemerintah an, Pertahanan & Jaminan Sos Wajib	634.682	8,11	687.058	8.11	711.655	7.78	749.088	7.57	780.999	7.31
P	Jasa Pendidikan	603.378	7,71	653.691	7.71	712.654	7.79	780.000	7.89	849.810	7.96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	381.122	4,87	412.944	4.87	448.251	4.90	489.400	4.95	532.370	4.98
R,S,T,U	Jasa lainnya	392.861	5,02	425.286	5.02	463.413	5.06	508.688	5.14	553.300	5.18
<b>PDRB</b>		<b>7.825.144</b>	<b>100</b>	<b>8.476.038</b>	<b>100.00</b>	<b>9,149,725</b>	<b>100.00</b>	<b>9.890.430</b>	<b>100.00</b>	<b>10,680,788</b>	<b>100.00</b>

\*angka sementara, \*\*angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Kota Mataram menurut lapangan usaha dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok sektor yaitu: kelompok kategori usaha *primer* terdiri dari kategori usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan kategori usaha pertambangan dan penggalian; kelompok kategori usaha *sekunder* terdiri dari kategori usaha industri pengolahan, kategori usaha pengadaan listrik dan gas, kategori usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur serta kategori usaha konstruksi; dan kelompok kategori usaha *tersier* terdiri dari kategori usaha perdagangan besar dan eceran, kategori usaha transportasi dan pergudangan, kategori usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori usaha informasi dan komunikasi, kategori usaha jasa keuangan dan asuransi, kategori usaha real estate, kategori usaha jasa perusahaan, kategori usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, kategori usaha jasa pendidikan, kategori usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta kategori usaha jasa lainnya.

Grafik 2.3  
**PDRB ADHK Kota Mataram Menurut Kelompok Kategori Usaha  
 Tahun 2011-2015 (Rp. 000)**



Sumber: BPS Kota Mataram , 2015

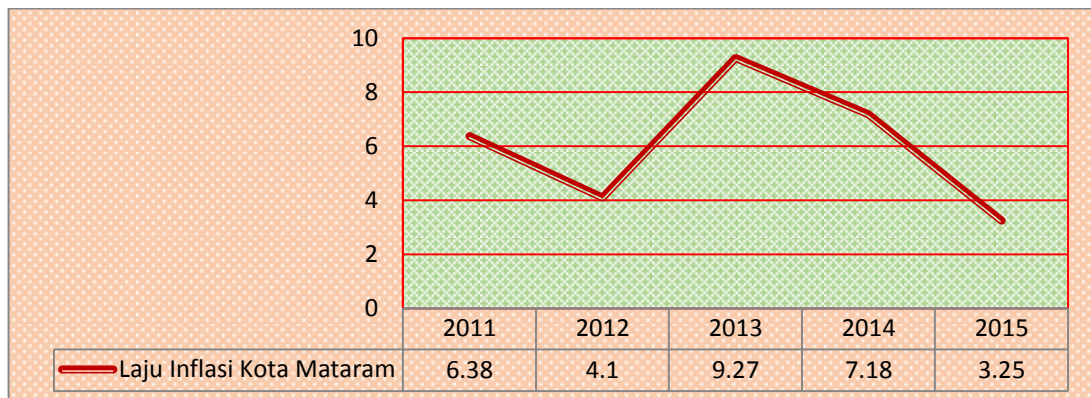
Struktur perekonomian di setiap kecamatan di Kota Mataram secara umum memiliki kesamaan dimana kelompok kategori usaha *tersier* lebih dominan dibandingkan dengan kelompok kategori usaha *primer* ataupun *sekunder*.

## 2. Laju Inflasi

Salah satu indikasi stabilnya perekonomian suatu daerah adalah harga barang. Inflasi atau deflasi adalah perubahan harga barang di tingkat konsumen, atau merupakan perubahan dari Indeks Harga Konsumen (IHK). Dalam PDRB, kenaikan harga barang-barang dicerminkan oleh perkembangan laju Indeks Harga Implisit (IHI). Secara agregat IHI menunjukkan tingkat perubahan harga yang terjadi di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.

Inflasi Kota Mataram pada tahun 2011-2015 mengalami pasang surut, namun secara umum inflasi pada tahun 2015 lebih rendah daripada tahun 2011. Inflasi pada tahun 2013 yang dikarenakan *shock* terhadap dampak kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak menyebabkan inflasi yang tertinggi dengan angka mencapai 9,27 persen. Laju Inflasi Kota Mataram Tahun 2011-2015, sebagaimana Grafik berikut:

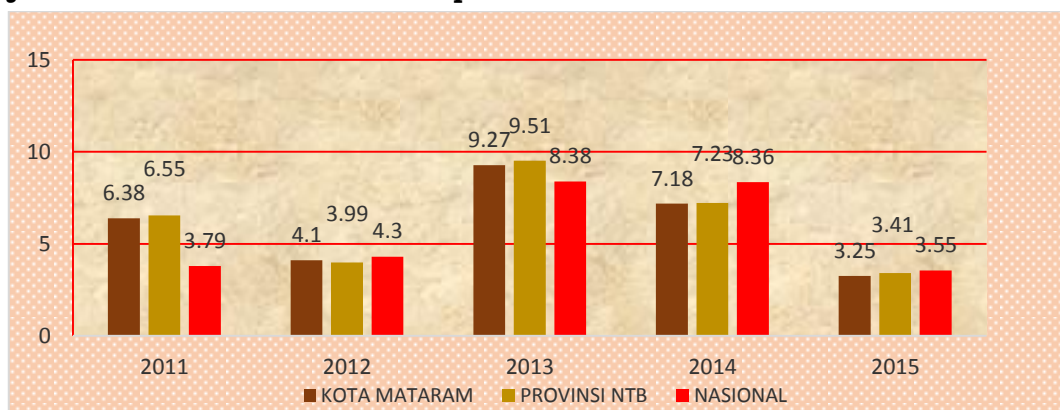
Grafik 2.4  
**Laju Inflasi Kota Mataram Tahun 2011-2015**



Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

Dari Grafik di atas dapat dilihat bahwa inflasi yang terjadi di Kota Mataram pada periode Tahun 2011-2015 termasuk dalam golongan inflasi ringan yaitu kurang dari 10 persen per tahun. Dengan pola yang hampir sama, perbandingan inflasi Kota Mataram dengan inflasi Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2011-2015, sebagaimana Grafik berikut:

Grafik 2.5  
**Laju Inflasi Kota Mataram terhadap Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2011-2015**



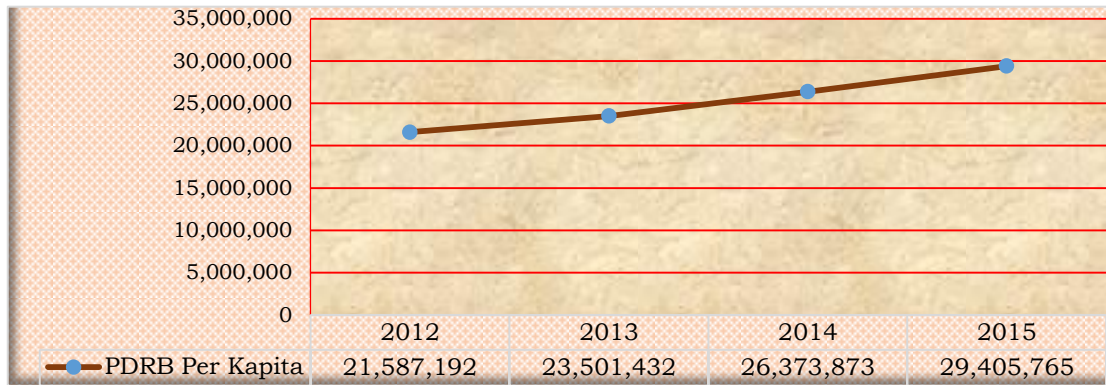
Sumber: BPS Kota Mataram, BPS Provinsi NTB dan BPS, 2015

### 3. PDRB per Kapita

PDRB per Kapita memberikan gambaran kasar bagian PDRB yang diterima secara rata-rata oleh seluruh penduduk dalam suatu daerah dan merupakan pembagian antara besaran PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Lebih jelas untuk perkembangan PDRB per kapita Kota Mataram Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.6  
**PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku  
 Kota Mataram Tahun 2011-2015**



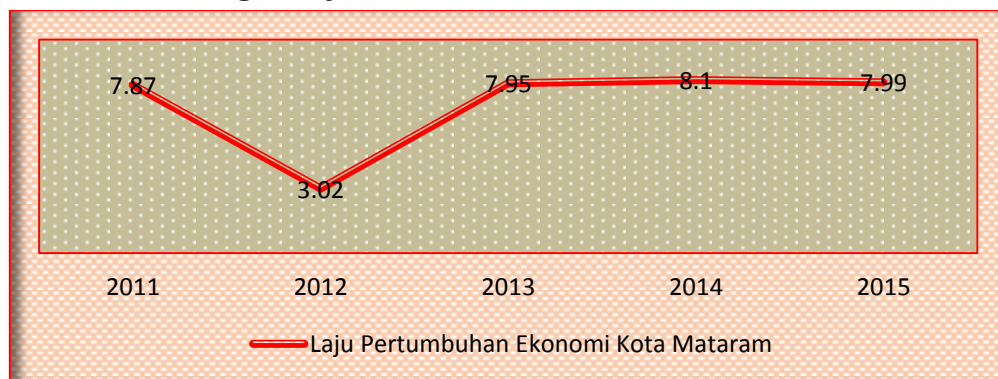
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

#### 4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mencerminkan aktifitas perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan yang positif (tinggi dan stabil) menunjukkan adanya peningkatan dan keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi, sedangkan pertumbuhan yang negatif menunjukkan terjadinya perlambatan dalam kegiatan perekonomian.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram tahun 2011-2015, sebagaimana Grafik berikut:

Grafik 2.7  
**Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011-2015**



Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

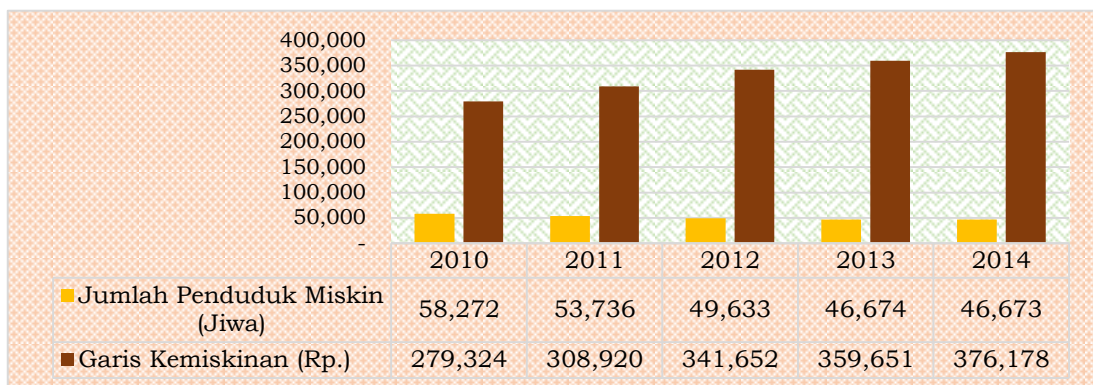
Grafik diatas menunjukkan rendahnya pertumbuhan ekonomi tahun 2012 yang disebabkan pada tahun bersangkutan merupakan masa transisi dimana salah satu indikator pembentuk PDRB Kota Mataram mengalami penurunan akibat perpindahan Bandara Selaparang. Dengan berakhirnya masa transisi, tahun 2013 hingga tahun 2015 pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan.

## 5. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin bukan dilihat hanya karena faktor pendapatan yang rendah, tapi juga karena kapabilitas (tingkat pendidikan dan kesehatan), yang bersifat kait-mengait pada diri penduduk miskin. Kriteria penduduk miskin yang masih memerlukan bantuan khusus secara intensif, bahkan sepanjang hidup, yaitu: penyandang disabilitas berat, penduduk lanjut usia, dan penduduk yang buta huruf. Gambaran garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kota Mataram sebagaimana Grafik 2.9 berikut:

Grafik 2.8

**Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Mataram Tahun 2010-2014**



Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan ditetapkan dua strategi yaitu: pertama: Strategi peningkatan pendapatan penduduk miskin melalui pengembangan usaha ekonomi produktif, menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; dan kedua, Strategi pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin melalui berbagai bentuk subsidi dari pemerintah. Beberapa program pokok, antara lain: penyediaan bantuan dalam bentuk pelayanan sosial dasar terutama pendidikan dan kesehatan; penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi, penyediaan pendampingan bagi keluarga miskin untuk pengembangan kemampuan usaha dan kebiasaan hidup produktif; serta Pengembangan sistem perlindungan sosial.

### 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2015 di Kota Mataram pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

## 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup masyarakat. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu derajat kesehatan dan usia hidup (*longevity*) yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (*live expectancy rate*), pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan kombinasi antara harapan lama sekolah (HLS atau EYS) dan rata-rata lama sekolah (RLS atau MYS) serta standar hidup layak (*decent living*) yang dilihat dari pengeluaran perkapita.

Status pembangunan manusia Kota Mataram pada tahun 2015 berada pada kriteria “Tinggi” (angka IPM antara 70 sampai dengan 79), yaitu sebesar 76,37. Secara lebih jelas, perkembangan IPM Kota Mataram tahun 2011-2015 sebagaimana Tabel berikut:

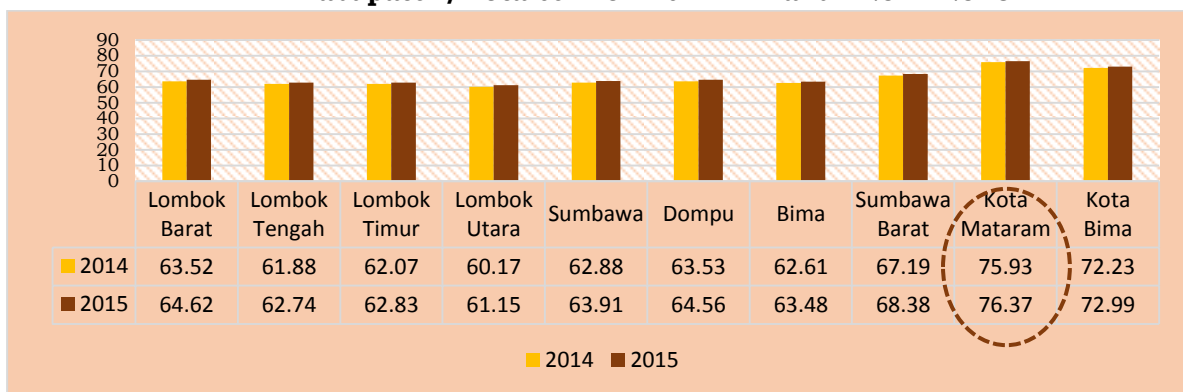
Tabel 2.11  
Perkembangan IPM Kota Mataram Tahun 2011-2015

Tahun	IPM	Laju (%)
2011	73,50	1,42
2012	74,22	0,98
2013	75,22	1,35
2014	75,93	0,94
2015	76,37	0,58

Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

Jika dibandingkan dengan angka Provinsi dan Nasional, maka IPM Kota Mataram tahun 2015 yaitu 76,37 berada diatas IPM Provinsi NTB yang besarnya 65,19 dan IPM Nasional sebesar 69,55. Begitu pula dengan IPM Kota/Kabupaten lainnya di Provinsi NTB, maka IPM Kota Mataram menduduki peringkat pertama sebagaimana Grafik berikut:

Grafik 2.9  
IPM Kabupaten/Kota se Provinsi NTB Tahun 2014-2015



Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

Uraian pada masing-masing 3 (tiga) dimensi dasar komponen pembentuk IPM adalah sebagai berikut:

### a) Angka Harapan Hidup (AHH)

Guna melihat ukuran capaian Angka Harapan Hidup (AHH) suatu wilayah, maka perlu dilihat AHH ideal. AHH penduduk yang ideal adalah 85 tahun, sementara AHH terendah adalah 25 tahun.

Selama kurun waktu 2011 sampai dengan 2015 AHH penduduk Kota Mataram semakin meningkat, artinya kualitas kesehatan masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Namun demikian, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang bersifat komprehensif dan lintas sektor harus terus dilakukan agar derajat kesehatan masyarakat makin meningkat di masa depan.

Adapun capaian kualitas kesehatan masyarakat Kota Mataram yang terukur dari AHH dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.12

#### Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Mataram Tahun 2011-2015

Tahun	Angka Harapan Hidup	Pertumbuhan (Point)
2011	69,45	-
2012	69,73	0,28
2013	70,03	0,30
2014	70,18	0,15
2015	70,43	0,25

Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

### b) Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai setiap anak. Dari tabel dibawah ini terlihat bahwa tahun 2015 HLS di Kota Mataram telah mencapai 15,28 tahun, hal ini menunjukkan bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak di masa mendatang adalah 15,28 tahun (setara dengan pendidikan Diploma III). Secara lebih jelas, perkembangan harapan lama sekolah di Kota Mataram terlihat pada table berikut ini:

Tabel 2.13

#### Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Mataram

Tahun	HLS	Pertumbuhan (point)
2011	14,61	-
2012	14,77	0,16
2013	14,82	0,45
2014	15,27	0,45
2015	15,28	0,01

Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

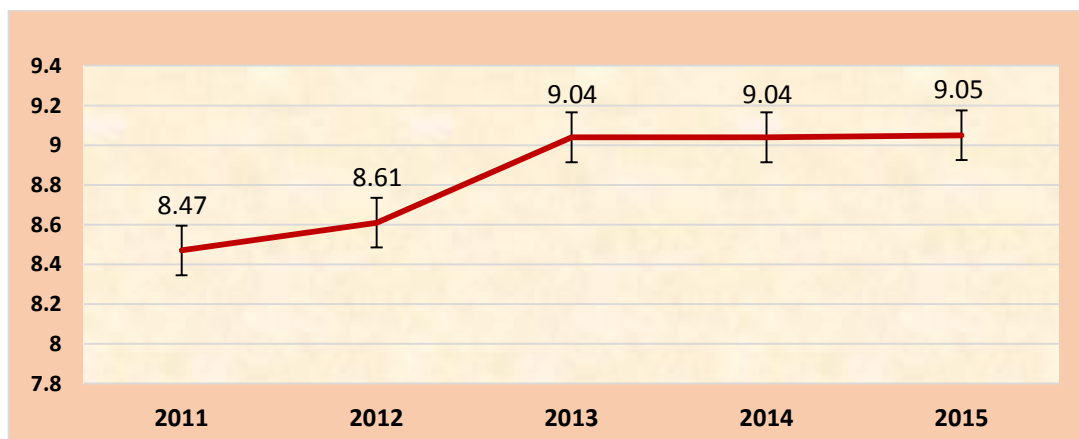
Dari tahun ke tahun terlihat perkembangan HLS penduduk Kota Mataram. Peningkatan partisipasi anak sekolah mendorong meningkatnya harapan lama sekolah.

### c) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan RLS penduduk berusia 25 tahun keatas.

RLS penduduk Kota Mataram dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan semakin sadarnya masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Pada tahun 2011, RLS selama 8,47 tahun, tahun 2015 RLS meningkat signifikan menjadi 9,05. Artinya rata-rata penduduk Kota Mataram bersekolah selama 9,05 tahun atau setingkat dengan kelas 10 (1 SMA). Dengan demikian wajib belajar 9 tahun di Kota Mataram sudah dapat dilampaui, sebagaimana Grafik berikut:

Grafik 2.10  
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Mataram

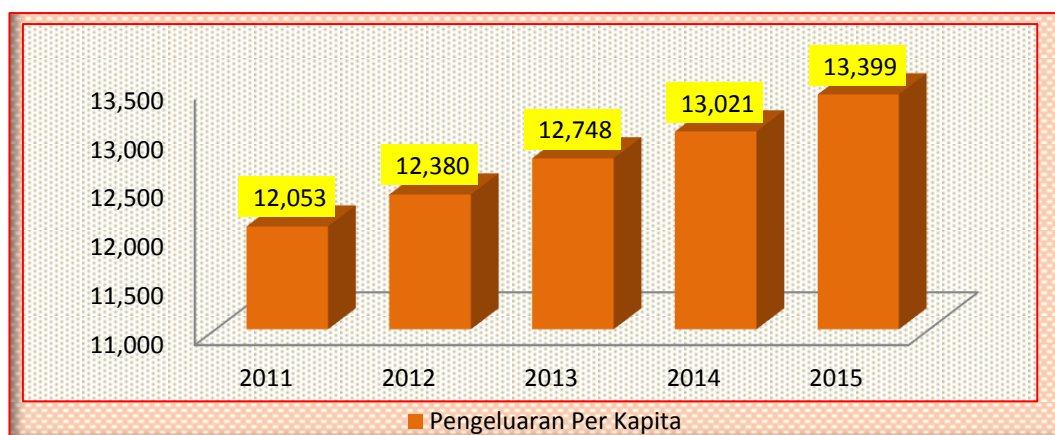


Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

### d) Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

Ukuran kesejahteraan penduduk suatu wilayah dapat digambarkan oleh tingkat pendapatannya. Semakin tinggi tingkat pendapatan berarti semakin tinggi kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi karena sulitnya memperoleh informasi mengenai pendapatan, maka salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dengan pendapatan rumah tangga yang tinggi, maka alokasi biaya untuk investasi kesehatan dan pendidikan akan menjadi lebih tinggi sehingga pada gilirannya berperan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di wilayahnya. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Mataram tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.11  
**Perkembangan Pengeluaran Per Kapita  
 Kota Mataram Tahun 2011-2015 (dalam ribu Rp.)**



Sumber: BPS Kota Mataram

**e) Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Daya serap penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu, dapat dilihat dengan menggunakan indikator yaitu APK dan APM.

APK adalah perbandingan antara jumlah murid pada setiap jenjang pendidikan (SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C), tanpa memperhitungkan umur terhadap jumlah penduduk Kota Mataram pada kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) yang sesuai. Sedangkan APM adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) pada jenjang pendidikan tertentu (SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C) terhadap jumlah penduduk Kota Mataram pada kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) yang sesuai.

Berikut gambaran perkembangan APK dan APM di Kota Mataram pada tahun 2011-2015:

Tabel 2.14  
**APM dan APK untuk SD/Setara, SMP/Setara dan SMA/Setara  
 Di Kota Mataram Tahun 2011 - 2015**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	- SD/MI/Paket A	98,14	97,42	96,76	110,40	105,27
	- SMP/MTs/Paket B	90,00	104,92	105,00	106,65	114,19
	- SMA/SMK/Paket C	73,56	89,42	90,54	92,16	116,96
2	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	- SD/MI/Paket A	93,44	97,42	96,76	98,91	99,00
	- SMP/MTs/Paket B	77,28	76,73	79,76	77,82	79,01
	- SMA/SMK/Paket C	68,08	73,79	68,13	67,01	79,97

Sumber: Dinas Dikpora Kota Mataram, 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa APK pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B mencapai lebih dari 100% dimana hal ini disebabkan karena terdapat murid sekolah yang berusia di luar usia resmi sekolah yang telah ditetapkan atau terdapat murid sekolah yang berasal dari luar Kota Mataram. Sementara optimalisasi pencapaian APM dilakukan melalui mekanisme Biaya Operasional Sekolah dan Bantuan Siswa Miskin atau tidak mampu.

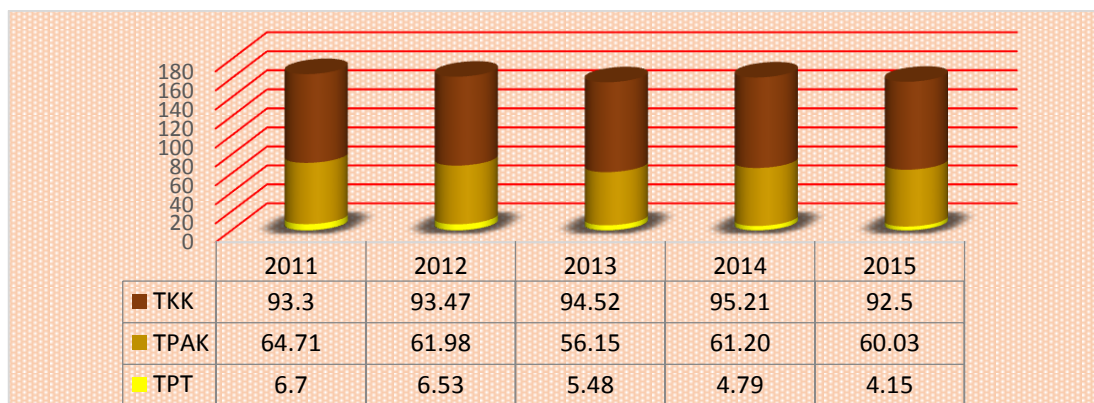
## 2. Ketenagakerjaan

Pemerintah Kota Mataram terus mengupayakan peningkatan mutu tenaga kerja dengan cara membekali masyarakat dengan keterampilan sehingga dapat memasuki lapangan pekerjaan sesuai yang dikehendaki dan menciptakan lapangan kerja dengan memanfaatkan peluang yang ada.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari, merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Sedangkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan peluang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja.

Terjadinya penurunan TPAK tidak serta merta diartikan sebagai minimnya kinerja Pemerintah Kota Mataram dalam penanganan ketenagakerjaan, tetapi lebih kepada pola penghitungan yang digunakan, dimana penghitungan TPAK didasarkan atas jumlah angkatan kerja berbanding jumlah penduduk usia kerja sehingga dapat dijelaskan bahwa angkatan kerja berdasarkan kelompok umur yaitu umur 15-24 tahun (kelompok usia sekolah) dan umur 65 ke atas (kelompok purna bakti/pensiun) lebih banyak masuk ke kelompok bukan angkatan kerja. Dengan demikian terjadi penurunan rasio jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja yang berimplikasi pada berfluktuasinya angka TPAK.

Grafik 2.12  
Perkembangan Angka Indikator Ketenagakerjaan  
Kota Mataram 2011-2015



Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

### 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Jumlah grup/sanggar kesenian di Kota Mataram pada tahun 2011-2015, terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.15

**Rasio Grup Kesenian/Sanggar Kesenian Tahun 2011 - 2015**

No	Uraian	Jumlah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Grup/Sanggar Kesenian	377	377	377	377	377
2	Jumlah Penduduk	413.622	422.673	431.876	441.064	450.226
Rasio Sanggar Kesenian per 10.000 penduduk		9,12	8,92	8,73	8,55	8,38

Sumber: BPS Kota Mataram dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, 2015

Sementara itu kondisi jumlah klub olahraga dan lapangan olah raga yang ada di Kota Mataram menunjang peningkatan prestasi di even olahraga baik tingkat nasional maupun internasional. Rasio klub olahraga di Kota Mataram tahun 2011-2015, sebagaimana tabel terlampir:

Tabel 2.16

**Rasio Klub Olahraga Tahun 2011 - 2015**

No	Uraian	Jumlah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Klub Olahraga	50	50	55	55	70
2	Jumlah Penduduk	413.622	422.673	431.876	441.064	450.226
Rasio Klub Olahraga per 10.000 penduduk		1,21	1,19	1,28	1,25	1,56

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram

---

## 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

---

Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam rangka memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa dan memberdayakan masyarakat, secara eksplisit dapat terlihat pada kinerja pelaksanaan pembangunan pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram yang terdiri dari Fokus Layanan Urusan Wajib dan Fokus Layanan Urusan Pilihan.

### 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

#### 1. Pendidikan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pendidikan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu tersedianya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan di Kota Mataram yang memadai.

Dengan dilaksanakannya program pendidikan gratis secara nasional untuk tingkat SD dan SMP sangat membantu masyarakat kurang mampu untuk melanjutkan sekolah dan diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Mataram. Sehingga penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Mataram. Gambaran statistik sekolah, guru dan murid di Kota Mataram tahun 2011-2015 terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.17  
**Statistik Sekolah, Guru dan Murid Tahun 2011 - 2015**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>Sekolah</b>					
1.1	TK & RA	98	113	113	117	117
1.2	SD & MI	158	181	181	185	187
1.3	SMP & MTs	47	59	59	61	61
1.4	SMA,SMA, MA	24	55	55	57	57
<b>2</b>	<b>Guru</b>					
2.1	TK & RA	494	484	497	639	639
2.2	SD & MI	2.242	2.291	2.237	2.461	2.356
2.3	SMP & MTs	1.222	1.279	1.262	1.746	1.697
2.4	SMA,SMA, MA	820	1.173	1.801	2.143	2.143
<b>3</b>	<b>Murid</b>					
3.1	TK & RA	5.374	5.266	5.245	6.383	6.383
3.2	SD & MI	40.621	43.823	43.638	47.211	45.596
3.3	SMP & MTs	16.728	19.045	19.745	24.027	23.890
3.4	SMA,SMA, MA	7.769	29.992	20.091	23.229	21.432

Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

Capaian indikator pembangunan Urusan Wajib Pendidikan tahun 2011-2015, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.18  
**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	<b>Pendidikan dasar:</b>						
1.1.	Angka partisipasi sekolah	%	109,36	109,36	109,44	110,40	110,65
1.2.	Rasio guru/murid	-	1:36	1:36	1:36	1:34	1:32
<b>2.</b>	<b>Pendidikan menengah:</b>						
2.1.	Angka partisipasi sekolah	%	103,23	103,64	104,64	105,64	106,04
2.2.	Rasio guru terhadap murid	-	1:25	1:25	1:25	1:25	1:24
<b>3.</b>	<b>Fasilitas Pendidikan:</b>						
3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI: kondisi ruang kelas baik	%	90,07	90,18	86,72	82,59	83,27
3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA : kondisi ruang kelas baik	%	89,00	91,03	91,00	92,4	93,04
<b>4.</b>	<b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):</b>						
4.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	lembaga	171	171	258	233	235
<b>5.</b>	<b>Angka Putus Sekolah:</b>						
5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,11	0,05	0,06	0,05	0,01
5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,40	0,15	0,3	0,22	0,22

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
<b>6.</b>	<b>Angka Kelulusan:</b>						
6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	99,90	99,83	100	100
6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	88,40	100	94,01	94,01
6.3.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	107,23	107,59	105,46	110,04	100
6.4.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	74,95	79,73	83,00	94,00	97,00
<b>7.</b>	<b>Angka Pendidikan Yang Ditamatkan</b>	%	-	96,64	96,78	96,91	97,05

Sumber: Dinas Dikpora Kota Mataram, 2015

## 2. Kesehatan

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penyelenggaraan Urusan Wajib Kesehatan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat di Kota Mataram.

Kondisi umum kesehatan di Kota Mataram dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan adalah ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan.

Sebagai sebuah Kota dengan dinamika yang kompleks, penanganan penyakit tertentu membutuhkan penanganan khusus dan berkelanjutan, seperti Penanganan HIV-AIDS, Gizi Buruk dan Gizi Kurang. Langkah-langkah optimalisasi dilakukan dengan penguatan kelembagaan dan jejaring kerja yang jelas dan berkesinambungan antara *stakeholders* terkait. Guna melayani masyarakat di bidang kesehatan, pada tahun 2015 terdapat fasilitas kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.19  
Jumlah Sarana Kesehatan Tahun 2015

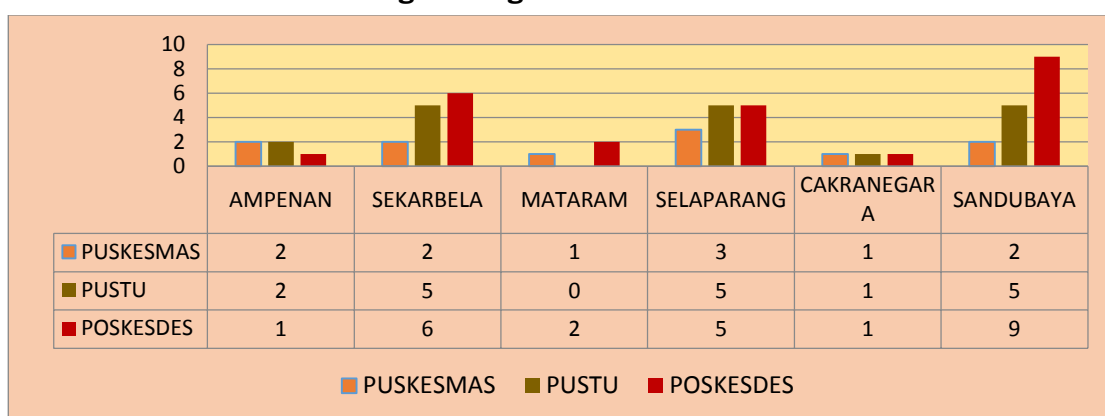
No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	RSU Pemerintah	2	RSUD Pemprov NTB & Kota Mataram
2	RSU TNI/Polri	2	TNI/Polri
3	RSU Swasta	7	RS Islam Siti Hajar, RS Saint Antonius, RS Risa, RS Biomedika, RS Harapan Keluarga, RS Graha Ultima Medika
4	Rumah Sakit Jiwa	1	Pemprov NTB
5	Rumah Bersalin	7	Swasta
6	Balai Kesehatan Mata	1	Pemprov NTB
7	Klinik	5	Swasta
8	Puskesmas Perawatan	4	Pemerintah Kota Mataram
9	Puskesmas Non Perawatan	7	Pemerintah Kota Mataram
10	Puskesmas Pembantu	18	Pemerintah Kota Mataram
11	UP2F	1	Swasta
12	Poskesdes	24	Pemerintah Kota Mataram
13	Posyandu	344	Pemerintah Kota Mataram
14	Poskestren	12	Swasta
15	Praktek Dokter Perorangan	524	Swasta

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2015

Kebijakan dalam memfungsikan 4 (empat) Puskesmas sebagai Puskesmas Pelayanan Perawatan dimaksudkan agar masyarakat Kota Mataram dapat lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan, serta pemerataan pelayanan antara RSUD dan Puskesmas, sehingga optimalisasi pelayanan kesehatan tingkat pertama atau pelayanan kesehatan tingkat dasar dapat dicapai.

Di bawah ini diuraikan mengenai sebaran (proporsi) jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta poskesdes Tahun 2015.

Grafik 2.13  
**Sebaran Puskesmas, Pustu dan Poskesdes di masing-masing Kecamatan Tahun 2015**



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2015

Keberhasilan pelayanan kesehatan masyarakat dapat meningkatkan Usia Harapan Hidup dan kualitas hidup masyarakat. Adapun capaian indikator pembangunan Urusan Wajib Kesehatan tahun 2011-2015, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.20  
**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Kesehatan Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Realisasi				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Harapan Hidup	thn	69,45	69,73	70,03	70,18	70,43
2	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	-	2,50	2,50	2,25	2,54
3	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup		-	-	-	4,18	4,00
4	Cakupan Layanan Puskesmas	%	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7
5	Rasio Rumah Sakit	RS	1:41.362	1:42.267	1:43.187	1:44.106	1:45.022
6	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi	%	-	-	-	-	9,09

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mataram

### 3. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pekerjaan Umum diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah akses masyarakat. Sebagai sektor penunjang, urusan pekerjaan umum berperan besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian, membuka

isolasi wilayah, serta pembangunan sektor-sektor lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola secara efisien, akan menciptakan peningkatan aksesibilitas dan kinerja sistem transportasi sehingga kegiatan perdagangan dan jasa akan berkembang dan memicu keunggulan daya saing perekonomian.

Tabel 2.21  
**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum  
 Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	75,80	75,09	76,80	83,96	87,21
2	Rasio Jaringan Irigasi	%	-	-	-	-	73,48
3	Persentase Rumah Tangga Menurut Akses Terhadap Sanitasi Layak	%	78,58	74,50	79,13	78,94	85,90
4	Rasio sarana peribadatan per 250 penduduk	%	-	-	-	-	228
4	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35
5	Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air	Km	-	-	-	-	379,733
6	Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	M	367,584	388,344	387,232	399,602	409,425
7	Pembangunan Turap pada Aliran Sungai Rawan Longsor Lingkup Kewenangan Kota	M	574	1.240	816	1.646	1.723
8	Luas irigasi dalam kondisi baik	Ha	-	-	-	-	908

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, 2015

Kinerja Bina Marga ditunjukkan dengan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Mataram Status jalan provinsi dan nasional yang juga mengalami perbaikan pada beberapa ruas diantaranya Jalan TGH. Faisal, Jalan Bung Karno, Jalan Saleh Sungkar, Jalan Energi dan lain-lain. Perbaikan tersebut juga disertai dengan penataan drainase dan trotoar.

Kinerja Bina Marga juga dapat dilihat dengan adanya peningkatan panjang jalan sebagai akibat dibukanya ruas jalan baru diantaranya jalan tembus dari ruas Jalan Bung Hatta menuju Jalan Jenderal Sudirman, akses BIL menuju Kota Mataram tembus Jalan Gajah Mada, dan Jalan Dakota. Jalan baru tersebut selain mengurai kemacetan pada ruas jalan tertentu, juga membuka akses dari dan ke Kota Mataram yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitarnya. Adanya peningkatan kinerja kebinamargaan sangat didukung oleh kemitraan dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Mataram dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat melalui Balai Pemeliharaan Jalan Nusa Tenggara I.

Kondisi topografi Kota Mataram yang sebagian besar merupakan daerah datar-landai dan dilalui oleh empat sungai besar berpotensi untuk menimbulkan genangan pada beberapa titik, sehingga dalam perancangan sistem drainase harus memperhatikan kondisi tersebut.

Pada tahun 2015 persentase cakupan drainase dalam kondisi baik meningkat. Kondisi tersebut dapat tercapai melalui pemeliharaan saluran drainase, juga melalui pembangunan drainase baru. Pemeliharaan drainase juga dilakukan melalui pengerahan Pasukan Biru dalam memastikan drainase berfungsi sebagaimana mestinya yang didukung oleh 170 Orang pada tahun 2013, dan meningkat menjadi 220 orang pada tahun 2015.

Pada tahun 2013 dilakukan normalisasi pada ruas Sungai Unus sepanjang 2.400 meter dan 1.400 meter pada Sungai Remeneng pada tahun 2014. Penataan tepi sungai ditangani pula melalui pembangunan jalan tepi Sungai Jangkok sepanjang 2.075 meter yang ditangani melalui kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi NTB. Sedangkan penataan sempadan pantai dilakukan dengan melakukan pembangunan jetty pada muara Sungai Unus yang dapat mencegah terjadinya abrasi pantai. Penataan sempadan pantai tidak hanya dalam upaya mengurangi abrasi, namun dilakukan untuk merevitalisasi kawasan dengan menambah ruang publik dan ruang terbuka hijau. Penataan pantai dilakukan di Pantai Gading di Kawasan Mapak, Pembangunan RTH Muara Jangkok, dan Penataan kembali kawasan Eks-Pelabuhan Ampenan.

#### **4. Urusan Wajib Perumahan**

Penyelenggaraan Urusan Wajib Perumahan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis menurunnya jumlah baglog rumah dan jumlah Rumah Tidak Layak huni (RTLH).

Jumlah rumah di Kota Mataram pada akhir tahun 2014 adalah sebanyak 101.415 unit, dengan jumlah rumah layak sebanyak 99.518, dan rumah tidak layak sebanyak 1.897 unit. Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) hingga tahun 2014 telah mengintervensi 3.900 unit rumah. Intervensi tersebut dilakukan dengan memberikan stimulan perbaikan rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui beberapa pihak baik itu SKPD Kota Mataram, Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Pusat, PNPM Mandiri Perkotaan, BAZNAS Kota Mataram dan Pihak Peduli Lainnya. Pada tahun 2014 penanganan RTLH dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram sebanyak 12 unit, PNPM-MP 418, Badan Pemberdayaan Masyarakat 86 unit, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 25 unit, BAZNAS Kota Mataram sebanyak 74 unit, Dana Pembangunan Kelurahan sebanyak 16 unit, dan Dinas Sosial Kota Mataram sebanyak 90 unit. Sisa RTLH pada tahun 2014 adalah sebanyak 1.866 unit.

Pengurangan luasan kawasan kumuh memiliki beberapa kriteria yaitu vitalitas non ekonomi kawasan, vitalitas ekonomi, status tanah dan kondisi

prasarana dan sarana berupa kondisi jalan, drainase, air bersih dan air limbah.

Penanganan RTLH dan kawasan permukiman kumuh dilakukan melalui penyediaan air bersih dan sanitasi. Penyediaan air bersih dilakukan melalui Sambungan PDAM, Sumur Gali, Kran Umum atau Hidran Umum, Sumur Bor, Sumur Pompa Tangan dan Perlindungan Mata Air. Pada tahun 2013 penyediaan air bersih sudah mencakup 41,54% dan pada tahun 2014 mencapai 68,24%.

Di bidang sanitasi, cakupan sanitasi pada tahun 2014 mencapai 78,94% dan tahun 2015 mencapai 85,90%, meningkatnya cakupan sanitasi disebabkan oleh banyaknya program yang menunjang guna peningkatan sanitasi tersebut seperti: pembangunan Jamban dan MCK Komunal.

Tabel 2.22

**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Perumahan  
Di Kota Mataram Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih	%	87,70	85,61	69,70	68,24	67,34
2	Luasan kawasan permukiman kumuh	Ha	-	-	-	-	803,39
3	Persentase rumah layak huni	%	-	-	-	-	98,13

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, 2015

Cakupan layanan air bersih sebagai salah satu komponen layanan dasar masyarakat mengalami peningkatan. Salah satu yang berkontribusi pada peningkatan cakupan layanan air bersih melalui sambungan langsung PDAM adalah adanya Program Sambungan Air Bersih Gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Adapun kebutuhan air baku PDAM sampai dengan saat ini masih mengandalkan suplai dari mata air Sarasuta, Ranget dan Saraswaka di Kabupaten Lombok Barat. Namun demikian, sudah mulai dirintis untuk menambah kapasitas suplai air melalui pemanfaatan beberapa potensi air bawah tanah di Kota Mataram yang sudah dilakukan survei dan penetapan lokasi oleh tim dari Universitas Gajah Mada, seperti di Kelurahan Rembiga dan Kelurahan Sayang-sayang. Kedalaman air tanah tersebut antara 5–7 meter, kecuali di beberapa lokasi, seperti Cakranegara, Monjok dan Dasan Agung bagian utara kedalaman air tanah mencapai 15 meter.

## 5. Urusan Wajib Penataan Ruang

Penyelenggaraan Urusan Wajib Penataan Ruang diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup.

Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut adalah komitmen Pemerintah Kota Mataram untuk secara bertahap menambah dan menata Ruang

Terbuka Hijau (RTH) baik berupa taman kota di setiap sudut kota, RTH jalur di jalan jalan utama dan jalan-jalan baru serta di areal permakaman.

Di samping itu pula, melakukan upaya penghematan energi listrik (*green energy*) melalui penggantian lampu PJU yang konvensional dengan daya listrik yang besar dengan Lampu berteknologi *Light Emitting Diode* (LED) dengan spesifikasi daya yang lebih rendah namun memiliki pencahayaan yang lebih terang, yang dilakukan di beberapa ruas jalan utama di Kota Mataram dengan jumlah 564 titik lampu.

Tabel 2.23  
**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Penataan Ruang  
 Di Kota Mataram Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	%	11,39	11,39	12,48	12,50	12,50
2	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	-	-	-	-	73,5 %
3	Persentase kesesuaian Rencana Tata Ruang	%	-	-	-	-	56,56 %

Sumber: Dinas Tata Kota dan Dinas Pertamanan Kota Mataram, 2015

Isu pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Mataram dalam mewujudkan rencana tata ruang pada tahun 2031. Kota Mataram dengan luas 6.130 Ha membutuhkan 20 persen RTH Publik setara dengan luas 460,86 Ha (1.226 km<sup>2</sup>). Saat ini RTH Publik Kota Mataram mencapai 12,50 persen atau seluas 765,57 Ha meningkat 0,02 persen dari tahun 2013, dimana penambahan RTH yang relatif kecil ini berasal dari penambahan RTH Jalur pada beberapa jalan-jalan baru.

Isu penataan ruang lain yang mendesak saat ini adalah pemenuhan rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU). Sejauh ini Pemerintah Kota Mataram hanya menata pemakaman umum sesuai aspirasi masyarakat. Kegiatan itu berupa penembakan, paving block, pengurukan, penerangan makam, pembangunan atau penataan fasilitas pemakaman. Selanjutnya diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat sekitar pemakaman tersebut. Indikator rasio TPU menunjukkan saat ini jumlah areal pemakaman yang ada di wilayah Kota Mataram sebanyak 51 areal pemakaman dengan luas sebesar 197.181 meter persegi.

Komitmen Pemerintah Kota Mataram untuk memenuhi ketersediaan RTH Publik dan Privat 30% pada tahun 2031 dilakukan pula melalui upaya koordinasi dan sinkronisasi program daerah dengan pemerintah pusat, diantaranya Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan kegiatan antara lain: Pembangunan Taman

Abian Tubuh, Taman Muara Jangkok, Pembentukan Forum Kota Hijau, serta Kampanye Kota Hijau melalui *Green Festival* dan Aksi Kota Hijau.

IMB merupakan upaya pengendalian pemanfaatan ruang. Jumlah IMB yang dikeluarkan pada tahun 2014 sebanyak 1.349 ijin, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 614 ijin. Menurunnya ijin yang diterbitkan memberikan gambaran bahwa dari ijin yang diusulkan terdapat ijin yang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang.

## 6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Penyelenggaraan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Ruang lingkup urusan perencanaan pembangunan meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara terpadu dan efektif.

Capaian Indikator Kinerja Utama urusan wajib Perencanaan Pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24

### Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Di Kota Mataram Tahun 2011 - 2015

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase tingkat perwujudan usulan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
2	Persentase ketepatan jadwal penetapan PERWAL RKPd sesuai dengan UU 25/2004 tentang SPPN	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS sebagai dasar penetapan RAPBD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase keselarasan program dalam RKPd dengan program dalam RPJMD	%	85,00	85,00	85,00	85,00	90,00
5	Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah	%	70,00	70,00	70,00	70,00	75,00
6	Persentase SKPD yang menyampaikan LKIP tepat waktu, berdasarkan Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014	%	80,00	80,00	80,00	79,41	85,29

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
7	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda Kota Mataram, 2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam merumuskan usulan program/kegiatan pembangunan yang nantinya menjadi bahan dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Kota Mataram. Keterlibatan pemangku kepentingan pembangunan dalam MPBM untuk mengakomodir keterwakilan segala unsur masyarakat salah satunya seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, partisipasi perempuan melalui kader posyandu, dan lain-lain. Dengan demikian perwujudan usulan masyarakat yang direalisasikan dalam APBD mencapai 80% dari keseluruhan usulan program dan kegiatan yang ada.

Pada tahun 2015, telah disusun dokumen perencanaan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 37 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014, dengan registrasi sebagai berikut:

1. RKPD Kota Mataram Tahun 2015 ditetapkan tanggal 31 Mei 2014.
2. Rancangan KUA dan PPAS RAPBD 2015 telah disusun dan disampaikan kepada DPRD Kota Mataram pada tanggal 26 Juni 2014.
3. Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan RAPBD 2015 telah disusun dan disampaikan kepada DPRD Kota Mataram pada tanggal 20 April 2015.

Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dan mudah diakses menjadi salah satu elemen penting dalam proses perencanaan pembangunan. Data dan informasi perencanaan pembangunan yang tersedia pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.25  
**Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2015**

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kota Mataram	6 Dokumen	RKPD, P-RKPD, KUA, PPAS, KUPA dan PPASP
2	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	2 Dokumen	PK, LAKIP
3	Data Kajian Perencanaan	28 Kajian	-

Sumber: Bappeda Kota Mataram, 2015

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, ditegaskan bahwa penyampaian LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LAKIP menjadi salah satu bahan bagi kelengkapan penyusunan LKPD (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota Mataram kepada DPRD Kota Mataram, sehingga ketepatan waktu penyampaian LAKIP SKPD menjadi indikator yang penting untuk dipenuhi.

## 7. Urusan Wajib Perhubungan

Penyelenggaraan Urusan Wajib Perhubungan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2.26  
**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Perhubungan  
 Di Kota Mataram Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	618.146	652.905	643.119	522.442	532.323
2	Rasio ijin trayek	%	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13
3	Jumlah uji kir angkutan umum	unit	17.245	17.297	17.302	17.356	17.579
4	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	76	69	74	82	88
5	Pemasangan Rambu-rambu	%	41	45	54	60	72

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, 2015

Rasio terpasangnya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan (rambu-rambu) merupakan indikator kinerja utama pelayanan publik urusan wajib perhubungan. Adapun rincian pemasangan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan tahun 2015 adalah Rambu-Rambu Lalu Lintas terpasang sebanyak 1.691 unit, meningkat 198 unit dari tahun 2014; Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan terpasang sebanyak 146 unit, meningkat sebanyak 33 unit dari tahun 2014; Marka Jalan terpasang seluas 11.120 m<sup>2</sup>, meningkat sebesar 1.080 m<sup>2</sup> dari tahun 2014; Paku Marka Jalan terpasang sebanyak 1.683 unit, meningkat sebanyak 537 unit dari tahun 2014; Pagar Pengaman Jalan terpasang sepanjang 1.086 m, meningkat 236 m dari tahun 2014; *Warning Light* terpasang sebanyak 20 unit, meningkat sebanyak 9 unit dari tahun 2014.

Kompleksitas Urusan Wajib Perhubungan dihadapkan pada ketersediaan SDM yang belum memadai, disisi lain keberadaan Kota Mataram menuju Mataram Metro menghadapi persoalan perhubungan yang membutuhkan penanganan secara terpadu dan terintegrasi.

## 8. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan Urusan Wajib Lingkungan Hidup diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya ketersediaan kawasan resapan

air, berkurangnya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsinya yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian.

Perkembangan jumlah penduduk yang cukup pesat diiringi peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya menyebabkan tingginya permintaan akan pembangunan permukiman dan perdagangan baik barang maupun jasa di Kota Mataram. Hal ini menyebabkan tingginya alih fungsi lahan pada kawasan pertanian menjadi kawasan non pertanian yang secara tidak langsung menyebabkan gangguan pada ketersediaan kawasan resapan air. Oleh karena itu untuk mengatasinya dilaksanakan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam untuk menambah cakupan biopori atau sumur resapan pada beberapa titik genangan.

Tabel 2.27

**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Lingkungan Hidup Di Kota Mataram Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase penanganan sampah	%	65,70	63,96	63,69	63,26	66,33
2	Pencemaran status mutu air	%	-	-	-	-	50
3	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal.	%	-	-	-	-	22,2
4	Penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram, 2015

Dari total volume sampah sebanyak 1.396 m<sup>3</sup> per hari pada tahun 2015, yang bisa terangkut ke TPA sampah adalah 925,98 m<sup>3</sup> perhari atau hanya sekitar 66,33% dari total volume sampah, sehingga dalam rangka mengimbangi penambahan volume sampah dan kecilnya persentase pengurangan sampah di sumber sampah, Pemerintah Kota Mataram memerlukan peningkatan ritasi dan jumlah seperti dump truck, armroll, pick up dan container. Sementara di sisi lain, persoalan akses/jalan menuju lokasi TPA melalui desa wisata dengan pemukiman padat yang rentan terhadap aksi protes dari warga juga memperparah permasalahan sampah di Kota Mataram. Sehingga digagaslah Pengelolaan Sampah dengan konsep pemusnahan melalui pembangunan Tungku Pembakaran Sampah yang bertujuan mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA.

Ruas sungai yang berada di Kota Mataram merupakan hilir aliran sungai yang ada di Pulau Lombok. Hal tersebut menyebabkan Kota Mataram berpeluang mengalami terjadinya genangan atau banjir. Sungai besar yang melintasi wilayah Kota Mataram berjumlah empat sungai dan semuanya bermuara di sepanjang pesisir barat Kota Mataram. Sebagai upaya pencegahan potensi genangan dibutuhkan kawasan resapan air untuk mengurangi *run off* air hujan yang langsung ke aliran sungai.

Sumur resapan yang dibangun di empat lingkungan, antara lain: Lingkungan Arong Arong dan Lingkungan Darul Hikmah Kelurahan Dasan Agung, Lingkungan Karang Jangu Kelurahan Sapta Marga, Lingkungan Kebun Jeruk, Pejeruk Perluasan, Pejeruk Baru Kelurahan Pejeruk dan Lingkungan Kebun Bawak Timur Kelurahan Kebun Sari. Masing-masing dengan diameter 1,2 meter dan kedalaman 3 meter. Disamping sumur resapan juga dibangun Biopori sebanyak 228 unit yang didukung dengan alat pengebor 50 unit.

Guna meningkatkan ketersediaan kawasan resapan air, Pemerintah Kota Mataram melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, akan menambah cakupan biopori dan sumur resapan pada kawasan yang rawan genangan. Konservasi Sumber Daya Alam juga dilakukan dengan mengoptimalkan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Mataram.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan ketersediaan kawasan resapan air, adalah sebagai berikut: Melakukan pengendalian dalam pemberian IMB dalam alih fungsi lahan terutama pada kawasan resapan air dan kawasan permukiman; menambah luasan RTH dengan membangun Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) di Kelurahan Selagalas; Penyediaan dan penanaman Pohon Pelindung; mengimplementasikan dokumen Survey Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dalam pengkajian Dampak Lingkungan.

Upaya lain yang dapat menjadi indikator kinerja urusan wajib lingkungan hidup adalah jumlah penanganan pengaduan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan serta jumlah titik perlindungan sumber daya alam. Untuk jumlah pengaduan, pada tahun 2015 yang dapat diselesaikan sebanyak 8 kasus dari 8 kasus yang diajukan, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 5 kasus dari 5 kasus yang diajukan.

## 9. Urusan Wajib Pertanahan

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pertanahan diarahkan untuk meningkatkan penyediaan dan pelayanan infrastruktur perkotaan.

Capaian indikator pembangunan Urusan Wajib Pertanahan di Kota Mataram tahun 2011-2015, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.28

### Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Pertanahan Di Kota Mataram Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase luas lahan pemerintah yang bersertifikat	%	-	-	-	-	50
2	Luas tanah yang dibebaskan	M2	54.205	42.551	53.903	36.096	30.893

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

Menurunnya luas tanah yang dibebaskan pada tahun 2015 dibanding tahun 2014 disebabkan karena anggaran pembebasan tanah pada tahun 2015 lebih banyak digunakan untuk pelunasan dari pengadaan tanah pada tahun 2014 yang baru dibayarkan uang muka sebesar 30% dari harga tanah. Selain untuk jalan, terdapat kebutuhan lahan untuk pembangunan gedung kantor karena masih terdapat Perangkat Daerah Kota Mataram yang menyewa maupun pinjam pakai asset Pemerintah Provinsi NTB. Selanjutnya, kebutuhan lahan untuk pembangunan jaringan air irigasi, bangunan pasar, pembangunan sekolah dan makam. Pada Tahun 2015, rencana pembebasan lahan akan terus diupayakan dalam rangka mendukung kelanjutan pembangunan dan peningkatan jalan, penyediaan lahan untuk rumah potong hewan di Gubuk Mamben, Sekarbela serta rencana relokasi Pasar Kebon Roek di Kebon Talo, Ampenan.

## 10. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik dan dilaksanakan dalam rangka pemberian pelayanan publik bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang merata dan adil dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas.

Pelaksanaan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Mataram dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan, bertujuan meningkatkan tertib administrasi kependudukan melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan, Pengembangan *database* kependudukan, Sosialisasi kebijakan kependudukan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian, Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian, Pengawasan Administrasi Kependudukan, Pelayanan Akta Perubahan Nama Kewarganegaraan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Penyusunan Perencanaan, Penataan dan Analisis Kependudukan.

Tabel 2.29

### Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Mataram Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase Penduduk ber-KTP	%	45,02	47,04	68,34	86,91	87,00
2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	42	45	47	48	51
3	Rasio pasangan berakte nikah	%	82	85	86	89	96
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	ada	ada	ada	ada	ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, 2015

Sebagai upaya peningkatan pelayanan Kartu Keluarga dan KTP terkait dengan program Nasional yaitu percepatan perekaman KTP bagi masyarakat yang mengharuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perekaman KTP-elektronik di masing-masing Kelurahan dan Sekolah Menengah Atas (SMA dan SMK) yang ada di Wilayah Kota Mataram dan sejalan pula dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2380/SJ Tanggal 10 Mei Tahun 2015 tentang Penyediaan Dukungan Pendanaan Pelaksanaan Program KTP-elektronik dalam APBD Tahun Anggaran 2015.

Dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Pelayanan Dokumen Kependudukan. Cakupan penerbitan KTP-elektronik dari tahun 2010 s/d tahun 2015 realisasinya sebanyak 127.477 KTP-elektronik. Angka ini tercapai secara signifikan pada tahun 2012, dimana tahun 2012 dilakukan pencetakan KTP-elektronik secara Nasional dan Massal.

Sedangkan pencetakan Kartu Keluarga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki Kartu Keluarga dan disertai pula dengan adanya even-even tertentu seperti: Pembukaan lowongan kerja, Haji dan Umroh, pendaftaran sekolah, dan pemenuhan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran. Disamping itu, adanya jumlah pindah datang ke Kota Mataram berpengaruh terhadap penerbitan Kartu Keluarga baru.

Dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait dengan pengaduan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram telah membentuk Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dimana hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

## **11. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan kesetaraan gender.

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan. Gerakan emansipasi perempuan dalam segala aspek pembangunan harus diapresiasi dengan memberikan kesetaraan peran antara perempuan dan laki-laki dari sisi pengarusutamaan gender serta peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan.

Adapun realisasi capaian masing-masing indikator, dapat dilihat pada tabel dan grafik, sebagai berikut:

Tabel 2.30

**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Mataram Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	-	55,25	57,61	57,72	57,77	61,06
2	Angka Melek Huruf Perempuan	%	79,22	80,58	90,01	90,03	90,86
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	79,12	80,26	82,25	36,01	36,01
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	87,41	89,87	93,87	96,8	94,09

Sumber: BPPKB Kota Mataram, 2015

Indeks Pemberdayaan Gender adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Angka IPG sebesar 61,06 dipengaruhi oleh implementasi kebijakan gender dengan memberikan peluang keterlibatan perempuan dalam pembangunan.

Untuk memberikan peran perempuan dalam kemajuan Kota dengan memberikan ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan, melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Gerakan Organisasi Wanita (GOW), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Forum Peduli Air Susu Ibu (FPASI).

Disamping itu, dalam mewujudkan kesetaraan gender telah dilakukan upaya-upaya, antara lain meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, terutama dalam aspek perencanaan pembangunan dengan menargetkan proporsi peserta MPBM sebesar 30% dari unsur perempuan, membuka seluas-luasnya informasi yang dapat diakses oleh Ibu, maupun Calon Ibu terhadap kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, meningkatkan pengetahuan dan pengembangan diri perempuan dengan membuka kesempatan pembentukan lembaga-lembaga non formal pemerhati perempuan, ibu dan anak, serta meningkatkan ruang ekspresi perempuan melalui peningkatan frekuensi acara berbasis gender bernilai kebangsaan seperti Peringatan Hari Ibu, Hari Kartini, dan lain-lain.

Dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak dan perlindungan perempuan serta peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, BPPKB telah melaksanakan sosialisasi Kota Layak Anak dengan peserta sebanyak 100 orang, rakor pokja PUG dan PA dengan peserta sebanyak 70 orang, sosialisasi UU PDKRT, PA dan Trafficking dengan peserta sebanyak 100 orang, Sosialisasi dalam rangka peringatan hari ibu dengan peserta sebanyak 80 orang, kemudian Pelatihan KHA terintegrasi KLA sebanyak 120 orang peserta, serta pembinaan Kecamatan Sayang Ibu sebanyak 25 orang di 6 kecamatan, ada juga pertemuan dan pembinaan forum anak serta pembinaan/pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

## 12. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penyelenggaraan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas keluarga. Program Keluarga Berencana merupakan salah satu program nasional yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk sehingga tercapai penduduk tumbuh seimbang dengan tujuan terciptanya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) bagi remaja yang dilaksanakan di pondok pesantren, SLTA/SLTP, dan melakukan penyuluhan di setiap kelurahan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang KRR.

Berkaitan dengan cakupan layanan KB, pencapaian program dari hasil pelayanan dan pembinaan sampai dengan Desember 2015 jumlah peserta KB aktif mengalami peningkatan, dimana jumlah peserta KB aktif sebesar 53.635 dari PPM sebesar 51.329 peserta atau 104,49% dari PPM dan 76,08% dari PUS sebesar 70.498 peserta. Dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014, jumlah peserta KB aktif sebesar 50.485 peserta dari PPM sebesar 50.882 dan PUS sebesar 68.317 peserta.

Pencapaian peserta KB Baru bulan Januari sampai dengan Desember 2015 sebesar 10.893 peserta atau 86,19% dari PPM Peserta KB Baru sebesar 12.638 peserta. Pencapaian peserta KB Baru tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 732 peserta dimana peserta KB Baru tahun 2014 sebesar 11.625 peserta dari PPM Peserta KB Baru sebesar 10.327 peserta.

Capaian indikator pembangunan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut:

Tabel 2.31

### Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Mataram Tahun 2011- 2015

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Keluarga Sejahtera	jiwa	76.254	77.335	78.141	78.950	84.124
2	Cakupan Layanan PUS ber-KB Aktif	jiwa	41.023	42.104	49.645	67.605	70.498
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	jiwa	1-2	1-2	1-2	1,51	1,51
4	Cakupan peserta KB aktif	%	62,55	63,05	64,02	73,90	73,90
5	Jumlah Keluarga Sejahtera	Jiwa	74.265	77.335	78.141	78.950	78.950

Sumber: BPPKB Kota Mataram, 2015

## 13. Urusan Wajib Sosial

Penyelenggaraan Urusan Wajib Sosial diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya upaya penanganan masalah sosial masyarakat.

Daya tarik Kota Mataram yang berdampak pada meningkatnya arus urbanisasi masyarakat menjadikan permasalahan sosial terus meningkat

setiap tahunnya. Selain urbanisasi, dinamika pertumbuhan penduduk dengan rata-rata 1,7% setiap tahunnya menjadi faktor yang mempengaruhi makin beragamnya permasalahan sosial kemasyarakatan. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terdiri dari fakir miskin, anak terlantar, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), pemulung, eks narkoba, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, dan Bekas Warga Binaan Lembaga Permasalahan (BWBLP).

Capaian indikator pembangunan urusan wajib sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32  
**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Sosial  
di Kota Mataram Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator Pembangunan	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase Penduduk Miskin	%	13,18	11,87	10,75	10,53	10,53*
2	Jumlah Panti Asuhan/Panti Jompo/Panti Rehabilitasi yang dibina	unit	16	16	16	16	16
3	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	unit	16	16	16	16	16
4	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	orang	46.916	46.860	46.939	47.032	47.331

\*) angka sementara

Sumber: BPS Kota Mataram, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, 2015

Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat strategi utama penanggulangan kemiskinan tersebut antara lain: i) memperbaiki program perlindungan sosial; ii) meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar; iii) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan iv) menciptakan pembangunan yang inklusif.

Dalam rangka melaksanakan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan tahun 2015, dilakukan upaya melalui program pembangunan yang berkelanjutan antara lain menerapkan layanan kesehatan gratis, bantuan siswa miskin, bedah rumah, sambungan gratis air bersih bagi MBR, bantuan beras miskin (raskin), bantuan beras bagi penduduk jompo, bantuan modal usaha dan santunan kematian, disamping itu juga dilaksanakan beberapa program KKS dan PKH untuk 28.212 KK sesuai dengan SK Mensos 170/HUK/2015.

Untuk indikator Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan melalui peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial PMKS, pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS serta pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE).

#### 14. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan Urusan Wajib Ketenagakerjaan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya ketersediaan lapangan kerja di Kota Mataram.

Masalah ketenagakerjaan semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah penduduk, yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Capaian indikator pembangunan Urusan Wajib Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.33  
**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Ketenagakerjaan  
 Di Kota Mataram Tahun 2011-2015**

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	64,71	61,98	56,15	61,20	63,31
2	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	93,30	93,47	94,52	95,21	92,50
3	Pencari kerja yang ditempatkan	orang	34	27	33	53	80
4	Tingkat pengangguran terbuka	%	6.70	6.53	5.48	4.79	4,15
5	Keselamatan dan perlindungan	%	65	60	68	76	84
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	53	50	62	66	44.72

Sumber: BPS Kota Mataram, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, 2015

Terjadinya peningkatan TPAK Kota Mataram didukung oleh perkembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran; jasa serta sektor industri kretatif.

Secara difinisi Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dapat memberikan gambaran peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Penurunan angka TKK dimaksud bukan semata-mata menunjukkan ketidakberhasilan pencapaian kinerja ketenagakerjaan akan tetapi lebih pada makin tingginya jumlah angkatan kerja yang ada di Kota Mataram.

Hal lain yang mempengaruhi bertumbuhnya sektor tersier yang positif adalah terkait berkembangnya pasar modern yang menggunakan tenaga kerja lokal, sehingga diharapkan sebagian besar angkatan kerja dapat tertampung di lapangan usaha tersebut dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sebagai bagian lain dari penilaian kinerja oleh pihak independen (Ombudman RI Perwakilan Provinsi NTB) diperoleh penilaian kinerja pelayanan publik bidang ketenagakerjaan (AK 1/Kartu Kuning) dengan nilai 890 berada pada Zona Hijau.

## 15. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penyelenggaraan Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya efektifitas pengembangan usaha di Kota Mataram.

Mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 06/Per/M.KUMKM/III/2008 tanggal 12 Maret Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri nomor 22/KEP/M.KUMKM/IV/2007 tanggal 16 April Tahun 2007 tentang pemeringkatan koperasi, beberapa upaya strategis dalam rangka peningkatan jumlah koperasi aktif dan jumlah koperasi berkualitas diimplementasikan melalui kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi, serta Peningkatan Penataan Data Koperasi. Dari jumlah koperasi aktif yang ada, secara berkesinambungan dilakukan penilaian kinerja dalam rangka penetapan koperasi yang berkualitas. Dasar penetapan kinerja koperasi dilakukan melalui Pemeringkatan Koperasi sehingga dari hasil penilaian yang dilakukan ditetapkan 142 koperasi berkualitas pada tahun 2015 meningkat sebanyak 9 unit koperasi dari 133 unit koperasi pada tahun 2014.

Pertumbuhan WUB di Kota Mataram menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun anggaran 2015 pertumbuhan wirausaha baru mencapai angka sebesar 4.767 WUB atau terjadi peningkatan sebesar 2.685 dari jumlah WUB tahun 2014.

Capaian indikator pembangunan Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.34  
**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Koperasi dan UKM  
 Kota Mataram Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Tingkat Perkembangan WUB	WUB	8.544	10.899	13.352	14.130	16.212
2	Koperasi Berkualitas	Unit	104	111	128	133	142
3	Koperasi Aktif	Unit	307	315	345	355	386
4	Persentase koperasi aktif	%	59.60	54.78	58.67	59.76	59,76

Sumber: Dinas Koperindag Kota Mataram, 2015

Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya strategis yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya, peningkatan kemampuan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan dan penguatan kelembagaan koperasi. Selain itu juga, peran koperasi menjadi prioritas perhatian dalam upaya peningkatan iklim usaha yang kondusif di Kota Mataram serta daya dukungnya dalam penciptaan WUB.

## 16. Urusan Wajib Penanaman Modal

Penanaman modal dalam suatu Negara maupun daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah. Peningkatan investasi dapat meningkatkan PAD secara langsung

yang dapat dibelanjakan untuk program pembangunan. Selain itu, besarnya investasi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat terkait dengan kesempatan kerja yang lebih luas. Dari sisi peran pemerintah, harus mengupayakan pembenahan terhadap peningkatan pelayanan secara prima dalam menunjang iklim berinvestasi.

Penyelenggaraan Urusan Wajib Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kepastian berinvestasi di Kota Mataram.

Peningkatan pelayanan perizinan di Kota Mataram diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perijinan Kepada BPMP2T Kota Mataram yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perijinan.

Tabel 2.35  
**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Penanaman Modal  
Di Kota Mataram Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator Pembangunan	Satuan	2015				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Rp (juta)	1.501,17	1.855,17	2.097,79	3.138,28	3.765,94
2	Laju Pertumbuhan Investasi	%	19,59	23,58	12,38	12,76	12,96
3	Penyelesaian Ijin Investasi Tepat Waktu	%	76	80	82	97	97,79

Sumber: BPS Kota Mataram dan BPMP2T Kota Mataram, 2015

Berdasarkan analisis PDRB Kota Mataram menurut Pengeluaran dijelaskan bahwa aktivitas investasi fisik tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB disebut sebagai bruto karena di dalamnya masih terkandung unsur penyusutan, atau nilai barang modal sebelum diperhitungkan nilai penyusutannya. Mengacu pada hasil penghitungan PMTB yang dilakukan, perkembangan investasi di Kota Mataram menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Indikator lainnya yang tidak kalah penting yaitu penentuan laju pertumbuhan investasi dimana dapat memberikan gambaran besaran proses kenaikan nilai investasi perkapita dalam jangka waktu tertentu.

Indikator meningkatnya efektifitas pengembangan usaha capaiannya didukung oleh pelaksanaan program/kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan perijinan termasuk di dalamnya adalah yang berkaitan dengan waktu penyelesaian izin. Waktu penyelesaian izin yaitu: IMB, PIMB, ILOK, SITU MB, HO, SIUP, TDP, TDG, TDI/IUI dan Perluasan, IUJK, Ijin Hotel, Ijin Rumah Makan, Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, Ijin

Usaha Jasa Pariwisata, Ijin Sewa Lahan dan lain-lain dapat ditingkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya. Salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan pada tahun 2015 telah diresmikan Program PAKET dimana masyarakat dapat mengurus lebih dari satu ijin secara bersamaan pada waktu yang sama. Pemberlakuan ijin PAKET berkontribusi terhadap jumlah ijin yang ditangani pada tahun 2015 yaitu meningkat sebesar 3.653 ijin dari 6.330 ijin pada tahun 2014 menjadi 9.983 ijin.

## 17. Urusan Wajib Kebudayaan

Sebagai ibukota Provinsi NTB, Kota Mataram dengan keberagaman budaya tetap peduli dalam upaya pelestarian terhadap nilai-nilai kebudayaan dan keragaman budaya. Penyelenggaraan Urusan Wajib Kebudayaan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal.

Tabel 2.36  
**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Kebudayaan  
 Di Kota Mataram Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah sanggar seni dan budaya	Sanggar	206	206	206	206	203
2	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	25	30	35	50	52
3	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Lokasi	4	4	4	4	4
4	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Lokasi	5	5	5	5	5
5	Jumlah Pranata Adat	Lembaga	12	14	20	23	30
6	Persentase Pranata Adat Terhadap Jumlah Lingkungan	%	3,74	4,36	6,23	7,16	9,34

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, 2015

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya berupa Festival Gendang Beleg, Bale Ganjur, Qasidah, dan Serakalan Barzanji diselenggarakan dalam upaya mempertahankan seni budaya lokal daerah. Sementara sanggar seni yang ada berupa sanggar seni tari, seni rudat, zikir jaman, peresean, cupak gerantang, hadrah dan qasidah. Selain sanggar seni, terdapat beberapa komunitas seni yang dikembangkan oleh komunitas muda dalam mengembangkan seni akustik, keroncong, dan sebagainya.

Untuk jumlah situs di Kota Mataram saat ini sebanyak 4 situs, yaitu: Taman Mayura, Pure Miru, Makam Van Ham, dan Makam Loang Baloq. Situs tersebut telah tercatat di Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar Bali yang wilayah kerjanya termasuk Kota Mataram. Selain 4 situs tersebut, terdapat beberapa situs lainnya yang dilestarikan dan dipublikasikan sebagai Cagar Budaya Kota Mataram, antara lain: Makam Dende Seleh, Makam Tuan Guru Tretetet, Masjid Lebai Sandar, Makam Al Kaff dan Titi Gangsa Sayang Sayang.

## 18. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan untuk meningkatkan peran aktif dan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan serta menumbuhkan dan meningkatkan budaya dan prestasi olahraga. Peningkatan kualitas sumber daya pemuda merupakan tujuan strategis dalam upaya menciptakan SDM Kota Mataram yang sehat jasmani dan rohani, serta mampu berdaya saing. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilaksanakan penyelenggaraan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga.

Tabel 2.37

### Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Organisasi Pemuda	buah	59	60	71	71	71
2	Jumlah Organisasi Keolahragaan	buah	30	30	30	30	30
3	Jumlah lapangan olahraga	buah	39	39	43	43	43
4	Gelanggang /balai remaja (selain milik swasta)	buah	4	4	4	4	4

Sumber: Dinas Dikpora Kota Mataram, 2015

Capaian indikator kinerja utama kepemudaan dan olahraga dilakukan dengan mengoptimalkan wadah organisasi yang ada yaitu organisasi kepemudaan yang berada di sekolah dan di luar sekolah.

Kegiatan keolahragaan sebanyak 7 kali secara rutin dilakukan setiap tahun, antara lain Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Liga Pendidikan Indonesia (LPI), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Kompetisi Olahraga Unggulan Daerah (KOUD), dan Pekan Olahraga Antar Satuan Pendidikan. Dalam mengoptimalkan organisasi olahraga yang terdiri dari 50 jenis olahraga, yang telah memiliki kepengurusan cabang olahraga di Kota Mataram sebanyak 30 cabang dan 20 cabang kepengurusannya belum terbentuk di Kota Mataram.

Pembinaan olahraga profesional di luar sekolah dengan keberadaan Komite Olahraga Nasional (KONI) Kota Mataram diarahkan untuk meningkatkan prestasi atlet Kota Mataram terutama dalam menghadapi event olahraga regional dan nasional. Untuk mendukung capaian prestasi atlet Pemerintah Kota Mataram telah memberikan bantuan stimulus baik kepada atlet maupun pelatih masing-masing Cabang Olahraga (Cabor).

## 19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kota Mataram memiliki karakteristik heterogenitas dari sisi agama, ras, suku dan golongan. Kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan di Kota Mataram berpeluang untuk terjadinya konflik, sehingga upaya preventif dalam mengantisipasi konflik dan sejenisnya dilakukan melalui

komunikasi, koordinasi dan sosialisasi yang intensif dengan unsur kepolisian, TNI, lembaga adat dan kemasyarakatan.

Pelaksanaan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram.

Tabel 2.38  
**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan Penanganan Konflik	kasus	4	4	4	2	2
2	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	kegiatan	1	1	1	1	1
3	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	kegiatan	1	1	1	1	1
4	Jumlah Tower Peringatan Dini Tsunami	Unit	-	-	1	1	1
5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	%	80	80	82,50	83,25	91,20
5	Inventaris Peralatan Penanggulangan Bencana	Unit	-	17	22	20	42
6	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kali	1	1	1	1	1
7	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kali	1	1	1	1	1

Sumber: BPBD Kota Mataram dan Bakesbangpol Kota Mataram, 2015

Dalam mengoptimalkan penanganan konflik, beberapa hal yang dilakukan: i) meningkatkan intervensi kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam rangka mendorong harmonisasi dan mengantisipasi sedini mungkin potensi konflik; ii) secara terus menerus dan aktif memfasilitasi dialog terbuka, menggelar rapat koordinasi, serta melakukan mediasi penanganan konflik; iii) Keberadaan Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA) dan jejaringnya juga dioptimalkan untuk mengantisipasi terjadinya konflik; iv) memfasilitasi program kerja sejumlah Ormas yang merupakan wadah masyarakat untuk membangun pemahaman atas pluralisme dan keberagaman, seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB); v) sosialisasi yang efektif untuk Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) pada 6 kecamatan; dan vii) melakukan musyawarah perdamaian dengan melibatkan tim terpadu bersama dengan Tokoh Masyarakat (Toma) dan Tokoh Agama (Toga).

Kota Mataram merupakan salah satu kota di Provinsi NTB yang termasuk dalam zona rawan bencana. Dari 14 jenis bencana yang ada di Indonesia, beberapa jenis berpotensi terjadi di Kota Mataram antara lain: longsor, genangan, banjir, gelombang pasang dan tsunami, abrasi pantai, gempa bumi, angin puting beliung, kebakaran, serta konflik sosial.

Dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat Kota Mataram dari ancaman bencana, khususnya gelombang pasang/tsunami, pada tahun 2013 Kota Mataram mendapat bantuan Tower Peringatan Dini Tsunami dari BMKG Pusat kerjasama dengan GIZ yang telah terpasang di halaman Kantor Kelurahan Ampenan Selatan.

Dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana baik pencegahan, pengurangan risiko bencana, mitigasi bencana, peringatan dini, kesiapsiagaan pada pra bencana, maupun pencarian, pertolongan dan evakuasi, pemulihan darurat saat terjadi bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana telah disediakan sarana dan fasilitas penunjang yang memadai agar tujuan penanggulangan bencana untuk penyelamatan dan mengurangi penderitaan korban dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

## 20. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan *Good Governance*.

Tabel 2.39

### Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Realisasi PAD	Rp. (juta)	82.423,87	95.919,78	139.877,15	202.589,30	210.004,03
2	Persentase Capaian PAD terhadap target	%	136,21	121,66	111,94	126,23	97,40
3	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon	%	82,33	84,56	70,10	65,36	94,95
4	Jumlah pelanggaran disiplin PNS	Kasus	9	11	8	10	10
5	Presentase <i>bezeting</i> pegawai	%	80,13	82,31	84,82	80,91	97,13
6	Monev perijinan pada bagian ekonomi (SITU, HO)	Izin	375	416	555	975	975
7	Penyaluran Raskin Yang Tepat Sasaran	RTS	29.316	29.309	28.533	28.533	28.502
8	Penetapan Perda APBD Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100
9	Jumlah pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) / E-Procurement.	Paket	69	79	57	58	58
10	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.	Orang	80	115	120	87	87
11	Perangkat Daerah yang mempunyai SPM & SOP	SKPD	13	13	15	15	15
12	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	-	0,43	0,47	0,49	0,51	0,55
13	Rasio Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	-	-	-	-	0,0186	0,0186
14	Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan	-	-	-	-	0,20	0,36
15	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	-	-	-	-	-	Website BPMP2T
16	Cakupan patroli petugas Satpol PP	%	90	90	90	90	90
17	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Orang	-	-	-	186	186
18	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	%	100	100	100	100	100
19	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	15	15	15	14
20	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik	%	86	86	88	90	92

Sumber: Dipenda, Setda Kota, Satpol PP, BKD. BPKAD, 2015

Potensi PAD menjadi semakin meningkat sejak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena diberikannya kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memungut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya menjadi kewenangan pusat. Kedua komponen ini memberikan peningkatan yang signifikan bagi peningkatan PAD secara keseluruhan.

Prosentase capaian target PAD terhadap target, pada tahun 2015 terealisasi sebesar 97,40%. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014 sebesar 129,76%, angka capaian tahun 2015 lebih realistis dimana pola penghitungan yang dilakukan sudah mendekati dari peta potensi sumber pendapatan yang sebenarnya dapat dikelola sebagai penerimaan daerah.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang berakibat pada promosi jabatan sebanyak 33 orang dari berbagai tingkatan eselon, sehingga dibutuhkan penyesuaian kompetensi jabatan dengan diklat kepemimpinan sesuai eseloneringnya

Dilihat dari data-data yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama rasio pelanggaran disiplin ASN tercapai 100% dari target kasus 12 dapat ditekan hanya 10 kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat pada tahun 2015. Penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN baik tingkat sedang dan berat tersebut merupakan dampak positif adanya kejelasan pemberian sanksi bagi ASN yang melakukan tindak pelanggaran disiplin ASN.

Realiasi capaian target *bezetting* pegawai sebesar 80.91% dari target sebesar 95% dan capaian kinerja tahun 2015 sebesar 85.17%. Tidak dapat terpenuhinya target yang diharapkan pada capaian kinerja tahun 2015 disebabkan beberapa hal, antara lain: adanya ketentuan Pemerintah Pusat melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang memberlakukan kebijakan moratorium penerimaan CPNS di tahun 2015; meningkatnya kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram yang awalnya Rumah Sakit Tipe C menjadi Tipe B; pemenuhan tenaga pendidikan untuk sekolah yang baru dioperasikan (SMPN 24 Kota Mataram).

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah tersebut, maka Pemerintah Kota Mataram telah menyusun formasi CPNS dengan mempertimbangkan azas *zero growth* yaitu pengangkatan CPNS yang didasarkan pada perhitungan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun (purna tugas).

Dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kelembagaan DPRD, keberadaan Sekretariat DPRD sebagai salah satu lembaga daerah sangat diperlukan. Peran lembaga ini diarahkan untuk peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sehingga dapat mewujudkan

hubungan yang harmonis antara Eksekutif (Pemerintah Kota Mataram) dengan Legislatif (DPRD Kota Mataram).

Upaya meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang lembaga legislatif, dilaksanakan dengan beberapa kegiatan antara lain Penyusunan Peraturan Daerah, hearing/dialog dan koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama, rapat-rapat alat kelengkapan dewan, rapat paripurna, kunjungan kerja, kegiatan panitia khusus dan fraksi-fraksi DPRD, kegiatan reses dan pelayanan bantuan hukum Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan kinerja program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui pemberian bantuan modal usaha pada kelompok-kelompok usaha yang ada di Kota Mataram mengalami peningkatan dalam jumlah kelompok penerima pada tahun 2014 sebesar 1.284 kelompok usaha menjadi 1.908 kelompok usaha tahun 2015.

Pelaksanaan penyaluran Beras Miskin (Raskin) telah ditetapkan data penerima Raskin oleh BPS, diman jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang ditetapkan untuk Kota Mataram sebanyak 28.533 RTS.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penyusunan APBD setelah proses perencanaan. Ketepatan waktu dalam penetapan APBD menjadi hal penting guna kelancaran pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan APBD tepat waktu setiap tahunnya.

Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, dengan semangat reformasi pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dimana disebutkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang saat ini dalam penyusunannya wajib mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan ketiga regulasi tersebut pada pada tahun 2010 Pemerintah menerbitkan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah yang merupakan revisi dari

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dimana Peraturan pemerintah dimaksud mewajibkan penerapan akuntansi berbasis akrual oleh Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah dari yang sebelumnya “berbasis kas menuju akrual” dan ditegaskan pula dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh paling lambat Tahun Anggaran 2015.

Dalam melakukan penyesuaian penerapan peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2014 melalui BPKAD Kota Mataram membangun Sistem Informasi Manajemen Barang Persediaan (SimBaPers) dalam rangka pencatatan persediaan yang mendukung Sistem Informasi yang telah dibangun sebelumnya, yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SimDa). Aplikasi tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga Pemerintah dalam penyediaan Teknologi Informasi (BPKP, Depdagri, Depkeu) dalam penyediaan Sistem informasi Pengelolaan keuangan. Sistem informasi yang telah dibangunpun tetap dibenahi guna mengakomodir solusi permasalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Sampai dengan akhir tahun 2014, Simda telah dikembangkan menjadi versi 2.7. dimana aplikasi ini mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual dan terintegrasi dengan pencatatan barang milik daerah dalam rangka memenuhi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Dalam upaya penanganan masalah Hukum dan HAM dilakukan 4 kali Konsultasi Publik dan 6 kali publikasi produk hukum daerah selama tahun 2013. Guna peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan aparatur dan masyarakat dalam menegakkan nilai-nilai HAM telah tersusun Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) yang menjadi dasar pelaksanaan harmonisasi nilai-nilai HAM ke dalam program dan kegiatan Pemerintah Kota Mataram.

Disamping itu, Penegakan Peraturan Daerah sebagai bagian penting pelaksanaan kebijakan daerah terus digalakkan, mulai dari tahapan sosialisasi yang intensif, uji coba, dan penerapan produk hukum daerah tersebut. Tim penegakan PERDA berupa tim operasional 20 orang. Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.40

**Jumlah Produk Hukum Daerah yang Ditetapkan Tahun 2011-2015**

Produk Hukum	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Peraturan Daerah Kota Mataram	19 Perda	11 Perda	11 Perda	10 Perda	16 Perda
Peraturan Walikota Mataram	42 Perwal	45 Perwal	41 Perwal	52 Perwal	32 Perwal
Keputusan Walikota Mataram	699 Keputusan	825 Keputusan	984 Keputusan	1212 Keputusan	900 Keputusan

Sumber : Bagian Hukum Setda Kota Mataram Tahun 2015

Pada Tahun Anggaran 2014 jumlah paket lelang yang sudah ditenderkan sejumlah 58 paket, dan Tahun Anggaran 2015 jumlah paket yang melalui proses lelang sejumlah 40 Paket.

Jumlah ASN yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pada tahun 2014 sebanyak 87 orang, sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 126 orang, bertambah sebanyak 39 orang. Hal tersebut disebabkan adanya ASN yang memperpanjang sertifikat sehingga dapat dipakai untuk menggantikan ASN yang menduduki Jabatan Struktural di Perangkat Daerah masing-masing dan ASN yang telah memasuki masa pensiun.

## 21. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan Urusan Wajib Ketahanan Pangan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya efektifitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah.

Tabel 2.41  
**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Ketahanan Pangan  
 Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	%	-	-	-	-	63,72
2	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	%	-	139.89	148.26	171,78	235,50
3	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	-	100	100	100	100
4	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	-	-	100	100	50	100
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	-	71.90	77.20	80,80	82,13
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	-	100	100	50	100
7	Cakupan Bina Kelompok Petani	%	55.00	63.00	70.00	77,00	84,00
8	Cakupan layanan penyuluhan	%	66.29	66.79	67.23	68,17	80,00
9	Regulasi ketahanan pangan	regulasi	-	-	-	1	2

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan dan BP4K Kota Mataram, 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa kinerja indikator utama urusan wajib ketahanan pangan rata-rata sudah tercapai. Untuk diketahui bahwa penyusunan PPH berdasarkan data tahun sebelumnya, sehingga PPH yang disusun pada tahun 2014 merupakan data PPH pada tahun 2013. Pada tahun 2014, Kinerja Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan mengalami penurunan sebesar 50 persen dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai realisasi 100 persen. Hal ini didasarkan dari hasil uji laboratorium yang dilaksanakan oleh Laboratorium MIPA Universitas Mataram terdapat 2 sampel produk segar yang terkontaminasi oleh polutan, tetapi masih berada dibawah ambang Batas Maksimum Residu (BMR) sesuai standar yang berlaku untuk dikonsumsi.

Untuk Penanganan Kerawanan Pangan sesuai SPM mencapai 100 persen dengan mengacu data SKPG, data peta kerawanan pangan dan data jumlah keluarga prasejahtera.

Peningkatan Cakupan bina kelompok petani pada tahun 2014 sebesar 7 persen dari tahun 2013, disebabkan oleh peningkatan pelatihan tani dan agrobisnis, penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis, pembinaan dan pendampingan kelompok tani, pemberdayaan dan pendampingan keluarga tani miskin/Gakin (Program peningkatan kesejahteraan petani).

Peningkatan kapasitas Balai Penyuluhan Kecamatan sebagai posko pelaksanaan pembangunan pertanian, dan peningkatan penumbuhan dan pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya melalui Pos Penyuluhan Desa. Dengan peningkatan jumlah kelompok tani dan gapoktan, pada Tahun 2015 menargetkan cakupan layanan penyuluhan sebesar 80 persen.

## **22. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan modal kepada pokmas yang telah disalurkan kepada 50 Kelompok Masyarakat (Pokmas) guna meningkatkan kemampuan manajerial pokmas dalam pengelolaan unit usahanya, kepada 50 orang anggota Pokmas diberikan pelatihan manajemen pemasaran dan keuangan. Hingga tahun 2015, sebanyak 150 anggota Pokmas telah mengikuti pelatihan. Untuk perbaiki kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak pada tingkat posyandu, dilaksanakan bimbingan teknis kepada 56 orang kader posyandu.

Masih terkait dengan upaya peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, dilaksanakan pemberian bantuan beras kepada 2.000 orang warga jompo/lansia. Dengan bantuan ini diharapkan dapat mengurangi kesulitan mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Selain capaian program dan kegiatan di atas, salah satu capaian program dan kegiatan lainnya yang tak kalah penting adalah terlaksananya rehabilitasi rumah tidak layak huni sejumlah 1.175 unit, sehingga sampai dengan tahun 2014 sebanyak 1.089 unit yang tersebar di beberapa kelurahan di Kota Mataram. Untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas sanitasi serta pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, dilaksanakan program pengadaan MCK dan sarana air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sanitasi dasar dan air bersih.

Tabel 2.42

**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	50	50	50	50	50
2	Jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	57	57	56	56	56
3	Jumlah PKK aktif	Kelompok	23	23	37	47	56
4	Posyandu aktif	Kelompok	342	343	343	346	364
5	Jumlah Lembaga Keswadayaan Masyarakat	LKM	50	50	50	50	50
6	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	90	90	90	90	90

Sumber: BPM Kota Mataram, 2015

### 23. Urusan Wajib Statistik

Penyelenggaraan Urusan Wajib Statistik diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), melalui penyediaan data dan informasi sebagai bahan acuan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Tabel 2.43

**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Statistik Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan	%	85,00	85,00	85,00	85,00	94,54
2	Buku "Mataram dalam angka"	Ada/ Tidak Ada	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
3	Buku "PDRB Kota Mataram"	jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis

Sumber: Bappeda Kota Mataram, 2015

Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dan mudah diakses menjadi salah satu elemen penting dalam proses perencanaan pembangunan. Data dan informasi statistik untuk menunjang proses perencanaan pembangunan yang tersedia pada tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 2.44

**Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2015**

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Dokumen Statistik Daerah	12 Dokumen	- Daerah Dalam Angka - Kecamatan dalam Angka - Indikator Kesejahteraan Rakyat - Produk Domestik Regional Bruto - Indeks Pembangunan Manusia

Sumber: Bappeda Kota Mataram, 2015

## 24. Urusan Wajib Kearsipan

Penyelenggaraan Urusan Wajib Kearsipan, diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan *Good Governance*.

Pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan selama tahun 2015 antara lain penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah melalui pengadaan sarana pengolahan, penyimpanan arsip dan penataan dokumen/arsip daerah. Selain itu untuk menunjang ketertiban penyelenggaraan kegiatan kearsipan, berpedoman pada Peraturan Walikota Mataram Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan. Dalam upaya mewujudkan tata kelola arsip dilaksanakan pelatihan bimbingan teknis kearsipan yang diperuntukan kepala sekola TK dan SD/MI seKota Mataram yang diikuti oleh 187 kepala sekolah dan Diklat Penciptaan Arsiparis untuk Perangkat Daerah dan sekolah dimana Kota Mataram mengirimkan peserta sebanyak 13 orang, dengan diklat ini diharapkan adanya peningkatan kemampuan aparatur dalam pengelola arsip Perangkat Daerah secara mandiri, efektif dan efisien.

Tabel 2.45  
**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Kearsipan  
Tahun 2012 - 2015**

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase Perangkat Daerah Pengelolaan arsip secara baku	%	50	50	65	85	100
2	Peningkatan SDM Perangkat Daerah pengelola kearsipan	kegiatan	7	9	10	11	13

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram, 2015

## 25. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan.

Tabel 2.46  
**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika  
Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah jaringan komunikasi	jaringan	-	-	-	-	40
2	Rasio Warnet terhadap penduduk	%	14	73	54	32	25
3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Surat kabar	-	7	7	7	7
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Stasiun	-	-	-	-	43
5	Web site milik pemerintah daerah	Jaringan	-	1	1	17	25
6	Pameran/expo	kegiatan	-	-	-	-	4

Sumber: Dishubkominfo, Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Mataram, 2015

Sampai dengan tahun 2015 jaringan komunikasi dan informasi antar Perangkat Daerah yang telah memiliki dan mengoperasikan jaringan internet untuk mendukung kemudahan akses informasi di lingkungan internal maupun eksternal sebanyak 26 Perangkat Daerah, 6 kecamatan dan 15 kelurahan. Selain Perangkat Daerah, jaringan internet juga telah terpasang di taman kota seperti Taman Sangkareang. Kedepan akan diperluas pada taman kota lainnya.

Selain upaya pengembangan jaringan, dilakukan pula pengembangan sistem informasi, melalui peningkatan kapasitas bandwidth internet dan upgrading program aplikasi website dan hosting/domain yang disewa, serta mulai digunakannya layanan SMS kepada seluruh pegawai Pemerintah Kota Mataram dan masyarakat dalam menyampaikan informasi layanan publik. Selain itu, untuk memberikan pedoman dalam pengembangan sistem dan pemberian pelayanan informasi telah disusun pedoman master plan, *blue print* dan SOP TIK.

Adapun bentuk inovasi percepatan pelayanan Penanganan gawat darurat Pemerintah Kota Mataram bekerjasama dengan Kementerian Kominfo melakukan penyatuan semua nomor informasi gawat darurat yang selama ini masih beragam menjadi satu nomor tunggal panggilan darurat (*single emergency number*) 112.

## 26. Urusan Wajib Perpustakaan

Pembangunan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan “BUDAYA GEMAR MEMBACA” dan kualitas layanan perpustakaan, baik dalam hal akses dan kapasitas, serta utilitas yang memadai melalui sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan, promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan dan pola partisipasi industri penerbitan dan masyarakat dalam membentuk KOMUNITAS BACA.

Capaian indikator pembangunan Urusan Wajib Perpustakaan, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.47  
**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Wajib Perpustakaan  
 Di Kota Mataram Tahun 2011 – 2015**

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah perpustakaan	Unit	115	136	147	158	187
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	23.154	25.136	26.113	27.549	30.513
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eksemplar	32.514	35.213	36.251	47.026	49.883

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram, 2015

Capaian urusan wajib perpustakaan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, dengan jumlah pengunjung perpustakaan meningkat sebesar 2.964 orang menjadi sebesar 30.513 orang pada tahun 2015. Optimalisasi cakupan layanan perpustakaan dilakukan dengan layanan Perpustakaan Keliling sebanyak satu unit yang merupakan bantuan dari Perpustakaan Nasional RI. Sebagai alternatif pilihan masyarakat untuk mengakses perpustakaan, keberadaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sebanyak 12 unit dapat memperpendek jarak layanan perpustakaan bagi masyarakat.

## 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

### 1. Urusan Pilihan Pertanian

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Pertanian diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya efektifitas pemenuhan kebutuhan pangan.

Capaian indikator pembangunan Urusan Pilihan Pertanian, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.48  
**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pilihan Pertanian  
 Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Produktifitas rata-rata Padi	Kw/Ha	53,29	53,43	56,26	58,26	64,16
2	Produktifitas rata-rata kedelai	Kw/Ha	17,36	10,15	9,45	10,45	19,44
3	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	3,37	4,81	4,53	4,31	4,12

Sumber: Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, 2015

Kondisi lahan pertanian di Kota Mataram saat ini tersebar di 6 Kecamatan. Ketersediaan jumlah areal pengembangan pertanian antar kecamatan satu dengan yang lainnya mengalami perbedaan yang disebabkan oleh perubahan fungsi lahan dan perbedaan luas kawasan. Hal ini karena ditunjang dengan adanya pengadaan bibit bermutu dan pupuk kepada kelompok tani, pembinaan dan penyuluhan kelompok tani serta pengadaan sarana prasarana seperti jalan usaha tani, mesin traktor, sumur bor, dan mesin air.

Dengan keterbatasan lahan pertanian di Kota Mataram, produksi hasil panen tetap dipertahankan dengan komoditas unggulan yaitu kedelai. Hal ini dapat tercapai melalui intensifikasi pertanian, bahkan Kelompok Petani Kedelai Kota Mataram dapat meraih juara nasional. Kinerja urusan Pilihan Pertanian dapat terlihat dari meningkatnya realisasi rata-rata produktifitas padi terhadap target yang dicanangkan pada tahun 2015.

## 2. Urusan Pilihan Pariwisata

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Pariwisata diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya efektifitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

Capaian indikator pembangunan Urusan Pilihan Pariwisata, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.49  
**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pilihan Pariwisata  
Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB	%	19,55	21,58	22,21	22,76	23,22
2	Angka kunjungan wisatawan	Orang	223.590	285.249	399.272	429.325	427.725

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, 2015

Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB Kota Mataram terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015. Perkembangan positif ini sejalan dengan geliat pembangunan di Kota Mataram sebagai pusat perdagangan dan jasa.

Disisi lain, penataan dan restrukturisasi kawasan pantai dan Kota Tua Ampenan serta kawasan destinasi dan situs bersejarah, menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk lebih mengenal Kota Mataram. Upaya peningkatan kunjungan wisatawan dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan Luar Negeri, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Pengembangan Jenis Paket Wisata Unggulan.

## 3. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya efektifitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah.

Capaian indikator pembangunan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.50  
**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan  
Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Thn	22,94	20,54	23	27,94	31,54
2	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1,688,3	1,639,5	1,635,8	1,669,8	1.800,00
3	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	244,63	256,472	269,71	284,18	320,15

Sumber: Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, 2015

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi ikan dilakukan melalui kampanye gerakan masyarakat gemar makan ikan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Peningkatan konsumsi ikan masyarakat disertai pula dengan ketersediaan ikan di pasaran, dimana peningkatan produksi perikanan tangkap ditunjang adanya penyediaan sarana dan prasarana perikanan seperti motor tempel, kapal motor, pukot kantong, jaring insang, jaring angkat dan pancing.

Dari sisi kinerja produksi perikanan budidaya air tawar juga terjadi peningkatan. Kenaikan tersebut didukung adanya upaya Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya yang ditargetkan pada kelompok pembudidayaan ikan air tawar serta melalui perluasan area pembudidayaan air tawar seperti keramba, kolam dan mina padi.

#### 4. Urusan Pilihan Perdagangan

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Perdagangan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya efektifitas pengembangan usaha di Kota Mataram.

Capaian indikator pembangunan Urusan Pilihan Perdagangan, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.51  
**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pilihan Perdagangan  
 Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Usaha Perdagangan	Unit usaha	15.516	1.487	1.523	1.687	1.687
2	Tingkat Inflasi	%	6,38	4,10	9,27	7,18	3,25
3	Penataan PKL	Titik	11	11	14	19	22
4	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,55	18,78	19,15	19,36	24,92

Sumber: BPS Kota Mataram dan Dinas Koperindag Kota Mataram, 2015

Perkembangan usaha di Kota Mataram menunjukkan pertumbuhan yang signifikan berdasarkan jumlah SIUP, TDP, TDI, TDG, IUI yang diterbitkan. Upaya yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi serta perkembangan harga sembako dan komoditas strategis lainnya di Kota Mataram pada 4 (empat) pasar tradisional serta melalui koordinasi yang intensif oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Mataram.

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Permendagri disebutkan bahwa tujuan penataan PKL adalah untuk memberikan

kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha mikro yang tangguh dan mandiri; dan untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Dalam upaya mengimplementasikan peraturan tersebut, Pemerintah Kota Mataram telah melaksanakan penataan titik-titik PKL.

## 5. Urusan Pilihan Industri

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Industri diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

Tabel 2.52  
**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pilihan Industri  
 Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	PDRB sektor industri pengolahan ADH Konstan	(juta)	276.474,71	293.450.26	307.858,67	326.207,05	347.207,05
2	Perkembangan jumlah IKM :						
	a. Formal	Unit Usaha	1.558	1.693	1.867	1.947	2.083
	b. Non Formal	Unit Usaha	1.545	1.592	1.650	1.707	1.717
3	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	11.72	11.16	10.80	10.49	9.16

Sumber: BPS Kota Mataram dan Dinas Koperindag Kota Mataram, 2015

Peningkatan PDRB sektor industri pengolahan sejalan dengan pesatnya perkembangan sektor-sektor Industri Kecil Menengah di Kota Mataram baik industri formal maupun industri non formal. Pemberian kemudahan ijin usaha serta jaminan dukungan kerjasama kemitraan usaha industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta dan perbankan berkontribusi positif dalam peningkatan PDRB sektor Industri Pengolahan.

Dalam mengembangkan potensi unggulan daerah, telah dilakukan berbagai upaya, yaitu: meningkatkan potensi unggulan daerah pada masing-masing kelurahan, meningkatkan penyelenggaraan serta keikutsertaan dalam event-event pemasaran hasil produksi unggulan daerah, menjaga stabilitas ekonomi daerah, pembinaan IKM serta kemampuan teknologi industri, kemudahan ijin usaha, bantuan peralatan, Pengembangan Ekonomi Produktif dan Fasilitasi kerjasama kemitraan IKM dengan swasta.

## 6. Ketrasmigrasian

Urusan Wajib Transmigrasi diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat melalui pengirim transmigran mengingat Kota Mataram bukan sebagai tujuan lokasi transmigrasi.

---

## 2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

---

### 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### A. Ekonomi Makro Daerah

Selama kurun waktu 2012-2015, konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan yang signifikan baik dalam nominal (ADH Berlaku) maupun riil (ADH Konstan) sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga.

Demikian juga halnya dengan nilai konsumsi rumah tangga ADH Konstan (2010), pada tahun 2015 terjadi kenaikan yang signifikan Untuk lebih jelasnya, perkembangan nilai konsumsi rumah tangga dari tahun 2012 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.53

#### Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Mataram Tahun 2011-2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (juta Rp)	6.080.212	6.967.254	7.598.806	8.396.521	9.556.083
b. ADHK 2010 (juta Rp)	5.975.280	6.477.548	6.842.339	7.221.292	7.709.394
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	76,36	76.36	74.87	72.18	70.12
Pertumbuhan (persen)	5,90	5.90	5.63	5.54	6.76

Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

#### B. Keuangan Daerah

APBD Kota Mataram TA. 2015 sebesar Rp.1.211.783.220.893,93 dengan tingkat capaian realisasi sebesar Rp.1.188.895.201.828,50 atau 98,11 persen meningkat jika dibandingkan realisasi APBD Kota Mataram TA. 2014 sebesar Rp. 1.083.110.566.585,00.

Realisasi PAD pada TA. 2015 mencapai Rp. 225.076.368.908,94 atau 104,40 persen dari target sebesar Rp. 215.599.750.389,00.

Dana Perimbangan pada TA. 2015 sebesar Rp.768.786.761.000,00, dengan realisasi mencapai Rp.757.189.767.596,00 atau 98,49 persen dari target tahun 2015.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada TA. 2015 sebesar Rp. 227.396.709.504,93 dan terealisasi sebesar 90,87 persen atau sebesar Rp. 206.629.065.323,56.

Realisasi penerimaan Pendapatan Daerah TA. 2015 pada komponen PAD mencapai sebesar 104,40 persen, Dana Perimbangan sebesar 98,49 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 90,87 persen.

Kinerja pendapatan daerah dapat diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah. Indikator ini dihitung dari persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah maka akan diketahui seberapa besar lokal taxing power suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Grafik 2.14.  
**Komposisi Realisasi Pendapatan  
Tahun 2011 - 2015 (%)**



Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

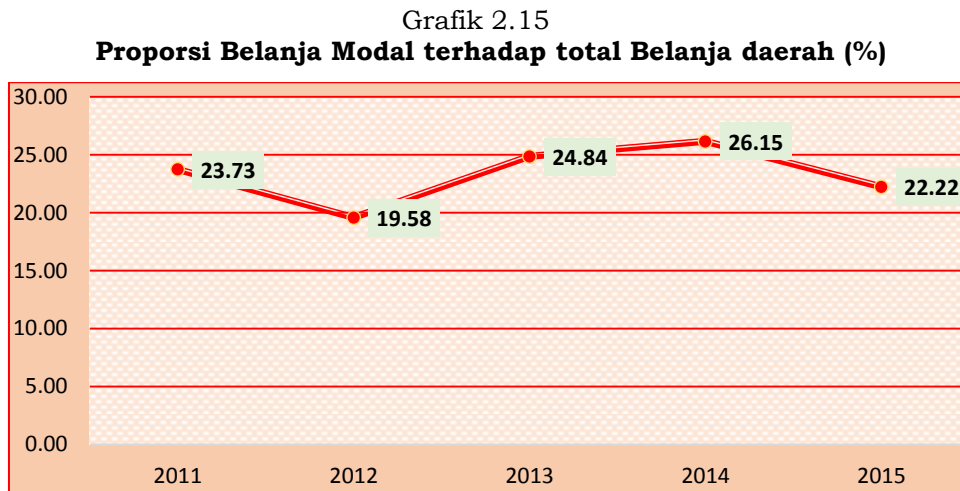
Berdasarkan Grafik di atas terlihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah meningkat cukup signifikan, bahkan kontribusi PAD yang pada tahun 2011 hanya sebesar 12,12% menjadi 18,93% pada Tahun 2015. Hal ini menunjukkan kemandirian daerah meningkat relatif pesat dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di Kota Mataram.

Sesuai amanat amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014, Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBD sekurang-kurangnya 30 persen dari belanja daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran Belanja Modal mendekati 30 persen pada APBD periode 2011-2015. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Mataram untuk memperhatikan alokasi anggaran pada belanja investasi yang produktif.

Untuk rasio terhadap total belanja daerah, Rasio Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah mencerminkan porsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk membiayai Belanja Modal. Realisasi Belanja Modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya,

semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah Kota Mataram dari tahun 2011-2015 terlihat pada Grafik berikut:



Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

#### 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Kemampuan suatu daerah untuk dapat bersaing dalam pembangunan juga diukur dari ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Kota Mataram tidak dapat dilepaskan dari kota-kota disekelilingnya, mengingat mobilitas penduduk antar kota antar wilayah yang sangat tinggi di Kota Mataram. Selain itu salah satu instrument untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan nasional dengan daerah adalah instrument penataan ruang. Penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang mutlak dibutuhkan dalam rangka menjamin hak kepemilikan setiap orang, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, dan mengelola perkembangan pembangunan yang terjadi, serta mewujudkan tata ruang Kota Mataram yang aman, nyaman dan berkelanjutan.

Perkembangan perekonomian Kota Mataram juga dapat dilihat dari perkembangan kategori usaha Perbankan dan Asuransi, dimana kegiatan perbankan merupakan penunjang semua kegiatan perekonomian masyarakat baik melalui simpanan maupun kredit yang tersalurkan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat pada perkembangan kategori usaha akomodasi dan konsumsi, yang menandakan kegiatan ekonomi masyarakat semakin berkembang.

Aspek daya saing daerah juga dilihat dari aspek aksesibilitas air bersih kepada masyarakat, ditandai oleh tingkat kelayakan hidup masyarakat pada suatu daerah, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.54

**Capaian Aspek Daya Saing Daerah Kota Mataram  
Dalam Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Tahun 2011-2015**

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>						
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	-	-	-	-	10,09
1.2.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang/ barang	618.146	652.905	643.119	522.442	532.323
1.3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/terminal per tahun	orang	618.146	652.905	643.119	522.442	532.323
<b>2</b>	<b>PENATAAN RUANG</b>						
2.1.	Luas wilayah produktif	ha	2.843,21	2.819,42	2.763,49	2.748,21	2.733,62
2.2.	Luas wilayah industri	ha	51,75	51,75	51,75	51,75	51,75
2.3.	Luas wilayah kebanjiran	-	-	-	-	-	-
2.4.	Luas wilayah kekeringan	-	-	-	-	-	-
2.5.	Tanah Peruntukan	Ha	125,81	125,81	129,88	129,88	129,88
<b>3</b>	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN</b>						
3.1.	Jenis dan jumlah umum pemerintah dan swasta	kantor	-	24	24	28	29
3.2.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	kantor	-	11	11	11	12
3.3.	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	restoran	-	183	206	211	242
3.4.	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	Unit	Hotel Bintang: 10, Hotel Non Bintang : 64	Hotel Bintang: 12, Hotel Non Bintang: 72	Hotel Bintang: 13, Hotel Non Bintang: 79	Hotel Bintang: 19, Hotel Non Bintang: 96	Hotel Bintang: 21, Hotel Non Bintang: 102
<b>4</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>						
4.1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	87,70	85,61	69,70	68,24	67,34

### 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Ukuran lain yang dapat menggambarkan perekonomian wilayah adalah besarnya investasi swasta yang masuk (PMA dan PMDN). Dalam era otonomi daerah, persaingan investor asing cenderung semakin ketat. Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan investasi di daerahnya tidak hanya yang berskala besar seperti dilakukan oleh PMA atau PMDN, namun investasi yang dilakukan masyarakat menengah ke bawah juga sangat penting karena dengan bertambahnya investasi diharapkan akan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga nantinya masalah pengangguran dapat teratasi.

Berdasarkan analisis PDRB Kota Mataram menurut Pengeluaran dijelaskan bahwa aktivitas investasi fisik tercermin pada komponen PMTB. Dari definisinya, PMTB menggambarkan adanya proses penambahan dan pengurangan barang modal pada tahun tertentu. PMTB disebut sebagai brutto karena di dalamnya masih terkandung unsur penyusutan, atau nilai barang modal sebelum diperhitungkan nilai penyusutannya. Mengacu pada hasil penghitungan PMTB yang dilakukan, perkembangan investasi di Kota Mataram menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2015

tercatat peningkatan PMTB sebesar Rp. 627.657.668.000 dari Rp. 3.138.288.340,000 pada tahun 2014 menjadi Rp. 3.765.946.008.000.

Peningkatan nilai investasi yang cukup signifikan mengindikasikan iklim keamanan yang kondusif, serta peran aktif semua pihak dalam meningkatkan minat investor dalam menanamkan modalnya di Kota Mataram. Besarnya nilai investasi yang masuk juga memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan perekonomian Kota Mataram.

Bidang usaha investasi yang telah ada saat ini antara lain:

- Jasa Telekomunikasi Seluler,
- Perdagangan (ekport-import),
- Jasa rekreasi wisata,
- Jasa konsultansi pengembangan bisnis dan manajemen,
- Biro perjalanan wisata, dan,
- Jasa penyediaan gedung perkantoran dan pusat bisnis.

Adapun perkembangan aspek daya saing daerah Kota Mataram dalam Fokus Iklim Berinvestasi dapat dilihat pada data berikut:

Tabel 2.55  
**Capaian Aspek Daya Saing Daerah Kota Mataram  
dalam Fokus Iklim Berinvestasi Tahun 2011-2015**

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN</b>						
Angka kriminalitas	kasus	-	-	-	1.282	1.143
Jumlah demo	Kali/tahun	-	20	24	21	18
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	macam	-	Pajak: 10; Retribusi 16	Pajak: 10; Retribusi 16	Pajak: 10; Retribusi 16	Pajak: 10; Retribusi 16
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	jenis	6 Perda	9 Perda	9 Perda	9 Perda	9 Perda
Lama proses perijinan:						
- IMB	Hari	30	30	30	30	30
- PIMB	Hari	30	30	30	30	14
- ILOK	Hari	30	30	30	30	30
- SITU MB	Hari	30	30	30	30	14
- HO	Hari	30	30	30	30	14
- SIUP	Hari	7	7	7	7	3
- TDP	Hari	7	7	7	7	3
- TDG	Hari	7	7	7	7	7
- TDI/IUI dan Perluasan	Hari	7	7	7	7	7
- IUJK	Hari	14	14	14	14	7
- Ijin Hotel	Hari	14	14	14	14	14
- Ijin Rumah Makan	Hari	14	14	14	14	14
- Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	Hari	14	14	14	14	14
- Ijin Usaha Jasa Pariwisata	Hari	14	14	14	14	14
- Ijin Sewa Lahan	Hari	7	7	7	7	30

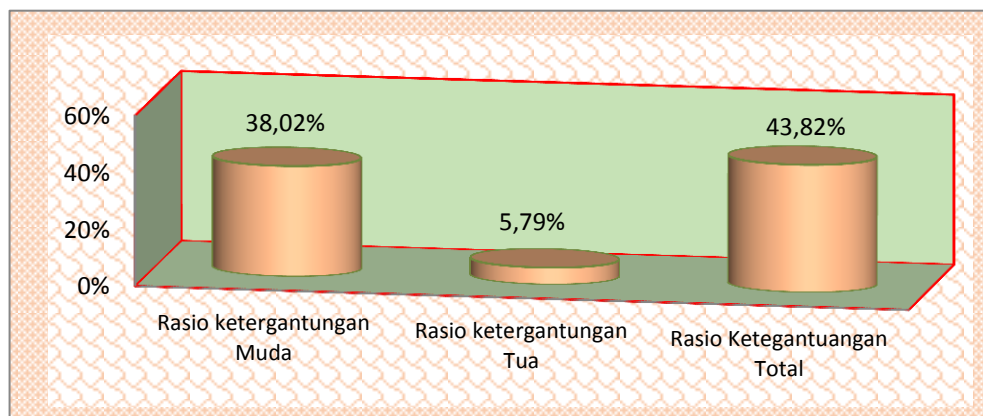
#### 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Mataram juga merupakan aset dalam kemampuan daya saing. Kota Mataram menjadi pusat pendidikan dan pengembangan karir karena fasilitas pendidikan dasar hingga tingkat perguruan tinggi sudah tersedia secara memadai, pusat kegiatan pemerintahan terutama tingkat nasional, provinsi dan Kota, serta pusat kegiatan bisnis dan keuangan.

Tingkat pendidikan tenaga kerja yang lulus strata satu atau lebih menjadi salah satu tolok ukur kualitas tenaga kerja. Begitu pula dengan rasio ketergantungan yang dapat mengukur besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif atau usia kerja di Kota Mataram dengan membandingkan penduduk yang dianggap belum produktif (0-14 tahun) atau sudah tidak produktif lagi (>65 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif atau usia kerja di Kota Mataram dengan membandingkan penduduk yang dianggap belum produktif (0-14 tahun) atau sudah tidak produktif lagi (>65 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Sehingga kebijakan dan program perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar maupun pendidikan. Rasio ketergantungan penduduk Kota Mataram tahun 2015, sebagaimana Tabel berikut:

Grafik 2.16  
**Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Mataram Tahun 2015**



Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

Dari gambaran tersebut, terlihat bahwa rasio ketergantungan penduduk tahun 2015 sebesar 43,83 persen, artinya setiap 100 orang penduduk Kota Mataram yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebesar ± 44 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi, terdiri dari rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 38,04 persen dan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 5,79 persen.

Di lain pihak, dengan proporsi penduduk usia produktif yang besar, akan meningkatkan rasio ketergantungan yang berarti bahwa akan semakin diperlukan juga lapangan pekerjaan di Kota Mataram sebagai bentuk antisipasi dari hal tersebut.

Adapun perkembangan aspek daya saing daerah Kota Mataram dalam Fokus Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada data berikut:

Tabel 2.56  
**Capaian Aspek Daya Saing Daerah Kota Mataram  
 dalam Fokus Sumber Daya Manusia Tahun 2011 - 2015**

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	<b>KETENAGAKERJAAN</b>						
1.1.	Persentase lulusan S1	%	9,10	15,58	13,80	18,14	10,99
1.2.	Persentase ketergantungan	%	44,79	44,76	44,77	44,04	43,83

# BAB 3

## GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah memasuki babak baru dengan mulai diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada tahun 2015 sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengamanahkan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual.

Manfaat bagi pemerintah, antara lain untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penganggaran dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah dengan menggunakan informasi yang lebih luas dan lebih riil, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. dengan basis akrual memungkinkan Pemerintah untuk menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya, menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas.

Momen ini sangat tepat dengan penyusunan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021. Diharapkan dengan data keuangan yang akrual akan lebih menggambarkan keadaan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah secara lebih proporsional dan komprehensif. Gambaran pengelolaan keuangan daerah mencakup gambaran kinerja dan pengelolaan keuangan daerah tahun-tahun sebelumnya (2011-2015), serta beberapa proyeksi kedepan yang diharapkan dapat menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun mendatang.

---

### 3.1. KINERJA KEUANGAN TAHUN 2011-2015

---

#### 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki unsur pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kinerja keuangan daerah dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah meliputi pendapatan asil daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah; Belanja

Daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung, sedangkan Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

### 1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Analisis pendapatan daerah memberikan gambaran kondisi pendapatan daerah yang tercermin dalam APBD. Pendapatan daerah mencakup: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi: Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan, meliputi: Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta 3) Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi: Pendapatan Hibah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram periode waktu tahun 2011-2015 mengalami peningkatan yang signifikan dan berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Daerah, sehingga pemerintah Kota Mataram berupaya maksimal menggali potensi penerimaan daerah yang ditunjukkan dengan peningkatan target pendapatan yang optimis dari tahun ke tahun. Perkembangan target pendapatan daerah periode tahun 2011-2015, sebagaimana Tabel dan Grafik berikut:

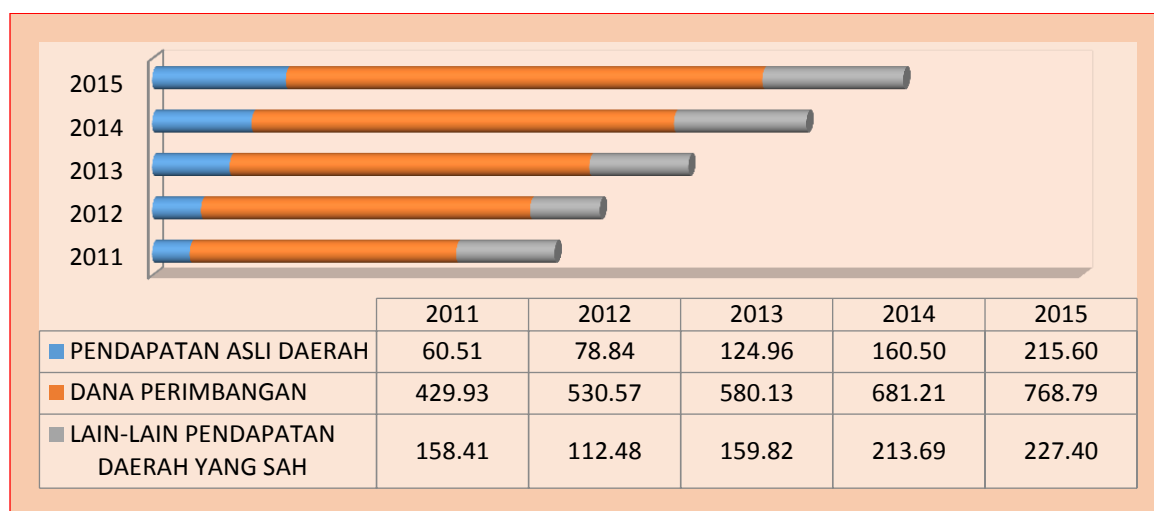
Tabel 3.1.  
Target Pendapatan Tahun 2011 s/d 2015

URAIAN	TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>648.862.491.019</b>	<b>721.899.242.989</b>	<b>864.905.445.373</b>	<b>1.055.390.821.016</b>	<b>1.211.783.220.894</b>	<b>14,40</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	60.514.511.410	78.841.707.800	124.957.834.100	160.495.316.854	215.599.750.389	26,96
Pendapatan Pajak Daerah	31.358.436.000	39.572.230.000	71.550.000.000	83.080.000.000	92.655.000.000	22,42
Hasil Retribusi Daerah	15.541.640.000	15.738.962.000	17.824.074.100	17.918.498.500	19.873.500.000	5,83
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.498.891.250	4.640.515.800	4.640.000.000	7.366.394.354	12.400.826.389	25,55
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.115.544.160	18.890.000.000	30.943.760.000	52.130.424.000	90.670.424.000	42,14
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	429.934.640.378	530.572.582.907	580.130.769.628	681.209.075.681	768.786.761.000	13,44
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37.566.129.378	55.241.728.907	44.741.156.628	64.324.774.681	63.672.014.000	9,49
Dana Alokasi Umum	366.882.411.000	445.894.174.000	500.043.553.000	564.661.391.000	593.930.707.000	11,23
Dana Alokasi Khusus	25.486.100.000	29.436.680.000	35.346.060.000	52.222.910.000	111.184.040.000	28,87
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	158.413.339.231	112.484.952.282	159.816.841.645	213.686.428.481	227.396.709.505	5,01
Pendapatan Hibah	-	-	5.000.000.000	20.000.000.000	9.000.000.000	17,59

URAIAN	TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. dan PEMDA Lainnya	34.442.996.431	32.040.253.282	43.617.605.165	64.634.697.481	76.775.311.505	16,84
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	107.438.542.800	63.662.899.000	98.967.436.480	121.519.931.000	130.989.598.000	-1,83
Bantuan Keuangan Prov. atau Pemda Lainnya	16.531.800.000	16.531.800.000	12.231.800.000	7.531.800.000	10.631.800.000	-17,10
Pendapatan Lainnya	0	250.000.000	0	0	0,00	-

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

Grafik 3.1.  
Target Pendapatan Tahun 2011 s/d 2015 (Milyar Rupiah)



Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

Target yang optimis ini tentu dibarengi dengan upaya dan kerja keras pemerintah Kota Mataram untuk merealisasikannya. Dan keberhasilan upaya tersebut dapat dilihat dari pencapaian pendapatan daerah yang realisasinya secara umum selalui melampaui target dari tahun ke tahun selama periode 2011-2015, hal ini dapat dilihat pada tabel dan Grafik dibawah ini:

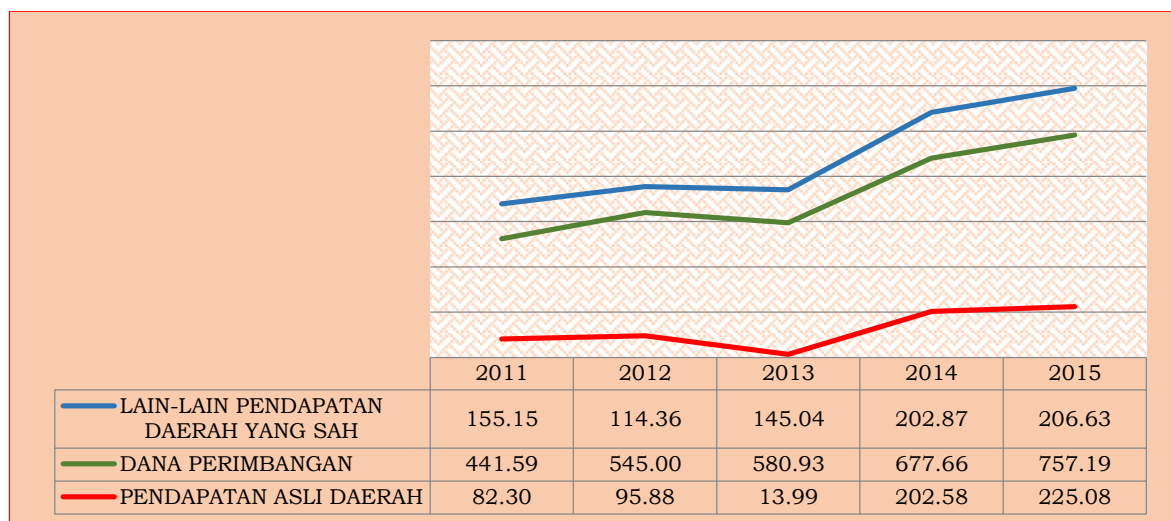
Tabel 3.2.  
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Tahun 2011 s/d 2015

URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>679.040.672.703</b>	<b>755.234.455.557</b>	<b>865.839.838.812</b>	<b>1.083.110.566.585</b>	<b>1.188.895.261.113</b>	<b>12,96</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>82.300.211.074</b>	<b>95.877.364.968</b>	<b>139.877.149.932</b>	<b>202.584.643.687</b>	<b>225.076.428.194</b>	<b>21,64</b>
Pendapatan Pajak Daerah	43.141.033.812	45.596.900.874	79.374.881.763	91.749.599.728	96.844.712.693	16,67
Hasil Retribusi Daerah	14.048.627.262	16.825.136.532	20.251.127.302	20.956.352.907	18.247.789.512	5,49

URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.012.566.423	4.642.764.448	2.759.307.095	8.041.386.510	6.219.928.163	-9,96
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.097.983.577	28.812.563.114	37.491.833.772	81.837.304.542	103.763.997.826	32,18
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>441.594.386.630</b>	<b>544.998.107.529</b>	<b>580.925.364.432</b>	<b>677.658.718.414</b>	<b>757.189.767.596</b>	<b>12,48</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	49.225.875.630	69.667.253.529	45.535.751.432	60.774.417.414	52.075.020.596	-3,82
Dana Alokasi Umum	366.882.411.000	445.894.174.000	500.043.553.000	564.661.391.000	593.930.707.000	11,23
Dana Alokasi Khusus	25.486.100.000	29.436.680.000	35.346.060.000	52.222.910.000	111.184.040.000	28,87
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>155.146.074.999</b>	<b>114.358.983.060</b>	<b>145.037.324.448</b>	<b>202.867.204.484</b>	<b>206.629.065.324</b>	<b>3,95</b>
Pendapatan Hibah	-	0,00	0	11.000.000.000	8.778.000.000	37,34
Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. dan PEMDA Lainnya	31.968.822.624	35.655.984.060	37.042.319.448	72.418.554.484	66.809.067.324	13,63
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	107.406.052.375	63.662.999.000	97.256.605.000	119.413.450.000	130.989.598.000	-1,69
Bantuan Keuangan Prov. atau Pemda Lainnya	15.771.200.000	15.000.000.000	10.700.000.000	0	0	-22,66
Pendapatan Lainnya	0	40.000.000	38.400.000,00	35.200.000,00	52.400.000,00	29,89

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015.

Grafik 3.2.  
Realisasi Pendapatan Tahun 2011 s/d 2015



Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015.

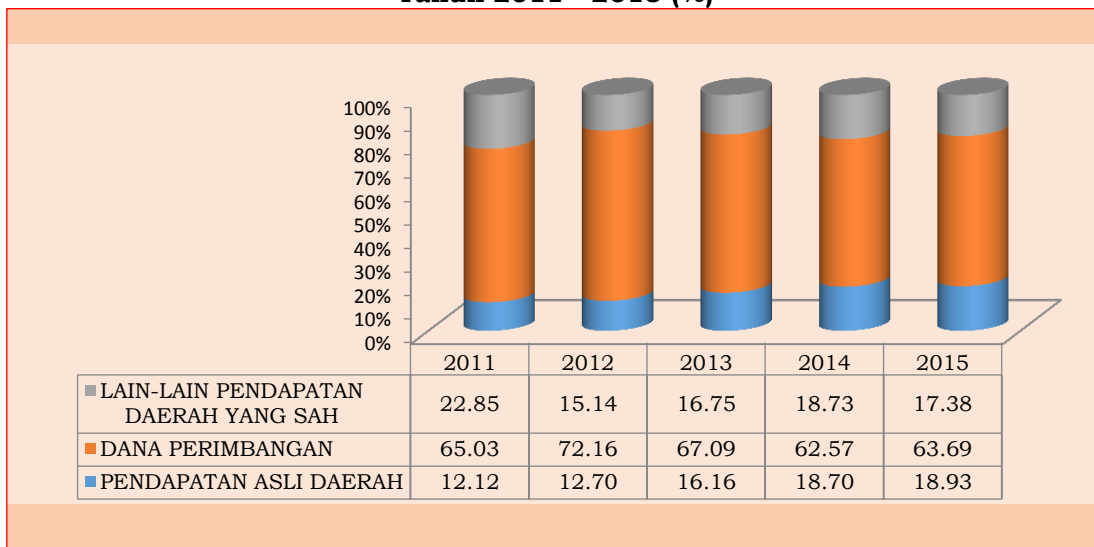
Berdasarkan Tabel 3.2 dan Grafik 3.2 terlihat realisasi pendapatan Pemerintah Kota Mataram terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. ini dapat menjadi ukuran kinerja pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi dan sumber pendapatan. Pendapatan daerah tahun 2011-2015 mengalami peningkatan sebesar Rp.509.854.588.410,69 yaitu dari Rp.679.040.672.702,- tahun 2011 menjadi Rp.1.188.895.261.113,40 tahun 2015. Komponen pendapatan daerah yang meningkat secara signifikan adalah Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 21,64% per tahun dalam kurun waktu 2011-2015. Peningkatan ini

tentu relatif signifikan dan dapat menggambarkan kemampuan daerah yang semakin kuat dalam mengisi *fiscal gap* yang ada.

Bila pendapatan daerah dirinci berdasarkan sumber pendapatan, terlihat bahwa komponen Dana Perimbangan masih memberikan kontribusi terbesar pada pendapatan agregat Kota Mataram. namun dapat dilihat juga bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun serta mempunyai proporsi cukup besar dalam komposisi pendapatan daerah dibandingkan kota/kabupaten lain di Indonesia yang rata-rata persentasenya sebesar sepuluh persen. Dengan menggunakan data keuangan tahun 2011-2015, terlihat kontribusi masing-masing komponen pendapatan Kota Mataram sebagai berikut:

Grafik 3.3.

**Komposisi Realisasi Pendapatan  
Tahun 2011 - 2015 (%)**



Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

Berdasarkan Grafik 3.3. tahun 2011-2015 komposisi realisasi terhadap total pendapatan menunjukkan bahwa secara rata-rata proporsi Dana Transfer 66,11%, Pendapatan Asli Daerah 15,72% dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah 18,17%. Bila dicermati setiap tahun kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat cukup signifikan, bahkan kontribusi PAD yang pada tahun 2011 hanya sebesar 12,12% menjadi 18,93% pada Tahun 2015. Hal ini menunjukkan kemandirian daerah meningkat relatif pesat dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di Kota Mataram.

**a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Kinerja pendapatan daerah dapat diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui

seberapa besar *local taxing power* suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

PAD merupakan salah satu fokus utama Pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan keuangan dan upaya peningkatan kemandirian daerah. Realisasi PAD Kota Mataram menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik, hal ini tergambarkan dari data realisasi PAD tahun 2011-2015 yang selalu melampaui target yang ditetapkan. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.  
**Prosentase Realisasi PAD Kota Mataram Tahun 2011-2015**

URAIAN	CAPAIAN REALISASI PAD (%)					RATA-RATA
	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	136.00	121.61	111.94	126.23	104.40	120.03
Pendapatan Pajak Daerah	137.57	115.22	110.94	110.44	104.52	115.74
Hasil Retribusi Daerah	90.39	106.90	113.62	117.00	91.82	103.94
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	143.26	100.05	59.47	109.16	50.16	92.42
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	198.68	152.53	121.16	156.98	114.44	148.76

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

#### ▪ **Pendapatan Pajak Daerah**

Pendapatan Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, ditargetkan sebesar Rp.318.215.666.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.356.707.128.869,84 atau sebesar **112,10** persen seperti terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.4.  
**Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2011 - 2015**

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2011	31.358.436.000,00	43.141.033.812,00	137,57	11.782.597.812,00
2012	39.572.230.000,00	45.596.900.874,00	115,22	6.024.670.874,00
2013	71.550.000.000,00	79.374.881.763,00	110,94	7.824.881.763,00
2014	83.080.000.000,00	91.749.599.728,00	110,44	8.669.599.728,00
2015	92.655.000.000,00	96.844.712.692,84	104,52	4.189.712.692,84
<b>Jumlah</b>	<b>318.215.666.000,00</b>	<b>356.707.128.869,84</b>	<b>112,10</b>	
<b>Rata-rata Persentase Pencapaian per tahun</b>			<b>115,74</b>	

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

Setiap tahun realisasi pajak daerah Kota Mataram selalu melampaui target, dengan rata-rata persentase pencapaian per tahun sebesar 115,74%, dengan kata lain realisasi pendapatan melampaui target yang ditetapkan rata-rata sebesar 15,74% per tahun.

▪ **Hasil Retribusi Daerah**

Obyek retribusi terdiri dari Retribusi Jasa Umum (Perda Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011), Retribusi Jasa Usaha (Perda Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2011) dan Retribusi Perizinan Tertentu (Perda Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011). Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, ditargetkan sebesar Rp. **86.896.674.600,00** dengan realisasi sebesar Rp. **90.337.033.514,00** atau sebesar **103,96** persen, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.5.

**Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2011 - 2015**

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2011	15.541.640.000,00	14.048.627.262,00	90,39	(1.493.012.738,00)
2012	15.738.962.000,00	16.825.136.532,00	106,90	1.086.174.532,00
2013	17.824.074.100,00	20.251.127.301,00	113,62	2.427.053.201,00
2014	17.918.498.500,00	20.964.352.907,00	117,00	3.045.854.407,00
2015	19.873.500.000,00	18.247.789.512,00	91,82	(1.625.710.488,00)
<b>Jumlah</b>	<b>86.896.674.600,00</b>	<b>90.337.033.514,00</b>	<b>103,96</b>	
<b>Rata-rata Persentase Pencapaian per tahun</b>			<b>103,95</b>	

Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2015

Hampir setiap tahun realisasi retribusi daerah Kota Mataram melampaui target, dengan rata-rata persentase pencapaian per tahun sebesar 103,95%, dengan kata lain realisasi pendapatan melampaui target yang ditetapkan rata-rata sebesar 3,95 % per tahun.

▪ **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari Bagian laba atas penyertaan modal pada PT. BPR NTB Mataram, Bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Bank NTB dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang. Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, ditargetkan sebesar Rp.**32.546.627.793,00** dengan realisasi sebesar Rp.**26.675.952.639,00** atau sebesar **81,96** persen, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.6.

**Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  
Tahun 2011-2015**

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2011	3.498.891.250,00	5.012.566.423,00	143,26	1.513.675.173,00
2012	4.640.515.800,00	4.642.764.448,00	100,05	2.248.648,00
2013	4.640.000.000,00	2.759.307.095,00	59,47	(1.880.692.905,00)
2014	7.366.394.354,00	8.041.386.510,00	109,16	674.992.156,00
2015	12.400.826.389,00	6.219.928.163,00	50,16	(6.180.898.226,00)
<b>Jumlah</b>	<b>32.546.627.793,00</b>	<b>26.675.952.639,00</b>	<b>81,96</b>	
<b>Rata-rata Persentase Pencapaian per tahun</b>			<b>92,42</b>	

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2011-2015 pencapaian targetnya rata-rata sebesar 92,42% per tahun.

▪ **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Dana Kapitasi, dan Pendapatan BLUD. Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, ditargetkan sebesar Rp. **202.750.152.160,00** dengan realisasi sebesar Rp. **272.000.048.842,00** atau sebesar **134,16** persen, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.7.

**Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
Tahun 2011-2015**

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2011	10.115.544.160,00	20.097.983.577,00	198,68	9.982.439.417,00
2012	18.890.000.000,00	28.812.563.114,00	152,53	9.922.563.114,00
2013	30.943.760.000,00	37.491.833.771,00	121,16	6.548.073.771,00
2014	52.130.424.000,00	81.833.670.554,00	156,98	29.703.246.554,00
2015	90.670.424.000,00	103.763.997.826,00	114,44	13.093.573.826,00
<b>Jumlah</b>	<b>202.750.152.160,00</b>	<b>272.000.048.842,00</b>	<b>134,16</b>	
<b>Rata-rata Persentase Pencapaian per tahun</b>			<b>148,76</b>	

Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2015

Setiap tahun realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Mataram selalu melampaui target, dengan rata-rata persentase pencapaian per tahun sebesar 148,76%, dengan kata lain realisasi pendapatan melampaui target yang ditetapkan rata-rata sebesar 48,76% per tahun.

## b) Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus adalah Dana Perimbangan yang merupakan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat. Ketergantungan pemerintah Kota Mataram terhadap dana perimbangan ini masih relatif tinggi mengingat selama kurun waktu 2011-2015 Kota Mataram membiayai pembangunan daerah secara rata-rata menggunakan PAD sebesar 15,72%, Dana Perimbangan sebesar 66,11%, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 18,17%. Rincian dari target dan realisasi dana perimbangan adalah sebagai berikut :

### ▪ Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp.265.545.803.594,00 dengan realisasi sebesar Rp.277.267.950.135,00 atau sebesar 104,41 persen, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.8.  
**Target Dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  
Tahun 2011-2015**

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2011	37.566.129.378,00	49.225.875.630,00	131,04	11.659.746.252,00
2012	55.241.728.907,00	69.667.253.529,00	126,11	14.425.524.622,00
2013	44.741.156.628,00	45.535.751.432,00	101,78	794.594.804,00
2014	64.324.774.681,00	60.764.048.948,00	94,46	(3.560.725.733,00)
2015	63.672.014.000,00	52.075.020.596,00	81,79	(11.596.993.404,00)
<b>Jumlah</b>	<b>265.545.803.594,00</b>	<b>277.267.950.135,00</b>	<b>104,41</b>	
<b>Rata-rata Persentase Pencapaian per tahun</b>			<b>107,04</b>	

Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2015

Rata-rata persentase pencapaian Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak per tahun sebesar 107,04%, dengan kata lain realisasi pendapatan melampaui target yang ditetapkan rata-rata sebesar 7,04% per tahun.

### ▪ Dana Alokasi Umum

Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, Dana Alokasi Umum ditargetkan sebesar Rp.2.471.412.236.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.471.412.236.000,00 atau sebesar 100,00 persen seperti terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.9.  
**Target Dan Realisasi Dana Alokasi Umum  
 Tahun 2011-2015**

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2011	366.882.411.000,00	366.882.411.000,00	100,00	-
2012	445.894.174.000,00	445.894.174.000,00	100,00	-
2013	500.043.553.000,00	500.043.553.000,00	100,00	-
2014	564.661.391.000,00	564.661.391.000,00	100,00	-
2015	593.930.707.000,00	593.930.707.000,00	100,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.471.412.236.000,00</b>	<b>2.471.412.236.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Rata-rata Persentase Pencapaian per tahun</b>			<b>100,00</b>	

Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2015

Untuk Dana Alokasi Umum periode 2011-2015 peningkatan targetnya rata-rata sebesar 12,95% per tahun, dan peningkatan realisasinya rata-rata sebesar 15,53% per tahun

▪ **Dana Alokasi Khusus**

Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, Dana Alokasi Khusus ditargetkan sebesar Rp.**253.675.790.000,00** dengan realisasi sebesar Rp.**253.675.790.000,00** atau sebesar **100,00** persen seperti terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.10.  
**Target dan realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2011-2015**

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2011	25.486.100.000,00	25.486.100.000,00	100,00	-
2012	29.436.680.000,00	29.436.680.000,00	100,00	-
2013	35.346.060.000,00	35.346.060.000,00	100,00	-
2014	52.222.910.000,00	52.222.910.000,00	100,00	-
2015	111.184.040.000,00	111.184.040.000,00	100,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>253.675.790.000,00</b>	<b>253.675.790.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Rata-rata Persentase Pencapaian per tahun</b>			<b>100,00</b>	

Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2015

Untuk Dana Alokasi Khusus periode 2011-2015 peningkatan targetnya rata-rata sebesar 22,83% per tahun, dan peningkatan realisasinya rata-rata sebesar 27,77% per tahun.

c) **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan salah satu sumber pendanaan pembangunan yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan otonomi khusus, Bantuan Keuangan

dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Pendapatan lainnya adalah komponen dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Mataram dalam meningkatkan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain pendapatan yang sah adalah dengan melakukan pendekatan terutama dengan pihak pemerintah Provinsi NTB dan upaya untuk mengoptimalkan Dana Bagi Hasil Pajak berdasarkan peraturan yang berlaku. Target dan realisasi Pendapatan Kota Mataram yang bersumber dari Lain-lain pendapatan yang sah dirinci sebagai berikut:

▪ **Pendapatan Hibah**

Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp. **34.000.000.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **19.778.000.000,00** atau sebesar **58,17** persen seperti terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.11.  
**Target dan realisasi Pendapatan Hibah Periode 2011-2015**

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2011	0	0	0,00	-
2012	0	0	0,00	-
2013	5.000.000.000	0	0,00	(5.000.000.000,00)
2014	20.000.000.000	11.000.000.000	55,00	(9.000.000.000,00)
2015	9.000.000.000	8.778.000.000,00	97,53	(222.000.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>34.000.000.000,00</b>	<b>19.778.000.000,00</b>	<b>58,17</b>	
<b>Rata-rata Persentase Pencapaian per tahun</b>			<b>50,84</b>	

Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2015

Pendapatan Hibah yang ditargetkan pada T.A. 2013-2015 adalah Hibah Air Minum bagi Masyarakat Miskin yang merupakan dana bersumber dari APBN serta bantuan dari Pemerintah Australia kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui AusAid bekerjasama dengan PDAM Giri Menang.

▪ **Dana bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp. **251.510.863.863,93** dengan realisasi sebesar Rp. **243.894.747.938,56** atau sebesar **96,97** persen seperti terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.12.

**Target Dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2011-2015**

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2011	34.442.996.431,00	31.968.822.623,00	92,82	(2.474.173.808,00)
2012	32.040.253.282,00	35.655.984.060,00	111,28	3.615.730.778,00
2013	43.617.605.165,00	37.042.319.448,00	84,93	(6.575.285.717,00)
2014	64.634.697.481,00	72.418.554.484,00	112,04	7.783.857.003,00
2015	76.775.311.504,93	66.809.067.323,56	87,02	(9.966.244.181,37)
<b>Jumlah</b>	<b>251.510.863.863,93</b>	<b>243.894.747.938,56</b>	<b>96,97</b>	
<b>Rata-rata Persentase Pencapaian per tahun</b>			<b>97,62</b>	

Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2015

▪ **Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**

Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp.**522.578.407.280,00** dengan realisasi sebesar Rp.**518.728.704.375,00** atau sebesar **99,26** persen, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.13.

**Target Dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Tahun 2011-2015**

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2011	107.438.542.800,00	107.406.052.375,00	99,97	(32.490.425,00)
2012	63.662.899.000,00	63.662.999.000,00	100,00	100.000,00
2013	98.967.436.480,00	97.256.605.000,00	98,27	(1.710.831.480,00)
2014	121.519.931.000,00	119.413.450.000,00	98,27	(2.106.481.000,00)
2015	130.989.598.000,00	130.989.598.000,00	100,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>522.578.407.280,00</b>	<b>518.728.704.375,00</b>	<b>99,26</b>	
<b>Rata-rata Persentase Pencapaian per tahun</b>			<b>99,30</b>	

Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2015

Untuk Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus periode 2011-2015 peningkatan targetnya rata-rata sebesar 11,52% per tahun, dan peningkatan realisasinya rata-rata sebesar 11,61% per tahun.

▪ **Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya**

Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp.**63.459.000.000,00** dengan realisasi sebesar Rp.**41.471.200.000,00** atau sebesar **65,35** persen, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.14.

**Target Dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2011-2015**

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2011	16.531.800.000,00	15.771.200.000,00	95,40	(760.600.000,00)
2012	16.531.800.000,00	15.000.000.000,00	90,73	(1.531.800.000,00)
2013	12.231.800.000,00	10.700.000.000,00	87,48	(1.531.800.000,00)
2014	7.531.800.000,00	0,00	0,00	(7.531.800.000,00)
2015	10.631.800.000,00	0,00	0,00	(10.631.800.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>63.459.000.000,00</b>	<b>41.471.200.000,00</b>	<b>65,35</b>	
<b>Rata-rata Persentase Pencapaian per tahun</b>			<b>54,72</b>	

Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2015

Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya tidak dapat terealisasi sepenuhnya. Hal ini terlihat pada tahun 2014, dimana Bantuan Keuangan yang direncanakan tidak dapat direalisasikan pada tahun 2014 dan 2015.

▪ **Pendapatan Lainnya**

Pendapatan Lainnya berupa Bantuan Dana Operasional CMS-Kasda dari PT Bank NTB. Target dan realisasi Pendapatan Lainnya periode 2011-2015 dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.15.

**Target Dan Realisasi Pendapatan Lainnya Tahun 2011-2015**

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2011	0	0	0,00	-
2012	250.000.000	40.000.000	16,00	(210.000.000,00)
2013	0	38.400.000	-	38.400.000,00
2014	0	35.200.000	-	35.200.000,00
2015	0	52.400.000	-	52.400.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>166.000.000,00</b>	<b>66,40</b>	

Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2015

Sebagai bentuk komitmen PT. Bank NTB untuk operasional CMS-Kasda di BPKAD Kota Mataram, telah dialokasikan dana dukungan setiap tahunnya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan CMS-Kasda Pemerintah Kota Mataram.

**2. Target dan Realisasi Belanja Daerah**

Belanja Daerah tahun anggaran 2011-2015 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran yaitu transparan, efektif, efisien, dan disusun dengan pendekatan kinerja untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat. Kemampuan

Pemerintah Kota Mataram dalam menggali sumber-sumber pendapatan sehingga realisasi pendapatan daerah selalu melampaui target yang ditetapkan juga menjadi salah satu dasar pemerintah Kota Mataram untuk membiayai pembangunan, sehingga target belanja yang ditetapkan setiap tahunnya selalu meningkat secara signifikan. Anggaran Belanja Kota Mataram periode tahun 2011-2015, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.16.  
**Anggaran Belanja Daerah Kota Mataram  
 Tahun 2011-2015**

URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>BELANJA</b>	<b>731.636.969.179</b>	<b>810.748.789.576</b>	<b>1.022.456.440.541</b>	<b>1.177.199.809.961</b>	<b>1.295.437.591.385</b>	<b>13,18</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>402.259.721.525</b>	<b>473.844.497.878</b>	<b>538.538.293.459</b>	<b>589.494.959.692</b>	<b>657.253.939.435</b>	<b>11,52</b>
Belanja Pegawai	367.969.525.144	426.835.076.202	484.028.071.029	539.560.313.692	595.737.687.201	11,33
Belanja Hibah	9.684.251.000	24.582.707.601	25.573.197.430	24.218.986.000	33.454.425.802	21,62
Belanja Bantuan Sosial	20.903.415.000	20.400.100.000	27.634.425.000	24.215.660.000	23.500.807.652	1,64
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0	0	0	0	0,00	-
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./Kabup./Kota dan Pemdes	2.258.800.000	0	0	0	912.798.780,00	-
Belanja Tidak Terduga	1.443.730.381	2.026.614.075	1.302.600.000	1.500.000.000	3.648.220.000	11,31
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>329.377.247.654</b>	<b>336.904.291.697</b>	<b>483.918.147.081</b>	<b>587.704.850.268</b>	<b>638.183.651.950</b>	<b>14,55</b>
Belanja Pegawai	46.521.009.935	57.026.089.602	70.756.743.858	71.447.082.600	85.294.058.779	13,76
Belanja Barang dan Jasa	109.265.270.321	121.161.855.634	159.159.416.419	208.411.606.059	265.047.268.211	19,67
Belanja Modal	173.590.967.398	158.716.346.460	254.001.986.803	307.846.161.609	287.842.324.960	9,67

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

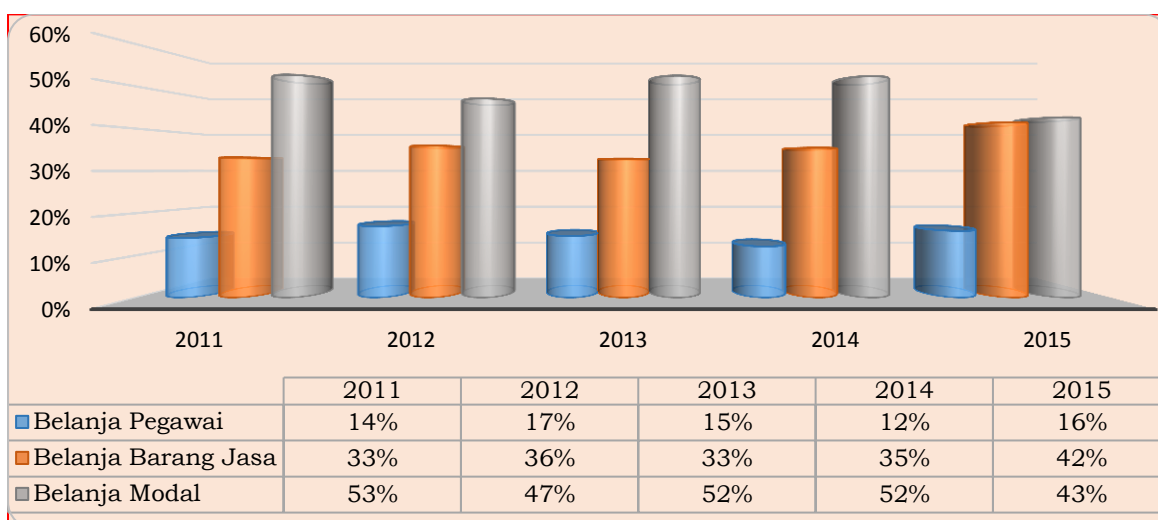
Dari tabel diatas terlihat bahwa anggaran belanja Pemerintah Kota Mataram periode 2011-2015 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun disebabkan semakin besarnya kebutuhan daerah seiring majunya perkembangan Kota Mataram yang sangat pesat sehingga peranan pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan melalui pengeluaran atau belanja pemerintah harus lebih besar pula.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014, Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBD sekurang-kurangnya 30 persen dari belanja daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran Belanja Modal mendekati 30 persen pada APBD periode 2011-2015. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Mataram untuk memperhatikan alokasi anggaran pada belanja investasi yang produktif.

Komposisi Belanja Langsung Pemerintah Kota Mataram selama periode 2011-2015, sebagaimana grafik dibawah ini:

Grafik 3.4.

**Komposisi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2011-2015**



Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015.

Untuk rasio terhadap total belanja daerah, Rasio Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah mencerminkan porsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk membiayai Belanja Modal. Belanja Modal ditambah belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, di samping pengaruh dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Realisasi Belanja Modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah Kota Mataram dari tahun 2011-2015 berfluktuatif namun menunjukkan kecenderungan meningkat, sebagaimana terlihat pada Tabel dan Grafik berikut:

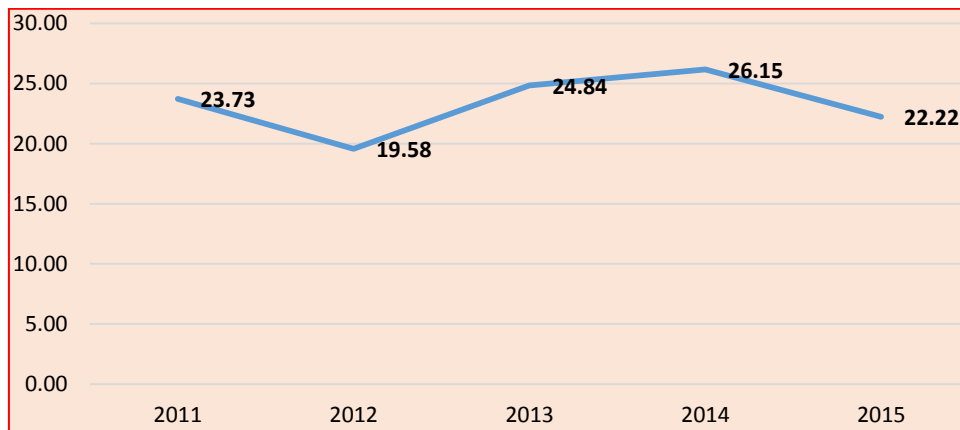
Tabel 3.17.

**Anggaran Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2011-2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Belanja Modal	23,73	19,58	24,84	26,15	22,22
Rasio Belanja Pegawai	56,65	58,39	51,89	49,79	49,58

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

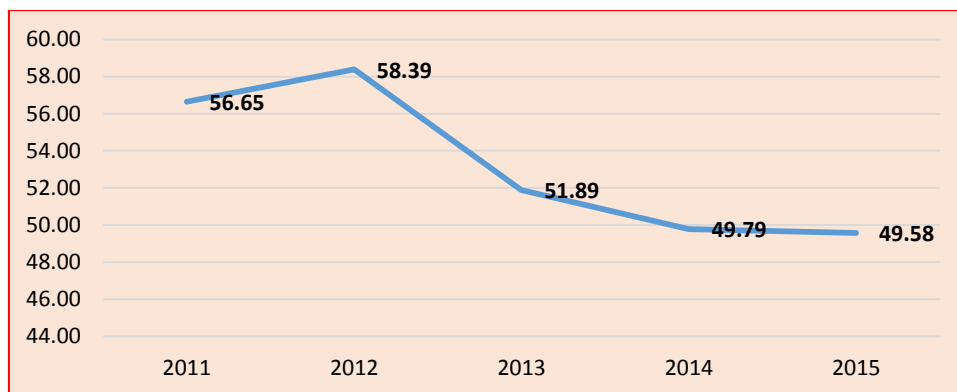
Grafik 3.5.  
**Proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja daerah (%)**



Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

Belanja Pegawai adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai langsung dan Belanja Pegawai tidak langsung. Perkembangan proporsi belanja pegawai (pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) terhadap total belanja daerah berfluktuatif namun menunjukkan kecenderungan menurun, sebagaimana terlihat pada Grafik berikut:

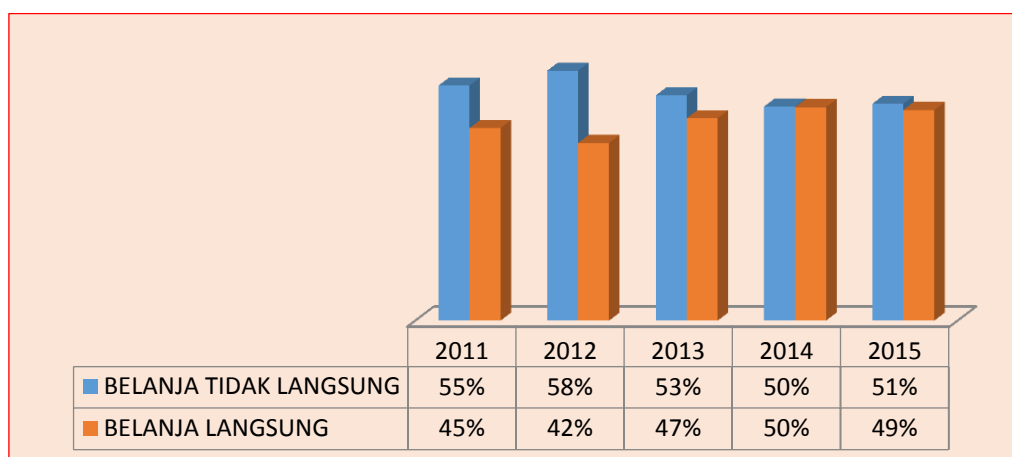
Grafik 3.6.  
**Proporsi Belanja Pegawai terhadap total Belanja daerah (%)**



Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

Selama periode 2011-2015 komposisi Belanja Langsung dibanding Belanja Tidak Langsung relatif meningkat, hal ini menunjukkan keberpihakan Pemerintah Kota Mataram pada belanja yang produktif dan terkait langsung dengan masyarakat.

Grafik 3.7.  
**Komposisi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung  
Tahun 2011-2015 (%)**



Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

Dari grafik di atas, terlihat Belanja Langsung mengalami peningkatan persentase dari tahun ke tahun dalam komposisi Belanja Daerah periode 2011-2015. Hal ini dapat menjadi indikasi kebijakan anggaran Pemerintah Kota Mataram yang berpihak pada belanja publik atau belanja yang langsung dipergunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Untuk lebih rinci Realisasi Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.18.  
**Realisasi Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2011-2015**

URAIAN	TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan %
	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>BELANJA</b>	731.636.969.179	810.748.789.576	1.022.456.440.541	1.177.199.809.961	1.295.437.591.385	13,18
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	402.259.721.525	473.844.497.878	538.538.293.459	589.494.959.692	657.253.939.435	11,52
Belanja Pegawai	367.969.525.144	426.835.076.202	484.028.071.029	539.560.313.692	595.737.687.201	11,33
Belanja Hibah	9.684.251.000	24.582.707.601	25.573.197.430	24.218.986.000	33.454.425.802	21,62
Belanja Bantuan Sosial	20.903.415.000	20.400.100.000	27.634.425.000	24.215.660.000	23.500.807.652	1,64
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./Kabup./Kota dan Pmdes	2.258.800.000	0	0	0	912.798.780,00	-
Belanja Tidak Terduga	1.443.730.381	2.026.614.075	1.302.600.000	1.500.000.000	3.648.220.000	11,31
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	329.377.247.654	336.904.291.697	483.918.147.081	587.704.850.268	638.183.651.950	14,55
Belanja Pegawai	46.521.009.935	57.026.089.602	70.756.743.858	71.447.082.600	85.294.058.779	13,76
Belanja Barang dan Jasa	109.265.270.321	121.161.855.634	159.159.416.419	208.411.606.059	265.047.268.211	19,67
Belanja Modal	173.590.967.398	158.716.346.460	254.001.986.803	307.846.161.609	287.842.324.960	9,67

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

### 3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Rincian selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi pembiayaan daerah periode 2011-2015 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.19.  
**Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah  
Tahun Anggaran 2011-2015**

URAIAN	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015**
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
- Anggaran	83.774.478.159	91.599.546.587	163.800.995.168	139.868.988.944	101.214.370.490
- Realisasi	83.774.478.159	91.599.546.587	103.800.995.168	79.868.988.944	101.214.370.490
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
- Anggaran	1.000.000.000	2.750.000.000	13.560.000.000	18.060.000.000	17.560.000.000
- Realisasi	1.000.000.000	2.750.000.000	0	17.330.000.000	17.500.000.000
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>					
- Anggaran	82.774.478.159	88.849.546.587	157.550.995.168	121.808.988.944	83.654.370.490
- Realisasi	82.774.478.159	88.849.546.587	97.550.995.168	62.538.988.944	83.714.370.490

Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2015

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang dilakukan periode tersebut diutamakan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah.

#### ▪ Realisasi SILPA

Realisasi SILPA periode 2011-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.20.  
**Sisa Lebih Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2015**

URAIAN	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	91.599.546.587	103.800.995.168	79.868.988.944	101.287.750.045	83.961.117.271,01

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015.

#### ▪ Target dan Realisasi Surplus/Defisit

Surplus/Defisit merupakan selisih positif/negatif antara pendapatan dengan belanja di Laporan Realisasi Anggaran. Selama periode 2011-2015 Kota Mataram defisit hanya pada tahun 2013 sedangkan tahun lainnya anggaran selalu surplus. Target dan realisasi Surplus/defisit Kota Mataram periode 2011-2015, sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel 3.21.  
**Surplus/Defisit APBD Kota Mataram Tahun 2011-2015**

SURPLUS/DEFISIT	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Anggaran	(82.774.478.159)	(88.849.546.587)	(157.550.995.168)	(121.808.988.944)	(87.961.190.440)
Realisasi	8.825.068.427	14.951.448.581	(17.682.006.223)	38.748.761.100	246.746.780,21

Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2015

### 3.1.2 Neraca Daerah

Terdapat beberapa manfaat yang bisa diambil dari tersusunnya Neraca Keuangan Daerah oleh Pemerintah Daerah, yaitu karakteristik aset daerah akan mudah dipahami oleh publik. Yang dimaksud dengan karakteristik aset adalah status aset, produktifitas aset, umur ekonomis aset, management aset daerah, kontribusi aset pada PAD, sistem dan nilai penyusutan aset dan manfaat lainnya. Kedua, kinerja keuangan Pemerintah Daerah dapat dievaluasi secara periodik.

Salah satu cara untuk melihat kinerja keuangan daerah adalah dengan melihat laporan perubahan keuangan daerah (khususnya Neraca Keuangan Daerah) dari tahun ketahun, apakah terjadi peningkatan atau penurunan. Perubahan di sisi aktiva dapat terlihat pada aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dana cadangan dan aktiva lainnya. Bila perkembangan aset-aset tersebut adalah positif, maka kinerja pemerintah daerah dari sisi keuangan adalah positif juga. Dan sebaliknya, bila perkembangan utang jangka pendek dan jangka panjang mengalami kenaikan terus menerus dan tidak diimbangi dengan kemampuan mengembalikannya, maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah buruk. Artinya dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengelola kegiatan ekonomi daerah dan lainnya tidak efektif dan tidak produktif, sehingga tidak mampu dikembalikan.

Belanja modal yang dilakukan Pemerintah Daerah akan terekam dengan baik pada Neraca Keuangan Daerah. Pada sisi belanja APBD terdapat belanja modal yang secara otomatis harus masuk pada sisi aset, sekaligus juga nilai penyusutan yang diperlakukan pada aset-aset tersebut harus tercatat pula pada Neraca Keuangan Daerah. Artinya dengan sistem ini, tidak terjadi lagi pembelian aset (belanja modal) yang tidak tercatat di Neraca Daerah. Bahkan aset-aset yang merupakan hasil pelimpahan pemerintah pusat, provinsi atau aset proyek lainnya yang diserahkan kedaerah tercatat dengan baik pada Neraca Keuangan Daerah. Demikian juga berbagai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada berbagai lembaga produktif yang ada di masyarakat (seperti BUMD) harus terekam pada Neraca Daerah, tidak dihapus begitu saja pada setiap akhir tahun anggaran.

Perkembangan Neraca Pemerintah Kota Mataram tahun 2011-2015 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.22.

**Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Mataram Tahun 2011-2015**

NO URUT	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan %
1	<b>ASET</b>						
1.1	ASET LANCAR						
1.1.1	Kas	92,033	104,738	81,711	107,939	85,751	-4,41
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	
1.1.3	Piutang	3,813	4,457	44,186	57,224	62,522	33,90
1.1.4	Piutang Lain-lain	10,500	15,335	33,633	5,239	18,771	-95,98
1.1.5	Persediaan	7,833	6,790	7,691	8,945	8,455	1,14
1.1.7	R/K Pusat	-	-	-	-	-	
	Penyisihan Piutang				(29,691)	(36,417)	118,47
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>114,179</b>	<b>131,320</b>	<b>167,222</b>	<b>149,657</b>	<b>139,080</b>	<b>3,80</b>
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG						
1.2.1	Investasi Non Permanen	0,411	0,411	0,411	0,411	0,411	0,00
1.2.2	Investasi Permanen	45,462	84,713	84,088	98,069	119,508	19,45
	Penyisihan Investasi Jangka Panjang				(0,411)	(0,411)	100,00
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>45,873</b>	<b>85,124</b>	<b>84,499</b>	<b>98,069</b>	<b>119,508</b>	<b>19,29</b>
1.3	ASET TETAP						
1.3.1	Tanah	362,279	785,101	817,443	838,911	877,656	16,20
1.3.2	Peralatan dan Mesin	228,941	250,743	275,556	333,469	376,846	11,64
1.3.3	Gedung dan Bangunan	433,679	522,866	569,216	655,143	820,599	14,62
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	280,045	317,268	357,335	401,942	501,810	13,49
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	23,271	22,750	25,102	32,466	41,639	12,95
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	20,927	9,446	15,528	4,229	0,478	-283,64
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	(999,822)	100,00
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1.349,142</b>	<b>1.908,175</b>	<b>2.060,180</b>	<b>2.266,160</b>	<b>1.619,205</b>	<b>1,45</b>
1.4	DANA CADANGAN						
1.4.1	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.5	ASET LAINNYA						
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1,390	0,852	-	0,012	0,055	38,24
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	27,586	231,129	231,129	231,129	231,129	22,02
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	0,465	0,754	69,18
1.5.5	Aset Lain-lain	13,701	36,509	64,854	58,418	35,771	7,96
1.5.6	Amortisasi Aset Tak Berwujud					(0,115)	100,00
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>42,678</b>	<b>268,490</b>	<b>295,982</b>	<b>290,024</b>	<b>267,594</b>	<b>20,74</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.551,872</b>	<b>2.393,110</b>	<b>2.607,883</b>	<b>2.803,909</b>	<b>2.145,388</b>	<b>4,92</b>
2	<b>KEWAJIBAN</b>						
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,423	0,935	1,729	6,725	1,487	-44,32
2.1.2	Utang Bunga	-	-	-	-	-	0,00
2.1.3	Utang Pajak	-	-	-	-	-	0,00
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	0,030	-	100,00
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	0,00

NO URUT	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan %
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	6,208	6,550	13,124	33,927	46,333	35,85
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>6,631</b>	<b>7,485</b>	<b>14,852</b>	<b>40,682</b>	<b>47,820</b>	<b>34,86</b>
2.2	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>						<b>0,00</b>
2.2.1	Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	0,00
2.2.2	Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	0,00
2.2.3	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	0,052	0,023	0,005	0,047	-72,69
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		<b>0,052</b>	<b>0,023</b>	<b>0,005</b>	<b>0,047</b>	<b>-72,69</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>6,631</b>	<b>7,536</b>	<b>14,875</b>	<b>40,687</b>	<b>47,867</b>	<b>34,95</b>
3	<b>EKUITAS DANA</b>						<b>0,00</b>
3.1	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>						<b>0,00</b>
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	91,600	103,801	79,869	101,214	83,961	-4,42
3.1.2	Cadangan untuk Piutang	14,313	19,792	77,819	32,773	38,413	-5,13
3.1.3	Cadangan untuk Persediaan	7,833	6,790	7,691	8,945	8,035	-0,24
3.1.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(6,208)	(6,550)	(13,124)	(33,957)	(47,579)	36,32
3.1.5	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,010	0,003	0,114	-	-	-62,81
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>107,548</b>	<b>123,835</b>	<b>152,369</b>	<b>108,975</b>	<b>82,831</b>	<b>-9,88</b>
3.2	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>						
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	45,873	85,124	84,499	98,069	119,508	19,29
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.349,142	1.908,175	2.060,180	2.266,160	1.619,205	1,45
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	42,678	268,490	295,982	290,024	267,594	20,74
3.2.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	-	(0,052)	(0,023)	(0,005)	(0,047)	-72,69
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>1.437,693</b>	<b>2.261,738</b>	<b>2.440,639</b>	<b>2.654,247</b>	<b>2.006,260</b>	<b>4,88</b>
3.3	<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>						
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
3.4	<b>KOREKSI EKUITAS</b>						
3.4.1	Koreksi Ekuitas					91,261	100,00
	<b>JUMLAH KOREKSI EKUITAS</b>					<b>91,261</b>	<b>100,00</b>
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>1.545,241</b>	<b>2.385,573</b>	<b>2.593,008</b>	<b>2.763,222</b>	<b>2.097,521</b>	<b>4,41</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>1.551,872</b>	<b>2.393,110</b>	<b>2.607,883</b>	<b>2.803,909</b>	<b>2.145,388</b>	<b>4,92</b>

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

Pada tahun 2015, Kota Mataram memiliki aset senilai Rp. 2,1 triliun, dengan tingkat pertumbuhan 4,92 persen per tahun. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada tahun 2015 mencapai Rp.1,61 triliun dan rata-rata tumbuh 1.45 persen per tahun. Aset tetap ini meliputi 75,47 persen dari seluruh aset pemerintah Kota Mataram.

Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 47,86 milyar. Dari tahun 2011 hingga 2015, jumlah kewajiban relatif meningkat, hal ini dikarenakan begitu pesatnya pembangunan di Kota Mataram yang menuntut adanya kebijakan-kebijakan yang diikuti timbulnya kewajiban. Misalnya kewajiban yang timbul dari utang pembebasan tanah yang diperuntukkan untuk penambahan ruas jalan.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Nilai ekuitas dana Kota Mataram Tahun 2015 mencapai Rp.2,09 triliun, dan mengalami pertumbuhan dari 2011-2015 dengan rata-rata 4,41 persen.

Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas.

Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Mataram dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya.

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kota Mataram mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin menurun. Nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya.

*Quick Ratio* lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai quick ratio neraca keuangan Pemerintah Kota Mataram menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kota Mataram setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Tabel 3.23.

**Analisis Rasio Keuangan Kota Mataram Tahun 2011-2015 (%)**

NO	URAIAN	Rasio Keuangan (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio lancar ( <i>current ratio</i> )	1721,89	1754,47	1125,89	367,87	290,84
2	Rasio quick ( <i>quick ratio</i> )	1603,76	1663,76	1074,10	345,88	273,16
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,43	0,31	0,57	1,45	2,23

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015.

*Current ratio* dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kota Mataram adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset juga sangat kecil, seperti terlihat pada tabel di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kota Mataram relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan dilakukan peminjaman dana untuk pembangunan-pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang. Hal ini merupakan peluang baik yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelayanan kepada publik. Diantara penyebab dari kapabilitas keuangan tersebut adalah karena Kota Mataram termasuk pemerintah daerah yang mampu mengumpulkan PAD dalam jumlah yang relatif besar persentasenya dalam proporsi pendapatan daerah.

---

### 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan 2011-2015

---

Untuk memperoleh gambaran pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Mataram, perlu dilakukan kajian kembali beberapa tahun ke belakang sehingga akan diketahui kondisi eksisting dan kinerja pengelolaan daerah lima tahun sebelumnya untuk menjadi dasar pengelolaan keuangan lima tahun kedepan. Secara umum kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

#### 1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Fokus utama pengelolaan pendapatan daerah Kota Mataram periode 2011-2015 adalah meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi besarnya kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang timbul karena adanya selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal daerah melalui penggalian sumber daya yang ada dengan tetap memperhatikan keberpihakan pada masyarakat terutama masyarakat miskin dan dunia usaha.

Arah kebijakan Pendapatan Daerah Kota Mataram periode 2011-2015 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran yang berkenaan dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah.

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Dana Perimbangan.

Optimalisasi Pendapatan Daerah selama tahun 2011-2015 melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terus dilakukan secara konsisten, antara lain:

1. Intensifikasi pendapatan daerah khususnya penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah yaitu :
  - a. Sosialisasi melalui media masa dan elektronik kepada Wajib Pajak;
  - b. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelayanan publik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah pengelola keuangan daerah;
  - c. Restrukturisasi kelembagaan pengelola pendapatan daerah dan perijinan;
  - d. Inventarisir wajib pajak yang belum terdaftar sehingga data potensi menjadi lebih akurat;
  - e. Memperkuat proses pemungutan dengan menyusun Perda terkait, mengubah tarif retribusi, efisiensi administrasi, penyederhanaan administrasi dan efisiensi pemungutan;
  - f. Pemanfaatan teknologi informasi sehingga proses pemungutan pajak akan lebih efektif dan efisien serta data menjadi lebih valid dan up to date;
  - g. Mengintensifkan pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi; dan
  - h. Melaksanakan kegiatan yang bersifat insentif sebagai upaya untuk mencapai target yang ditetapkan, salah satunya melalui Gebyar PBB.
2. Ekstensifikasi potensi pendapatan daerah:
  - a. Merevisi Peraturan Daerah yang menyangkut penambahan dan perluasan obyek pajaknya daerah/retribusi daerah;
  - b. Menyusun produk hukum daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - c. Melakukan ekstensifikasi PAD dengan mengidentifikasi potensi daerah yang dapat dijadikan sumber penerimaan, mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial, dan memperbaiki basis data objek, dan menjaring wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah baru melalui pendataan rutin setiap triwulan.
3. Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam perhitungan lokasi Dana Perimbangan.
- c. Untuk kebijakan dana perimbangan ditambahkan: penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN (khususnya DAK dan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana/DISP) dan APBD Kabupaten/Kota.

## 2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Pemerintah Kota Mataram selalu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya. Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan Urusan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Selama periode tahun 2011-2015, kebijakan umum belanja Kota Mataram memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada kebijakan yang *Pro Poor* (Pro Kemiskinan), *Pro Job* (Pro Pekerjaan), *Pro Growth* (Pro Pertumbuhan), dan *Pro Environment* (Pro Lingkungan).
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha dan aparatur menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
3. Pengembangan kebijakan belanja/pengeluaran yang diarahkan untuk menciptakan peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal dan penciptaan wirausaha baru, yang berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai modal belanja pembangunan.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan berbasis standar pelayanan perkotaan (SPP).
5. Peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan keuangan dan penyempurnaan struktur organisasi pengelolaan keuangan, serta peningkatan sistem informasi keuangan daerah dan pengendalian pembangunan daerah.

6. Kebijakan untuk mendorong keikutsertaan swasta dalam pelayanan publik baik sebagai penanam modal maupun sebagai pengelola jasa pelayanan masyarakat.
7. Pengembangan Sistem Manajemen Pemerintahan berbasis IT dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang melayani, bersih, dan akuntabel.

Adapun arah kebijakan Belanja Daerah, 2011-2015 adalah:

1. Memenuhi kebutuhan Belanja Tidak Langsung yang meliputi belanja pegawai, hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga sesuai dengan pedoman peraturan perundangan yang berlaku.
2. Efisiensi Belanja Langsung untuk kegiatan rutin yang meliputi belanja pemanfaatan listrik, air, telepon, pemeliharaan gedung/kendaraan dinas/sarana dan prasarana kantor dan perjalanan dinas serta efisiensi pengadaan sarana dan prasarana kantor.
3. Diarahkan pada belanja-belanja kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Mataram periode 2011 - 2015 serta kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Mengoptimalkan Belanja Langsung untuk penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah daerah sesuai kemampuan dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

#### **a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung**

Kebijakan Belanja Tidak Langsung Kota Mataram periode tahun 2011-2015 diarahkan untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bantuan sosial (Bansos) yang digunakan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan kepada masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang secara selektif;
3. Belanja hibah yang digunakan untuk pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
4. Belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

5. Belanja bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah;
6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus (pendidikan) dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, dan kepada pemerintah daerah lainnya.

#### **b. Kebijakan Belanja Langsung**

Kebijakan Belanja Langsung Kota Mataram periode 2011-2015 diarahkan untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Belanja Langsung Urusan Wajib dan Urusan Pilihan digunakan untuk:
  - Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menunjang pelaksanaan tiga Program Unggulan Pemerintah Kota Mataram.
  - Mendanai program dan kegiatan dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
  - Mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, air bersih, sanitasi, transportasi darat, lingkungan hidup, kependudukan, perdagangan, pertanian, kelautan dan perikanan sesuai dengan

petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan.

- Mendanai program dan kegiatan yang berkaitan dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT).

### **3. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman. Namun selama tahun 2011-2015 Pemerintah Kota Mataram belum pernah melakukan pinjaman untuk menutup defisitnya.

#### **a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan *Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)* tahun sebelumnya, yang bersumber dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, dan sisa penghematan belanja.

#### **b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan kepada penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada PDAM Giri Menang; penyertaan modal pada PT Bank NTB; PT. BPR NTB Mataram dan PT. Jamkrida NTB.

### 3.3. KERANGKA PENDANAAN

Dalam mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki untuk pelaksanaan pembangunan perlu direncanakan Kebijakan anggaran yang akan menjadi acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

#### 3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Tabel 3.24.  
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta  
Prioritas Utama Kota Mataram

No	Uraian	Data Tahun Dasar (2014-2016)			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Realisasi 2014	Realisasi 2015	Target 2016	
<b>A.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>506.848.621.240,50</b>	<b>532.875.067.509,00</b>	<b>634.213.931.703,34</b>	10,43
1	Belanja Gaji dan tunjangan	349.836.998.712,50	380.334.853.564,00	421.992.836.852,34	8,95
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	150.157.272.640,00	144.005.667.070,00	202.205.313.300,00	12,26
3	Belanja Penerimaan Lainnya Anggota dan pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.453.800.000,00	3.923.880.000,00	3.976.800.000,00	19,40
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.942.900.000,00	4.011.250.000,00	5.257.982.126,00	12,71
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	457.649.888,00	599.416.875,00	780.999.425,00	23,45
<b>B.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>29.183.690.462,00</b>	<b>37.952.898.103,00</b>	<b>42.757.865.276,00</b>	24,11
1	Belanja Jasa Kantor (Khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	19.969.247.715,00	29.699.884.466,00	31.631.334.431,00	19,43
2	Belanja Premi Asuransi	652.847.032,00	81.810.028,00	439.762.000,00	-308,30
3	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.561.595.715,00	8.171.203.609,00	10.686.768.845,00	9,38
<b>C.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
1.	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	-
2.	Pembayaran pokok utang	0	0	0	-
	<b>Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama</b>	<b>536.032.311.702,50</b>	<b>570.827.965.612,00</b>	<b>676.971.796.979,34</b>	11,95

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

Pertumbuhan tertinggi belanja prioritas utama untuk belanja tidak langsung Kota Mataram selama periode 2012-2016 berasal dari Belanja Penerimaan Lainnya Anggota dan pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Insentif Pemungutan Pajak Daerah masing masing mencapai 19,40 persen, 23,45 persen dan 12,71 persen. Sedangkan untuk belanja langsung pertumbuhan paling tinggi berasal dari belanja Belanja Jasa Kantor (Khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya) sebesar 19,43 persen.

### **3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu**

Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun kedepan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun kebelakang. Adapun proyeksi untuk lima tahun kedepan, meliputi proyeksi pendapatan. Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah. Ini karena akan berkaitan dengan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik.

Untuk proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama menggunakan data realisasi keuangan tahun 2014 dan 2015 serta data target tahun 2016. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Proyeksi pendapatan**

Dalam hal proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan selama tahun 2011-2015 dan target TA. 2016 serta berdasarkan asumsi-asumsi lain yang dirasa dapat mempengaruhi perkiraan pendapatan daerah kedepan.

Berdasarkan penghitungan tersebut, proyeksi pendapatan untuk tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp. 1,328 Trilyun dan diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2016-2021, pendapatan akan menjadi Rp. 2,103 trilyun. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Perimbangan.

Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan bersifat indikatif karena faktor-faktor penghitungannya atau asumsi-asumsinya bisa mengalami perubahan.

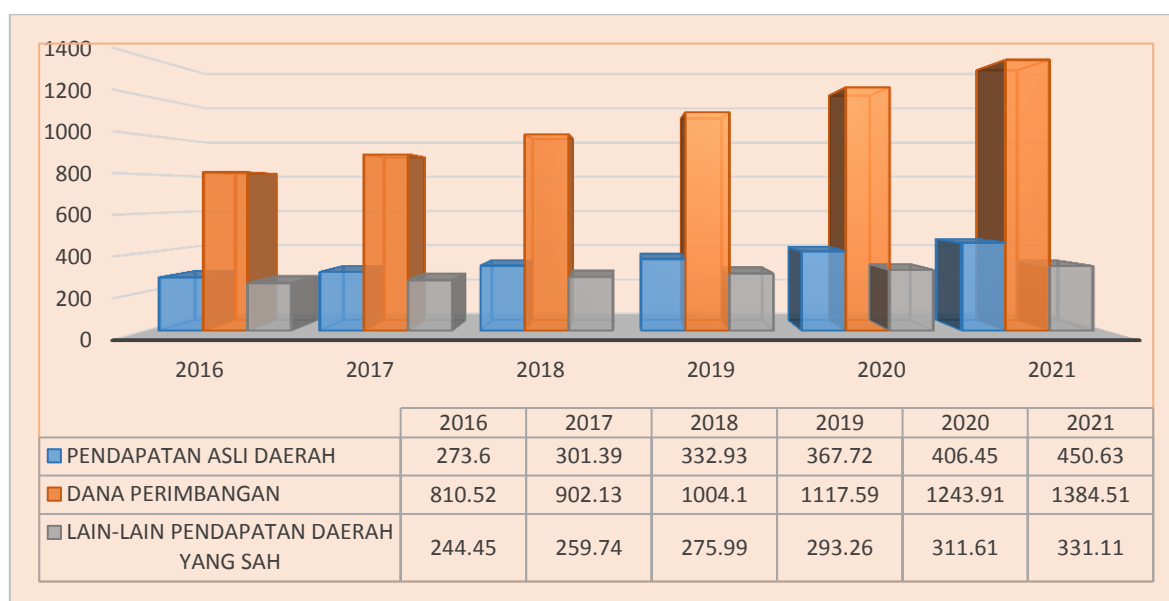
Adapun proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.25.  
**Proyeksi Pendapatan Daerah (Milyar Rp)**

URAIAN	TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.328,57</b>	<b>1.463,26</b>	<b>1.613,02</b>	<b>1.778,57</b>	<b>1.961,97</b>	<b>2.166,25</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>273,60</b>	<b>301,39</b>	<b>332,93</b>	<b>367,72</b>	<b>406,45</b>	<b>450,63</b>
Pendapatan Pajak Daerah	118,58	136,00	153,70	170,4	189,10	209,30
Hasil Retribusi Daerah	19,71	18,47	19,23	20,02	20,85	21,67
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,4	6,85	7,33	7,84	8,39	8,98
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	128,5	140,07	152,67	169,46	188,11	210,68
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>810,52</b>	<b>902,13</b>	<b>1.004,10</b>	<b>1.117,59</b>	<b>1.243,91</b>	<b>1.384,51</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	58,11	57,53	56,97	56,41	55,86	55,31
Dana Alokasi Umum	609,02	666,75	729,95	799,15	874,9	957,84
Dana Alokasi Khusus	143,4	182,96	233,44	297,84	380,01	484,86
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>244,45</b>	<b>259,74</b>	<b>275,99</b>	<b>293,26</b>	<b>311,61</b>	<b>331,11</b>
Pendapatan Hibah	9	10,03	11,17	12,45	13,87	15,45
Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. dan PEMDA Lainnya	60,91	66,37	72,33	78,82	85,89	93,59
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	131,93	130,34	128,76	127,19	125,65	124,13
Bantuan Keuangan Prov. atau Pemda Lainnya	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Lainnya	42,6	61,3	88,2	126,91	182,62	262,76

Sumber : BPKAD dan Dispenda Kota Mataram, 2015

Grafik 3.8.  
**Proyeksi Pendapatan Daerah (milyar Rupiah)**



Sumber : BPKAD dan Dispenda Kota Mataram, 2015

## 2. Proyeksi belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama

Proyeksi Belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama tahun 2016-2021 diproyeksikan cenderung meningkat, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.26.

### Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat serta Prioritas Utama (juta Rp)

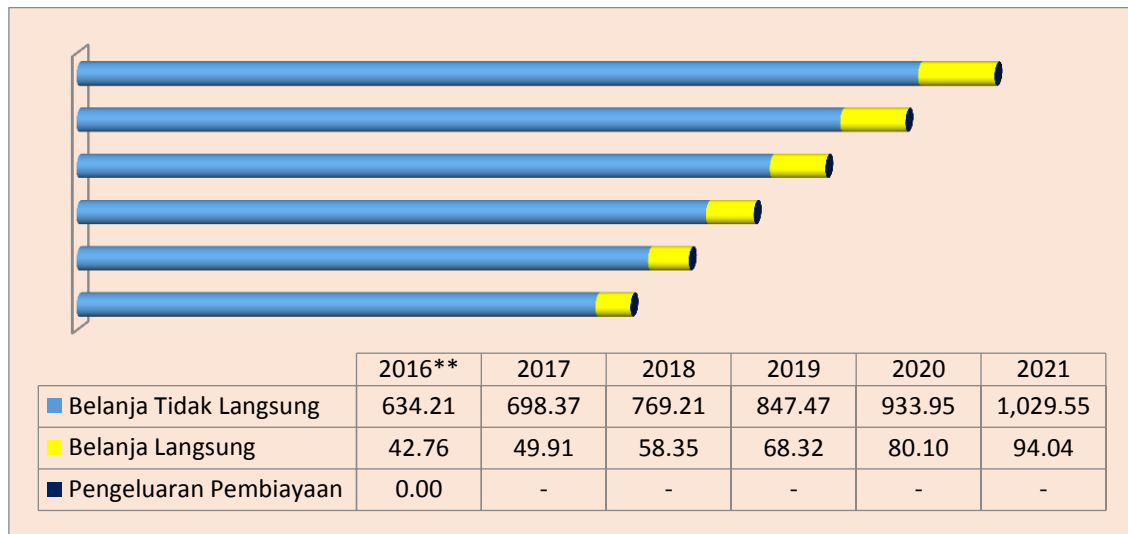
No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi					
			2016**	2017	2018	2019	2020	2021
<b>A.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>10,43</b>	<b>634,21</b>	<b>698,37</b>	<b>769,21</b>	<b>847,47</b>	<b>933,95</b>	<b>1.029,55</b>
1	Belanja Gaji dan tunjangan	8,95	421,99	459,74	500,87	545,67	594,48	647,66
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	12,26	202,21	226,99	254,80	286,03	321,09	360,44
3	Belanja Penerimaan Lainnya Anggota dan pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	19,40	3,98	4,75	5,67	6,77	8,08	9,65
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	12,71	5,26	5,93	6,68	7,53	8,48	9,56
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	23,45	781,00	0,96	1,19	1,47	1,81	2,24
<b>B.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>24,11</b>	<b>42,76</b>	<b>49,91</b>	<b>58,35</b>	<b>68,32</b>	<b>80,10</b>	<b>94,04</b>
1	Belanja Jasa Kantor (Khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	19,43	31,63	37,78	45,12	53,89	64,36	76,87
2	Belanja Premi Asuransi	-	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
3	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9,38	10,69	11,69	12,79	13,99	15,30	16,73
<b>C.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA</b>	<b>11,95</b>	<b>676,97</b>	<b>748,27</b>	<b>827,56</b>	<b>915,78</b>	<b>1.014,05</b>	<b>1.123,59</b>

Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2015

Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat, serta prioritas utama diproyeksikan mengalami peningkatan dari Rp 679,97 juta di tahun 2016 menjadi sebesar Rp 1,123 milyar lebih di tahun 2021. Belanja tidak langsung dalam hal ini merupakan bagian yang sangat dominan dalam total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat, serta prioritas utama.

Grafik 3.9.

**Proyeksi Belanja dan Pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama (Juta Rp)**



Sumber : BPKAD Kota Mataram, 2015

**3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan**

Untuk kurun waktu mendatang (2016-2021), kapasitas kemampuan keuangan daerah Kota Mataram diharapkan akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah.

Berdasarkan data dalam kurun waktu tahun 2011-2015 pencapaian pendapatan daerah target rata-rata sebesar 102% daya serap anggaran pada belanja daerah maupun rata-rata mampu menyerap 90% anggaran

Berdasarkan data SILPA tahun dasar 2011-2015 SILPA akan terjadi diskenariokan sebesar 9,5% dari total APBD pada setiap tahunnya. Akan tetapi, apabila SILPA pada akhir tahun terealisasikan diatas 9,5%, selisih tersebut akan diprioritaskan pada penyertaan modal, penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, serta belanja peningkatan jaminan sosial.

Perkiraan kapasitas kemampuan daerah dapat disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya selengkapnya secara indikatif tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.27.

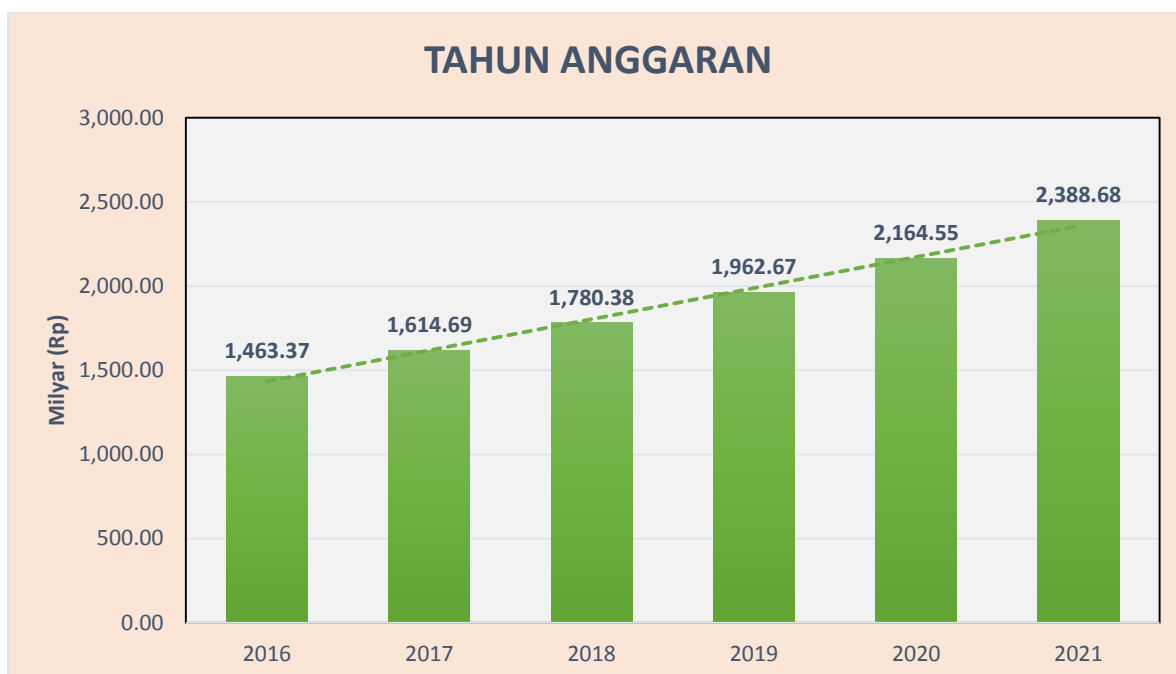
**Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah  
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Mataram (Milyar Rp)**

No.	URAIAN	Proyeksi Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.328,57</b>	<b>1.463.26</b>	<b>1,613.02</b>	<b>1,778.57</b>	<b>1,961.97</b>	<b>2,166.25</b>
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-		-
3	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	134,80	151,43	167,36	184,10	202,58	222,43
	<b>Total Kapasitas Kemampuan Keuangan daerah</b>	<b>1.463,37</b>	<b>1.614,69</b>	<b>1.780,38</b>	<b>1.962,67</b>	<b>2.164,55</b>	<b>2.388,68</b>

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

Grafik 3.10.

**Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah  
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Mataram (Milyar Rp)**



Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

### 3.3.4. Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas.

Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.

**Prioritas I**, dialokasikan untuk mendanai Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama.

**Prioritas II**, dialokasikan untuk pendanaan:

- a. program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2016-2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
- b. program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD.

**Prioritas III**, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: dana pendamping DAK, tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Berkaitan dengan hal tersebut Alokasi kerangka pendanaan berdasarkan Prioritas tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.28  
**Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis Prioritas  
 Tahun Anggaran 2016-2021**

No.	Jenis Dana	ALOKASI											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	<b>Prioritas I</b>	<b>46,3</b>	<b>677,0</b>	<b>46,6</b>	<b>748,3</b>	<b>46,9</b>	<b>827,6</b>	<b>47,3</b>	<b>915,8</b>	<b>47,7</b>	<b>1014,1</b>	<b>48,3</b>	<b>1123,6</b>
	Belanja Tidak Langsung	43,3	634,2	43,5	698,4	43,6	769,2	43,8	847,5	44,0	934,0	44,3	1029,6
	Belanja Langsung	2,9	42,8	3,1	49,9	3,3	58,4	3,5	68,3	3,8	80,1	4,0	94,0
	Pengeluaran Pembiayaan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>Prioritas II</b>	<b>49,6</b>	<b>725,8</b>	<b>51,1</b>	<b>838,59</b>	<b>51,2</b>	<b>946,84</b>	<b>51,1</b>	<b>1.066,70</b>	<b>50,9</b>	<b>1.198,64</b>	<b>50,5</b>	<b>1.348,31</b>
3	<b>Prioritas III</b>	<b>2,8</b>	<b>40,3</b>	<b>2,3</b>	<b>36,4</b>	<b>1,9</b>	<b>33,4</b>	<b>1,6</b>	<b>31,1</b>	<b>1,4</b>	<b>29,5</b>	<b>1,2</b>	<b>28,4</b>
	Belanja Hibah	1,3	19,0	0,9	15,2	0,7	12,2	0,5	9,8	0,4	7,8	0,3	6,3
	Belanja Bantuan Sosial	1,3	18,3	1,1	18,0	1,0	17,7	0,9	17,3	0,8	17,0	0,7	16,7
	Belanja Bantuan Keuangan	0,1	0,9	0,1	1,2	0,1	1,6	0,1	2,0	0,1	2,6	0,1	3,4
	Belanja Tidak Terduga	0,1	2,1	0,1	2,1	0,1	2,1	0,1	2,0	0,1	2,0	0,1	2,0
	<b>Total</b>		<b>1.463,4</b>		<b>1.623,29</b>		<b>1.807,84</b>		<b>2.013,60</b>		<b>2.242,24</b>		<b>2.500,31</b>

(dalam juta rupiah)

Sumber: BPKAD Kota Mataram, 2015

---

### 4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

---

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas, dan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di Kota Mataram, adalah sebagai berikut:

- a. cakupan masalah yang luas;
- b. permasalahan cenderung meningkat di masa mendatang dan berdampak negatif;
- c. memerlukan upaya penanganan yang konsisten serta sinergitas berbagai pihak.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka permasalahan pembangunan yang akan dihadapi oleh masyarakat Kota Mataram secara umum adalah membangun masyarakat yang beriman dan berbudaya, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, pengembangan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur perkotaan berbasis tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum.

#### 1. Masyarakat yang Beriman dan Berbudaya

- Kota Mataram masih memiliki potensi konflik sebagai konsekuensi kemajemukan dan karakteristik heterogenitas penduduk sehingga kejadian-kejadian konflik horisontal antar wilayah lingkungan masih ditemukan.
- Dalam era globalisasi pengaruh negatif kebebasan informasi dapat berpotensi menurunkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.
- Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang cenderung meningkat, dimana keberadaan Kota Mataram sebagai magnet tersendiri bagi

terjadinya urbanisasi atau berpindahnya penduduk dari wilayah luar kota ke wilayah Kota Mataram telah memungkinkan terjadinya perkembangan Narkotika.

- Nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra serta kearifan lokal belum dilestarikan dan diaktualisasikan dalam pembangunan secara optimal.
- Sarana dan prasarana pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya belum optimal.

## **2. Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

- Di bidang pendidikan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain: i) belum meratanya kualitas pendidikan dan lemahnya pengawasan penyelenggaraan pendidikan; ii) penuntasan wajib belajar 12 tahun terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum berjalan mantap dan sesuai harapan; iii) belum optimalnya penerapan pendidikan karakter di lingkungan keluarga dan masyarakat.
- Di Bidang Kesehatan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain: i) status kesehatan penduduk miskin masih rendah; ii) beban ganda penyakit, dimana pola penyakit yang diderita oleh masyarakat adalah penyakit infeksi menular dan pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular sehingga terjadi beban ganda pada waktu yang bersamaan; iii) kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih rendah; iv) terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya tidak merata; v) perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat; vi) kinerja pelayanan kesehatan yang rendah; vii) rendahnya kondisi kesehatan lingkungan; dan. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi anekaragam pangan dengan gizi seimbang
- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) cukup tinggi, hal ini disebabkan antara lain: i) jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar yang belum maksimal; ii) sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal; iii) kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif; iv) pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia belum berjalan seperti yang diharapkan; serta v) keterlibatan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*) belum terkoordinasi dengan baik.
- Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi menjadi salah satu masalah yang dihadapi Kota Mataram sehingga menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk yang tidak berimbang antar wilayah sehingga memperlebar

kesenjangan dalam pemenuhan pelayanan sosial, kesehatan pendidikan, infrastruktur dan lainnya.

### **3. Pengembangan Ekonomi Lokal**

- Permasalahan pengembangan usaha dan perijinan, antara lain: belum terjalannya pola kemitraan dalam upaya pengembangan usaha; terbatasnya akses (Wirausaha Baru) WuB terhadap sumber pemodal usaha; belum optimalnya regulasi yang mendukung kearah pengembangan PTSP; belum tersedianya profil dan informasi yang bisa diakses dengan mudah oleh investor; belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perijinan yang ada; serta belum optimalnya pengawasan, pengendalian dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).
- Nilai ekspor komoditas ataupun produk unggulan Kota Mataram belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kondisi ini tidak terlepas dari kualitas mutu komoditas atau produk yang belum memenuhi standar internasional; masih minimnya standar, desain dan kualitas mutu produk yang dihasilkan; serta lemahnya daya saing produk-produk lokal dari sisi akses pasar baik lokal, regional maupun internasional. Selain itu juga belum adanya jalinan kerjasama perdagangan dengan negara importir berkontribusi terhadap perkembangan nilai ekspor serta perluasan jenis komoditas atau produk yang dapat diserap pasar.
- Permasalahan dalam bidang pariwisata yaitu belum sinerginya Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) Provinsi NTB dengan RIPARDA Pemerintah Kota Mataram sebagai acuan perencanaan sektor kepariwisataan
- Dalam bidang ketahanan pangan, permasalahan yang adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam upaya memperbaiki sistem budidaya tanaman, penanganan pasca panen, pengolahan pangan dan penanganan distribusi; serta belum optimalnya diversifikasi pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
- Secara umum permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi Kota Mataram, antara lain: Tingginya jumlah Angkatan Kerja, Relatif rendahnya kualitas tenaga kerja, Tidak meratanya penyebaran tenaga kerja, Masih terbatasnya kesempatan kerja, serta Pengangguran.

### **4. Kemiskinan**

- Kemiskinan di wilayah Kota Mataram disebabkan antara lain oleh perkembangan kota yang semakin pesat tercermin dari pesatnya perluasan wilayah kota, tingginya tingkat urbanisasi, meningkatnya perkembangan ekonomi yang ditandai adanya konsentrasi berbagai macam kegiatan ekonomi, terutama industri, jasa dan perdagangan dalam skala besar.
- Data kemiskinan Kota Mataram menunjukkan penurunan angka kemiskinan pada kisaran 0,2-1,6 persen setiap tahunnya, dimana angka

kemiskinan Kota Mataram saat ini mencapai 10,06% dari jumlah penduduk. Terjadinya pelambatan penurunan kemiskinan dipengaruhi oleh masyarakat sangat miskin yaitu penduduk dengan kondisi kemiskinan yang sudah kronik, yang masih sulit untuk dientaskan.

- Tingginya kelompok usia produktif (15-64 tahun) yaitu 64.2%, namun memiliki akses yang lemah terhadap pasar kerja dan sektor produktif sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran di Kota Mataram.

#### **5. Infrastruktur Perkotaan berbasis Tata Ruang**

- Semakin bertambahnya kawasan permukiman menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan air bersih, dimana cakupan air bersih pada tahun 2015 baru mencapai 67,34%.
- Berkembangnya Kota Mataram yang diikuti dengan perkembangan kawasan permukiman menuntut dibangunnya jalan-jalan baru sebagai akses bagi masyarakat serta tuntutan pemenuhan kondisi jalan dalam kondisi baik, dimana proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik baru mencapai 87,21% pada tahun 2015.
- Masih adanya genangan air pada beberapa lokasi, disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (a) Banjir kiriman yang berasal dari daerah hulu yang mengalir melalui sungai-sungai yang ada di Kota Mataram, (b). Penutupan saluran yang tidak mengikuti petunjuk teknis dari instansi terkait (c). Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan drainase dengan tidak membuang sampah ke saluran masih rendah
- Luas kawasan kumuh yang mencapai 803,39 ha, yang salah satu indikatornya adalah kepadatan bangunan
- Belum terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan.
- Masih kurangnya pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas
- Belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan serta kawasan permukiman

#### **6. Lingkungan Hidup**

- Kota Mataram tergolong Kota yang cukup padat, dengan jumlah penduduk 450.226 jiwa dan kepadatan sebesar 7.345 jiwa/km dapat berimplikasi pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan perkotaan.
- Banjir merupakan bencana yang rentan terjadi di Kota Mataram. Banjir yang terjadi merupakan luapan air sungai yang sudah tidak dapat mengalirkan air dari hulu ke hilir. Hal tersebut disebabkan beberapa hal diantaranya berkurangnya daerah resapan, debit sungai dari wilayah hulu yang melebihi kapasitas sungai dan terjadinya penyempitan lebar sungai yang disebabkan pemanfaatan sempadan sungai sebagai tempat berdirinya bangunan.
- belum optimalnya pelayanan persampahan. Volume sampah di Kota Mataram secara signifikan meningkat seiring dengan meningkatnya

aktivitas rumah tangga di wilayah pemukiman baru, serta kawasan perdagangan dan jasa yang tumbuh secara merata di wilayah kota. Menurut data tahun 2016, volume sampah mencapai 1.444 m<sup>3</sup>/hari dan yang mampu diangkut 1.039 m<sup>3</sup>/hari (71,59%) yang menyebabkan polusi udara dan pencemaran lingkungan.

- kemampuan dan keterbatasan sarana prasarana serta perilaku masyarakat yang belum memiliki pengetahuan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat
- Keterbatasan lahan yang difungsikan sebagai RTH, dimana luasan RTH baru mencapai 12,5% dari 30% yang disyaratkan.

#### **7. Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum**

- Kualitas pelayanan publik masih belum optimal yang disebabkan antara lain kurangnya sarana prasarana, SDM maupun prosedur pelayanan publik.
- Masih kurangnya ruang/media aspirasi masyarakat terhadap pembangunan.
- Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.
- Belum tersedianya sistem informasi yang terintegrasikan antar unit kerja melalui jaringan komunikasi antar Perangkat Daerah.

Dalam pemenuhan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, tidak semua urusan pemerintahan dapat diprioritaskan atau terkait dengan sasaran pokok RPJPD dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah (RPJMD) disebabkan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat.

---

### **4.2. ISU STRATEGIS**

---

Isu strategis merupakan kondisi yang menjadi permasalahan utama untuk diperhatikan atau disepakati sebagai prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya:

1. Berdasarkan lingkungannya, isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kota Mataram.
2. Isu strategis daerah kebijakan pembangunan daerah lainnya yang mempengaruhi Kota Mataram.
3. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang bersifat aktual, problematik, kekhlayakan dan kelayakan, terdiri dari:
  - RPJPD Kota Mataram 2005-2025
  - Sasaran-sasaran pembangunan yang belum tercapai pada RPJMD tahun sebelumnya
  - Isu strategis yang diangkat dari analisis dan kondisi bidang pembangunan daerah

Kriteria isu strategis yang menjadi prioritas penanganan dalam RPJMD, adalah sebagai berikut:

1. Kriteria-1 : memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional
2. Kriteria 2 : merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah
3. Kriteria-3 : luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat
4. Kriteria-4 : memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah
5. Kriteria-5 : kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola
6. Kriteria-6 : prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

#### **4.2.1. Penelaahan Isu Strategis dari Dinamika Internasional**

Penelaahan isu strategis dari dinamika internasional perlu dilakukan untuk dapat melengkapi isu strategis yang mempengaruhi Kota Mataram, salah satunya adalah *Sustainable Development Goals* (SDG's). SDG's merupakan agenda pembangunan internasional yang disahkan pada tanggal 27 September 2015 melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

SDG's periode 2016-2030 merupakan lanjutan dari komitmen *Millenium Development Goals* (MDG's) dengan target pencapaian yang telah berakhir pada tahun 2015, yaitu: menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan; memberlakukan pendidikan dasar yang universal; mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian anak; memperbaiki kesehatan maternal; memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya; menjamin kesinambungan lingkungan hidup; serta membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Keterkaitan tujuan dan target SDGs 2016-2030 yang disepakati dengan isu strategis di Kota Mataram, sebagaimana berikut:

No	Tujuan dan Target SDGs	Keterkaitan dengan Kota Mataram
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun berada	Penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram yang saat ini mencapai 10,06% dari jumlah penduduk
2	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan gizi seimbang
3	Memastikan hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan semua penduduk di segala usia	Belum optimalnya akses dan mutu serta kualitas dan sarana prasarana pelayanan kesehatan
4	Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua	Belum meratanya kualitas pendidikan dan fasilitas/sarana penunjang pendidikan belum memadai, serta penuntasan wajib belajar 12 tahun terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum berjalan mantap dan sesuai harapan
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
6	Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Masih kurangnya upaya pencegahan penurunan kualitas lingkungan hidup
7	Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua	-
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Tingginya angka pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja, belum meratanya tingkat penyebaran tenaga kerja serta relatif rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja
9	Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan infrastruktur yang memadai, yaitu jalan, jembatan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan lain-lain</li> <li>• Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar untuk investasi</li> </ul>
10	Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara	-
11	Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Masih tingginya luas kawasan permukiman kumuh. Luas kawasan kumuh yang mencapai 803,39 ha, yang salah satu indikatornya adalah kepadatan bangunan
12	Memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan	Belum optimalnya diversifikasi pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal
13	Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim
14	Melestarikan sumber daya samudera, laut dan kelautan untuk pembangunan berkelanjutan	-
15	Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam upaya memperbaiki sistem budidaya tanaman, penanganan pasca panen, pengolahan pangan dan penanganan distribusi

No	Tujuan dan Target SDGs	Keterkaitan dengan Kota Mataram
16	Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan	Lemahnya daya saing produk-produk lokal dari sisi akses pasar baik lokal, regional maupun internasional
17	Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Belum optimalnya pola kemitraan antar stakeholder dalam upaya pengembangan usaha

#### 4.2.2. Penelaahan Kebijakan Pembangunan Nasional.

Sebelum penetapan isu strategis, perlu dilakukan penelaahan terhadap kebijakan pembangunan nasional yang dapat melengkapi isu strategis yang mempengaruhi Kota Mataram, sebagai berikut:

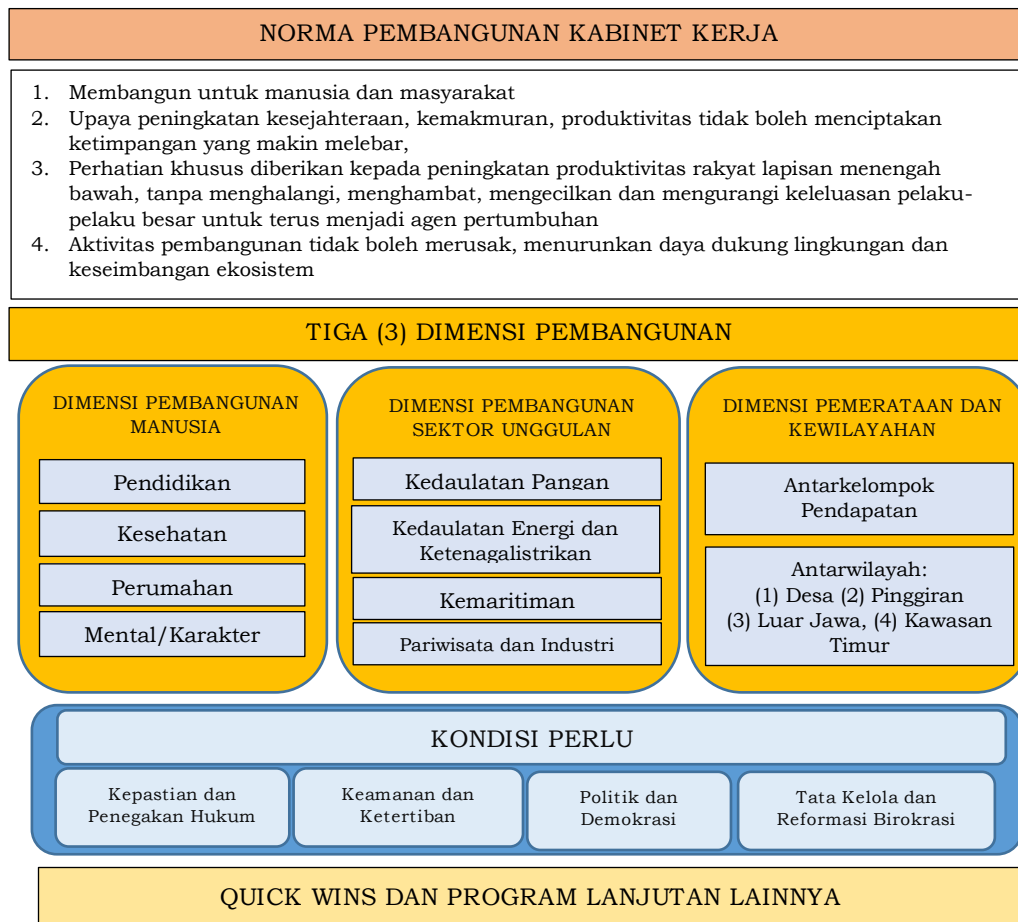
##### 1. Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019

Visi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 Nasional yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut melalui penerapan 7 Misi Pembangunan yaitu:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam RPJMN 2015-2019, Strategi Pembangunan Nasional menggariskan hal-hal sebagai berikut: Norma Pembangunan, Tiga Dimensi Pembangunan, Kondisi Perlu dan Quickwins. Untuk lengkapnya Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana Gambar berikut:



Sumber: RPJMN 2015-2019

Gambar 4.1. **Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019**

Isu-isu strategis pembangunan Kota Mataram juga diselaraskan dengan penjabaran 3 (tiga) dimensi kedalam 1 (satu) pengarusutamaan dan lintas bidang dan 9 (sembilan) bidang pembangunan sebagaimana ditegaskan dalam RPJMN 2015-2019, sebagaimana berikut:

No	Isu Strategis Nasional	Keterkaitan dengan Kota Mataram
<b>1</b>	<b>Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang</b>	
<b>1.1</b>	<b>Pengarusutamaan:</b>	
1.1.1	Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan Kota Mataram dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
1.1.2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Keterbukaan informasi dan komunikasi publik, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan kapasitas birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
1.1.3	Gender	Kesetaraan gender dalam pembangunan Kota Mataram, meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.

No	Isu Strategis Nasional	Keterkaitan dengan Kota Mataram
<b>1.2</b>	<b>Pembangunan Lintas Bidang</b>	
1.2.1	Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan	Perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta program pro rakyat
1.2.2	Perubahan Iklim	Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim
1.2.3	Revolusi Mental	Kepatuhan dan penegakan hukum serta budaya hukum
<b>2.</b>	<b>Pembangunan Bidang:</b>	
2.1	Sosbud dan Kehidupan Beragama	Kependudukan dan Keluarga Berencana; Kesehatan dan Gizi Masyarakat; Pendidikan; Penguatan Sistem Penilaian Pendidikan; Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Karakter; Perpustakaan; Pemuda dan Olahraga; Kebudayaan, Agama, Kesejahteraan Sosial; Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; Perlindungan Anak
2.2	Ekonomi	Perkembangan Ekonomi Makro; Pemberdayaan UMKM dan Koperasi; Peningkatan Pariwisata; Peningkatan Ekonomi Kreatif; Penguatan Investasi; Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja; Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
2.3	Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)	IPTEK dalam rangka: daya saing sektor produksi, peningkatan keberlanjutan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam; peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar
2.4	Bidang Politik	Keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; stabilitas sosial dan politik
2.5	Bidang Pertahanan dan Keamanan	-
2.6	Bidang Hukum dan Aparatur	Kualitas penegakan hukum; efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi; birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang efektif dan efisien; birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
2.7	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Wilayah (koordinasi, produksi, distribusi, pemanfaatan, SDM, kelembagaan, Iptek dan Industri Informasi Geospasial) Tata Ruang (Harmonisasi antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan; perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang
2.8	Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana	Infrastruktur dan ekonomi; infrastruktur, kependudukan dan urbanisasi; infrastruktur dan kesenjangan antar wilayah; infrastruktur dan peran badan usaha; infrastruktur, energi dan lingkungan; infrastruktur dan globalisasi
2.9	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pengamanan produksi untuk kemandirian dan diversifikasi konsumsi pangan; pengembangan agribisnis, pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani;

No	Isu Strategis Nasional	Keterkaitan dengan Kota Mataram
		peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan/ pembudidaya ikan/pengolah dan pemasaran hasil perikanan; pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan; pengelolaan DAS; peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan serta pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati (kehati); penanggulangan dan pengurangan risiko bencana; penanganan perubahan iklim serta peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan

## 2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Mengacu pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal. Dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) disebutkan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib pemerintahan kabupaten/kota adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial sebagaimana berikut:

No	Bidang SPM	Dasar Hukum	Perangkat Daerah PenanggungJawab
1	Bidang Pendidikan	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	Bidang Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 317/MENKES/SK/V/2009 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan, RSUD

No	Bidang SPM	Dasar Hukum	Perangkat Daerah PenanggungJawab
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan, Bappeda
4	Bidang Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	Dinas Pekerjaan Umum
5	Bidang Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial daerah Provinsi, Kabupaten/kota</li> <li>Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BPBD
6	Bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	-	Satpol PP, Bakesbangpol

#### 4.2.3. Penelaahan Kebijakan Pembangunan Daerah

##### 1. Penelaahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 adalah **“Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera”**. Visi pembangunan tersebut diwujudkan melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu:

- 1) Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter
- 2) Mengembangkan budaya dan kearifan lokal
- 3) Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan
- 4) Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah

- 6) Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis tata ruang
- 7) Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Penelaahan terhadap kebijakan pembangunan Provinsi NTB yang dapat melengkapi isu strategis yang mempengaruhi Kota Mataram, sebagaimana berikut:

No	Isu Strategis Provinsi NTB	Keterkaitan dengan Kota Mataram
1	Pudarnya Jati Diri Daerah	Pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra di Kota Mataram belum optimal
2	Pelayanan Publik dan Kepastian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota</li> <li>• Masih minimnya Perangkat Daerah yang menerapkan sistem pelayanan publik berbasis IT</li> </ul>
3	Partisipasi Politik dan Kamtibmas	Masih adanya potensi gangguan kamtibmas bernuansa SARA di masyarakat
4	Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Masalah Kesos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum meratanya kualitas pendidikan</li> <li>• Belum optimalnya kualitas dan sarana prasarana pelayanan kesehatan</li> <li>• Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih belum optimal</li> </ul>
5	Daya Saing Produk Lokal dan Pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemahnya daya saing produk-produk lokal dari sisi akses pasar baik lokal, regional maupun internasional</li> <li>• Belum optimalnya penanganan masalah pengangguran</li> </ul>
6	Kerjasama dan konektivitas Antar Wilayah	Tertatanya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain dengan mempertahankan sistem jaringan jalan yang tersedia
7	Program Iklim dan Bencana Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan ketahanan masyarakat dan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim</li> <li>• mitigasi bencana</li> </ul>

## 2. RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025

Dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 ditetapkan Visi Pembangunan Kota Mataram 2005-2025 adalah: "**Terwujudnya Kota Mataram yang Religius, Maju, dan Berbudaya sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa Tahun 2025**". Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) Misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Masyarakat yang Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Moral dan Etika.
- 2) Mewujudkan Keberdayaan Masyarakat dalam Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Hukum.
- 3) Mewujudkan SDM yang berkualitas dan menguasai IPTEK serta diimbangi dengan IMTAQ.

- 4) Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah dalam menghadapi Era Globalisasi.
- 5) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.
- 6) Mewujudkan Pengelolaan Potensi dan Sumber Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.
- 7) Mewujudkan Pengelolaan Potensi SDA Berdasarkan Prinsip Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Yang Berkelanjutan.

Arah kebijakan RPJPD Kota Mataram tahun 2005-2025 terbagi dalam 4 (empat) tahun periodisasi tahapan pembangunan. RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 berada dalam Tahapan pembangunan lima tahun Ketiga (2015-2019).

Sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Mataram 2016-2021, penelaahan terhadap kebijakan RPJPD Kota Mataram tahun 2005-2025 menjadi acuan dalam penetapan isu strategis yang mempengaruhi Kota Mataram, sebagaimana berikut:

No	Sasaran Pokok dalam RPJPD	Keterkaitan dengan Permasalahan dalam RPJMD Kota Mataram 2016-2021
1	Terwujudnya karakter masyarakat kota Mataram yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai/norma-norma yang berlaku di masyarakat	Sosial dan Budaya
2	Mantapnya budaya lokal yang tercermin dengan meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai budaya guna menguatnya jati diri	
3	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat	Ekonomi
4	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam seluruh bidang sosial budaya	Sosial dan Budaya
5	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hakikat demokrasi dalam seluruh proses penyelenggaraan Negara	Pemerintahan
6	Terciptanya sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masa kini pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan	Pendidikan
7	Tersedianya lembaga pendidikan yang merata dan seimbang di seluruh wilayah dengan fasilitas memadai	
8	Meningkatnya peran serta masyarakat termasuk dunia usaha dalam bidang pendidikan formal dan non formal	
9	Membbaiknya manajemen lembaga pendidikan yang mendorong otonomi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan	
10	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan iptek	
11	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Sosial dan Budaya
12	Meningkatnya daya saing produk industri dan jasa	Ekonomi
13	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan disegala bidang	Sosial dan Budaya

No	Sasaran Pokok dalam RPJPD	Keterkaitan dengan Permasalahan dalam RPJMD Kota Mataram 2016-2021
14	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan	Ekonomi
15	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif	
16	Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain	Infrastruktur
17	Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah	Pemerintahan
18	Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi	
19	Terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa	
20	Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat	
21	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik	
22	Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan peraturan dan perundangan di atasnya	
23	Meningkatnya kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat	
24	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam perencanaan	
25	Tersedianya sistem informasi aset daerah secara <i>actual</i> dan <i>online</i>	
26	Berkembangnya pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan	
27	Meningkatnya akses masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup agar dapat didayagunakan secara berkelanjutan	Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

### 3. Penelaahan Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya

Dalam rangka keselarasan perencanaan pembangunan Kota Mataram dengan pembangunan daerah lainnya maka dilakukan penelaahan terhadap kebijakan pembangunan Daerah lainnya, dalam hal ini Kabupaten Lombok Barat yang berdampingan dengan Kota Mataram.

Dalam Peraturan Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 ditetapkan Visi Pembangunan yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat dilandasi Nilai-Nilai Patuh Patuh Patju”** yang diwujudkan melalui 6 (enam) Misi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk mendapatkan Nilai Tambah (Lobar Kreatif, Inovatif dan Produktif)
2. Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang memiliki Spirit serta Etos Kerja untuk Meraih yang Terbaik (Lobar Berpestasi)

3. Mengembangkan Potensi Sumberdaya Sosial dan Budaya yang dimiliki untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar Tangguh dan Berbudaya)
4. Mengembangkan Potensi Sumberdaya Alam dengan Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan (Lobar Lestari)
5. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mampu Beradaptasi terhadap Perkembangan Regional, Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas)
6. Meningkatkan Martabat dan Kebanggaan Daerah (Lobar Bermartabat).

Adapun isu-isu strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat serta keterkaitan dengan keberadaan Kota Mataram, sebagaimana Tabel berikut:

No	Isu Strategis Kab. Lombok Barat	Keterkaitan dengan Kota Mataram
1	Kualitas pendidikan, kesehatan dan aktualisasi budaya	Keberadaan sarana pendidikan, kesehatan dan budaya menjadi daya Tarik Kota Mataram terhadap Kabupaten Lombok Barat
2	Pemerataan infrastruktur wilayah	Sinergitas pembangunan dan pemerataan infrastruktur wilayah
3	Angka kemiskinan dan masalah sosial	Kota Mataram menjadi tujuan bagi pencari kerja dan penduduk miskin yang bekerja tanpa keahlian
4	Reformasi birokrasi dan penegakan hukum	Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
5	Peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan daerah	Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumberdaya yang ada dan investasi daerah
6	Pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumberdaya yang ada untuk pemanfaatan bersama.

#### 4.2.4. Isu Strategis Kota Mataram

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan RPJMD Kota Mataram 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Mataram selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan yang dihadapi, penelaahan isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional serta penelaahan kebijakan pembangunan daerah yang bersifat aktual, problematik, kekhayalan dan kelayakan serta kebijakan pembangunan daerah lainnya yang mempengaruhi Kota Mataram, maka penetapan isu pembangunan Kota Mataram diklasifikasikan dalam 3 (tiga) aspek pembangunan, sebagai berikut:

## **1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, sejumlah isu yang masih perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi Kota Mataram
- b. Laju inflasi
- c. Angka kemiskinan yang masih tinggi
- d. Angka Harapan Lama Sekolah
- e. Angka Rata-rata Lama Sekolah
- f. Angka Pendidikan yang ditamatkan
- g. Partisipasi Angkatan kerja perempuan masih rendah
- h. Pendapatan per kapita
- i. Angka Indeks Pembangunan Manusia
- j. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) belum optimal
- k. Angka Pengangguran Terbuka masih cukup tinggi
- l. Pengelolaan lembaga ekonomi produktif berbasis keagamaan belum optimal.

## **2. Aspek Pelayanan Umum**

Pada aspek pelayanan umum, sejumlah isu yang masih akan perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Persentase penduduk ber KTP
- b. Masih terdapatnya prevalensi Balita Gizi Buruk
- c. Puskesmas yang terakreditasi masih rendah
- d. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
- e. Persentase pranata adat terhadap jumlah lingkungan
- f. Penanganan pelanggaran PERDA dan PERWAL belum optimal
- g. Peserta KB aktif masih rendah
- h. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (MPKS) belum optimal
- i. Jumlah sarana perpustakaan di tempat ibadah masih rendah
- j. Akses antar kawasan di beberapa titik belum berfungsi dengan baik
- k. Masih rendahnya rumah tangga pengguna air bersih
- l. Masih tingginya rumah tidak layak huni
- m. Luas ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah
- n. Persentase kesesuaian rencana tata ruang
- o. Penanganan sampah perkotaan belum optimal

## **3. Aspek Daya Saing**

Pada aspek daya saing, sejumlah isu yang masih akan perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Mempertahankan target opini laporan keuangan pemerintah daerah
- b. Potensi PAD masih belum tergali secara optimal
- c. Proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah

- d. Target penilaian maturitas SPIP
- e. Target penilaian kapabilitas APIP
- f. Pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara belum optimal.
- g. Angka kriminalitas
- h. Cakupan SKPD yang menyelenggarakan informasi public berbasis IT
- i. Cakupan SKPD yang berada di zona hijau sesuai standar Ombudsman
- j. Kualitas pelayanan publik belum optimal
- k. Inovasi Pelayanan Publik belum optimal
- l. Nilai Investasi daerah masih rendah
- m. Tingkat Perkembangan WuB masih rendah
- n. Penetapan Standar Pelayanan Minimum
- o. Kualitas produk olahan local belum mampu bersaing di level nasional maupun internasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara umum isu strategis yang dihadapi oleh Kota Mataram tahun 2016-2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Budaya
2. Kondusifitas Wilayah
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Daya saing pekonomian Daerah
6. Kemiskinan
7. Infrastruktur
8. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
9. Kependudukan dan Catatan Sipil
10. Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum

# BAB 5

## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

---

### 5.1. VISI

---

Mengacu pada Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang disampaikan pada Pilkada serentak yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kota Mataram yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dan Visi pembangunan Kota Mataram Tahun 2016-2021 adalah:

**“TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA”**

Dalam visi tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci, yaitu:

1. **Kota Mataram**, adalah sasaran pembangunan yaitu wilayah Kota Mataram termasuk didalamnya warga kota yang secara administrasi kependudukan menetap dan tinggal diwilayah Kota Mataram. Artinya Kota Mataram dan seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu dengan segala konsekuensi keberadaannya sebagai warga kota.
2. **Maju**, ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya seni dan sosial budaya, sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mataram.
3. **Religius**, diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan muammallah serta toleransi yang tinggi antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani.
4. **Berbudaya**, diartikan sebagai kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukkan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktifitas sehari-hari disemua tempat. Masyarakat yang menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat. Perilaku berbudaya juga

ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan nenek moyang dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan dimasa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga tercipta keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan dan kemajemukan, menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral, bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma, adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani.

Visi Kota Mataram Tahun 2016-2021 tersebut selaras dan sinkron dengan keadaan yang ingin dicapai Kota Mataram tahun 2025 sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025 yang menjabarkan Visi Kota Mataram Tahun 2005-2025 yaitu **“Terwujudnya Kota Mataram yang Religius, Maju dan Berbudaya sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa Tahun 2025”**.

Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa Tahun 2025 dimaksudkan untuk percepatan dan pemantapan pembangunan dengan menekankan pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan publik dan sarana prasarana sebagai pusat pemerintahan di NTB serta terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

---

## 5.2. MISI

---

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Sehingga, misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Berdasarkan gambaran Misi dari pasangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram terpilih, kemudian ditelaah dan diselaraskan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan kemudian diterjemahkan menjadi **5 (lima) Misi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2016-2021**, yaitu:

**Misi 1**, Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai.

- Misi 2,** Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan Iptek dalam rangka Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing.
- Misi 3,** Mendorong Kemajuan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera.
- Misi 4,** Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui Penanganan Sarana Dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan.
- Misi 5,** Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*).

---

### 5.3. TUJUAN DAN SASARAN

---

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.1.

**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Mataram Tahun 2016-2021**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (outcome)
1	2	3	4	
<b>VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA</b>				
<b>MISI I MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AMAN, RUKUN DAN DAMAI</b>				
		Meningkatkan kualitas pengembangan nilai nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat.	Tersedianya sarana penunjang kebudayaan yang memadai	Rasio lembaga adat terhadap jumlah lingkungan
			Tersedianya budayawan yang kompeten	Rasio tokoh budaya terhadap 10.000 penduduk
		Meningkatkan kondusifitas wilayah.	Tertanganinya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif	Waktu penyelesaian penanganan konflik
			Terwujudnya kerukunan hidup masyarakat yang optimal	Daya tangkal terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban
		Meningkatkan religiusitas masyarakat.	Tersedianya sarana penunjang kehidupan beragama yang memadai	Jumlah perpustakaan pada tempat ibadah
			Tersedianya tenaga keagamaan yang berkualitas	Rasio tenaga syiar agama terhadap 1.000 penduduk
			Tersalurnya dana dan dukungan kepada tenaga syiar dan lembaga keagamaan yang proporsional	Daya serap dana dan dukungan kepada tenaga syiar dan lembaga keagamaan
		Meningkatkan kualitas masyarakat	Terbinanya masyarakat secara berkelanjutan	Rasio intensitas pembinaan terhadap jumlah keseluruhan masyarakat yang dibina
				Cakupan jenis pertemuan fasilitasi pembangunan
				Cakupan Kelurahan yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kelurahan (SIMKEL) yang baik

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (outcome)
1	2	3	4	
	<b>MISI II</b>	<b>MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMENUHAN PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN PENGUASAAN IPTEK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DAERAH YANG BERDAYA SAING</b>		
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan	Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan yang memadai Tersedianya SDM Pendidikan yang sesuai kompetensi secara merata	Daya Tampung Sekolah terhadap Jumlah Siswa Rasio Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Jumlah Siswa
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan	Tersedianya sarana prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang memadai Tersedianya kualitas SDM kesehatan yang profesional Tersedianya standar pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu	Rasio Jumlah Puskesmas terhadap 1.000 Jumlah Penduduk Rasio Jumlah RSUD terhadap 10.000 Penduduk Rasio Jumlah Dokter terhadap 1.000 Penduduk Rasio Jumlah Perawat terhadap 1.000 Penduduk Rasio Jumlah Bidan terhadap 1.000 Penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Cakupan Pelayanan Persalinan Cakupan Pelayanan Anak Balita Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan Cakupan Desa Siaga Aktif Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (outcome)
1	2	3	4	
		Meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan catatan sipil	Tersedianya prasarana dan layanan kependudukan yang memadai	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
				Cakupan Penerbitan KTP
				Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
				Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
			Terwujudnya layanan kependudukan yang berkualitas	Waktu Penyelesaian Layanan Kependudukan
		Meningkatkan kualitas perempuan dan kesetaraan gender	Terwujudnya kesetaraan gender secara menyeluruh	Daya serap penduduk perempuan dalam partisipasi proses pembangunan
				Dokumen kebijakan pengarusutamaan gender yang diimplementasikan
			Terbinanya kelembagaan perempuan secara berkelanjutan	Rasio Lembaga Perempuan terhadap 1.000 Penduduk
		Meningkatkan kualitas kesejahteraan dan perlindungan anak	Tertanganinya permasalahan anak sesuai situasi	Cakupan Penanganan Masalah Anak terhadap Jumlah Permasalahan Anak
			Terwujudnya layanan yang berkualitas bagi anak	Cakupan Pemenuhan 31 Indikator Kota Layak Anak
Meningkatkan efektifitas pengendalian pertumbuhan penduduk	Tertanganinya laju pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan	Cakupan PUS Peserta KB Aktif terhadap Jumlah Keseluruhan Peserta KB		
		Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi		
		Cakupan Advokasi KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)		
	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Cakupan Keluarga Sejahtera terhadap Jumlah Seluruh Keluarga (KK)		

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (outcome)
1	2	3	4	
		Meningkatkan kualitas layanan sosial masyarakat	Tertanganinya masalah sosial kemasyarakatan secara berkelanjutan	Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terhadap Keseluruhan PMKS yang ada
			Terdatanya penduduk miskin sesuai kondisi	Rasio Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk
				Daya serap anggaran penanggulangan kemiskinan terhadap seluruh anggaran yang disediakan
				Cakupan Program Penanggulangan Kemiskinan terhadap Seluruh Program Pembangunan
		Meningkatkan kapasitas Pemuda	Terbinanya Kelembagaan Pemuda secara berkelanjutan	Daya Tumbuh Organisasi Pemuda terhadap organisasi pemuda yang sudah ada
				Cakupan Pemuda yang berwirausaha terhadap Seluruh Pemuda
				Rasio Organisasi Pemuda Aktif terhadap Seluruh Organisasi Pemuda
				Daya serap partisipasi pemuda dalam proses perencanaan pembangunan
		Meningkatkan produktifitas prestasi olah raga	Tersedianya sarana prasarana olahraga yang memadai	Rasio Lapangan Olahraga terhadap Cabang Olahraga Tertentu
				Tersedianya dana pembinaan olahraga yang memadai
		Meningkatkan kualitas data dan informasi	Tersedianya sarana pendukung yang memadai	Dokumen Pembangunan
			Tersedianya sistem data yang terpadu	Dokumen Pembangunan
Meningkatkan kualitas layanan arsip	Tersedianya sarana prasarana kearsipan yang memadai	Daya Tampung Gedung Arsip terhadap Keseluruhan Arsip Yang Ada		

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (outcome)	
1	2	3	4		
		Meningkatkan kualitas sarana perpustakaan	Terpenuhinya SDM Layanan Arsip sesuai kebutuhan	Rasio Arsiparis terhadap Seluruh Aparatur Sipil Negara	
			Terpenuhinya sistem pengelolaan arsip yang terpadu	Cakupan SKPD yang mengelola arsip secara baku	
			Tersedianya sarana prasarana perpustakaan yang memadai	Daya Tampung Gedung terhadap jumlah bahan pustaka	
				Rasio jumlah perpustakaan yang dibina terhadap seluruh perpustakaan yang ada	
				Daya Tumbuh Perpustakaan Rumah Ibadah	
		Terpenuhinya SDM Layanan Perpustakaan yang memadai	Rasio Pustakawan terhadap Seluruh Aparatur Sipil Negara		
	<b>MISI III MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA</b>				
	Meningkatkan efektifitas layanan ketenagakerjaan	Tersedianya tenaga kerja yang berkompeten	Persentase angkatan kerja yang terlatih		
		Terlindunginya tenaga kerja sesuai ketentuan	Persentase kasus yang ditangani		
		Tersedianya informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi	Cakupan layanan informasi		
	Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM	Terbentuknya kelembagaan koperasi yang profesional	Persentase koperasi aktif		
		Tersedianya SDM yang berkompeten	Persentase koperasi berprestasi		
		Terwujudnya akses permodalan	Persentase UKM yang terfasilitasi		
	Meningkatkan stabilitas ketersediaan stok dan distribusi komoditas strategis	Tersedianya kelembagaan yang mantap	Dokumen		
		Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Daya tampung		
Tersedianya SDM yang berkompeten		Persentase jumlah penyuluh yang dilatih			
		Persentase hasil terapan visitasi			

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (outcome)		
1	2	3	4			
		Meningkatkan produktifitas pertanian	Tersedianya lahan budidaya yang memadai	Produktifitas		
		Meningkatkan aminitas wisatawan	Tersedianya sarana dan prasarana yang representatif	Daya tampung terhadap pelaku seni		
			Tersedianya Data/Informasi yang memadai	Dokumen		
			Terdidiknya Pelaku Wisata yang Profesional	Persentase Pelaku Wisata Yang Terdidik		
			Terpeliharanya situasi keamanan secara menyeluruh	Persentase Keamanan di Destinasi wisata		
		Meningkatkan produktifitas perikanan	Tersedianya Sarana Prasarana Yang Memadai	Persentase Kelompok Penerima		
			Tersedianya Sumberdaya Perikanan	Produksi perikanan tangkap		
			Terlatihnya Sumberdaya Petani/Nelayan yang Terampil	Produksi perikanan budidaya		
			Tersedianya modal usaha yang memadai	Persentase jumlah poktan yang terampil		
		Meningkatkan stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok	Terwujudnya masyarakat yang paham tentang perkembangan harga komoditas	Persentase jumlah masyarakat nelayan yang memperoleh modal usaha		
			Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Cakupan Layanan Informasi Harga komoditas		
			Tersedianya Tim Pengamanan dan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa yang berkompeten	Umur Teknis pasar tradisional		
		Meningkatkan kualitas industri kecil menengah	Tersedianya pelaku IKM yang berdaya saing	Pedoman Umum		
			Tersedianya permodalan Usaha	Presentase pelaku usaha yang dilatih		
			Tersedianya Sarana Produksi yang memadai	MOU		
			Tersedianya dana bantuan secara simultan	Presentase kelompok penerima bantuan		
		Meningkatkan efektifitas layanan perijinan	Tersedianya SDM penanaman modal yang handal	Persentase kelompok yang menerima bantuan		
			Tersedianya sistem pelayanan yang tepat	Presentase		
			Tersedianya regulasi layanan perijinan yang proporsional	Waktu penyelesaian perijinan		
					Dokumen	

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (outcome)
1	2	3	4	
	<b>MISI IV MENINGKATKAN KELAYAKAN HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENANGANAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN BERBASIS TATA RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN</b>			
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana sarana perumahan dan kawasan permukiman		Tersedianya regulasi pengelolaan air limbah yang komprehensif	Perda Pengelolaan Air Limbah
			Tersedianya lembaga pengelolaan air limbah yang terstruktur	Persentase lembaga pengelolaan air limbah yang berfungsi
			Tersedianya lahan sarana pengolah air limbah yang memadai	Persentase lahan yang tersedia untuk pengelolaan air limbah
			Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang memadai	Cakupan pengelolaan air limbah
			Tersedianya akses air bersih secara merata	Cakupan pelayanan air bersih
			Tersedianya regulasi pengelolaan sampah yang komprehensif	Perda Pengelolaan Sampah
			Tersedianya lembaga pengelolaan sampah secara berjenjang	Persentase lembaga pengelolaan sampah yang berfungsi
			Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang memadai	Cakupan pengelolaan sampah
			Terbentuknya TPA regional yang optimal	Nota Kesepahaman (MoU)
			Terkelolanya sampah berbasis energi terbarukan yang berkualitas	Persentase pengurangan sampah
	Tertanganinya permasalahan banjir dan genangan secara optimal	Cakupan wilayah layanan drainase / Cakupan luas genangan dan banjir		
	Meningkatkan aksesibilitas wilayah		Tersedianya jaringan jalan dan jembatan sesuai standar	Persentase jalan dalam kondisi mantap sesuai NSPM
			Tersedianya fasilitas pejalan kaki dan pesepeda yang aman dan nyaman	Persentase jembatan dalam kondisi baik sesuai NSPM
	Meningkatkan efektifitas jaringan irigasi		Tersedianya fasilitas pejalan kaki dan pesepeda yang aman dan nyaman	Persentase fasilitas pejalan kaki dan pesepeda
			Terpeliharanya jaringan irigasi yang optimal	Cakupan layanan irigasi (mempertahankan)

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (outcome)	
1	2	3	4		
		Meningkatkan kapasitas pengawasan jasa konstruksi	Terwujudnya kualitas jasa konstruksi yang sesuai standar	Persentase bangunan yang memiliki sertifikat layak fungsi	
		Meningkatkan aksesibilitas perumahan dan permukiman layak huni	Tertanganinya kawasan permukiman kumuh secara menyeluruh	Cakupan kawasan permukiman kumuh	
			Tertanganinya rumah tidak layak huni secara menyeluruh	Persentase rumah layak huni	
			Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang memadai	Persentase Fasilitas Umum (terhadap luas kawasan permukiman)	
		Meningkatkan aminitas pengguna jalan	Tersedianya sistem transportasi publik yang memadai	Cakupan wilayah yang terlayani angkutan publik	
			Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	Cakupan ketersediaan fasilitas perhubungan	
			Terpasangnya fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan ( <i>road safety</i> ) secara menyeluruh	Cakupan ketersediaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan	
			Terkelolanya perparkiran secara optimal	Persentase lokasi parkir yang terkelola	
		Meningkatkan efektifitas penataan ruang	Terwujudnya perencanaan tata ruang yang berkualitas	Perda Penataan Ruang	
			Terwujudnya pemanfaatan ruang secara tertib sesuai prosuder	Persentase kesesuaian rencana dengan pemanfaatan ruang	
			Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sejalan dengan peraturan	Persentase ketidaksesuaian pemanfaatan tata ruang	
		Meningkatkan efektifitas pengelolaan tanah milik daerah	Terkelolanya aset milik daerah secara tertib sesuai prosedur	Persentase tanah milik daerah yang telah bersertifikat	
		Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Tertanganinya pencemaran lingkungan hidup secara menyeluruh	Persentase badan air yang tercemar	
				Hasil Penilaian Adipura	
				Tercapainya luasan ruang terbuka hijau publik dan privat sejalan dengan peraturan	Persentase Ruang Terbuka Hijau

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (outcome)		
1	2	3	4			
			Terwujudnya kesiapsiagaan kebencanaan pada wilayah rawan bencana	Rasio ketersediaan sarpras penanggulangan bencana		
				Daya tanggap darurat		
			Tertatanya layanan komunikasi dan informatika yang berkualitas	Cakupan layanan informasi publik		
				Cakupan layanan publik melalui sistem elektronik		
	<b>MISI V MENINGKATKAN KEANDALAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPERMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)</b>					
		Meningkatkan kualitas layanan publik		Tersedianya sarana prasarana pemerintah yang memadai	Rasio umur ekonomis Gedung Pemerintahan dan Sarana Penunjang	
					Cakupan ketersediaan gedung kelurahan sesuai kebutuhan	
				Tercapainya target penerimaan PAD	Penerimaan PAD	
		Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan			Terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	Dokumen
					Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai	Bangunan gedung
					Tertatanya birokrasi pemerintahan	Cakupan unit pelayanan berkualitas baik
					Terwujudnya system pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel	Persentase pejabat pengadaan barang/jasa yang aktif
					Terwujudnya system administrasi pembangunan yang tertib dan terkendali	Persentase pencapaian realisasi program Perangkat Daerah
					Tersedianya SDM yang profesional	Cakupan pejabat structural yang telah mengikuti diklatpim
						Cakupan layanan kepegawaian
					Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan/bezetting pegawai					

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (outcome)	
1	2	3	4		
			Tersedianya regulasi daerah sesuai kebutuhan	Cakupan Perda yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan	
			Terpenuhinya laporan hasil pemeriksaan kegiatan pembangunan yang efektif dan efisien	Dokumen laporan hasil pemeriksaan	
				Rasio auditor terhadap ASN	
			Terpenuhinya struktur kelembagaan yang proporsional	Dokumen SOTK	
			Terbinanya SDM Aparatur secara berkelanjutan	Cakupan fasilitasi kegiatan ASN	
			Terpenuhinya regulasi sesuai kebutuhan	Cakupan produk hukum yang ditetapkan sesuai kebutuhan	
			Meningkatkan kualitas rencana pembangunan	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang akurat dan akuntabel	Dokumen Perencanaan Pembangunan
				Tersedianya data penunjang yang valid dan berkualitas	Dokumen
				Terjalinnnya Kerjasama dan Kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan Pembangunan	Cakupan koordinasi kerjasama dan kajian pembangunan
		Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan		Tingkat/Persentase aspirasi masyarakat melalui musrenbang	

# BAB 6

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk menjamin konsistensi dan implementasi visi, misi dan tujuan serta sasaran maka diperlukan **strategi** dan **arah kebijakan** sehingga dapat diidentifikasi tahapan dan berbagai faktor dengan harapan mampu memberikan solusi akan berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan dalam lima tahun kedepan sehingga visi dan misi dapat terwujud.

Strategi merupakan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah langkah yang diperlukan tujuan memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun dan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan peangaturan pelaksanaannya, diperlukan pedoman berupa arah kebijakan.

Salah satu alat analisis dalam merumuskan strategi adalah Analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*) sebagai alat identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi sebuah institusi dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) dan secara bersamaan melakukan upaya meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) serta ancaman (*threats*). Dengan pemetaan tersebut, setidaknya dapat ditempuh empat strategi sehubungan dengan upaya pengembangan di Kota Mataram. *Pertama*, “Strategi SO” yang berupaya untuk memanfaatkan kekuatan dalam rangka meraih peluang. *Kedua*, “Strategi ST” yaitu memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman. *Ketiga*, “Strategi WO” dengan mengatasi kelemahan untuk meraih peluang. *Keempat*, “Strategi WT” dengan meminimalisasi kelemahan agar mampu bertahan dari ancaman.

<b>EKTERNAL</b>	<b>OPPORTUNITIES</b>	<b>THREATS</b>
<b>INTERNAL</b>		
<b>STRENGTHS</b>	<b>SO</b> memanfaatkan kekuatan dalam rangka meraih peluang	<b>ST</b> memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman.
<b>WEAKNESS</b>	<b>WO</b> Mengatasi kelemahan untuk meraih peluang	<b>WT</b> meminimalisasi kelemahan agar mampu bertahan dari ancaman.

Penentuan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram tahun 2016-2021, diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan bidang pembangunan yaitu Bidang Pembangunan Sosial Budaya, Bidang Pembangunan Ekonomi, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana dan *Good Governance*, sebagai berikut:

### 1. Bidang Pembangunan Sosial Budaya

INTERNAL	EKSTERNAL
<p><b>STRENGTHS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Mataram merupakan ibukota Provinsi NTB.</li> <li>2. Secara spasial, Kota Mataram berkedudukan sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan RTRWN</li> <li>3. Kota Mataram sebagai Kawasan Strategis Provinsi dengan Kawasan Mataram Metro</li> <li>4. Pusat Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Pusat Pelayanan Jasa Kesehatan skala regional.</li> <li>6. Sebagai kawasan Hub dengan Kawasan Pengembangan Wilayah skala Pulau Lombok</li> <li>7. Banyak potensi sarana sosial budaya yang telah terbangun oleh pemerintah</li> <li>8. Banyaknya sarana ibadah yang dapat digunakan sebagai sarana sosial kebudayaan</li> </ol>	<p><b>WEAKNESSES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum meratanya kualitas pendidikan dan lemahnya pengawasan penyelenggaraan pendidikan.</li> <li>2. Belum optimalnya penataan dan pemerataan kompetensi guru</li> <li>3. Belum optimalnya penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)</li> <li>4. Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai</li> <li>5. Masih ada pelayanan lembaga pendidikan yang belum sesuai dengan standar nasional</li> <li>6. Penuntasan wajib belajar 12 tahun terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum berjalan mantap dan sesuai harapan</li> <li>7. Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya.</li> <li>8. Belum optimalnya kualitas dan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar.</li> <li>9. Meningkatnya prevalensi penyakit menular (DBD, Infeksi Menular Seksual, HIV/AIDS serta TB) serta penyakit tidak menular (stroke, jantung, hipertensi DM)</li> <li>10. Belum optimalnya sinergitas pelayanan kesehatan antara pemerintah dengan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan</li> <li>11. Tingginya tingkat kepadatan penduduk Kota Mataram yang mencapai angka rata-rata 7.345 jiwa/km<sup>2</sup> pada 2015.</li> <li>12. Tingginya jumlah migrasi penduduk ke Kota Mataram yaitu sebesar 12.605 jiwa pada 2015. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan pertambahan penduduk dari selisih jumlah kelahiran dan kematian pada tahun yang sama sebesar 1.231 jiwa.</li> <li>13. Masih rendahnya tingkat pengetahuan &amp; pemahaman remaja tentang program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</li> <li>14. Tingginya angka pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja, kemiskinan juga belum dapat dituntaskan. Angka kemiskinan kota mataram saat ini mencapai 10,06% dari jumlah penduduk</li> <li>15. Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal</li> </ol>

INTERNAL	EKSTERNAL
	<ol style="list-style-type: none"> <li>16. Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif</li> <li>17. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih belum optimal</li> <li>18. Pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia belum berjalan seperti yang diharapkan</li> <li>19. Belum optimalnya pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang berbasis nilai dan kearifan lokal.</li> <li>20. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra.</li> <li>21. Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya.</li> <li>22. Belum optimalnya kualitas pengembangan nilai-nilai budaya dan karifan lokal masyarakat</li> <li>23. Rendahnya kepekaan terhadap warisan budaya daerah nenek moyang sebagai bagian dari perekat budaya nasional</li> <li>24. Pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi bagi anak dan remaja</li> <li>25. Adanya pengaruh negatif kebebasan informasi yang berpotensi menurunkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan</li> <li>26. Masih rendahnya kualitas SDM PMKS dalam mengembangkan kelompok PMK</li> <li>27. Keterlibtan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) belum terkoordinasi dengan baik</li> <li>28. Masih belum optimalnya pembinaan olahraga untuk mencapai prestasi olahraga daerah</li> <li>29. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan kepemudaan di masyarakat, termasuk keberadaan pemuda pelopor</li> </ol>
<p><b>OPPORTUNITIES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan nasional tentang pendidikan karakter dan revolusi mental merupakan peluang digalinya nilai dan kearifan lokal dalam kebudayaan dan pendidikan</li> <li>2. Kebijakan tentang Pariwisata nasional dengan melakukan festival kebudayaan memberi ruang ekspresi kepada pelaku seni budaya</li> <li>3. Banyaknya event MICE yang menampilkan tradisi dan budaya lokal Mataram</li> </ol>	<p><b>THREATS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ancaman dampak negatif kemajuan teknologi infoamsi dan komunikasi bagi pendidikan keluarga dan budaya</li> <li>2. Masuknya SDM Tenaga medis dan tenaga pendidik dari LN yang lebih berkualitas</li> </ol>

## Penentuan Alternatif Strategi dan Indikator Sasaran

EKTERNAL INTERNAL	OPPORTUNITIES	THREATS
<b>Kekuatan (STRENGTHS)</b>	<p style="text-align: center;"><b>SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mediasi dan Fasilitasi budayawan yang kompeten</li> <li>2. Mediasi dan Fasilitasi situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif</li> <li>3. Reorganisasi kelembagaan pemuda yang berkelanjutan</li> <li>4. Distribusi Pendanaan bagi Olahragawan dan Siswa Berprestasi</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>ST</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konstruksi dan rehabilitasi prasarana dan sarana PAUD, SD dan SMP yang memadai</li> <li>2. Konstruksi dan Rehabilitasi sarana prasarana Puskesmas dan RSUD yang memadai</li> <li>3. Konstruksi dan rehabilitasi sarana penunjang kehidupan beragama yang memadai</li> <li>4. Konstruksi, Rehabilitasi Lapangan dan Gedung Olahraga yang memadai</li> </ol>
<b>Kelemahan (WEAKNESS)</b>	<p style="text-align: center;"><b>WO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revitalisasi SPM dan SOP</li> <li>2. Revitalisasi sarana penunjang kebudayaan yang memadai</li> <li>3. Distribusi Dana untuk tenaga syiar dan lembaga keagamaan yang proporsional</li> <li>4. Mediasi Kelompok Masyarakat Termarginalkan secara berkelanjutan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>WT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edukasi tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai kompetensi secara merata</li> <li>2. Edukasi Tenaga Medis dan Paramedis yang profesional</li> <li>3. Edukasi tenaga syiar keagamaan yang berkualitas</li> <li>4. Sosialisasi dan Fasilitasi kepada kelompok ekonomi dan sosial di masyarakat yang berkelanjutan</li> <li>5. Klarifikasi penduduk miskin sesuai kondisi</li> </ol>

Dari alternatif strategi di atas, maka di munculkan strategi yang terpilih yaitu:

1. Konstruksi dan rehabilitasi prasarana dan sarana PAUD, SD dan SMP yang memadai
2. Edukasi tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai kompetensi secara merata
3. Konstruksi dan Rehabilitasi sarana prasarana Puskesmas dan RSUD yang memadai
4. Edukasi Tenaga Medis dan Paramedis yang profesional
5. Revitalisasi SPM dan SOP
6. Revitalisasi sarana penunjang kebudayaan yang memadai
7. Mediasi dan Fasilitasi budayawan yang kompeten
8. Mediasi dan Fasilitasi situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif
9. Mediasi dan Fasilitasi kerukunan hidup masyarakat yang optimal
10. Konstruksi dan rehabilitasi sarana penunjang kehidupan beragama yang memadai
11. Edukasi tenaga syiar keagamaan yang berkualitas

12. Distribusi Dana untuk tenaga syiar dan lembaga keagamaan yang proporsional
13. Sosialisasi dan Fasilitasi kepada kelompok ekonomi dan sosial di masyarakat yang berkelanjutan
14. Integrasi Teknologi Informasi yang berkualitas
15. Fasilitasi dan Mediasi Penduduk Perempuan secara menyeluruh
16. Mediasi dan Fasilitasi Organisasi Perempuan secara berkelanjutan
17. Mediasi dan Fasilitasi Anak Usia 6-15 Tahun sesuai situasi
18. Revitalisasi layanan yang berkualitas bagi anak
19. Mediasi, Fasilitasi, dan Komunikasi terhadap laju pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan
20. Sosialisasi dan Fasilitasi Keluarga yang berkualitas
21. Mediasi Kelompok Masyarakat Termarginalkan secara berkelanjutan
22. Klarifikasi penduduk miskin sesuai kondisi
23. Reorganisasi kelembagaan pemuda yang berkelanjutan
24. Konstruksi, Rehabilitasi Lapangan dan Gedung Olahraga yang memadai
25. Distribusi Pendanaan bagi Olahragawan dan Siswa Berprestasi

## 2. Bidang Pembangunan Bidang Ekonomi

INTERNAL	EKSTERNAL
<p><b>STRENGTHS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Mataram merupakan ibukota Provinsi NTB.</li> <li>2. Secara spasial, Kota Mataram berkedudukan sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan RTRWN</li> <li>3. Kota Mataram sebagai Kawasan Strategis Provinsi dengan Kawasan Mataram Metro</li> <li>4. Pusat Pendidikan Tinggi dan Pelayanan Jasa Kesehatan skala regional.</li> <li>5. Sebagai kawasan Hub dengan Kawasan Pengembangan Wilayah skala Pulau Lombok</li> <li>6. Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram diatas rata rata pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional</li> <li>7. Kondusitas wilayah yang sangat mendukung invetsasi</li> </ol>	<p><b>WEAKNEES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terjalannya pola kemitraan dalam upaya pengembangan usaha;</li> <li>2. Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia pengelola/ pengurus koperasi;</li> <li>3. Tingginya tingkat kompetisi dengan badan usaha lainnya;</li> <li>4. Terbatasnya ruang lingkup pelayanan koperasi;</li> <li>5. Belum adanya pengenaan sangsi hukum yang sesuai;</li> <li>6. Terbatasnya akses WUB terhadap sumber pemodalan usaha</li> <li>7. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar untuk investasi;</li> <li>8. Belum optimalnya regulasi yang mendukung kearah pengembangan PTSP;</li> <li>9. Belum optimalnya penerapan regulasi terkait prosedur pengelolaan PMA maupun PMDN;</li> <li>10. Belum optimalnya pemanfaatan RTRW sebagai pedoman dalam penentuan zona investasi;</li> <li>11. Belum tersedianya profil dan informasi yang bisa diakses dengan mudah oleh investor;</li> <li>12. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perijinan yang ada;</li> <li>13. Relatif rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja;</li> <li>14. Masih terbatasnya kesempatan kerja;</li> <li>15. Tingginya jumlah angkatan kerja;</li> <li>16. Belum meratanya tingkat penyebaran tenaga kerja;</li> <li>17. Tingkat pengangguran;</li> </ol>

<b>INTERNAL</b>	<b>EKSTERNAL</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>18. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi anekaragam pangan dengan gizi seimbang;</li> <li>19. Belum optimalnya pola kemitraan antar stakeholder ketahanan pangan;</li> <li>20. Berkurangnya lahan pertanian budidaya/produktif;</li> <li>21. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam upaya memperbaiki sistem budidaya tanaman, penanganan pasca panen, pengolahan pangan dan penanganan distribusi;</li> <li>22. Belum optimalnya diversifikasi pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;</li> <li>23. Belum sinerginya Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) Provinsi NTB dengan RIPARDA pemerintah Kota Mataram sebagai acuan perencanaan sektor kepariwisataan;</li> <li>24. Belum optimalnya pengawasan, pengendalian dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL);</li> <li>25. Lemahnya daya saing produk-produk lokal dari sisi akses pasar baik lokal, regional maupun internasional;</li> <li>26. Masih adanya permainan pasar yang mengakibatkan terjadinya lonjakan harga komoditas;</li> <li>27. Masih minimnya ekspektasi masyarakat terhadap perkembangan harga komoditas pangan strategis;</li> <li>28. Belum idealnya penerapan regulasi dalam hal pengaturan jumlah usaha toko modern;</li> <li>29. Belum optimalnya upaya peningkatan daya saing UMKM sebagai industri kreatif dan inovatif;</li> <li>30. Keterbatasan kemampuan UMKM dalam pemanfaatan fasilitas pembiayaan yang ada;</li> <li>31. Masih minimnya standar, desain dan kualitas mutu produk yang dihasilkan;</li> <li>32. Masih rendahnya diversifikasi output dan stabilitas</li> </ol>
<p><b>OPPORTUNITIES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya dorongan pemerintah pusat dan daerah untuk kegiatan ekonomi UMKM dan Koperasi</li> <li>2. Fasilitas permodalan bagi Koperasi dan UMKM dari perbankan</li> <li>3. Tingginya minat Investasi dari dalam dan luar negeri</li> <li>4. Promosi wisata yang dilakukan oleh pihak dalam dan luar negeri</li> </ol>	<p><b>THREATS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ancaman masuknya SDM Luar Negeri dan Luar NTB yang memiliki kompetensi dan keahlian di atas SDM Lokal</li> <li>2. Tingginya pasokan komoditas yang berasal dari luar Kota Mataram</li> <li>3. Tingginya tingkat persaingan termasuk dalam memperoleh sumber daya;</li> </ol>

Penentuan Alternatif Strategi dan Indikator Sasaran, sebagai berikut:

<b>EKTERNAL</b> <b>INTERNAL</b>	<b>OPPORTUNITIES</b>	<b>THREATS</b>
<b>Kekuatan (STRENGTHS)</b>	<p style="text-align: center;"><b>SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mediasi pekerja dengan pemilik pekerjaan</li> <li>2. Intensifikasi peningkatan produktifitas pertanian</li> <li>3. Koordinasi yang terpola dan berkelanjutan</li> <li>4. Fasilitasi pengembangan usaha</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>ST</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edukasi dan standarisasi mutu serta kompetensi tenaga kerja</li> <li>2. Revitalisasi kelembagaan Koperasi</li> <li>3. Edukasi kompetensi SDM kelembagaan dan UKM</li> <li>4. Revitalisasi prasarana pengaman stok komoditas pangan</li> <li>5. Edukasi kualitas dan mutu penyuluhan</li> <li>6. Konstruksi prasarana destinasi pariwisata</li> <li>7. Edukasi dan fasilitasi SDM kepariwisataan daerah</li> <li>8. Edukasi peningkatan mutu pengolahan hasil perikanan</li> <li>9. Konstruksi/Renovasi prasarana perdagangan</li> <li>10. Edukasi daya saing IKM</li> <li>11. Distribusi sarana produksi IKM</li> </ol>
<b>Kelemahan (WEAKNESS)</b>	<p style="text-align: center;"><b>WO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi keterbukaan informasi ketenagakerjaan</li> <li>2. Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga pebankan</li> <li>3. Visitasi daerah yang representatif</li> <li>4. Transaksi pengadaan sarana produksi bagi nelayan</li> <li>5. Eksplorasi potensi produksi perikanan</li> <li>6. Distribusi stimulan pengembangan usaha</li> <li>7. Ekspektasi masyarakat terhadap ketersediaan dan kepastian harga komoditas pangan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>WT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reorganisasi internal kelembagaan</li> <li>2. Inventarisasi data dan informasi kepariwisataan daerah</li> <li>3. Reorganisasi pola kerja kelembagaan</li> </ol>

Dari alternatif strategi di atas, maka di munculkan strategi yang terpilih yaitu:

1. Edukasi dan standarisasi mutu serta kompetensi tenaga kerja
2. Mediasi pekerja dengan pemilik pekerjaan
3. Fasilitasi keterbukaan informasi ketenagakerjaan
4. Revitalisasi kelembagaan Koperasi
5. Edukasi kompetensi SDM kelembagaan dan UKM
6. Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga pebankan
7. Reorganisasi internal kelembagaan

8. Revitalisasi prasarana pengaman stok komoditas pangan
9. Edukasi kualitas dan mutu penyuluhan
10. Visitasi daerah yang representatif
11. Intensifikasi peningkatan produktifitas pertanian
12. Konstruksi prasarana destinasi pariwisata
13. Inventarisasi data dan informasi kepariwisataan daerah
14. Edukasi dan fasilitasi SDM kepariwisataan daerah
15. Koordinasi yang terpolo dan berkelanjutan
16. Transaksi pengadaan sarana produksi bagi nelayan
17. Eksplorasi potensi produksi perikanan
18. Edukasi peningkatan mutu pengolahan hasil perikanan
19. Distribusi stimulan pengembangan usaha
20. Ekspektasi masyarakat terhadap ketersediaan dan kepastian harga komoditas pangan
21. Konstruksi/Renovasi prasarana perdagangan
22. Reorganisasi pola kerja kelembagaan
23. Edukasi daya saing IKM
24. Fasilitasi pengembangan usaha
25. Distribusi sarana produksi IKM

### 3. Bidang Sarana dan Prasarana

INTERNAL	EKSTERNAL
<p><b>STRENGTHS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Mataram merupakan ibukota Provinsi NTB.</li> <li>2. Secara spasial, Kota Mataram berkedudukan sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan RTRWN</li> <li>3. Kota Mataram sebagai Kawasan Strategis Provinsi dengan Kawasan Mataram Metro</li> <li>4. Pusat Pendidikan Tinggi dan Pelayanan Jasa Kesehatan skala regional.</li> <li>5. Sebagai kawasan Hub dengan Kawasan Pengembangan Wilayah skala Pulau Lombok</li> </ol>	<p><b>WEAKNEES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih adanya genangan air pada beberapa lokasi, disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (a) Banjir kiriman yang berasal dari daerah hulu yang mengalir melalui sungai-sungai yang ada di Kota Mataram, (b). Penutupan saluran yang tidak mengikuti petunjuk teknis dari instansi terkait (c). Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan drainase dengan tidak membuang sampah ke saluran masih rendah</li> <li>2. Luas kawasan kumuh yang mencapai 803,39 ha, yang salah satu indikatornya adalah kepadatan bangunan</li> <li>3. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang</li> <li>4. Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian sebagai akibat dari perkembangan kota</li> <li>5. Masih adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.</li> <li>6. Keterbatasan lahan yang difungsikan sebagai RTH.</li> <li>7. Keterbatasan Lahan untuk pengadaan areal TPU.</li> <li>8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki IMB.</li> <li>9. Belum terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan.</li> </ol>

INTERNAL	EKSTERNAL
	10. Masih kurangnya pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas 11. Belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan serta kawasan permukiman 12. Belum tersedianya sistem informasi yang terintegrasikan antar unit kerja melalui jaringan komunikasi antar SKPD. 13. Masih kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi oleh masyarakat khususnya pelajar dan remaja.
<b>OPPORTUNITIES</b> 1. Kebijakan nasional 100-0-100 2. Program Adaptasi thd perubahan iklim 3. Program Nasional Kota Hijau 4. Program Nasional Kota Berketahanan, Kota Pintar dan Kota Layak Anak 5. Program Pengembangan Negeri Maritim dan Tol Laut 6. Masuk dalam delineasi Kawasan Geo Park Gunung Rinjani	<b>THREATS</b> 1. Ancaman Isu Perubahan iklim global 2. Ancaman Bencana Vulkanik 3. Stok lahan terbatas 4. Pertumbuhan penduduk yang tinggi 5. Migrasi penduduk dari daerah sekitar yang tinggi

Penentuan Alternatif Strategi dan Indikator Sasaran, sebagai berikut:

EKSTERNAL INTERNAL	OPPORTUNITIES	THREATS
<b>Kekuatan (STRENGTHS)</b>	<b>SO</b> 1. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dengan Pemerintah Pusat untuk mengakses Program dan Pendanaan APBN untuk pembangunan infrastruktur dasar perkotaan (jalan, drainase, sampah, sanitasi, limbah) guna mendukung Kota Mataram sebagai Pusat Kegiatan Nasional 2. Meningkatkan dukungan Pemerintah Provinsi NTB untuk pembangunan infrastruktur dasar di Kota Mataram sebagai Kawasan Strategis Provinsi Mataram Metro. 3. Meningkatkan aksesibilitas transportasi antar kawasan wisata dan pusat aktivitas distribusi barang dan jasa	<b>ST</b> 1. Koordinasi dan Ratifikasi peraturan pengelolaan air limbah 2. Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah pada skala lingkungan 3. Investasi lahan pada kawasan permukiman kumuh 4. Koordinasi dan reorganisasi Pembentukan TPA regional 5. Memperkuat jaringan kota kota dalam mengadaptasi isu perubahan iklim 6. Melakukan investasi dan efisiensi aset penggunaan lahan/ruang dengan pembangunan vertikal
<b>Kelemahan (WEAKNESS)</b>	<b>WO</b> 1. Konstruksi dan Intensifikasi sarana pengelolaan sampah skala Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, dan Kota 2. Koordinasi dan reorganisasi Pembentukan TPA regional	<b>WT</b> 1. Sosialisasi dan fasilitasi pada pelaku jasa konstruksi

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Konstruksi dan implementasi teknologi sampah berbasis energi terbarukan skala kecamatan dan kota</li> <li>4. Konstruksi dan rehabilitasi sistem drainase, irigasi dan sungai</li> <li>5. Konstruksi dan rehabilitasi pada jaringan jalan kota</li> <li>6. Konstruksi dan rehabilitasi fasilitas pejalan kaki dan pesepeda pada jaringan jalan utama kota</li> <li>7. Konstruksi dan rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Kawasan Pertanian</li> <li>8. Mengatasi bencana banjir dan genangan dengan program Kota Hijau dan Kota Berketahanan</li> </ol>	
--	---	--

Dari alternatif strategi di atas, maka di munculkan strategi yang terpilih yaitu:

1. Koordinasi dan Ratifikasi peraturan pengelolaan air limbah
2. Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah pada skala lingkungan
3. Investasi lahan pada kawasan permukiman kumuh
4. Konstruksi dan rehabilitasi pengelolaan air limbah pada kawasan kumuh
5. Konstruksi sambungan air bersih pada kawasan permukiman
6. Koordinasi dan ratifikasi peraturan Pengelolaan sampah
7. Restrukturisasi lembaga pengelolaan sampah skala lingkungan, kelurahan dan kota
8. Konstruksi dan Intensifikasi sarana pengelolaan sampah skala Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, dan Kota
9. Koordinasi dan reorganisasi Pembentukan TPA regional
10. Konstruksi dan implementasi teknologi sampah berbasis energi terbarukan skala kecamatan dan kota
11. Konstruksi dan rehabilitasi sistem drainase, irigasi dan sungai
12. Konstruksi dan rehabilitasi pada jaringan jalan kota
13. Konstruksi dan rehabilitasi fasilitas pejalan kaki dan pesepeda pada jaringan jalan utama kota
14. Konstruksi dan rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Kawasan Pertanian
15. Sosialisasi dan fasilitasi pada pelaku jasa konstruksi

#### 4. Bidang Good Governance

INTERNAL	EKSTERNAL
<b>STRENGTHS</b>	<b>WEAKNESSES</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas SDM Aparatur yang usia muda dan memiliki kualifikasi pendidikan relatif lebih baik di banding Kota/Kabupaten lain di NTB</li> <li>2. Tingginya potensi dan realisasi PAD</li> <li>3. Pengelolaan Keuangan Pemerintah telah mendapat WTP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya perangkat hukum dalam pelayanan publik dan good governance</li> </ol>
<b>OPPORTUNITIES</b>	<b>THREATS</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peluang dan kesempatan peningkatan kualitas ASN yang sangat besar dari Pemerintah Pusat dan Negara donor</li> </ol>	

Penentuan Alternatif Strategi dan Indikator Sasaran, sebagai berikut:

<b>EKSTERNAL</b> <b>INTERNAL</b>	<b>OPPORTUNITIES</b>	<b>THREATS</b>
<b>Kekuatan (STRENGTHS)</b>	<p><b>SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Penetapan PERDA sesuai kebutuhan</li> <li>2. Fasilitasi Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan yang efektif dan efisien</li> <li>3. Fasilitasi SOTK yang proporsional</li> <li>4. Fasilitasi dan Mediasi Aparatur Sipil Negara secara berkelanjutan</li> <li>5. Fasilitasi, konsultasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan</li> <li>6. Fasilitasi, komunikasi dan koordinasi yang diarahkan pada pemangku kepentingan pembangunan</li> <li>7. Koordinasi, Fasilitasi dan sosialisasi masyarakat yang diarahkan pada peningkatan partisipasi dalam perencanaan dan pembangunan daerah</li> </ol>	<p><b>ST</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konstruksi, rehabilitasi dan transaksi sumber daya milik daerah</li> <li>2. Bantuan modal sebagai stimulan pengembangan usaha</li> </ol>
<b>Kelemahan (WEAKNESS)</b>	<p><b>WO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intensifikasi potensi penerimaan PAD</li> <li>2. Edukasi profesionalitas sumber daya penanaman modal</li> <li>3. Simplikasi prosedur dan kemudahan akses pelayanan perijinan</li> <li>4. Edukasi Aparatur Sipil Negara yang profesional</li> <li>5. Legislasi Penetapan PERWAL, Keputusan dan SK sesuai kebutuhan</li> </ol>	<p><b>WT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi dan evaluasi pertanggung jawaban keuangan Daerah</li> <li>2. Inventarisasi tingkat kepuasan konsumen</li> <li>3. Konsolidasi, Restrukturisasi birokrasi pemerintahan</li> <li>4.</li> </ol>

Dari alternatif strategi di atas, maka di munculkan strategi yang terpilih yaitu:

1. Konstruksi, rehabilitasi dan transaksi sumber daya milik daerah
2. Inventarisasi dan evaluasi pertanggung jawaban keuangan Daerah
3. Intensifikasi potensi penerimaan PAD
4. Bantuan modal sebagai stimulan pengembangan usaha
5. Edukasi profesionalitas sumber daya penanaman modal
6. Inventarisasi tingkat kepuasan konsumen
7. Simplikasi prosedur dan kemudahan akses pelayanan perijinan
8. Konsolidasi, Restrukturisasi birokrasi pemerintahan
9. Edukasi Aparatur Sipil Negara yang profesional
10. Fasilitasi Penetapan PERDA sesuai kebutuhan
11. Fasilitasi Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan yang efektif dan efisien
12. Fasilitasi SOTK yang proporsional
13. Fasilitasi dan Mediasi Aparatur Sipil Negara secara berkelanjutan
14. Legislasi Penetapan PERWAL, Keputusan dan SK sesuai kebutuhan
15. Fasilitasi, konsultasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan
16. Fasilitasi, komunikasi dan koordinasi yang diarahkan pada pemangku kepentingan pembangunan
17. Koordinasi, Fasilitasi dan sosialisasi masyarakat yang diarahkan pada peningkatan partisipasi dalam perencanaan dan pembangunan daerah

---

### **6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MEWUJUDKAN MISI**

---

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, maka penentuan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram tahun 2016-2021, sebagai berikut:

***Misi 1 : Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai Agama dan kearifan lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, rukun dan damai***

Adapun tujuan dalam misi tersebut diatas adalah :

1. Meningkatkan kualitas pengembangan nilai nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat yang dicapai melalui beberapa sasaran:
  - a. Tersedianya sarana penunjang kebudayaan yang memadai dengan strategi melakukan revitalisasi sarana penunjang kebudayaan yang diarahkan pada penguatan kapasitas lembaga adat.
  - b. Tersedianya budayawan yang kompeten dengan strategi melakukan mediasi dan Fasilitasi budayawan yang kompeten

yang diarahkan pada Pengembangan media pengetahuan seni dan budaya daerah.

2. Meningkatkan kondusifitas wilayah, yang dicapai melalui beberapa sasaran:
  - a. Tertanganinya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif dengan strategi melakukan mediasi dan fasilitasi situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif diarahkan pada pengembangan media tatap muka.
  - b. Terwujudnya kerukunan hidup masyarakat yang optimal dengan mediasi dan fasilitasi kerukunan hidup masyarakat dan penguatan peran tokoh agama.
3. Meningkatkan religiusitas masyarakat, yang dicapai melalui beberapa sasaran:
  - a. Tersedianya sarana penunjang kehidupan beragama yang memadai dengan strategi melakukan konstruksi dan rehabilitasi sarana penunjang kehidupan beragama yang memadai diarahkan pada pembangunan dan rehab sarana peribadatan.
  - b. Tersedianya tenaga keagamaan yang berkualitas dengan strategi melakukan edukasi tenaga syiar keagamaan yang berkualitas diarahkan pada pengembangan media pembelajaran agama.
  - c. Tersalurnya dana dan dukungan kepada tenaga syiar dan lembaga keagamaan yang proporsional dengan strategi melakukan distribusi dana dan dukungan kepada tenaga syiar dan lembaga keagamaan yang proporsional diarahkan pada pendataan tenaga syiar agama dan lembaga keagamaan.
4. Meningkatkan kualitas masyarakat, yang dicapai melalui sasaran terbinanya masyarakat secara berkelanjutan dengan strategi melakukan sosialisasi dan fasilitasi kepada kelompok ekonomi dan sosial di masyarakat yang berkelanjutan diarahkan pada pengembangan media tatap muka dan pendampingan pemberdayaan masyarakat.

***Misi 2 : Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pemenuhan pelayanan sosial dasar dan penguasaan IPTEK dalam rangka terwujudnya daerah yang berdaya saing***

Adapun tujuan dalam misi tersebut diatas adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan, yang dicapai melalui beberapa sasaran:
  - a. Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan yang memadai dengan strategi melakukan konstruksi dan rehabilitasi sarana dan prasarana PAUD, SD dan SMP yang memadai diarahkan pada pemenuhan sarana dan prasarana PAUD, SD dan SMP sesuai dengan proporsi siswa dan pemerataan akses.

- b. Tersedianya SDM pendidikan yang sesuai kompetensi secara merata melalui Edukasi tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai kompetensi secara merata Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah berbasis MBS (Manajemen Berbasis Sekolah).
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan yang dicapai melalui beberapa sasaran:
  - a. Tersedianya sarana prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang memadai dengan strategi melakukan konstruksi dan rehabilitasi sarana prasarana Puskesmas dan RSUD yang diarahkan pada pemenuhan sarana prasarana Puskesmas dan RSUD sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
  - b. Tersedianya kualitas SDM kesehatan yang profesional dengan strategi melakukan edukasi Tenaga Medis dan Paramedis yang diarahkan pada pemenuhan Tenaga Medis dan Paramedis sesuai dengan kebutuhan layanan.
  - c. Tersedianya standar pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang terakreditasi dengan strategi melakukan revitalisasi SPM dan SOP yang diarahkan pada penerapan SPM dan SOP dalam penguatan aksi seribu hari pertama kehidupan (ASHAR) serta layanan kesehatan berkualitas.
3. Meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan catatan sipil yang dicapai melalui beberapa sasaran:
  - a. Tersedianya prasarana dan layanan kependudukan yang memadai dengan melakukan strategi konstruksi prasarana dan layanan kependudukan yang diarahkan pada pembangunan sarana pendukung sesuai Standar Pelayanan Publik (SPP).
  - b. Terwujudnya layanan kependudukan yang berkualitas dengan melakukan strategi integrasi Teknologi Informasi yang berkualitas diarahkan pada pengkajian pemanfaatan Teknologi Informasi Layanan Kependudukan.
4. Meningkatkan kualitas perempuan dan kesetaraan gender yang dicapai melalui beberapa sasaran:
  - a. Terwujudnya kesetaraan gender secara menyeluruh dengan melakukan strategi fasilitasi dan mediasi penduduk perempuan secara menyeluruh yang diarahkan pada pencapaian Indeks Kesetaraan Gender.
  - b. Terbinanya Organisasi Perempuan secara berkelanjutan dengan melakukan strategi mediasi dan fasilitasi kelembagaan perempuan secara berkelanjutan yang diarahkan pada penguatan peran organisasi perempuan dalam pembangunan.
5. Meningkatkan kualitas kesejahteraan dan perlindungan anak yang dicapai melalui beberapa sasaran:

- a. Tertanganinya permasalahan anak sesuai situasi dengan melakukan strategi Mediasi dan Fasilitasi Anak usia sejak lahir sampai 17 Tahun sesuai situasi yang diarahkan pada pendampingan penyelesaian kasus anak.
  - b. Terwujudnya layanan yang berkualitas bagi anak dengan melakukan strategi revitalisasi layanan yang diarahkan pada pencapaian Kota Layak Anak (KLA).
6. Meningkatkan efektifitas pengendalian pertumbuhan penduduk yang dicapai melalui beberapa sasaran:
- a. Tertanganinya laju pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan dengan strategi melakukan mediasi, fasilitasi, dan komunikasi terhadap laju pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan yang diarahkan pada pengembangan media informasi Keluarga Berencana
  - b. Terwujudnya keluarga yang berkualitas dengan strategi melakukan sosialisasi dan fasilitasi keluarga yang berkualitas yang diarahkan pada penguatan pendampingan keluarga.
7. Meningkatkan kualitas layanan sosial masyarakat yang dicapai melalui beberapa sasaran:
- a. Tertanganinya masalah sosial kemasyarakatan secara berkelanjutan dengan strategi melakukan mediasi kelompok masyarakat termarjinalkan secara berkelanjutan yang diarahkan pada penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
  - b. Terdatanya penduduk miskin sesuai kondisi dengan strategi melakukan klarifikasi penduduk miskin sesuai kondisi yang diarahkan pada pendataan penduduk miskin.
8. Meningkatkan kapasitas Pemuda yang dicapai melalui sasaran terbinanya Kelembagaan Pemuda secara berkelanjutan dengan strategi melakukan reorganisasi kelembagaan pemuda yang diarahkan pada pembinaan Organisasi Pemuda.
9. Meningkatkan produktifitas prestasi olah raga, yang dicapai melalui sasaran:
- a. Tersedianya sarana prasarana olahraga yang memadai dengan strategi melakukan konstruksi, rehabilitasi Lapangan dan Gedung Olahraga yang memadai diarahkan pada pembangunan Gedung dan penyediaan Lapangan Olahraga sesuai kebutuhan.
  - b. Tersedianya dana pembinaan olahraga yang memadai dengan strategi melakukan distribusi pendanaan bagi Olahragawan dan Siswa Berprestasi diarahkan pada pemantapan sumber dan mekanisme penyaluran dana Bantuan Olahraga.
10. Meningkatkan kualitas data dan informasi yang dicapai melalui sasaran:

- a. Tersedianya sarana pendukung yang memadai dengan strategi melakukan Transaksi pada Data dan Informasi Daerah yang memadai diarahkan pada Penyediaan Data dan Informasi.
  - b. Tersedianya sistem data yang terpadu dengan strategi melakukan koordinasi dan integrasi Teknologi Informasi yang terpadu diarahkan pada Penerapan Layanan Informasi Terpadu.
11. Meningkatkan kualitas layanan arsip yang dicapai melalui sasaran:
- a. Tersedianya sarana prasarana kearsipan yang memadai dengan strategi melakukan konstruksi Gedung/Depo Arsip dan Sarana Penunjang yang memadai diarahkan pada Pembangunan Gedung/Depo Arsip dan Sarana Penunjang
  - b. Terpenuhinya SDM Layanan Arsip sesuai kebutuhan dengan strategi melakukan fasilitasi kebutuhan arsiparis yang diarahkan pada pemenuhan ketersediaan Tenaga Arsiparis
  - c. Terpenuhinya sistem pengelolaan arsip yang terpadu dengan strategi melakukan koordinasi dan integrasi sistem pengelolaan arsip yang terpadu diarahkan pada penerapan Teknologi Informasi Tata Kelola Arsip.
12. Meningkatkan kualitas sarana perpustakaan yang dicapai melalui sasaran:
- a. Tersedianya sarana prasarana perpustakaan yang memadai dengan strategi melakukan konstruksi Gedung Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Rumah Ibadah, Perpustakaan Anak yang diarahkan pada pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah, sarana Perpustakaan Rumah Ibadah dan Perpustakaan Anak.
  - b. Terpenuhinya SDM Layanan Perpustakaan yang memadai dengan strategi melakukan fasilitasi Tenaga Pustakawan yang diarahkan pada pemenuhan Tenaga Pustakawan sesuai kebutuhan.
13. Meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika yang dicapai melalui sasaran tertatanya layanan komunikasi dan informatika yang berkualitas dengan strategi mengadakan sosialisasi dan edukasi yang diarahkan pada pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
14. Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penanggulangan bencana yang dicapai melalui sasaran terwujudnya kesiapsiagaan kebencanaan dengan strategi sosialisasi, edukasi, koordinasi dan konsolidasi yang diarahkan pada pra dan pasca bencana.

**Misi 3 : Mendorong kemajuan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera**

Adapun tujuan dalam misi tersebut diatas adalah:

1. Meningkatkan efektifitas layanan ketenagakerjaan yang akan dicapai melalui:
  - a. Tersedianya tenaga kerja yang berkompeten dengan strategi dan kebijakan, melakukan edukasi dan standarisasi mutu serta kompetensi tenaga kerja yang diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja;
  - b. Terlindunginya tenaga kerja sesuai ketentuan dengan strategi dan arah kebijakan melakukan mediasi antar pekerja dengan pemilik pekerjaan yang diarahkan pada perlindungan tenaga kerja lokal;
  - c. Tersedianya informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan strategi dan arah kebijakan, melakukan fasilitasi keterbukaan informasi ketenagakerjaan yang diarahkan pada peningkatan kuantitas angkatan kerja yang ditempatkan.
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM yang akan dicapai melalui:
  - a. Terbentuknya kelembagaan koperasi yang profesional dengan strategi dan arah kebijakan melakukan revitalisasi kelembagaan koperasi yang diarahkan pada peningkatan jumlah koperasi aktif;
  - b. Tersedianya SDM yang berkompeten dengan strategi dan arah kebijakan melakukan edukasi kompetensi SDM kelembagaan dan UKM yang diarahkan pada peningkatan kompetensi pengurus koperasi dan pelaku UKM;
  - c. Terwujudnya akses permodalan dengan strategi dan arah kebijakan, melakukan fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga perbankan yang diarahkan pada peningkatan modal usaha.
3. Meningkatkan stabilitas ketersediaan stok dan distribusi komoditas strategis yang akan dicapai melalui:
  - a. Tersedianya kelembagaan yang mantap dengan strategi dan arah kebijakan melakukan reorganisasi internal kelembagaan yang diarahkan pada peningkatan kinerja Dewan Keamanan Pangan;
  - b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dengan strategi dan arah kebijakan melakukan revitalisasi prasarana pengaman stok komoditas pangan yang diarahkan pada optimalisasi fungsi Gudang Cadangan Pangan dan Lumbung Pangan;
  - c. Tersedianya SDM yang berkompeten dengan strategi dan arah kebijakan: (i) melakukan edukasi terhadap kualitas dan mutu penyuluhan yang diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga penyuluh; (ii) melakukan visitasi pada daerah yang representatif yang diarahkan pada pengembangan wawasan kelompok tani.
4. Meningkatkan produktifitas pertanian yang akan dicapai melalui:

- a. Tersedianya sarana dan prasarana yang representatif dengan strategi dan arah kebijakan melakukan intensifikasi peningkatan produktifitas pertanian yang diarahkan pada pengembangan pangan dan hortikultura
5. Meningkatkan aminitas wisatawan yang akan dicapai melalui:
    - a. Tersedianya sarana dan prasarana yang representatif dengan strategi dan arah kebijakan melakukan pengembangan konstruksi prasarana destinasi pariwisata yang diarahkan pada pembangunan kampung budaya;
    - b. Tersedianya data/informasi yang memadai dengan strategi dan arah kebijakan melakukan inventarisasi data dan informasi kepariwisataan daerah yang diarahkan pada pengembangan potensi kepariwisataan;
    - c. Terdidiknya pelaku wisata yang profesional dengan strategi dan arah kebijakan melakukan edukasi dan fasilitasi SDM kepariwisataan daerah yang diarahkan pada pembinaan *guide* dan pengusaha;
    - d. Terpeliharanya situasi keamanan secara menyeluruh dengan strategi dan arah kebijakan melakukan koordinasi yang terpolo dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kinerja stakeholder kepariwisataan.
  6. Meningkatkan produktifitas perikanan yang akan dicapai melalui:
    - a. Tersedianya sarana prasarana yang memadai dengan strategi dan arah kebijakan melakukan transaksi pengadaan sarana produksi bagi nelayan yang diarahkan pada penyediaan peralatan perikanan tangkap;
    - b. Tersedianya Sumberdaya Perikanan dengan strategi dan arah kebijakan melakukan eksplorasi potensi produksi perikanan yang diarahkan pada pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya air tawar;
    - c. Terlatihnya sumberdaya petani/nelayan yang terampil dengan strategi dan arah kebijakan melakukan edukasi peningkatan mutu pengolahan hasil perikanan yang diarahkan pada peningkatan kapasitas Poktan pengolah hasil perikanan;
    - d. Tersedianya modal usaha yang memadai dengan strategi dan arah kebijakan melakukan distribusi stimulan pengembangan usaha yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat nelayan.
  7. Meningkatkan stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok yang akan dicapai melalui:
    - a. Terwujudnya masyarakat yang paham tentang perkembangan harga komoditas dengan strategi dan arah kebijakan meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap ketersediaan dan

- kepastian harga komoditas pangan yang diarahkan pada kemudahan akses informasi harga dan stok komoditas strategis;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dengan strategi dan arah kebijakan melakukan renovasi/konstruksi prasarana perdagangan yang diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan pasar tradisional dan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis;
  - c. Tersedianya tim pengamanan dan pengawasan peredaran barang dan jasa yang berkompeten dengan strategi dan arah kebijakan melakukan reorganisasi pola kerja kelembagaan yang diarahkan pada peningkatan kinerja tim pengamanan dan pengawasan peredaran barang dan jasa.
8. Meningkatkan kualitas industri kecil menengah yang akan dicapai melalui:
- a. Tersedianya pelaku IKM yang berdaya saing dengan strategi dan arah kebijakan melakukan edukasi daya saing IKM yang diarahkan pada peningkatan kompetensi pelaku IKM klaster unggulan;
  - b. Tersedianya permodalan usaha dengan strategi dan arah kebijakan melakukan fasilitasi pengembangan usaha yang diarahkan pada peningkatan produktifitas pelaku IKM klaster unggulan;
  - c. Tersedianya sarana produksi yang memadai dengan strategi dan arah kebijakan melakukan distribusi sarana produksi IKM yang diarahkan pada penyediaan peralatan kerja.

**Misi 4: *Meningkatkan kelayakan hidup masyarakat melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam Rangka Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.***

Adapun tujuan dalam misi tersebut diatas adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang dicapai melalui beberapa sasaran, yaitu :
  - a. Tersedianya regulasi pengelolaan air limbah yang komprehensif dengan strategi melakukan koordinasi dan ratifikasi peraturan yang diarahkan pada pengelolaan air limbah;
  - b. Tersedianya lembaga pengelolaan air limbah yang terstruktur dengan strategi melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang diarahkan pada pengelolaan air limbah skala lingkungan;
  - c. Tersedianya lahan sarana pengolah air limbah yang memadai dengan strategi melakukan investasi lahan yang diarahkan pada kawasan permukiman kumuh;

- d. Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang memadai dengan strategi konstruksi dan rehabilitasi yang diarahkan pada kawasan permukiman kumuh;
  - e. Tersedianya akses air bersih secara merata dengan strategi konstruksi sambungan air bersih yang diarahkan pada kawasan permukiman;
  - f. Tersedianya regulasi pengelolaan sampah yang komprehensif dengan strategi melakukan koordinasi dan ratifikasi peraturan pengelolaan sampah;
  - g. Tersedianya lembaga pengelolaan sampah secara berjenjang dengan strategi melakukan restrukturisasi lembaga pada skala lingkungan, kelurahan, kecamatan, dan kota;
  - h. Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang memadai dengan strategi konstruksi dan melakukan intensifikasi prasarana dan sarana pada skala lingkungan, kelurahan, kecamatan, dan Kota;
  - i. Terbentuknya TPA regional yang optimal dengan strategi melakukan koordinasi dan reorganisasi yang diarahkan pada rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
  - j. Terkelolanya sampah berbasis energi terbarukan yang berkualitas dengan strategi konstruksi dan implementasi teknologi yang diarahkan pada skala kecamatan dan kota;
  - k. Tertanganinya permasalahan banjir dan genangan secara optimal dengan strategi konstruksi dan rehabilitasi yang diarahkan pada sistem drainase, irigasi, dan sungai.
2. Meningkatkan aksesibilitas wilayah yang dicapai melalui beberapa sasaran, yaitu :
    - a. Tersedianya jaringan jalan dan jembatan sesuai standar dengan strategi konstruksi dan rehabilitasi yang diarahkan pada jalan kota.
    - b. Tersedianya fasilitas pejalan kaki dan pesepeda yang aman dan nyaman dengan strategi konstruksi dan rehabilitasi yang diarahkan pada jalan utama kota.
  3. Meningkatkan efektifitas jaringan irigasi yang dicapai melalui sasaran, yaitu:
    - a. Terpeliharanya jaringan irigasi yang optimal dengan strategi konstruksi dan rehabilitasi jaringan irigasi yang diarahkan pada kawasan pertanian.
  4. Meningkatkan kapasitas pengawasan jasa konstruksi melalui sasaran, yaitu :

- a. Terwujudnya kualitas jasa konstruksi yang sesuai standar dengan strategi sosialisasi dan fasilitasi yang diarahkan pada pelaku jasa konstruksi.
5. Meningkatkan aksesibilitas perumahan dan permukiman layak huni yang dicapai melalui beberapa sasaran, yaitu :
    - a. Tertanganinya kawasan permukiman kumuh secara menyeluruh dengan strategi konstruksi dan rehabilitasi sarana dan prasarana permukiman yang diarahkan pada kawasan permukiman kumuh
    - b. Tertanganinya rumah tidak layak huni secara menyeluruh dengan strategi konstruksi dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
    - c. Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang memadai dengan strategi konstruksi dan rehabilitasi fasilitas sosial dan fasilitas umum pada kawasan permukiman
  6. Meningkatkan aminitas pengguna jalan yang dicapai melalui beberapa sasaran, yaitu :
    - a. Tersedianya sistem transportasi publik yang memadai dengan strategi implementasi yang diarahkan pada pengembangan sistem transportasi publik Trans Mataram
    - b. Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai dengan strategi konstruksi dan rehabilitasi Terminal, Halte, Pengujian Kendaraan bermotor, dan penunjang lainnya.
    - c. Terpasangnya fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan (*road safety*) secara menyeluruh dengan strategi konstruksi dan rehabilitasi rambu, marka, traffic light, dll
    - d. Terkelolanya perpustakaan secara optimal dengan strategi melakukan revitalisasi lembaga yang diarahkan pada Unit Pengelola Perpustakaan.
  7. Meningkatkan efektifitas penataan ruang yang dicapai melalui beberapa sasaran, yaitu:
    - a. Terwujudnya perencanaan tata ruang yang berkualitas dengan strategi melakukan konsolidasi dan integrasi RTRW dan RDTR
    - b. Terwujudnya pemanfaatan ruang secara tertib sesuai prosedur dengan strategi melakukan sosialisasi, edukasi dan implementasi pada Layanan Perijinan, Masyarakat dan Swasta
    - c. Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sejalan dengan peraturan melalui strategi melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pemanfaatan ruang oleh Pemerintah, masyarakat dan swasta.
  8. Meningkatkan efektifitas pengelolaan tanah milik daerah yang dicapai melalui sasaran, yaitu :

- a. Terkelolanya aset milik daerah secara tertib sesuai prosedur dengan strategi melakukan koordinasi pengelolaan tanah milik daerah
9. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang dicapai melalui beberapa sasaran, yaitu :
- a. Tertanganinya pencemaran lingkungan hidup secara menyeluruh dengan strategi melakukan Sosialisasi dan reduksi Pencemaran udara, air, dan tanah
  - b. Tercapainya luasan ruang terbuka hijau publik dan privat yang sejalan dengan peraturan dengan strategi melakukan Investasi dan ekstensifikasi Ruang Terbuka Hijau Kota

**Misi 5: *Meningkatkan keandalan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)***

Adapun tujuan dalam misi tersebut diatas adalah:

1. Meningkatkan kualitas layanan publik yang dicapai melalui sasaran:
  - a. Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai *dengan strategi dan arah* kebijakan, melakukan rehabilitasi, konstruksi, dan transaksi terhadap sumber daya milik daerah yang diarahkan pada pengelolaan dan peningkatan asset milik daerah;
  - b. Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel dengan strategi dan arah kebijakan melakukan inventarisasi dan evaluasi pertanggungjawaban keuangan daerah yang diarahkan pada pengelolaan APBD;
  - c. Tercapainya target penerimaan PAD dengan strategi dan arah kebijakan melakukan intensifikasi potensi penerimaan PAD yang diarahkan pada pendataan wajib pajak;
  - d. Tersedianya dana bantuan secara simultan dengan strategi dan arah kebijakan memberikan bantuan modal sebagai stimulan pengembangan usaha yang diarahkan pada pengembangan kelompok usaha dan masyarakat.
2. Meningkatkan meningkatnya efektifitas layanan perijinan yang akan dicapai melalui :
  - a. Tersedianya SDM penanaman modal yang handal dengan strategi dan arah kebijakan melakukan edukasi profesionalitas sumber daya penanaman modal yang diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga SPIPISE;
  - b. Tersedianya sistem pelayanan yang tepat dengan strategi dan arah kebijakan melakukan inventarisasi tingkat kepuasan konsumen yang diarahkan pada peningkatan standar mutu pelayanan;

- c. Tersedianya regulasi layanan perijinan yang proporsional dengan strategi dan arah kebijakan melakukan simplikasi prosedur dan kemudahan akses pelayanan perijinan yang diarahkan pada optimalisasi layanan satu pintu.
3. Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang dicapai melalui sasaran:
- a. Tertatanya birokrasi pemerintahan dengan strategi melakukan konsolidasi, restrukturisasi birokrasi pemerintahan yang diarahkan pada pengkajian Reformasi Birokrasi;
  - b. Tersedianya SDM yang profesional dengan strategi melakukan edukasi Aparatur Sipil Negara yang profesional diarahkan pada Penguatan diklat bagi ASN;
  - c. Tersedianya regulasi daerah sesuai kebutuhan dengan strategi melakukan fasilitasi Penetapan PERDA sesuai kebutuhan yang diarahkan pada pemantapan proses penyusunan PERDA;
  - d. Terpenuhinya laporan hasil pemeriksaan kegiatan pembangunan yang efektif dan efisien dengan strategi melakukan fasilitasi penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan yang efektif & efisien diarahkan pada Penurunan jumlah temuan dalam LHP;
  - e. Terpenuhinya struktur kelembagaan yang proporsional dengan strategi melakukan fasilitasi SOTK yang proporsional diarahkan pada pengembangan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Daerah;
  - f. Terbinanya SDM Aparatur secara berkelanjutan dengan strategi melakukan fasilitasi dan mediasi Aparatur Sipil Negara secara berkelanjutan yang diarahkan pada Pengembangan potensi keahlian dan keterampilan ASN;
  - g. Terpenuhinya regulasi sesuai kebutuhan dengan strategi melakukan legislasi penetapan PERWAL, Keputusan dan SK sesuai kebutuhan yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan Perwal, Keputusan dan SK sesuai dengan kondisi.
4. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan yang dicapai melalui sasaran:
- a. Tersedianya dokumen perencanaan yang akurat melalui fasilitasi, konsultasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan yang diarahkan pada Perencanaan pembangunan yang kredibel
  - b. Terjalinnnya Kerjasama dan Kemitraan Pembangunan melalui fasilitasi, komunikasi dan koordinasi yang diarahkan pada terjalinnnya kemitraan, kerjasama dengan pemerintah luar negeri, pemerintah pusat, provinsi, pemerintah daerah lainnya, pihak swasta maupun lembaga donor.

Tabel 6.1.  
**Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
<b>VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA</b>			
<b>MISI I : MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AMAN, RUKUN DAN DAMAI</b>			
Meningkatkan kualitas pengembangan nilai nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat.	Tersedianya sarana penunjang kebudayaan yang memadai	Revitalisasi	Penguatan kapasitas lembaga adat
	Tersedianya budayawan yang kompeten	Mediasi dan Fasilitasi	Pengembangan media pengetahuan seni dan budaya daerah
Meningkatkan kondusifitas wilayah.	Tertanganinya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif	Mediasi dan Fasilitasi	Pengembangan media tatap muka
	Terwujudnya kerukunan hidup masyarakat yang optimal	Mediasi dan Fasilitasi	Penguatan peran tokoh agama
Meningkatkan religiusitas masyarakat.	Tersedianya sarana penunjang kehidupan beragama yang memadai	Konstruksi dan rehabilitasi	Pembangunan dan rehab sarana peribadatan
	Tersedianya tenaga keagamaan yang berkualitas	Edukasi	Pengembangan media pembelajaran agama
	Tersalurnya dana untuk tenaga syiar dan lembaga keagamaan yang proporsional	Distribusi Dana	Pendataan tenaga syiar agama dan lembaga keagamaan
Meningkatkan kualitas masyarakat	Terbinanya masyarakat secara berkelanjutan	Sosialisasi dan Fasilitasi	Pengembangan media tatap muka dan pendampingan pemberdayaan masyarakat
<b>MISI II : MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMENUHAN PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN PENGUASAAN IPTEK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DAERAH YANG BERDAYA SAING</b>			
Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan	Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan yang memadai	Konstruksi dan rehabilitasi	Pemenuhan sarana PAUD, SD dan SMP sesuai dengan proporsi siswa
	Tersedianya SDM Pendidikan yang sesuai kompetensi secara merata	Edukasi	Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan	Tersedianya sarana prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang memadai	Konstruksi dan Rehabilitasi	Pemenuhan Puskesmas dan RSUD sesuai dengan kebutuhan masyarakat
	Tersedianya kualitas SDM kesehatan yang profesional	Edukasi	Pemenuhan Tenaga Medis dan Paramedis sesuai dengan kebutuhan layanan
	Tersedianya standar pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu	Revitalisasi SPM dan SOP	Penerapan SPM dan SOP sesuai bidang kewenangan SKPD
Meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan catatan sipil	Tersedianya prasarana dan layanan kependudukan yang memadai	Konstruksi	Pembangunan sarana pendukung sesuai Standar Pelayanan Publik (SPP)
	Terwujudnya layanan kependudukan yang berkualitas	Integrasi Teknologi Informasi	Pengkajian Pemanfaatan Teknologi Informasi Layanan Kependudukan
Meningkatkan kualitas perempuan dan kesetaraan gender	Terwujudnya kesetaraan gender secara menyeluruh	Fasilitasi dan Mediasi	Pencapaian Indeks Kesetaraan Gender
	Terbinanya kelembagaan perempuan secara berkelanjutan	Mediasi dan Fasilitasi	Penguatan peran organisasi perempuan dalam pembangunan
Meningkatkan kualitas kesejahteraan dan perlindungan anak	Tertanganinya permasalahan anak sesuai situasi	Mediasi dan Fasilitasi	Pendampingan penyelesaian kasus anak
	Terwujudnya layanan yang berkualitas bagi anak	Revitalisasi	Pencapaian Kota Layak Anak
Meningkatkan efektifitas pengendalian pertumbuhan penduduk	Tertanganinya laju pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan	Mediasi, Fasilitasi, dan Komunikasi	Pengembangan media informasi Keluarga Berencana
	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Sosialisasi dan Fasilitasi	Penguatan pendampingan keluarga
Meningkatkan kualitas layanan sosial masyarakat	Tertanganinya masalah sosial kemasyarakatan secara berkelanjutan	Mediasi	Penanganan PMKS, anjal dan pengemis
	Terdatanya penduduk miskin sesuai kondisi	Klarifikasi	Pendataan Penduduk Miskin
Meningkatkan kapasitas Pemuda	Terbinanya Kelembagaan Pemuda secara berkelanjutan	Reorganisasi	Pembinaan Organisasi Pemuda
Meningkatkan produktifitas prestasi olah raga	Tersedianya sarana prasarana olahraga yang memadai	Konstruksi, Rehabilitasi	Pembangunan Gedung dan Penyediaan Lapangan Olahraga sesuai kebutuhan

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Tersedianya dana pembinaan olahraga yang memadai	Distribusi Pendanaan	Pemantapan mekanisme penyaluran dana Bantuan Olahraga
Meningkatkan kualitas data dan informasi	Tersedianya sarana pendukung yang memadai	Transaksi pada Data dan Informasi	Penyediaan Data dan Informasi
	Tersedianya sistem data yang terpadu	Koordinasi dan Integrasi Teknologi Informasi	Penerapan Layanan Informasi Terpadu
Meningkatkan kualitas layanan arsip	Tersedianya sarana prasarana kearsipan yang memadai	Konstruksi	Pembangunan Gedung/Depo Arsip dan Sarana Penunjang
	Terpenuhinya SDM Layanan Arsip sesuai kebutuhan	Fasilitasi	Pemenuhan ketersediaan Tenaga Arsiparis
	Terpenuhinya sistem pengelolaan arsip yang terpadu	Koordinasi dan Integrasi	Penerapan Teknologi Informasi Tata Kelola Arsip
Meningkatkan kualitas sarana perpustakaan	Tersedianya sarana prasarana perpustakaan yang memadai	Konstruksi	Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Rumah Ibadah
	Terpenuhinya SDM Layanan Perpustakaan yang memadai	Fasilitasi	Pemenuhan Tenaga Pustakawan sesuai kebutuhan
Meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penanggulangan bencana	Tertatanya layanan komunikasi dan informatika yang berkualitas	Sosialisasi dan edukasi	Teknologi informasi dan komunikasi
	Terwujudnya kesiapsiagaan kebencanaan	Sosialisasi, edukasi, koordinasi dan konsolidasi	Pra dan pasca bencana
Meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penanggulangan bencana	Tertatanya layanan komunikasi dan informatika yang berkualitas	Sosialisasi dan edukasi	teknologi informasi dan komunikasi
	Terwujudnya kesiapsiagaan kebencanaan	Sosialisasi, edukasi, koordinasi dan konsolidasi	Pra dan pasca bencana
Meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika	Tertatanya layanan komunikasi dan informatika yang berkualitas	Sosialisasi dan edukasi	Teknologi informasi dan komunikasi
Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penanggulangan bencana	Terwujudnya kesiapsiagaan kebencanaan	Sosialisasi, edukasi, koordinasi dan konsolidasi	Pra dan pasca bencana

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
<b>MISI III : MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA</b>			
Meningkatkan efektifitas layanan ketenagakerjaan	Tersedianya tenaga kerja yang berkompeten	Edukasi dan standarisasi	Peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal
	Terlindunginya tenaga kerja sesuai ketentuan	Mediasi	Perlindungan tenaga kerja lokal
	Tersedianya informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi	Fasilitasi	Peningkatan kuantitasi angkatan kerja yang ditempatkan
Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM	Terbentuknya kelembagaan koperasi yang profesional	Revitalisasi	Peningkatan jumlah koperasi aktif
	Tersedianya SDM yang berkompeten	Edukasi	Peningkatan kompetensi pengurus koperasi dan pelaku UKM
	Terwujudnya akses permodalan	Fasilitasi	Peningkatan modal usaha
Meningkatkan stabilitas ketersediaan stok dan distribusi komoditas strategis	Tersedianya kelembagaan yang mantap	Reorganisasi internal kelembagaan	Peningkatan kinerja Dewan Keamanan Pangan
	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Revitalisasi	Optimalisasi fungsi Gudang Cadangan Pangan dan Lumbung Pangan
	Tersedianya SDM yang berkompeten	Edukasi	Peningkatan kompetensi tenaga penyuluh
		Visitasi	Pengembangan wawasan kelompok tani
Meningkatkan produktifitas pertanian	Tersedianya sarana dan prasarana yang representatif	Intensifikasi	Pengembangan pangan dan hortikultura
Meningkatkan aminitas wisatawan	Tersedianya sarana dan prasarana yang representatif	Konstruksi	Pembangunan kampung budaya
	Tersedianya Data/Informasi yang memadai	Inventarisasi	Pengembangan Potensi Kepariwisataaan
	Terdidiknya Pelaku Wisata yang Profesional	Edukasi dan fasilitasi	Pembinaan Guide dan Pengusaha
	Terpeliharanya situasi keamanan secara menyeluruh	Koordinasi	Peningkatan kinerja stakeholder kepariwisataaan

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Meningkatkan produktifitas perikanan	Tersedianya Sarana Prasarana Yang Memadai	Transaksi	Penyediaan peralatan perikanan tangkap
	Tersedianya Sumberdaya Perikanan	Eksplorasi potensi	Pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya air tawar
	Terlatihnya Sumberdaya Petani/Nelayan yang Terampil	Edukasi	Peningkatan kapasitas Poktan pengolah hasil perikanan
	Tersedianya modal usaha yang memadai	Distribusi stimulan pengembangan usaha	Pemberdayaan masyarakat nelayan
Meningkatkan stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok	Terwujudnya masyarakat yang paham tentang perkembangan harga komoditas	Ekspektasi masyarakat	Kemudahan akses informasi harga dan stok komoditas strategis
	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Konstruksi/Renovasi	Pembangunan dan pemeliharaan pasar tradisional dan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis
	Tersedianya Tim Pengamanan dan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa yang berkompeten	Reorganisasi	Peningkatan kinerja tim pengamanan dan pengawasan peredaran barang dan jasa
Meningkatkan kualitas industri kecil menengah	Tersedianya pelaku IKM yang berdaya saing	Edukasi	Peningkatan kompetensi pelaku IKM klaster unggulan
	Tersedianya permodalan Usaha	Fasilitasi	Peningkatan produktifitas pelaku IKM klaster unggulan
	Tersedianya Sarana Produksi yang memadai	Distribusi	Penyediaan Peralatan Kerja
<b>MISI IV : MENINGKATKAN KELAYAKAN HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENANGANAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN BERBASIS TATA RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN</b>			
Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana sarana perumahan dan kawasan permukiman	Tersedianya regulasi pengelolaan air limbah yang komprehensif	Koordinasi dan Ratifikasi	Pengelolaan air limbah
	Tersedianya lembaga pengelolaan air limbah yang terstruktur	Koordinasi dan sinkronisasi	Lembaga pengelolaan limbah Skala lingkungan
	Tersedianya lahan sarana pengolah air limbah yang memadai	Investasi	Kawasan permukiman kumuh
	Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang memadai	Konstruksi dan rehabilitasi	Kawasan permukiman kumuh

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Tersedianya akses air bersih secara merata	Konstruksi	Kawasan permukiman
	Tersedianya regulasi pengelolaan sampah yang komprehensif	Koordinasi dan ratifikasi	Pengelolaan sampah
	Tersedianya lembaga pengelolaan sampah secara berjenjang	Restrukturisasi	Skala Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, dan Kota
	Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang memadai	Konstruksi dan Intensifikasi	Skala Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, dan Kota
	Terbentuknya TPA regional yang optimal	Koordinasi dan reorganisasi	Rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemkab Lobar
	Terkelolanya sampah berbasis energi terbarukan yang berkualitas	Konstruksi dan implementasi	Skala Kecamatan dan Kota
	Tertanganinya permasalahan banjir dan genangan secara optimal	Konstruksi dan rehabilitasi	Sistem drainase, irigasi, dan sungai
Meningkatkan aksesibilitas wilayah	Tersedianya jaringan jalan dan jembatan sesuai standar	Konstruksi dan rehabilitasi	Jalan dan jembatan kewenangan Pemerintah Kota Mataram
	Tersedianya fasilitas pejalan kaki dan pesepeda yang aman dan nyaman	Konstruksi dan rehabilitasi	Jalan utama kota
Meningkatkan efektifitas jaringan irigasi	Terpeliharanya jaringan irigasi yang optimal	Konstruksi dan rehabilitasi	Kawasan pertanian
Meningkatkan kapasitas pengawasan jasa konstruksi	Terwujudnya kualitas jasa konstruksi yang sesuai standar	Sosialisasi dan fasilitasi	Pelaku jasa konstruksi
Meningkatkan aksesibilitas perumahan dan permukiman layak huni	Tertanganinya kawasan permukiman kumuh secara menyeluruh	Konstruksi dan rehabilitasi	Kawasan permukiman kumuh
	Tertanganinya rumah tidak layak huni secara menyeluruh	Konstruksi dan rehabilitasi	Rumah Tidak Layak Huni
	Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang memadai	Konstruksi dan rehabilitasi	Kawasan permukiman
Meningkatkan aminitas pengguna jalan	Tersedianya sistem transportasi publik yang memadai	Implementasi sistem transportasi publik Trans Mataram	Sistem Transportasi Publik Trans Mataram

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	Konstruksi dan rehabilitasi	Terminal, Halte, Pengujian Kendaraan bermotor, dan penunjang lainnya
	Terpasangnya fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan ( <i>road safety</i> ) secara menyeluruh	Konstruksi dan rehabilitasi	Rambu, marka, Traffic light, dll
	Terkelolanya perparkiran secara optimal	Revitalisasi	Unit Pengelola Perparkiran
Meningkatkan efektifitas penataan ruang	Terwujudnya perencanaan tata ruang yang berkualitas	Konsolidasi dan integrasi	RTRW dan RDTR
	Terwujudnya pemanfaatan ruang secara tertib sesuai prosuder	Sosialisasi, edukasi dan implementasi	Layanan Perijinan, Masyarakat dan Swasta
	Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sejalan dengan peraturan	Koordinasi dan supervisi	Pemerintah, Masyarakat dan Swasta
Meningkatkan efektifitas pengelolaan tanah milik daerah	Terkelolanya aset milik daerah secara tertib sesuai prosedur	Koordinasi pengelolaan	Tanah milik daerah
Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Tertanganinya pencemaran lingkungan hidup secara menyeluruh	Sosialisasi dan reduksi)	Pencemaran udara, air, dan tanah
	Tercapainya luasan ruang terbuka hijau publik dan privat sejalan dengan peraturan	Investasi dan ekstensifikasi	Ruang Terbuka Hijau Kota
<b>MISI V : MENINGKATKAN KEANDALAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)</b>			
Meningkatkan kualitas layanan publik	Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai	Konstruksi, rehabilitasi dan transaksi	Pengelolaan dan Peningkatan Asset Milik Daerah
	Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel	Inventarisasi dan evaluasi	Pengelolaan APBD

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Tercapainya target penerimaan PAD	Intensifikasi	Pendataan Wajib Pajak
	Tersedianya dana bantuan secara simultan	Bantuan modal	Pengembangan Kelompok Usaha dan Masyarakat
Meningkatkan efektifitas layanan perijinan	Tersedianya SDM penanaman modal yang handal	Edukasi	Penigkatan kompetensi tenaga SPIPISE
	Tersedianya sistem pelayanan yang tepat	Inventarisasi tingkat kepuasan konsumen	Peningkatan standar sutu pelayanan
	Tersedianya regulasi layanan perijinan yang proporsional	Simplikasi prosedur	Optimalisasi Layanan Satu Pintu
Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Tertatanya birokrasi pemerintahan	Konsolidasi, Restrukturisasi	Pengkajian Reformasi Birokrasi
	Tersedianya SDM yang profesional	Edukasi	Penguatan diklat bagi ASN
	Tersedianya regulasi daerah sesuai kebutuhan	Fasilitasi Penetapan PERDA	Pemantapan proses penyusunan PERDA
	Terpenuhinya laporan hasil pemeriksaan kegiatan pembangunan yang efektif dan efisien	Fasilitasi	Penurunan jumlah temuan dalam LHP
	Terpenuhinya struktur kelembagaan yang proporsional	Fasilitasi SOTK	Pengembangan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Daerah
	Terbinanya SDM Aparatur secara berkelanjutan	Fasilitasi dan Mediasi	Pengembangan potensi keahlian dan ketrampilan ASN
	Terpenuhinya regulasi sesuai kebutuhan	Legislasi	Pemenuhan kebutuhan Perwal, Keputusan dan SK sesuai dengan kondisi
Meningkatkan kualitas rencana pembangunan	Tersedianya dokumen perencanaan yang Akurat dan Kredibel	Fasilitasi, konsultasi dan koordinasi	Pemenuhan akan dokumen Perencanaan pembangunan yang akurat dan kredibel

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Terjalannya Kerjasama dan Kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan Pembangunan	Fasilitasi, komunikasi dan koordinasi	Pemenuhan akan dokumen kerjasama dan kajian pembangunan
	Terjangungnya aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Koordinasi, Fasilitasi dan sosialisasi	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyampaian aspirasi pembangunan





# BAB 7

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

### 7.1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

Dalam RPJMN tahun 2015-2019 dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut **NAWA CITA**, meliputi:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Secara ringkas keterkaitan Prioritas Nasional dengan penetapan isu strategis pemerintah Kota Mataram Tahun 2016-2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel. 7.1

#### Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional dan Pembangunan Kota Mataram

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kota Mataram
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (1) Prioritas lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kondusifitas Wilayah (2) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan (10) Kependudukan dan Catatan Sipil (9)

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kota Mataram
Pendidikan (2) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi (11)	Budaya (1) Pendidikan (4)
Penanggulangan Kemiskinan (4) Prioritas lainnya Bid Kesejahteraan Rakyat Ketahanan Pangan (5)	Kemiskinan (6) Kesehatan (3)
Infrastruktur (6) Energi (8) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik (10)	Infrastruktur (7)
Iklim investasi dan usaha (7) Prioritas Lainnya Bidang Ekonomi	Daya saing pekonomian Daerah (5)
Lingkungan Hidup dan pengelolaan bencana (9)	Lingkungan Hidup (8)

## 7.2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI NTB

Dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2014 telah ditetapkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Provinsi NTB tahun 2013-2018, adalah:

- 1) Budipekerti Luhur
- 2) Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Stabilitas Keamanan
- 3) Kesehatan
- 4) Pendidikan
- 5) Kesejahteraan Sosial
- 6) Agroindustri dan Ketahanan Pangan
- 7) Wirausaha dan Iklim Investasi
- 8) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 9) Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah
- 10) Lingkungan Hidup, Perubahan iklim dan Bencana Alam.

Secara ringkas keterkaitan Provinsi NTB dan dengan penetapan isu strategis pemerintah Kota Mataram Tahun 2016-2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel. 7.2

**Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi dan  
Pembangunan Kota Mataram**

Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kota Mataram
Budi Pekerti Luhur (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Penegakan Hukum dan Stabilitas Keamanan (2)	Kondusifitas Wilayah (2) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan (10) Kependudukan dan Catatan Sipil (9)
Pendidikan (4)	Budaya (1) Pendidikan (4)
Kesejahteraan Sosial (5) Agroindustri dan Ketahanan Pangan (6)	Kemiskinan (6) Kesehatan (3)
Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah (9)	Infrastruktur (7)
Wirausaha dan Iklim investasi (7) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (8)	Daya saing pekonomian Daerah (5)
Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Bencana Alam (10)	Lingkungan Hidup (8)

---

**7.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KOTA MATARAM TAHUN 2005-2025**

---

Arah kebijakan RPJPD Kota Mataram tahun 2005-2025 terbagi dalam 4 (empat) tahun periodisasi tahapan pembangunan. RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 berada dalam pembangunan lima tahunan ketiga. Adapun tujuannya adalah untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkotaan yang diikuti dengan kesinambungan pembangunan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang ditandai dengan:

- Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata pada seluruh wilayah,
- Terciptanya suasana lingkungan perkotaan yang sehat, bersih dan nyaman;

- Tertatanya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain dengan mempertahankan sistem jaringan jalan yang tersedia sehingga dapat memacu percepatan dan pertumbuhan ekonomi daerah,
- Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan;
- Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern;
- Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air;
- Terwujudnya penataan dan pola pemanfaatan ruang yang lebih berdaya guna dan berhasil guna
- Tercapainya keseimbangan dalam pemanfaatan ruang dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lahan dan
- Tercapainya prinsip pembangunan berkelanjutan;
- terwujudnya kondisi lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, indah, bersih dan sehat, serta untuk mendukung pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Tersedianya lembaga pendidikan yang merata dan seimbang di seluruh wilayah dengan fasilitas memadai
- Meningkatnya peran serta masyarakat termasuk dunia usaha dalam bidang pendidikan formal dan non formal;
- Membaiknya manajemen lembaga pendidikan yang mendorong otonomi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan;
- Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas penguasaan iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan iptek;
- Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat serta terwujudnya pola hidup bersih dan sehat sebagai antisipasi terhadap penyakit menular dan kejadian luar biasa;
- Meningkatnya kesetaraan gender;
- Meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, (efisien dan efektif) serta profesional (*good governance*) yang mampu mendukung pembangunan.
- Terpadunya dukungan sumber daya manusia yang handal, infrastruktur yang modern (dan moda transportasi yang memadai), iklim usaha yang kondusif, serta kelembagaan ekonomi yang efisien, produktif, pemanfaatan dan penerapan teknologi oleh seluruh pelaku ekonomi.
- Meningkatnya daya saing produk industri dan jasa dengan daerah lain dalam rangka memasuki era globalisasi;
- Meningkatnya kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat,

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Secara ringkas keterkaitan RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025 dengan penetapan Program prioritas pemerintah Kota Mataram Tahun 2016-2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel. 7.3

**Keselarasan RPJPD dan RPJMD Kota Mataram**

<b>RPJPD KOTA MATARAM TAHUN 2005-2025</b>	<b>RPJMD TAHUN 2016-2021</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata pada seluruh wilayah,</li> <li>• Terciptanya suasana lingkungan perkotaan yang sehat, bersih dan nyaman;</li> <li>• Tertatanya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain dengan mempertahankan sistem jaringan jalan yang tersedia sehingga dapat memacu percepatan dan pertumbuhan ekonomi daerah,</li> <li>• Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan;</li> <li>• Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern;</li> <li>• Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air;</li> <li>• Terwujudnya penataan dan pola pemanfaatan ruang yang lebih berdaya guna dan berhasil guna</li> <li>• Tercapainya keseimbangan dalam pemanfaatan ruang dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lahan dan</li> <li>• Tercapainya prinsip pembangunan berkelanjutan;</li> <li>• terwujudnya kondisi lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, indah, bersih dan sehat, serta untuk mendukung pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup</li> </ul>	<p>Infrastruktur (7) Lingkungan Hidup (8)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, (efisien dan efektif) serta profesional (good governance) yang mampu mendukung pembangunan</li> </ul>	<p>Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan (10)</p>

<b>RPJPD KOTA MATARAM TAHUN 2005-2025</b>	<b>RPJMD TAHUN 2016-2021</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya lembaga pendidikan yang merata dan seimbang di seluruh wilayah dengan fasilitas memadai</li> <li>• Meningkatnya peran serta masyarakat termasuk dunia usaha dalam bidang pendidikan formal dan non formal;</li> <li>• Membaiknya manajemen lembaga pendidikan yang mendorong otonomi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>• Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas penguasaan iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan iptek;</li> </ul>	Budaya (1) Pendidikan (4)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat serta terwujudnya pola hidup bersih dan sehat sebagai antisipasi terhadap penyakit menular dan kejadian luar biasa;</li> <li>• Meningkatnya kesetaraan gender;</li> <li>• Meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak.</li> </ul>	Kemiskinan (6) Kesehatan (3) Kependudukan dan Catatan Sipil (9)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya daya saing produk industri dan jasa dengan daerah lain dalam rangka memasuki era globalisasi;</li> <li>• Meningkatnya kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat,</li> <li>• Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan</li> <li>• Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif</li> </ul>	Daya saing pekonomian Daerah (5)

---

#### **7.4. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA**

---

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 adalah “Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat dilandasi nilai-nilai Patut Patuh Patju”.

Dalam rangka pencapaian Visi, ditetapkan 6 Misi yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan daya saing dan kemandirian daerah untuk mendapatkan nilai tambah (Lobar kreatif, inovatif dan produktif).
2. Mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos kerja untuk meraih yang terbaik (Lobar berprestasi).

3. Mengembangkan potensi sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan (Lobar tangguh dan berbudaya).
4. Mengembangkan potensi sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan (Lobar lestari).
5. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan regional, nasional dan global (Lobar sehat dan cerdas).
6. Meningkatkan martabat dan kebanggaan daerah (Lobar bermartabat).

Adapun isu-isu strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat serta keterkaitan dengan keberadaan Kota Mataram, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel. 7.4

**Isu Strategis Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram**

No	Isu Strategis Kab. Lombok Barat	Keterkaitan dengan Kota Mataram
1	Kualitas pendidikan, kesehatan dan aktualisasi budaya	Keberadaan sarana pendidikan, kesehatan dan budaya menjadi daya Tarik Kota Mataram terhadap Kabupaten Lombok Barat
2	Pemerataan infrastruktur wilayah	Sinergitas pembangunan dan pemerataan infrastruktur wilayah
3	Angka kemiskinan dan masalah sosial	Kota Mataram menjadi tujuan bagi pencari kerja dan penduduk miskin yang bekerja tanpa keahlian
4	Reformasi birokrasi dan penegakan hukum	Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
5	Peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan daerah	Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumberdaya yang ada dan investasi daerah
6	Pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumberdaya yang ada untuk pemanfaatan bersama.

---

**7.5. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA MATARAM TAHUN 2016-2021**

---

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif dalam mencapai sasaran.

Sementara perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam mewujudkan capaian sasaran pembangunan daerah, Pemerintah Kota Mataram menetapkan prioritas pembangunan sesuai dengan isu strategis yaitu:

1. Budaya
2. Kondusifitas Wilayah
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Daya saing pekonomian Daerah
6. Kemiskinan
7. Infrastruktur
8. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
9. Kependudukan dan Catatan Sipil
10. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Sedangkan harmonisasi dan sinergi antara prioritas pembangunan tersebut dengan arah kebijakan dan program pembangunan Kota Mataram Tahun 2016-2021 dilakukan menyesuaikan dengan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pemerintahan disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

**Misi 1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai Agama dan kearifan lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, rukun dan damai**

Urusan pemerintahan dan program untuk mendukung Misi Kesatu adalah:

- a. **Urusan Wajib Kebudayaan**, meliputi:
  1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
  2. Program Pengembangan Nilai Budaya
  3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- b. **Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**, meliputi
  1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
  2. Program Penegakan Perundang-undangan Daerah
  3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
  4. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
  5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan
- c. **Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**, meliputi
  1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan

- d. **Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa**, meliputi
  - 1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
  - 2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
  - 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif
  - 4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

**Misi 2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pemenuhan pelayanan sosial dasar dan penguasaan IPTEK dalam rangka terwujudnya daerah yang berdaya saing**

Urusan pemerintahan dan program untuk mendukung Misi Kedua adalah:

- a. **Urusan Wajib Pendidikan**, meliputi:
  - 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
  - 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
  - 3. Program Pendidikan Non Formal
  - 4. Program Pendidikan Luar Biasa
  - 5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- b. **Urusan Wajib Kesehatan**, meliputi:
  - 1. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
  - 2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
  - 3. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
  - 4. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
  - 5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
  - 6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
  - 7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - 8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
  - 9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
  - 10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
  - 11. Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan
- c. **Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**, meliputi:
  - 1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
  - 2. Program Pemulihan Pasca Bencana Alam
- d. **Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika**, meliputi:
  - 1. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
  - 2. Program Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika
  - 3. Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
  - 4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

5. Program Peningkatan Pelayanan Pos dan Telekomunikasi
  6. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
  7. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
- e. **Urusan Wajib Statistik**, meliputi:
1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
- f. **Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil**, meliputi:
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
  2. Program Keserasian Kebijakan Kependudukan
- g. **Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, meliputi:
1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
  2. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
  3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
  4. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
  5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- h. **Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**, meliputi:
1. Program Keluarga Berencana
  2. Program Pelayanan Kontrasepsi
  3. Program Pembinaan Peranserta Masyarakat dan Kelompok Usaha dalam Pelayanan KB dan Peningkatan Kesejahteraan
  4. Program Pembinaan Peranserta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri
  5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
  6. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
  7. Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
- i. **Urusan Wajib Sosial**, meliputi:
1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
  2. Program Pembinaan Anak Terlantar
  3. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
  4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
  5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
  6. Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya

7. Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya
- j. **Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga**, meliputi:
  1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
  2. Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan
  3. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

**Misi 3. Mendorong kemajuan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera**

Urusan pemerintahan dan program untuk mendukung Misi Ketiga adalah:

- a. **Urusan Wajib Ketenagakerjaan**, meliputi :
  1. Program Peningkatan Kualitas Penduduk Usia Produktif
  2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
  3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
  4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- b. **Urusan Wajib Ketenagakerjaan Koperasi dan UKM**, meliputi :
  1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
  2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
  3. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif
  4. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM
- c. **Urusan Wajib Ketahanan Pangan**, meliputi :
  1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
  2. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
  3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- d. **Urusan Pilihan Pertanian** meliputi :
  1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
  2. Program Peningkatan Produksi Peternakan
- e. **Urusan Pilihan Pariwisata** meliputi:
  1. Program pengembangan destinasi pariwisata
  2. Program pengembangan pemasaran pariwisata
  3. Program pengembangan Kemitraan
- f. **Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan** meliputi:
  1. Program pengembangan perikanan tangkap
  2. Program pengembangan budidaya perikanan
  3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan
  4. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- g. **Urusan Pilihan Perdagangan** meliputi:

1. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
3. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

h. **Urusan Pilihan Industri** meliputi:

1. Program pengembangan industri kecil dan menengah
2. Program peningkatan kemampuan teknologi industri.

**Misi 4. Meningkatkan kelayakan hidup masyarakat melalui penanganan sarana dan prasarana perkotaan berbasis tataruang dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.**

Urusan pemerintahan dan program untuk mendukung Misi Keempat adalah:

a. **Urusan Wajib Pekerjaan Umum**, meliputi:

1. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
5. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
7. Program Pengendalian Banjir
8. Program Pembinaan Dan Pengawasan Serta Pelayanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi
9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan
10. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

b. **Urusan Wajib Perumahan**, meliputi:

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan
3. Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan
4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
5. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
6. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

c. **Urusan Wajib Penataan Ruang**, meliputi:

1. Program Perencanaan Tata Ruang;
2. Program Pemanfaatan Ruang;
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
4. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU
5. Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame

d. **Urusan Wajib Perhubungan**, meliputi:

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
  4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
  5. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
  6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
  7. Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran
- e. **Urusan Wajib Lingkungan Hidup**, meliputi:
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
  2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
  3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
  5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
  6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- f. **Urusan Wajib Pertanahan**, meliputi:
1. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

**Misi 5. Meningkatkan keandalan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)**

Urusan pemerintahan dan program untuk mendukung Misi Keempat adalah:

- a. **Urusan Wajib Penanaman Modal**, meliputi:
1. Program Penanaman Modal
  2. Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perijinan
  3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- b. **Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan**, meliputi:
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  2. Program Pengembangan Data/Informasi
  3. Program Perencanaan Kerjasama Daerah
- c. **Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**, meliputi
1. Program Pengendalian Pembangunan Daerah
  2. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
  3. Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan PER
  4. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik
  5. Program peningkatan kapasitas kelurahan
  6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  7. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
  8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  9. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

10. Program Pendidikan Kedinasan
11. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
12. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
13. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
14. Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
15. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
16. Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta PAN
17. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
18. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Tabel 7.5  
**KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>MISI I : MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AMAN, RUKUN DAN DAMAI</b>								
1	Tersedianya sarana penunjang kebudayaan yang memadai	Revitalisasi yang diarahkan pada lembaga adat	Proporsi Lembaga Adat terhadap Jumlah Lingkungan	40%	100%	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	DINAS BUDPAR
2	Tersedianya budayawan yang kompeten	Mediasi dan Fasilitasi yang diarahkan pada Seni Budaya Daerah	Persentase Budayawan terhadap jumlah lingkungan	37%	50%	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	DINAS BUDPAR
						Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	DINAS BUDPAR
3	Tertanganinya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif	Mediasi dan Fasilitasi yang diarahkan pada Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Waktu Penyelesaian Penanganan Konflik	3 bulan	1 bulan	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	BAKESBANGPOL & SATPOL PP
						Program Penegakan Perundang-undangan Daerah	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	BAKESBANGPOL & SATPOL PP
						Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	BAKESBANGPOL & SATPOL PP
4	Terwujudnya kerukunan hidup masyarakat yang optimal	Mediasi dan Fasilitasi yang diarahkan pada Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Daya Tangkal terhadap Potensi Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban	90%	98%	Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	BAKESBANGPOL & SATPOL PP
5	Tersedianya sarana penunjang kehidupan beragama yang memadai	Konstruksi dan rehabilitasi yang diarahkan pada sarana peribadatan	Jumlah perpustakaan pada tempat ibadah	4*	32	Program Bantuan Sosial Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bagian Kesra
6	Tersedianya tenaga keagamaan yang berkualitas	Edukasi yang diarahkan pada Tenaga Syiar Keagamaan	Rasio Tenaga Syiar Agama terhadap 1.000 Penduduk	1 : 373,78	1 : 220,53	Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bagian Kesra
7	Tersalurnya dana untuk tenaga syiar dan lembaga	Distribusi Dana yang diarahkan pada tenaga	Daya Serap Dana terhadap Pembinaan	95%	99%	Program Pemberdayaan	Pemerintahan Umum	Bagian Kesra

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	keagamaan yang proporsional	syiar agama dan lembaga keagamaan	Tenaga Syiar dan Lembaga Keagamaan			Kelembagaan Sosial dan Keagamaan		
8	Terbinanya masyarakat secara berkelanjutan	Sosialisasi dan Fasilitasi yang diarahkan pada pembinaan masyarakat	intensitas pembinaan terhadap jumlah keseluruhan masyarakat yang dibina	2 kali	5 kali	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	BPM
intensitas jenis pertemuan fasilitasi pembangunan			5 jenis pertemuan fasilitasi	7 jenis pertemuan fasilitasi	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	BPM	
					Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	Pemberdayaan Masyarakat Desa	BPM	
Cakupan Kelurahan yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kelurahan (SIMKEL) yang baik			8%	30%	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa	BPM	
<b>MISI II : MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMENUHAN PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN PENGUASAAN IPTEK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DAERAH YANG BERDAYA SAING</b>								
1	Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan yang memadai	Konstruksi dan rehabilitasi yang diarahkan pada Lembaga Pendidikan Dasar dan Usia Dini	Rasio Daya Tampung Sekolah terhadap Jumlah Siswa	1:273 (SDN); 1:750 (SMPN)	1 225 (SDN); 1:600 (SMPN)	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	DIKPORA
							Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan
2	Tersedianya SDM Pendidikan yang sesuai kompetensi secara merata	Edukasi yang diarahkan pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Jumlah Siswa	1:20 (SDN) ; 1:18 (SMPN)	1:20 (SDN) ; 1:18 (SMPN)	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	DIKPORA
							Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan
3	Tersedianya sarana prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang memadai	Konstruksi dan Rehabilitasi yang diarahkan pada Puskesmas dan RSUD	Rasio Jumlah Puskesmas terhadap 1.000 Jumlah Penduduk	1 : 44.104	1 : 30.000	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana uskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Rasio Jumlah RSUD terhadap 10.000 Penduduk	1 : 10.095	1 : 8.000		Kesehatan

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Tersedianya kualitas SDM kesehatan yang profesional	Edukasi yang diarahkan pada Tenaga Medis dan Paramedis	Rasio Jumlah Dokter terhadap 1.000 Penduduk	1 : 17,31	1 : 9,00	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Rasio Jumlah Perawat terhadap 1.000 Penduduk	1 : 46,52	1 : 27,60	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
5	Tersedianya standar pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu	Revitalisasi yang diarahkan pada SPM dan SOP	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	85%	100%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	85%	100%	Program Peningkatan Sarpras Rumah Sakit	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Pelayanan Persalinan	85%	100%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	85%	100%	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan	85%	100%	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Desa Siaga Aktif	85%	90%	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam	85%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan
6	Tersedianya prasarana dan layanan kependudukan yang memadai	Konstruksi yang diarahkan pada prasarana layanan kependudukan	Cakupan prasarana layanan Penerbitan Kartu Keluarga	80%	100%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil	DUKCAPIL
			Cakupan prasarana layanan Penerbitan KTP	95,57%	100%		Kependudukan dan Catatan Sipil	
			Cakupan prasarana layanan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	51,58%	100%		Kependudukan dan Catatan Sipil	

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Cakupan prasarana layanan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	6,85%	100%		Kependudukan dan Catatan Sipil	
7	Terwujudnya layanan kependudukan yang berkualitas	Integrasi yang diarahkan pada Teknologi Informasi	Waktu Penyelesaian Layanan Kependudukan	3 hari	1 hari	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil	DUKCAPIL
8	Terwujudnya kesetaraan gender secara menyeluruh	Fasilitasi dan Mediasi yang diarahkan pada Penduduk Perempuan	Partisipasi perempuan dalam proses pembangunan	25%	50%	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BP2KB
			Dokumen kebijakan pengarusutamaan gender yang diimplementasikan	-	1 dokumen	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
9	Terbinanya kelembagaan perempuan secara berkelanjutan	Mediasi dan Fasilitasi yang diarahkan pada Organisasi Perempuan	Persentase Lembaga Perempuan terhadap Jumlah Ormas	23%	30%	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BP2KB
10	Tertanganinya permasalahan anak sesuai situasi	Mediasi dan Fasilitasi yang diarahkan pada Anak Usia 6-15 Tahun	Cakupan Penanganan Masalah Anak terhadap Jumlah Permasalahan Anak	50%	100%	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BP2KB
11	Terwujudnya layanan yang berkualitas bagi anak	Revitalisasi yang diarahkan pada Kota Layak Anak	Cakupan Pemenuhan 31 Indikator Kota Layak Anak	70%	100%	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BP2KB
12	Tertanganinya laju pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan	Mediasi, Fasilitasi, Komunikasi dan Promosi yang diarahkan pada Keluarga Muda	Cakupan PUS Peserta KB Aktif terhadap Jumlah Keseluruhan Peserta KB	86,19%	95%	Program Keluarga Berencana	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BP2KB
			Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	90%	98%	Program Pelayanan Kontrasepsi	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
			Cakupan Advokasi KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)	85%	100%	Program Pembinaan Peranserta Masyarakat dan Kelompok Usaha	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						dalam Pelayanan KB dan Peningkatan Kesejahteraan		
						Program Pembinaan Peranserta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
						Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
13	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Sosialisasi dan Fasilitasi yang diarahkan pada Keluarga Sejahtera	Cakupan Keluarga Sejahtera terhadap Jumlah Seluruh Keluarga (KK)	25,31	37,96	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BP2KB
						Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BP2KB
14	Tertanganinya masalah sosial kemasyarakatan secara berkelanjutan	Mediasi yang diarahkan pada Kelompok Masyarakat Termarginalkan	Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terhadap Keseluruhan PMKS yang ada	90%	97%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	DISOSNAKERTRANS
				4.767 anak	2.783 anak	Program Pembinaan Anak Terlantar	Sosial	DISOSNAKERTRANS
				6.639 orang	6.412 orang	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Sosial	DISOSNAKERTRANS
				10 kali pembinaan	20 kali pembinaan	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	DISOSNAKERTRANS
15	Terdatanya penduduk miskin sesuai kondisi	Klarifikasi yang diarahkan pada Teknologi Informasi	Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk	10,53%	5,06%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Sosial	DISOSNAKERTRANS

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Lainnya		
			Daya serap anggaran penanggulangan kemiskinan terhadap seluruh anggaran yang disediakan	93%	100%	Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
			Cakupan Program Penanggulangan Kemiskinan terhadap Seluruh Program Pembangunan	25%	30%	Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
16	Terbinanya Kelembagaan Pemuda secara berkelanjutan	Reorganisasi yang diarahkan pada organisasi pemuda	Daya Tumbuh Organisasi Pemuda terhadap organisasi pemuda yang sudah ada	71 organisasi	90 organisasi	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Pemuda dan Olahraga	DIKPORA
			Cakupan Pemuda yang berwirausaha terhadap Seluruh Pemuda	80%	95%	Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Pemuda dan Olahraga	DIKPORA
			Persentase Organisasi Pemuda Aktif terhadap Seluruh Organisasi Pemuda	70%	90%	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Pemuda dan Olahraga	DIKPORA
			Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam proses perencanaan pembangunan	25%	45%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (MPBM)	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
17	Tersedianya sarana prasarana olahraga yang memadai	Konstruksi, Rehabilitasi yang diarahkan pada Lapangan dan Gedung Olahraga	Jumlah Lapangan Olahraga terhadap Cabang Olahraga Tertentu	43 lapangan	47 lapangan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pemuda dan Olahraga	DIKPORA
18	Tersedianya dana pembinaan olahraga yang memadai	Distribusi Pendanaan yang diarahkan pada Olahragawan dan Siswa Berprestasi	Daya serap anggaran keolahragaan terhadap total anggaran yang ada	95%	98%	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Pemuda dan Olahraga	DIKPORA
				5 kegiatan pembinaan	15 kegiatan pembinaan	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	DIKPORA

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Tersedianya sarana pendukung yang memadai	Transaksi yang diarahkan pada Data dan Informasi	Ketersediaan data dan informasi	7 dokumen data	7 dokumen data	Program Pengembangan Data dan Informasi	Statistik	BAPPEDA
20	Tersedianya sistem data yang terpadu	Koordinasi dan Integrasi yang diarahkan pada Teknologi Informasi	Ketersediaan sistem informasi Pembangunan	0	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Statistik	BAPPEDA
21	Tersedianya sarana prasarana kearsipan yang memadai	Konstruksi yang diarahkan pada Gedung/Depo Arsip dan Sarana Penunjang	Ketersediaan Gedung Arsip	0	1 depo	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip	Kearsipan	Kantor Perpustakaan dan ARSIPDA
22	Terpenuhinya SDM Layanan Arsip sesuai kebutuhan	Fasilitasi yang diarahkan pada Tenaga Arsiparis	Rasio Arsiparis terhadap jumlah ASN	6%	21%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kearsipan	Kantor Perpustakaan dan ARSIPDA
23	Terpenuhinya sistem pengelolaan arsip yang terpadu	Koordinasi dan Integrasi yang diarahkan pada Teknologi Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku terhadap seluruh SKPD	29,41%	73,54%	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Kearsipan	Kantor Perpustakaan dan ARSIPDA
24	Tersedianya sarana prasarana perpustakaan yang memadai	Konstruksi yang diarahkan pada Gedung Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Rumah Ibadah	Daya Tampung Gedung memadai terhadap kapasitas gedung yang ada	78%	100%	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Kantor Perpustakaan dan ARSIPDA
			jumlah perpustakaan yang dibina terhadap seluruh perpustakaan	24	24		Perpustakaan	Kantor Perpustakaan dan ARSIPDA
			Persentase Perpustakaan Rumah Ibadah terhadap seluruh rumah ibadah	25%	95%		Perpustakaan	Kantor Perpustakaan dan ARSIPDA
25	Terpenuhinya SDM Layanan Perpustakaan yang memadai	Fasilitasi yang diarahkan pada Tenaga Pustakawan	Rasio Pustakawan terhadap Seluruh Aparatur Sipil Negara	1 : 1.104	1 : 602	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Perpustakaan	Kantor Perpustakaan dan ARSIPDA

**MISI 3 : MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA**

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tersedianya tenaga kerja yang berkompeten	Melakukan edukasi dan standarisasi mutu serta kompetensi tenaga kerja yang diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja	Persentase angkatan kerja yang terlatih	2%	7%	Program Peningkatan Kualitas Penduduk Usia Produktif	Ketenagakerjaan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Terlindunginya tenaga kerja sesuai ketentuan	Melakukan mediasi antar pekerja dengan pemilik pekerjaan yang diarahkan pada perlindungan tenaga kerja lokal	Persentase kasus yang ditangani	20%	100%	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Tersedianya informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi	Melakukan fasilitasi keterbukaan informasi ketenagakerjaan yang diarahkan pada peningkatan kuantitas angkatan kerja yang ditempatkan	Cakupan layanan informasi	25%	75%	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Ketenagakerjaan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Terbentuknya kelembagaan koperasi yang profesional	Melakukan revitalisasi kelembagaan koperasi yang diarahkan pada peningkatan jumlah koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	64,90%	73,25%	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
	Tersedianya SDM yang berkompeten	Melakukan edukasi kompetensi SDM kelembagaan dan UKM yang diarahkan pada peningkatan kompetensi pengurus koperasi dan pelaku UKM	Persentase koperasi berprestasi	2,06%	9,79%	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase UKM yang terlatih	18%	36%	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
	Terwujudnya akses permodalan	Melakukan fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga perbankan yang diarahkan pada peningkatan modal usaha	Persentase UKM yang terfasilitasi	1 %	5 %	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Tersedianya kelembagaan yang mantap	Melakukan reorganisasi internal kelembagaan yang diarahkan pada peningkatan kinerja Dewan Keamanan Pangan	Dokumen	0	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan Bp4K
	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Melakukan revitalisasi prasarana pengaman stok komoditas pangan yang diarahkan pada optimalisasi fungsi Gudang Cadangan Pangan dan Lumbung Pangan	Daya tampung	20 ton	200 ton		Ketahanan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan Bp4K
	Tersedianya SDM yang berkompeten	Melakukan edukasi terhadap kualitas dan mutu penyuluhan yang diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga penyuluh	Persentase jumlah penyuluh yang dilatih	50 %	100 %	Program pemberdayaan penyuluh Pertanian/ perkebunan lapangan	Ketahanan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan Bp4K
		Melakukan visitasi pada daerah yang representatif yang diarahkan pada pengembangan wawasan kelompok tani	Persentase hasil terapan visitasi	0 %	25 %	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	Kantor Ketahanan Pangan Bp4K
4	Tersedianya lahan budidaya yang memadai	Melakukan intensifikasi peningkatan produktifitas pertanian yang diarahkan pada pengembangan pangan dan hortikultura	Produktifitas	100 Kw/Ha	200 Kw/Ha	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan
	Tersedianya sarana dan prasarana yang representatif	Melakukan pengembangan konstruksi prasarana destinasi pariwisata yang diarahkan pada pembangunan kampung budaya	Daya tampung terhadap pelaku seni	0	4.000 org	Program pengembangan destinasi pariwisata	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tersedianya Data/Informasi yang memadai	Melakukan inventarisasi data dan informasi kepariwisataan daerah yang diarahkan pada pengembangan potensi kepariwisataan	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Terdidiknya Pelaku Wisata yang Profesional	Melakukan edukasi dan fasilitasi SDM kepariwisataan daerah yang diarahkan pada pembinaan <i>guide</i> dan pengusaha	Persentase Pelaku Wisata Yang Terdidik	0 %	10 %		Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Terpeliharanya situasi keamanan secara menyeluruh	Melakukan koordinasi yang terpola dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kinerja stakeholder kepariwisataan	Persentase Keamanan di Destinasi wisata	70 %	95 %	Program pengembangan Kemitraan	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6.	Tersedianya Sarana Prasarana Yang Memadai	Melakukan transaksi pengadaan sarana produksi bagi nelayan yang diarahkan pada penyediaan peralatan perikanan tangkap	Persentase Kelompok Penerima	20 %	100 %	Program pengembangan perikanan tangkap	Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan
	Tersedianya Sumberdaya Perikanan	Melakukan eksplorasi potensi produksi perikanan yang diarahkan pada pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya air tawar	Produksi perikanan tangkap	1.706 ton	1.850 ton	Program pengembangan budidaya perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan
			Produksi perikanan budidaya	298.1 ton	325 ton		Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terlatihnya Sumberdaya Petani/Nelayan yang Terampil	Melakukan edukasi peningkatan mutu pengolahan hasil perikanan yang diarahkan pada peningkatan kapasitas Poktan pengolah hasil perikanan	Persentase jumlah poktan yang terampil	40 %	100 %	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan
	Tersedianya modal usaha yang memadai	Melakukan distribusi stimulan pengembangan usaha yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat nelayan	Persentase jumlah masyarakat nelayan yang memperoleh modal usaha			Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan
7.	Terwujudnya masyarakat yang paham tentang perkembangan harga komoditas	Meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap ketersediaan dan kepastian harga komoditas pangan yang diarahkan pada kemudahan akses informasi harga dan stok komoditas strategis	Cakupan Layanan Informasi Harga komoditas	0 %	100 %	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Melakukan renovasi/konstruksi prasarana perdagangan yang diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan pasar tradisional dan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis	Umur Teknis pasar tradisional	10 thn	25 thn	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
	Tersedianya Tim Pengamanan dan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa yang berkompeten	Melakukan reorganisasi pola kerja kelembagaan yang diarahkan pada Peningkatan kinerja tim pengamanan dan pengawasan peredaran barang dan jasa	Pedoman Umum	0	1	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Tersedianya pelaku IKM yang berdaya saing	Melakukan edukasi daya saing IKM yang diarahkan pada peningkatan kompetensi pelaku IKM klaster unggulan	Presentase pelaku usaha yang dilatih	29%	40%	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Industri	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
	Tersedianya permodalan Usaha	Melakukan fasilitasi pengembangan usaha yang diarahkan pada peningkatan produktifitas pelaku IKM klaster unggulan	MOU	15%	19%		Industri	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
	Tersedianya Sarana Produksi yang memadai	Melakukan distribusi sarana produksi IKM yang diarahkan pada penyediaan peralatan kerja	Presentase kelompok penerima bantuan	5 %	7 %	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Industri	
9.	Tersedianya SDM penanaman modal yang handal	Melakukan edukasi profesionalitas sumber daya penanaman modal yang diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga SPIPISE	Presentase	12,7 %	42,5 %	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Industri	BPMP2T
	Tersedianya sistem pelayanan yang tepat	Melakukan inventarisasi tingkat kepuasan konsumen yang diarahkan pada peningkatan standar mutu pelayanan	Waktu penyelesaian perijinan	20 Hr	7 Hr	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perijinan	Penanaman Modal	BPMP2T
	Tersedianya regulasi layanan perijinan yang proporsional	Melakukan simplikasi prosedur dan kemudahan akses pelayanan perijinan yang diarahkan pada optimalisasi layanan satu pintu	Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penanaman Modal	BPMP2T

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>MISI 4 : MENINGKATKAN KELAYAKAN HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENANGANAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN BERBASIS TATARUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN.</b>								
1	Tersedianya regulasi pengelolaan air limbah yang komprehensif	Koordinasi dan Ratifikasi peraturan yang diarahkan pada Pengelolaan air limbah	Perda Pengelolaan Air Limbah	0	1 Perda	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pekerjaan Umum	Dinas PU, BLH
2	Tersedianya lembaga pengelolaan air limbah yang terstruktur	Koordinasi dan integrasi yang diarahkan pada pengelolaan air limbah skala lingkungan	Persentase lembaga pengelolaan air limbah yang berfungsi	10 %	100 %	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pekerjaan Umum	Dinas PU, BLH, Kecamatan
3	Tersedianya lahan sarana pengolah air limbah yang memadai	Investasi lahan yang diarahkan pada Kawasan permukiman kumuh	Persentase lahan yang tersedia untuk pengelolaan air limbah	0 %	100 %	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pekerjaan Umum	Dinas PU, BLH, Dinas Kebersihan
4	Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang memadai	Konstruksi dan rehabilitasi yang diarahkan pada Kawasan permukiman kumuh	Cakupan pengelolaan air limbah	85,4 %	100 %	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pekerjaan Umum	Dinas PU, BLH, Dinas Kebersihan, Kecamatan
5	Tersedianya akses air bersih secara merata	Konstruksi sambungan air bersih yang diarahkan pada Kawasan permukiman	Cakupan pelayanan air bersih	60 %	100 %	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pekerjaan Umum	Dinas PU
6	Tersedianya regulasi pengelolaan sampah yang komprehensif	Koordinasi dan Ratifikasi peraturan yang diarahkan pada Pengelolaan sampah	Perda Pengelolaan Sampah	1 Perda	1 Perda perubahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Dinas PU, BLH, Kecamatan
7	Tersedianya lembaga pengelolaan sampah secara berjenjang	Restrukturisasi lembaga yang diarahkan pada Skala Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, dan Kota	Persentase lembaga pengelolaan sampah yang berfungsi	10 %	100 %	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Dinas PU, BLH, Kecamatan
8	Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan sampah	Konstruksi dan Intensifikasi prasarana	Cakupan pengelolaan sampah	71,59 %	100 %	Program Pengembangan	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Dinas PU, BLH,

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	yang memadai	dan sarana yang diarahkan pada Skala Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, dan Kota				Kinerja Pengelolaan Persampahan		Kecamatan
9	Terbentuknya TPA regional yang optimal	Koordinasi dan Reorganisasi yang diarahkan pada Rakor dengan Pemerintah Provinsi dan Pemkab Lobar	Nota Kesepahaman (MoU)	0	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Dinas PU, BLH, Kecamatan
10	Terkelolanya sampah berbasis energi terbarukan yang berkualitas	Konstruksi dan implementasi teknologi yang diarahkan pada Skala Kecamatan dan Kota	Persentase pengurangan sampah	0 %	50 %	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Dinas PU, BLH, Kecamatan
11	Tertanganinya permasalahan banjir dan genangan secara optimal	Konstruksi dan rehabilitasi yang diarahkan pada Sistem drainase, irigasi, dan sungai	Cakupan wilayah layanan drainase / Cakupan luas genangan dan banjir	Ha	Ha	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Pekerjaan Umum	Dinas PU
						Program pembangunan turap/ talud/bronjong	Pekerjaan Umum	Dinas PU
						Program Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum	Dinas PU
12	Tersedianya jaringan jalan dan jembatan sesuai standar	Konstruksi dan rehabilitasi yang diarahkan pada Jalan Kota	Persentase jalan dalam kondisi mantap sesuai NSPM Persentase jembatan dalam kondisi baik sesuai NSPM			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
						Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
						Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
						Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
13	Tersedianya fasilitas pejalan kaki dan pesepeda yang aman dan nyaman	Konstruksi dan rehabilitasi yang diarahkan pada Jalan	Persentase fasilitas pejalan kaki dan pesepeda	%	%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PU

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		utama kota				Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
14	Terpeliharanya jaringan irigasi yang optimal	Konstruksi dan rehabilitasi jaringan irigasi yang diarahkan pada Kawasan pertanian	Cakupan layanan irigasi (mempertahankan)	1770,62 Ha	1770,62 Ha	Program Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas PU
15	Terwujudnya kualitas jasa konstruksi yang sesuai standar	Sosialisasi dan Fasilitasi yang diarahkan pada Pelaku Jasa Konstruksi	Persentase bangunan yang memiliki sertifikat layak fungsi	%	%	Program Pembinaan dan Pengawasan serta Pelayanan IUJK	Pekerjaan Umum	Dinas PU
16	Tertanganinya kawasan permukiman kumuh secara menyeluruh	Konstruksi dan rehabilitasi sarana dan prasarana permukiman yang diarahkan pada Kawasan permukiman kumuh	Cakupan kawasan permukiman kumuh	805 Ha	0 Ha	Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan	Perumahan	Dinas PU
						Program Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan	Dinas PU
17	Tertanganinya rumah tidak layak huni secara menyeluruh	Konstruksi dan rehabilitasi yang diarahkan pada Rumah Tidak Layak Huni	Persentase rumah layak huni	74,57 %	100 %	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan	Dinas PU
						Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Perumahan	Dinas PU
18	Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang memadai	Konstruksi dan rehabilitasi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang diarahkan pada Kawasan permukiman	Persentase Fasilitas Umum (terhadap luas kawasan permukiman)	30 %	30 %	Program Pemeliharaan/ Pengelolaan Areal Pemakaman	Perumahan	Dinas Pertamanan
						Program Peningkatan Jalan & Jembatan (jalan lingkungan)	Pekerjaan Umum	Dinas PU
19	Tersedianya sistem transportasi publik yang memadai	Implementasi yang diarahkan pada pengembangan sistem transportasi publik Trans Mataram	Cakupan wilayah yang terlayani angkutan publik	4 rute	14 rute	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Perhubungan	DISHUBKOMINFO
20	Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	Konstruksi dan rehabilitasi yang diarahkan pada Terminal,	Cakupan ketersediaan fasilitas perhubungan	58 %	79 %	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perhubungan	DISHUBKOMINFO

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Halte, Pengujian Kendaraan bermotor, dan penunjang lainnya				Perhubungan		
						Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Perhubungan	DISHUBKOMINFO
						Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Perhubungan	DISHUBKOMINFO
						Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Perhubungan	DISHUBKOMINFO
21	Terpasangnya fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan (road safety) secara menyeluruh	Konstruksi dan rehabilitasi yang diarahkan pada Rambu, marka, Traffic light, dll	Cakupan ketersediaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan	72 %	78 %	Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas	Perhubungan	DISHUBKOMINFO
22	Terkelolanya perpustakaan secara optimal	Revitalisasi lembaga yang diarahkan pada Unit Pengelola Perpustakaan	Persentase lokasi parkir yang terkelola	80 %	90 %	Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	Perhubungan	DISHUBKOMINFO
23	Terwujudnya perencanaan tata ruang yang berkualitas	konsolidasi dan integrasi yang diarahkan pada RTRW dan RDTR	Perda Penataan Ruang	1 Perda	2 Perda	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Bappeda, Dinas Tata Kota
24	Terwujudnya pemanfaatan ruang secara tertib sesuai prosedur	sosialisasi, edukasi dan implementasi yang diarahkan pada Layanan Perijinan, Masyarakat dan Swasta	Persentase kesesuaian rencana dengan pemanfaatan ruang	56,56 %	100 %	Program Pemanfaatan Tata Ruang	Penataan Ruang	Bappeda, Dinas Tata Kota, BPMP2T
25	Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sejalan dengan peraturan	koordinasi dan supervisi terhadap pemanfaatan ruang oleh pemerintah, masyarakat dan swasta	Persentase ketidaksesuaian pemanfaatan tata ruang	43,44 %	0 %	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Bappeda, Dinas Tata Kota, BPMP2T
						Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU	Penataan Ruang	Dinas Pertamanan
						Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame	Penataan Ruang	Dinas Pertamanan
26	Terkelolanya aset milik daerah secara tertib sesuai prosedur	koordinasi pengelolaan Tanah milik daerah	Persentase tanah milik daerah yang telah bersertifikat	80 %	100 %	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	Pertanahan	BPKAD, Bagian Pemerintahan

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Tertanganinya pencemaran lingkungan hidup secara menyeluruh	Sosialisasi dan reduksi yang diarahkan pada Pencemaran udara, air, dan tanah	Persentase badan air yang tercemar	%	%	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Lingkungan Hidup	BLH, Dinas Kebersihan, DISHUBKOMINFO
			Hasil Penilaian Adipura	61 – 70 Nilai	71 – 80 Nilai	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	BLH, Dinas Kebersihan, DISHUBKOMINFO
						Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	BLH
28	Tercapainya luasan ruang terbuka hijau publik dan privat sejalan dengan peraturan	Investasi dan ekstensifikasi yang diarahkan pada Ruang Terbuka Hijau Kota	Persentase Ruang Terbuka Hijau	11,62 %	15 %	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Lingkungan Hidup	BPKAD, Dinas Pertamanan, BLH
29	Terwujudnya kesiapsiagaan kebencanaan pada wilayah rawan bencana	Sosialisasi, edukasi, koordinasi, dan konsolidasi yang diarahkan pada Pra dan Pasca Bencana	Rasio ketersediaan sarpras penanggulangan bencana	20 %	100 %	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	BPBD, PMK, Dinas Kesehatan, DISOSNAKERTRANS, Dinas PU
			Daya tanggap darurat	15 Menit	10 Menit	Program Pemulihan Pasca Bencana Alam	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	BPBD
						Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	PMK
30	Tertatanya layanan komunikasi dan informatika yang berkualitas	Sosialisasi dan edukasi yang diarahkan pada teknologi informasi dan komunikasi	Cakupan layanan informasi publik	%	%	Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa	IPTEK	DISHUBKOMINFO, PDEI, Humas dan Protokol
				%	%	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	IPTEK	PDEI
						Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	IPTEK	Bagian Humas, PDEI

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	IPTEK	Bagian Humas, PDEI
			Cakupan layanan publik melalui sistem elektronik	%	%	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	IPTEK	PDEI
						Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	IPTEK	Bagian Humas, PDEI
<b>MISI 5 : MENINGKATKAN KELAYAKAN HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENANGANAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN BERBASIS TATA RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN.</b>								
1	Tersedianya sarana prasarana pemerintah yang memadai	Konstruksi dan Rehabilitasi yang diarahkan pada Gedung Pemerintah Daerah dan Sarana Penunjang	Tingkat umur ekonomis Gedung Pemerintahan dan Sarana Penunjang	15 tahun	10 tahun	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Bagian Umum, Bagian Pemerintahan
			Cakupan ketersediaan gedung kelurahan sesuai kebutuhan	90%	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Bagian Pemerintahan

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Tertatanya birokrasi pemerintahan	Konsolidasi, Restrukturisasi yang diarahkan pada Aparatur Sipil Negara	Cakupan unit pelayanan publik berkualitas sesuai penilaian Ombudsman	38,34%	100%	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Bagian Organisasi
3	Terwujudnya sistem pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel	Sosialisasi, fasilitasi, dan sertifikasi yang diarahkan SKPD dan ASN lingkup Pemkot Mataram	Persentase pejabat pengadaan barang/jasa yang aktif	43,48 %	80%	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Bagian APP
4	Terwujudnya sistem administrasi pembangunan yang tertib dan terkendali	Koordinasi dan monitoring/ supervisi yang diarahkan SKPD lingkup Pemkot Mataram	Persentase pencapaian realisasi program SKPD	50%	100%	Pengendalian Pembangunan Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Bagian APP
5	Tersedianya SDM yang profesional	Edukasi yang diarahkan pada Aparatur Sipil Negara	Cakupan Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklatpim	97,13%	100%	Program Pendidikan Kedinasan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKD
			Cakupan Layanan Kepegawaian	15 jenis	20 jenis	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKD

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	12 Kasus	0 Kasus		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKD
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan/ <i>Bezetting</i> Pegawai	80,91%	90%	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKD
6	Tersedianya regulasi daerah sesuai kebutuhan	Fasilitasi yang diarahkan pada Penetapan PERDA	Cakupan PERDA yang ditetapkan sesuai kebutuhan	85%	95%	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat DPRD
7	Terpenuhinya laporan hasil pemeriksaan kegiatan pembangunan yang efektif dan efisien	Fasilitasi yang diarahkan pada Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan	Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan	37 SKPD	37 SKPD	Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektorat
			Rasio Auditor terhadap ASN	1 : 331 (20 auditor)	1 : 220 (30 auditor)	Program Peningkatan Profesi-onalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan	Inspektorat

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Pengawasan	Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
8	Terpenuhinya struktur kelembagaan yang proporsional	Fasilitasi yang diarahkan pada SOTK	Dokumen SOTK	37 Dokumen	37 Dokumen	Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta PAN	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Bagian Organisasi
9	Terbinanya SDM Aparatur secara berkelanjutan	Fasilitasi dan Mediasi yang diarahkan pada Aparatur Sipil Negara	Cakupan Fasilitasi Kegiatan ASN	5 Kegiatan	15 Kegiatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat KORPRI
10	Terpenuhinya regulasi sesuai kebutuhan	Legislasi yang diarahkan pada Penetapan PERWAL, Keputusan dan SK	Cakupan Produk Hukum yang ditetapkan sesuai kebutuhan	85%	95%	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Bagian Hukum
11	Tersedianya data penunjang yang valid dan berkualitas	Koordinasi, inventarisasi, evaluasi dan konsultasi yang diarahkan pada data hasil pelaksanaan pembangunan	Dokumen	90%	95%	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Statistik	BAPPEDA

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai	Konstruksi, Rehabilitasi dan Transaksi di arahkan pada Aset milik daerah	Bangunan Gedung	Unit	unit	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BPKAD
13	Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel	Inventarisasi dan evaluasi yang di arahkan pada pengelolaan APBD	Dokumen	12	12		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BPKAD
14	Tercapainya target penerimaan PAD	Intensifikasi yang di arahkan kepada wajib pajak	Penerimaan PAD	100 %	100 %	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Dinas Pendapatan
15	Tersedianya dana bantuan secara simultan	Fasilitasi yang di arahkan kepada kelompok usaha dan masyarakat	Presentase Kelompok yang menerima bantuan	100 %	100 %	Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan PER	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Bagian Ekonomi
16	Tersedianya dokumen perencanaan yang Akurat dan Kredibel	Fasilitasi, konsultasi dan koordinasi yang di arahkan pada penyusunan dokumen perencanaan yang akurat dan kredibel	Dokumen Perencanaan Pembangunan	16 dok	40 dok	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Terjalannya Kerjasama dan Kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan Pembangunan	Fasilitasi, komunikasi dan koordinasi yang diarahkan pada pemangku kepentingan pembangunan	Cakupan koordinasi kerjasama dan kajian pembangunan	24 kali koordinasi	84 kali koordinasi	Program Kerjasama Pembangunan	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
18	Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Koordinasi, Fasilitasi dan sosialisasi masyarakat yang diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Tingkat/Persentase aspirasi masyarakat melalui musrenbang	70%	80%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA

---

## 7.6. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN KOTA MATARAM

---

Dalam RTRW Nasional Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional. Dalam RTRW Provinsi NTB, Kota Mataram ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mataram Metro di Bidang Pertumbuhan Ekonomi.

Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi NTB, sesuai Perda Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 memiliki kebijakan utama pembentukan struktur tata ruang dengan memperhatikan daerah sekitar. Tahapan pembangunan dalam rangka pengembangan wilayah diarahkan guna menerjemahkan posisi Kota Mataram sebagai Pusat Kegiatan Nasional, serta Kawasan Strategis Provinsi NTB dimana Kota Mataram harus memperkokoh posisinya sebagai Pusat Pemerintahan, Pendidikan, serta Perdagangan dan Jasa. Adapun tahapan pengembangan wilayah adalah sebagai berikut:

### I. Rencana Pusat Pelayanan Wilayah Kota:

Diarahkan kepada pengembangan wilayah dengan memepertimbangkan fungsi-fungsi spesifik di setiap wilayahnya. Berdasarkan pola pergerakan yang terpetakan, saat ini masih memusat di tiga wilayah utama Kota Mataram, yaitu Wilayah Ampenan (Kecamatan Ampenan dan Sekarbela), Wilayah Mataram (Kecamatan Selaparang dan Mataram), dan Wilayah Cakranegara (Kecamatan Cakranegara dan Sandubaya). Atas daar tersebut pusat pelayanan kota dikembangkan sebagai berikut:

1. Pengembangan Pusat Pelayanan Ampenan sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan dan jasa serta pelayanan pariwisata;
2. Pengembangan Pusat Pelayanan Mataram sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial, seperti pendidikan;
3. Pengembangan Pusat Pelayanan Cakranegara sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan dan pusat bisnis.

### II. Rencana Jaringan Prasarana Wilayah Kota

#### 1. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

##### Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Darat

Rencana pengembangan jaringan transportasi darat terbagi menjadi struktur jaringan jalan, rute angkutan, dan terminal. Pada dasarnya, ruas-ruas jaringan jalan di Kota Mataram dibagi berdasarkan klasifikasi sistem hirarki jalan yang bertujuan sebagai berikut:

- menghindari terjadinya pencampuran arus lalu lintas pergerakan regional dan lokal di kawasan pusat kota;
- mengembangkan kawasan yang sesuai dengan arahan pemanfaatan lahan;
- menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan rute/jalur/trayek angkutan umum.

### **Rencana Pembangunan Jalan Baru di Wilayah Kota Mataram Tahun 2010 - 2030**

NO.	WILAYAH YANG DIHUBUNGKAN	RENCANA DAN LOKASI PENGEMBANGAN
1.	Kecamatan Sekarbela – Kecamatan Labuapi (Kab. Lombok Barat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pelebaran jalan di Jalan Gajah Mada menuju Kecamatan Labuapi.</li> <li>• pembangunan jalan tembus baru dari Jalan Dr. Sujono hingga ke Desa Kuranji Kecamatan Labuapi (Kabupaten Lombok Barat).</li> <li>• pembangunan jalan baru dari Jalan Panjitar Negara – Jalan Merdeka.</li> <li>• pembangunan jalan tembus dari Jalan Batu Mandiri – Jalan Dr. Sujono.</li> <li>• pembangunan jalan tembus dari Jalan Batu Mandiri (Kelurahan Jempong Baru) – Situs Makam Loang Baloq.</li> <li>• pembangunan jalan tembus baru dari Jalan Merdeka Raya – Situs Makam Loang Baloq.</li> <li>• pembangunan jalan tembus dari Jalan Arya Banjar Getas – bantaran Sungai Ancar (Kelurahan Taman Sari).</li> <li>• pembangunan jalan baru dari bantaran Sungai Ancar – Kelurahan Tanjung Karang Permai.</li> </ul>
2.	Kecamatan Cakranegara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pembangunan jalan baru di Kecamatan Cakranegara dari Jalan Tohpati (Kelurahan Karang Taliwang) – Jalan Gora (Lingkungan Nyangget Kelurahan Selagalas).</li> </ul>
3.	Kecamatan Ampenan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pembangunan jalan baru 9 km di sepanjang pesisir pantai bagian barat Kota Mataram.</li> <li>• pembangunan jalan tembus dari Jalan Dakota – Jalan Adi Sucipto (Kelurahan Rembiga)</li> <li>• pembangunan jalan baru pesisir Ampenan Selatan – jalan di selatan Sungai Ancar.</li> <li>• pembangunan Jalan Lumba-lumba – Jalan Irigasi – Jalan Swakarya.</li> <li>• pembangunan jalan tembus Jalan Udayana – Jalan Semanggi.</li> <li>• pembangunan jalan baru di bantaran Sungai Jangkok Kelurahan Kebon Sari.</li> <li>• pembangunan jalan tembus baru dari bantaran Sungai Jangkok Kelurahan Kebon Sari – Jalan Udayana.</li> <li>• pembangunan jalan tembus baru dari Jalan Bambu Runcing – Jalan Adi Sucipto.</li> <li>• pembangunan jalan layang.</li> </ul>
	Kecamatan Mataram dan Kecamatan Selaparang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pembangunan jalan tembus baru dari Jalan Bung Hatta (Kelurahan Monjok Kecamatan Mataram) – Jalan Jend. Ahmad Yani (Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Selaparang) – Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.</li> </ul>

NO.	WILAYAH YANG DIHUBUNGKAN	RENCANA DAN LOKASI PENGEMBANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• pembangunan jalan dari Jalan Majapahit – bantaran Sungai Ancar – Jalan Airlangga.</li> <li>• pembangunan jalan dari Jalan KH. Ahmad Dahlan – Jalan Batu Bolong – Jalan Nuraksa.</li> <li>• pembangunan jalan tembus baru dari Jalan Batu Bolong – Jalan Nuraksa.</li> <li>• pembangunan Jalan Cendrawasih – Jalan Oloh.</li> <li>• pembangunan jalan tembus baru dari bantaran Sungai Jangkok Kelurahan Dasan Agung – Jalan Udayana.</li> </ul>

### Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Laut

Pengembangan transportasi laut di Kota Mataram terdiri dari pengembangan pelabuhan laut, khususnya pelabuhan khusus wisata. Tujuan pengembangan pelabuhan laut tersebut adalah untuk memperpendek jarak tempuh penyeberangan laut dari 4 jam menjadi 1-2 jam dalam rangka mendukung salah satu fungsi Kota Mataram sebagai kota pelayanan pariwisata serta melayani pergerakan antarwilayah.

Pelabuhan khusus wisata ini dikembangkan di Lingkungan Mapak Kelurahan Jempong Baru (Kecamatan Sekarbela) dengan rencana peningkatan kelengkapan prasarana dan sarana pelabuhan laut, seperti pembangunan dermaga sandar, fasilitas bongkar muat barang, pergudangan (tertutup dan terbuka), dan sarana prasarana penunjang lainnya

Rute wisata yang akan dikembangkan di Kota Mataram melalui pelabuhan khusus wisata terdiri dari:

1. Pulau Lombok - Pulau Bali (PP);
2. Mapak – Ampenan – Senggigi – Gili Meno – Gili Trawangan – Gili Air (PP);
3. Mapak – Lembar – Sekotong (PP);
4. Mapak – Sekotong – Bena (PP);
5. Mapak – Pulau Moyo (PP);
6. Mapak – Pelabuhan Benete (PP);
7. Mapak – Ampenan – Tanjung Sire (PP);
8. Sungai Jangkok – Senggigi - Gili Meno – Gili Trawangan- Gili Air (PP); dan
9. Ampenan – Telong-elong (PP).

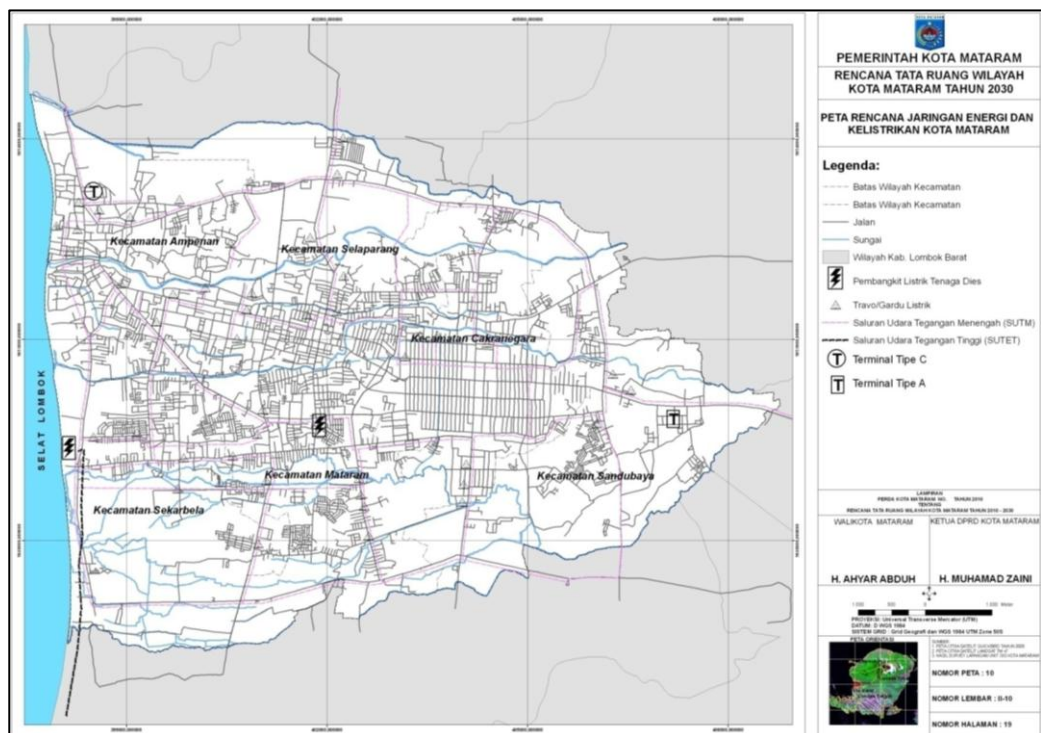
### 2. Pengembangan Sistem Jaringan Energi dan Ketenagalistrikan

Total kebutuhan listrik di Kota Mataram hingga akhir tahun perencanaan (Tahun 2030) adalah 104.370 Kva. Jumlah kebutuhan listrik di Sandubaya sebesar 26.571 Kva, Kecamatan Ampenan

sebesar 19.837 Kva, Kecamatan Selaparang sebesar 17.010 Kva, Kecamatan Cakranegara sebesar 16.252 Kva, Kecamatan Mataram sebesar 13.651 Kva, dan Kecamatan Sekarbela sebesar 11.049 Kva.

Berdasarkan hal tersebut, energi listrik akan sangat dibutuhkan pada wilayah-wilayah yang di dalamnya terdapat pusat kegiatan perdagangan dan jasa, industri, serta pariwisata. Kebutuhan listrik yang saat ini masih disuplai dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) tidak akan memenuhi kebutuhan listrik di masa mendatang. Oleh sebab itu, diperlukan alternatif energi baru, seperti energi terbarukan serta peningkatan jumlah prasarana dan sarana kelistrikan. Dengan demikian, setidaknya ada 3 (tiga) upaya pengembangan yang perlu dilakukan, yaitu pengembangan sistem jaringan transmisi listrik, peningkatan distribusi listrik, dan pengembangan energi baru terbarukan.

Rencana pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan dapat dilihat lebih jelas pada Gambar 7.1.



Gambar 7.1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan di Wilayah Kota Mataram

### 3. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi

Kebutuhan telepon kabel diperkirakan tidak terlalu meningkat secara signifikan karena penggunaan telepon selular yang begitu pesat. Meskipun demikian, upaya peningkatan telepon kabel masih dibutuhkan, terutama untuk kegiatan-kegiatan pelayanan sosial

seperti perkantoran, pendidikan, dan kesehatan. Upaya-upaya pengembangan sistem jaringan telepon adalah:

1. peningkatan kapasitas terpasang dan distribusi Stasiun Telepon Otomat (STO) Mataram;
2. pengembangan telepon rumah dan telepon umum;
3. pengembangan distribusi jaringan sambungan telepon dari STO ke pelanggan; dan
4. pengembangan jaringan baru di seluruh wilayah Kota Mataram yang diintegrasikan penempatannya sesuai kapasitas pelayanan serta estetika lingkungan dan keamanan;
5. pemasangan jaringan kabel telepon di bawah tanah yang terintegrasi dan terpadu dengan jaringan infrastruktur lainnya pada kawasan strategis kota.

Adapun rencana pengembangan sistem jaringan nirkabel untuk telepon selular, *mobile fixphone*, *fiber optic*, dan teknologi informasi berbasis internet adalah:

1. menata lokasi menara telekomunikasi dan BTS (*Base Transceiver Station*) terpadu secara kolektif antaroperator yang lokasinya ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
2. mengembangkan teknologi telematika berbasis teknologi modern pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan;
3. membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan antarpusat kegiatan; dan
4. peningkatan sistem informasi telekomunikasi pembangunan yang berbasis teknologi internet.

Pengembangan stasiun-stasiun komunikasi nirkabel atau menara telekomunikasi dengan arahan pengembangan sebagai berikut:

1. penggunaan tanah sekitar tower difungsikan sebagai kawasan RTH dan jauh dari permukiman;
2. pemagaran yang rapat di sekeliling kaki tower dengan jarak yang cukup jauh demi keamanan, karena mempunyai tegangan tinggi;
3. menerapkan konsep menara bersama yang dapat digunakan untuk penempatan beberapa antena dari beberapa penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyiaran dengan isolasi antarpemancar 30 dB atau dengan jarak antarantena 3 meter; dan
4. pendirian menara di sekitar kawasan cagar budaya harus menyesuaikan ketentuan estetika lingkungan kawasan setempat.

#### 4. Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kota

Sistem jaringan sumberdaya air di Kota Mataram terdiri mata air dan sungai beserta ekosistemnya. Peningkatan kualitas air di Kota Mataram dilakukan pada sumber-sumber air berupa mata air dan sungai beserta ekosistemnya. Sumber mata air terdapat di Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Timur, Kelurahan Pagutan Timur, Kelurahan Pagutan Barat, Kelurahan Dasan Agung, Kelurahan Kebon Sari, Kelurahan Pejeruk, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Karang Taliwang, dan Kelurahan Sayang-sayang. Upaya untuk menjaga kelestarian sumberdaya air di Kota Mataram adalah:

1. Konservasi sumberdaya air
  - a. Perlindungan dan pelestarian sumber air;
  - b. Pengelolaan kualitas air; dan
  - c. Pengendalian pencemaran air.
2. Pendayagunaan sumberdaya air
  - a. penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan air baku, terdiri atas:
    - pemantapan kerjasama terpadu pengadaan air baku antar wilayah melalui Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Menang - Mataram;
    - pemantapan air permukaan meliputi pengembangan kolam retensi untuk mendukung ketersediaan sediaan air baku; dan
    - pengaturan pemanfaatan air tanah pada wilayah kota secara berkelanjutan.
  - b. Pengembangan sistem jaringan irigasi, terdiri atas:
    - pelayanan irigasi melayani areal pertanian yang ditetapkan sebagai budidaya tanaman pangan berkelanjutan dan areal pertanian hortikultura yang ditetapkan berdasarkan rencana pola ruang;
    - pelayanan irigasi teknis dan pintu air yang melayani Kelurahan Rembiga, Kelurahan Sayang-sayang, Kelurahan Selagalas, Kelurahan Bertais, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Jempong Baru, dan Kelurahan Turida. Rencana pengaturan pola aliran air irigasi adalah dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas prasarana irigasi teknis serta menerapkan sistem buka tutup pintu air agar dapat mengairi seluruh lahan pertanian hortikultura yang dikembangkan di Kota Mataram; dan

- pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem prasarana irigasi untuk memelihara ketersediaan air.
3. Pengendalian daya rusak air
- a. Pengembangan sistem pengendalian banjir, terdiri atas:
    - normalisasi aliran sungai-sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, dan Sungai Brenyok beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase mayor kota;
    - pengembangan kolam retensi untuk menampung dan menghambat kecepatan aliran air hujan di Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela;
    - membatasi kegiatan fisik dan/atau non fisik pada hulu dan hilir wilayah sungai; dan
    - pemulihan fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumberdaya air.
  - b. Pengembangan sistem pengamanan pantai, terdiri atas:
    - pengurangan laju angkutan sedimen sejajar pantai;
    - pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai melalui pembuatan bangunan pemecah gelombang sejajar pantai (*offshore breakwaters*); dan
    - pemeliharaan struktur fisik pengamanan pantai yang telah dibangun di sepanjang Pantai Ampenan.
5. pengembangan sistem prasarana penyediaan air minum kota

Suplai air minum warga Kota Mataram berasal sistem perpipaan PDAM Menang Mataram serta sistem non perpipaan seperti sumur, sungai, dan/atau pompa yang memanfaatkan air tanah dalam, air tanah dangkal, dan air permukaan. Upaya pengembangannya dilakukan melalui peningkatan kualitas air minum, meningkatkan cakupan pelayanan, dan efisiensi pemanfaatan air minum dengan tetap memperhatikan konservasi sumberdaya air.

Secara umum, rencana pengembangan sistem prasarana penyediaan air minum Kota Mataram terdiri atas (1) pengembangan kapasitas terpasang pada sistem penyediaan air minum kota dan (2) pemerataan jaringan distribusi ke pelanggan.

1. Pengembangan kapasitas terpasang pada sistem penyediaan air minum kota dilakukan melalui:
  - penambahan jaringan prasarana perpipaan;
  - pembuatan sumur dan/atau pompa untuk kegiatan non permukiman yang belum terlayani oleh prasarana perpipaan;

- pencegahan pengambilan air tanah secara berlebihan serta pengaturan pemanfaatan air sungai sebagai salah satu sumber air minum; dan
  - penyediaan air baku yang berasal dari air tanah dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Pemerataan jaringan distribusi ke pelanggan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
- pemeliharaan peningkatan pelayanan jaringan distribusi yang telah ada;
  - kerjasama dengan Instansi Pengelola Air Minum di Kabupaten Lombok Barat dan pihak ketiga untuk melayani kawasan-kawasan yang tidak terjangkau jaringan distribusi Instansi Pengelola Air Minum di Kota Mataram;
  - pengembangan jaringan distribusi baru pada seluruh wilayah kota;
  - penyebaran hidran-hidran umum pada seluruh wilayah kota; dan
  - pengaturan pengambilan air tanah secara berlebihan serta pemanfaatan air sungai.
6. pengembangan sistem pengelolaan air limbah kota

Rencana sistem pengelolaan air limbah di Kota Mataram dikembangkan untuk menanggulangi dan mengolah hasil buangan limbah cair dari kegiatan warga Kota Mataram. Rencana pengeluaran limbah cair warga Kota Mataram hingga Tahun 2030 dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut ini:

Tabel 7.6  
**Rencana Volume Pengeluaran Limbah Cair di Wilayah Kota Mataram Sampai Tahun 2030**

No.	Wilayah Perencanaan	Keb. Air Minum (Liter/Hr)	Perkiraan Limbah Cair (Liter/Hr)			Volume Total (Liter/Hr)
			Rumah Tangga	Komersial	Sosial	
1.	Kecamatan Ampenan	159.903,52	119.927,64	95.942,11	95.942,11	311.811,87
2.	Kecamatan Cakranegara	130.999,81	98.249,86	78.599,89	78.599,89	255.449,63
3.	Kecamatan Mataram	110.031,28	82.523,46	66.018,77	66.018,77	214.561,00
4.	Kecamatan Sandubaya	214.168,43	160.626,32	128.501,06	128.501,06	417.628,43

No.	Wilayah Perencanaan	Keb. Air Minum (Liter/Hr)	Perkiraan Limbah Cair (Liter/Hr)			Volume Total (Liter/Hr)
			Rumah Tangga	Komersial	Sosial	
5.	Kecamatan Sekarbela	89.058,15	66.793,61	53.434,89	53.434,89	173.663,38
6.	Kecamatan Selaparang	137.110,89	102.833,16	82.266,53	82.266,53	267.366,23
<b>Total</b>		<b>841.272,07</b>	<b>630.954,05</b>	<b>504.763,24</b>	<b>504.763,24</b>	<b>1.640.480,54</b>

Sumber: Hasil Rencana Tahun 2010-2030

Prasarana pengelolaan air limbah ini sangat dibutuhkan untuk kegiatan pariwisata, kegiatan perdagangan, dan kegiatan medis/kesehatan. Adapun upaya penanggulangan dan pengolahan air limbah di Kota Mataram terdiri atas:

- a. sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat skala kota melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat;
- b. sistem pembuangan air limbah setempat secara individual maupun berkelompok skala kecil;
- c. penanganan air limbah secara ketat pada lingkup kawasan peruntukan industri, perdagangan dan jasa, dan kesehatan berupa penyediaan instalasi pengolahan air limbah pada masing-masing kawasan; dan
- d. penyediaan tangki septik dan saluran perpipaan air limbah secara kolektif pada kawasan dengan fasilitas pelayanan umum.

Rencana sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat skala kota melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat dilakukan melalui:

- a. mendayagunakan dan memelihara Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Meninting yang melayani seluruh wilayah Kota Mataram;
- b. mengembangkan IPAL untuk kegiatan industri di Lingkungan Dasan Cermen Barat Kelurahan Dasan Cermen dan Lingkungan Bukit Ngandang Kelurahan Pagutan Timur;
- c. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah secara komunal di Lingkungan Marong Jamak dan Lingkungan Karang Baru Selatan Kelurahan Karang Baru; Lingkungan Kebon Jaya Kelurahan Monjok; Lingkungan Nyangget dan Lingkungan Jangkok Kelurahan Selagalas; serta Lingkungan Jempong Baru Kelurahan Jempong Baru; dan

- d. memelihara saluran pembuangan air limbah dari sistem pengelolaan air limbah secara komunal sebelum dialirkan ke IPAL Meninting.

Rencana sistem pembuangan air limbah setempat secara individual maupun berkelompok skala kecil dilakukan melalui:

- a. mengembangkan jaringan air limbah komunal setempat yang dikelola oleh masyarakat dan/atau kerjasama dengan pihak lain; dan
- b. mengembangkan tangki septik secara kolektif pada kawasan perumahan tipe kecil serta tangki septik secara individu pada kawasan perumahan tipe sedang dan tipe besar.

#### 7. pengembangan sistem jaringan persampahan kota

Rencana pengelolaan persampahan di Kota Mataram bertujuan untuk menanggulangi dan mengelola produksi limbah padat (sampah) dari kegiatan warga Kota Mataram. Oleh sebab itu, diperlukan 1 - 2 unit tempat penampungan sampah sementara (berupa container) di seluruh wilayah Kota Mataram sesuai dengan kebutuhan dan pengeluaran sampah.

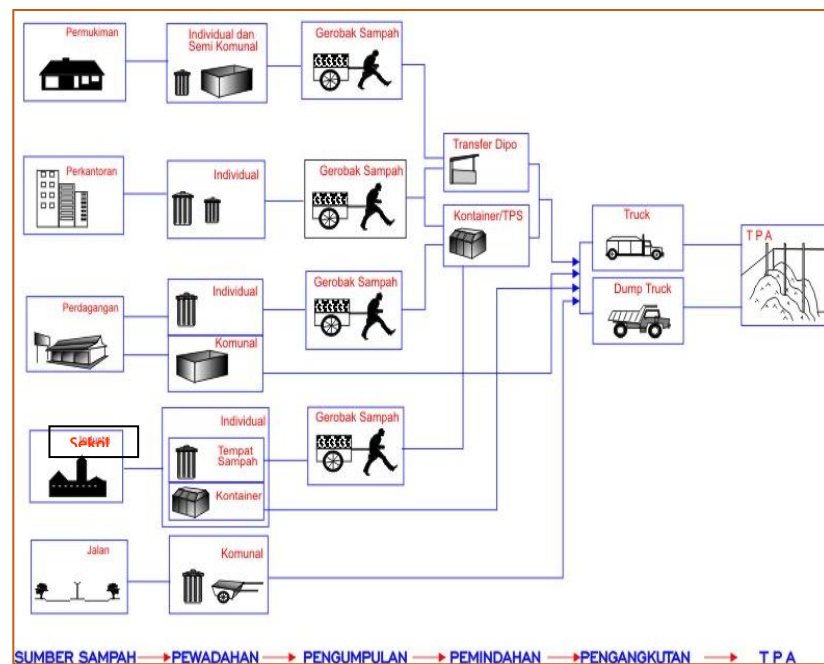
Penambahan Tempat Penampungan Sementara (TPS) direncanakan Lingkungan Kebon Roek Kelurahan Dayan Peken, Lingkungan Sembalun Kelurahan Tanjung Karang, Lingkungan Bertais Kelurahan Bertais, dan Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas. Upaya pengelolaan dan penanggulangan sampah di Kota Mataram dilakukan melalui:

1. penambahan unit Tempat Penampungan Sementara (TPS) berupa container yang dilakukan di Lingkungan Kebon Roek Kelurahan Dayan Peken, Lingkungan Sembalun Kelurahan Tanjung Karang, Lingkungan Bertais Kelurahan Bertais, dan Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas;
2. peningkatan intensitas sarana pengangkutan dan perluasan jangkauan pelayanan;
3. pengembangan dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) lintas kabupaten/kota dengan metode lahan urug saniter;
4. memilah jenis sampah organik dan anorganik untuk dikelola melalui konsep 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*);
5. meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan;
6. menumbuhkan keswadayaan pengelolaan sampah di tingkat lingkungan melalui unit-unit pengelolaan secara mandiri;

7. meningkatkan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha di bidang pengelolaan persampahan melalui konsep *Pengelolaan Sampah Terpadu Menuju Zero Waste*;
8. meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam kegiatan pengolahan sampah dari produsen sampah hingga ke TPA sampah; dan
9. penyusunan aturan-aturan yang tegas mengenai pembuangan sampah.

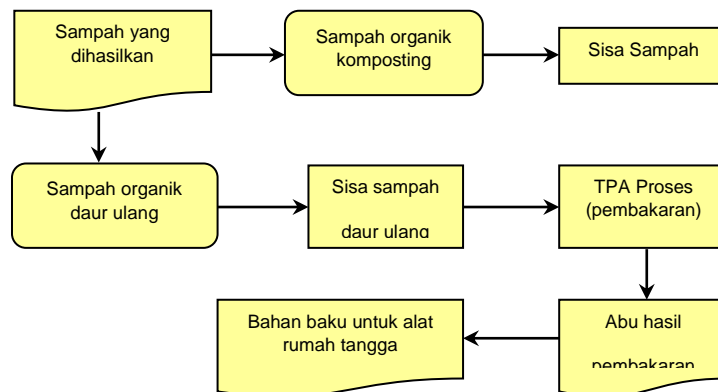
Konsep Pengelolaan Sampah Terpadu Menuju Zero Waste, yaitu upaya mengubah sampah menjadi bahan yang lebih berguna bagi masyarakat dan tidak mencemari lingkungan. Sistem yang terkait adalah sistem pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Konsep ini merupakan kombinasi dari teknologi pengolahan sampah, antara lain teknologi pengkomposan, teknologi daur ulang sampah non organik, teknologi pembakaran (incinerator), teknologi sanitary landfill (lahan urug saniter) yang sehat dan dapat digunakan secara terus-menerus, serta teknologi pemanfaatan sisa pembakaran. Strategi Konsep Pengelolaan Sampah Terpadu Menuju Zero Waste adalah:

1. Memperbaiki sistem pengelolaan sampah dengan skala terpadu pada tiap kawasan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 7.2.

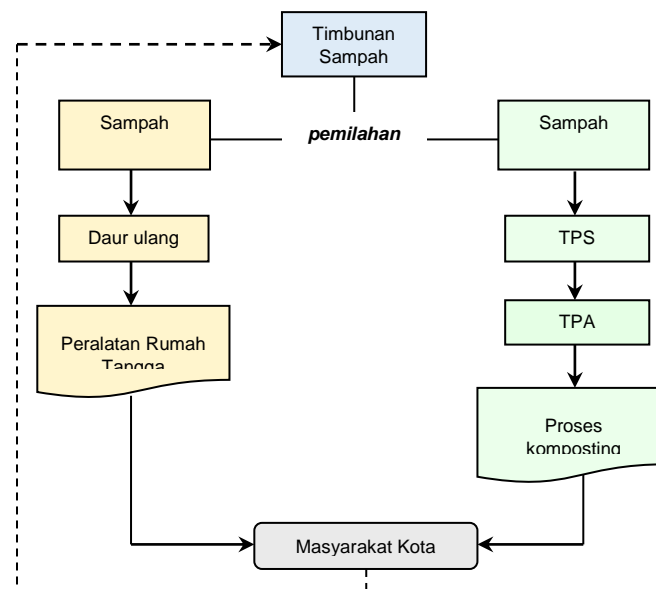


Gambar 7.2 Rencana Proses Pengelolaan Sampah di Wilayah Kota Mataram Tahun 2030

2. mengembangkan proses pengelolaan sampah langsung pada sumbernya (skala individu). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 7.3. dan Gambar 7.4.



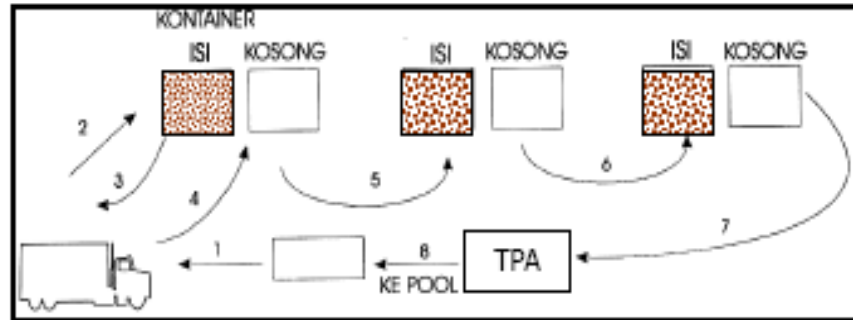
Gambar 7.3. Alur Pengelolaan Sampah di Wilayah Kota Mataram



Gambar 7.4. Konsep Pengolahan Sampah di Wilayah Kota Mataram Tahun 2010 - 2030

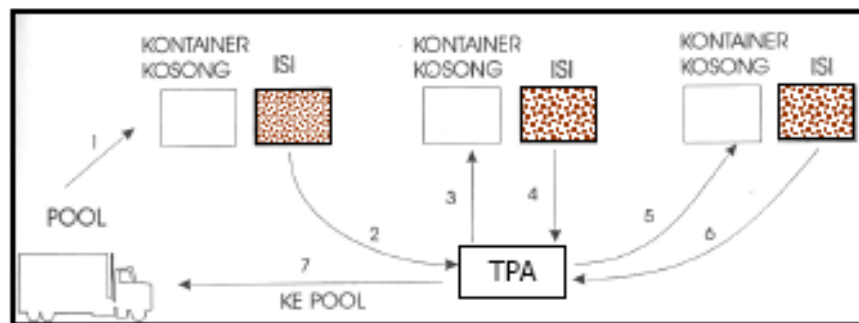
3. mengembangkan sistem pengangkutan sampah secara efektif dan efisien. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 7.5 – Gambar 7.6.

- a. **Sistem Kontainer Tidak Tetap Sistem Compactor**, kendaraan keluar dari pool dengan membawa kontainer dengan membawa kontainer kosong menuju TPS untuk mengambil container berisi sampah untuk dibawa ke TPA apabila kapasitas telah penuh, namun apabila masih belum penuh perjalanan dilanjutkan ke TPS lain sebelum ke TPA, sampai ritasi terakhir.



Gambar 7.5 Alur Pengangkutan Sampah dengan Sistem Tidak Tetap Sistem Compactor

- b. **Sistem Kontainer Tidak Tetap Sistem Amroll**, kendaraan keluar dari pool dengan membawa container kosong menuju TPS untuk mengganti atau mengambil container berisi sampah untuk dibawa ke TPA, selanjutnya dari TPA dengan membawa container yang sudah kosong, truk pengangkut menuju container terisi di TPS berikutnya sampai ritasi terakhir.



Gambar 7.6. Alur Pengangkutan Sampah dengan Sistem Tidak Tetap Sistem Amroll

Dalam pengelolaan sampah perlu ada kerjasama antara pihak pemerintah khususnya dinas terkait, swasta, dan masyarakat berupa:

- pihak masyarakat melakukan kegiatan pemisahan sampah sesuai dengan sampah yang dihasilkan berdasarkan jenisnya (sampah organik dan anorganik);
- pihak swasta bekerjasama dalam pengelolaan sampah dengan konsep 3R, di mana sampah-sampah yang masih bisa dimanfaatkan diolah menjadi barang bernilai ekonomis dan ekologis;
- pihak pemerintah, khususnya Dinas Kebersihan melakukan pengangkutan sisa-sisa sampah yang telah terpisah untuk diangkut ke TPA.

8. pengembangan sistem jaringan drainase kota

a) Rencana Pengembangan Sistem Drainase Utama (*Major Drainage*)

Saluran drainase dikembangkan dengan mengadopsi konsep *fish bone* (tulang ikan) yang diawali dengan pengembangan Saluran Induk (SI) atau saluran primer yang berfungsi menampung aliran saluran drainase dari kawasan pemukiman, perkantoran, perdagangan, industri, dan lainnya.

Sistem jaringan drainase primer ditetapkan dalam rangka melayani kawasan perkotaan dan terintegrasi dengan sistem badan air regional, yaitu sungai. Rencana pengembangan pola aliran saluran induk drainase yang bermuara pada ditempatkan pada saluran induk berikut:

1. **SI Yani**, yaitu saluran induk yang sejajar di kiri kanan Jalan Jend. A. Yani – Jalan TGH. Faisal;
2. **SI Diponegoro**, yaitu saluran induk yang sejajar di kiri kanan Jalan Diponegoro – Jalan Imam Bonjol – Jalan Sultan Hasanudin – Jalan AA. Gde Ngurah – Jalan Prabu Rangkasari;
3. **Hatta Karno**, yaitu saluran induk yang sejajar di kiri kanan Jalan Bung Hatta – Jalan Bung Karno;
4. **SI Wahidin**, yaitu saluran induk yang sejajar di kiri kanan Jalan Dr. Wahidin – Jalan Sutomo – Jalan Cokroaminoto – Jalan W.R. Supratman – Jalan A.R. Hakim – Jalan R. Nuraksa;
5. **SI Udayana**, yaitu saluran induk yang sejajar di kiri kanan Jalan Udayana – Jalan Airlangga – Jalan Gajah Mada;
6. SI Suprpto, yaitu saluran induk yang sejajar di kiri kanan Jalan Suprpto – Jalan Panjtilar Negara;
7. **SI Saleh**, yaitu saluran induk yang sejajar di kiri kanan Jalan Saleh Sungkar – Jalan Energi – Jalan Arya Banjar Getas;
8. **SI Soedirman**, saluran induk yang sejajar di kiri kanan Jalan Soedirman;
9. SI Majapahit, saluran induk yang sejajar di kiri kanan Jalan Pajajaran – Jalan Majapahit;
10. **SI AB. Getas**, saluran induk yang sejajar di kiri kanan Jalan Arya Banjar Getas;
11. **SI Sujono**, saluran induk yang sejajar di kiri kanan Jalan Dr. Sujono – Jalan Mamiq Acip Thalip;
12. **SI Gajah Mada**, saluran induk yang Sejajar di kiri kanan Jalan Gajah Mada.

Sungai yang mengalir di dalam Kota Mataram dijadikan muara dari saluran induk drainase, sehingga saluran drainase yang bermuara di sungai tersebut merupakan subsistem dari sistem drainase Kota Mataram, yaitu Subsistem Midang, Subsistem Jangkok, Subsistem Ancar, dan Subsistem Brenyok. Dalam sub sistem tersebut terdapat saluran induk dan daerah genangan yang menjadi prioritas utama untuk diselesaikan.

1. Subsistem Midang

Rencana pengembangan Subsistem Midang berupa pengembangan Saluran Induk dan pengembangan Bendung Gegutu. Total panjang SI Subsistem Midang adalah 9.640 m.

2. Subsistem Jangkok

Rencana pengembangan Subsistem Jangkok berupa pengembangan Saluran Induk dan pengembangan Bendung Mataram. Subsistem Jangkok ini dekat dengan daerah genangan di Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Tengah, dan Kelurahan Monjok Barat. Total panjang SI Subsistem Jangkok adalah 34.050 m.

3. Subsistem Ancar

Rencana pengembangan Subsistem Ancar berupa pengembangan Saluran Induk dan pengembangan Bendung Pamaton. Subsistem Ancar ini dekat dengan daerah genangan di Kelurahan Kekalik Jaya dan Kelurahan Taman Sari. Total panjang SI Subsistem Ancar adalah 24.200 m.

4. Subsistem Brenyok

Rencana pengembangan Subsistem Brenyok berupa pengembangan Saluran Induk dan pengembangan Bendung Bertais, Bendung Tembelok, Bendung Babakan, Bendung Pesongoran, Bendung Unus, dan Bendung Kolo. Sub Sistem Brenyok ini dekat dengan daerah genangan di Kelurahan Tanjung Karang, Kelurahan Jempong Baru, dan Kelurahan Pagesangan. Total panjang SI Subsistem Brenyok adalah 42.700 m.

9. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki

Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki dapat dilakukan melalui kegiatan:

1. menata jalur pejalan kaki sesuai dengan standar keamanan dan kenyamanan pada trotoar untuk memperkecil konflik antara pejalan kaki dengan kendaraan bermotor;
  2. menetapkan dimensi jalur pejalan kaki pada trotoar sesuai dengan fungsi jalan;
  3. menyediakan jalur sepeda yang digabung dengan jalur pejalan kaki dengan dimensi yang ditentukan sesuai kebutuhan;
  4. merencanakan jalur pejalan kaki yang melintasi jalur kendaraan pada titik terdekat yang dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan marka jalan; dan
  5. menyediakan jalur pejalan kaki di kawasan sempadan sungai.
10. pengembangan jalur evakuasi bencana

Secara umum, jalur-jalur evakuasi bencana diarahkan melalui jalan-jalan utama ke arah timur yang sebenarnya adalah kawasan pusat kota yang dilengkapi oleh fasilitas. Selain itu, wilayah timur merupakan daratan yang lebih tinggi dari kawasan barat yang sering terkena bencana banjir, gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai, serta gempa bumi. Jalur-jalur evakuasi tersebut adalah:

1. jalur-jalur evakuasi bencana banjir menjauhi lokasi-lokasi genangan yang melalui Jalan Saleh Sungkar – Jalan Adi Sucipto, Jalan Jend. Sudirman – Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Energi – Jalan Langko, Jalan Dr. Sujono, Jalan Sultan Kaharudin, Jalan HOS. Cokroaminoto, Jalan Brawijaya, Jalan Prabu Rangkasari, serta jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke utara melalui Jalan TGH. Faisal;
2. jalur-jalur evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai yang mengarah ke timur melalui Jalan Adi Sucipto – Jalan Jend. Sudirman, Jalan Pabean – Jalan Langko – Jalan Pejanggik – Jalan Selaparang – Jalan Sandubaya, Jalan Sultan Salahudin – Jalan Sultan Kaharudin, Jalan Dr. Sujono – Jalan TGH. Ali Batu, dan jalan di sepanjang pesisir pantai; dan
3. jalur-jalur evakuasi bencana gempa bumi pada setiap ruas jalan di wilayah Kota Mataram.

Sedangkan untuk kawasan rawan kebakaran, yaitu kawasan berkepadatan tinggi dengan bangunan umum di dalamnya yang berpenghuni 500 orang atau yang memiliki luas lantai minimal 5.000 m<sup>2</sup> atau mempunyai ketinggian bangunan lebih dari 8 lantai, atau bangunan rumah sakit diwajibkan menerapkan Manajemen Penanggulangan Kebakaran (MPK). Khusus bangunan industri yang memiliki luas bangunan minimal 5.000 m<sup>2</sup> atau dengan beban hunian 500 orang atau dengan luas areal/site minimal 5.000 m<sup>2</sup> atau

terdapat bahan berbahaya yang mudah terbakar juga diwajibkan menerapkan Manajemen Penanggulangan Kebakaran (MPK). Untuk bangunan selain yang disebutkan di atas seperti instalasi militer dan menara TV yang mempunyai resiko kebakaran tinggi diatur secara khusus.

Pengembangan prasarana pemadam kebakaran untuk pos pemadam kebakaran direncanakan di Kelurahan Mataram Timur (Kecamatan Mataram), Kelurahan Jempong Baru (Kecamatan Sekarbela), Kelurahan Ampenan Utara (Kecamatan Ampenan), dan Kelurahan Mandalika (Kecamatan Sandubaya). Satu pos pemadam kebakaran ditempatkan pada lokasi dengan waktu tempuh 15 menit dengan radius pelayanan 7,5 km. Satu pos pemadam kebakaran dapat didukung oleh 2 pos pembantu yang jaraknya 2,5 km. Sedangkan, untuk hidran direncanakan pada lokasi-lokasi dengan suplai air sekurang-kurangnya 38 L/detik pada tekanan 3,5 bar serta mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit.

### 7.7. PROGRAM TEROBOSAN

Untuk mendukung kebijakan umum dan program pembangunan yang telah ditetapkan, dalam hal ini dijabarkan skema program terobosan guna mempercepat tercapainya indikator pembangunan. Adapun skema dari program terobosan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 7.7. Program Terobosan Pemerintah Kota Mataram

# BAB 8

## INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Dalam bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

---

### INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

---

Uraian tentang hubungan antara urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab PD dalam menjawab kinerja pembangunan yang ditargetkan menjadi jabaran pada bagian ini. Selain itu juga disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Setelah program prioritas diketahui, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Mataram berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Mataram, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Propinsi, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 8.1 hanya yang bersumber dari APBD Kota Mataram.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra PD. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8 – 1  
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai dengan Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17						
<b>1</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>																			
<b>1</b>	<b>PENDIDIKAN</b>				<b>26,572.94</b>		<b>39,970.82</b>		<b>45,964.78</b>		<b>53,033.81</b>		<b>60,876.39</b>		<b>70,897.68</b>		<b>297,316.42</b>			
1	1	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Cakupan Penduduk Usia 5-7 yang bersekolah	90%	90%	999.81	92%	1,503.91	94%	1,729.43	96%	1,995.40	98%	2,290.48	98%	2,667.53	98%	11,186.57	DIKPORA
1	1	2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Cakupan penduduk usia 7-15 tahun yang bersekolah	100%	100%	23,156.48	100%	34,831.81	100%	40,055.14	100%	46,215.30	100%	53,049.58	100%	61,782.44	100%	259,090.74	DIKPORA
1	1	3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tersedianya tenaga pendidik bersertifikasi	90%	90%	1,155.50	91%	1,738.09	93%	1,998.74	95%	2,306.13	97%	2,647.15	99%	3,082.92	99%	12,928.53	DIKPORA
1	1	4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terbangunnya mekanisme monitoring dan evaluasi pelayanan pendidikan	90%	100%	1,261.15	100%	1,897.01	100%	2,181.48	100%	2,516.97	100%	2,889.18	100%	3,364.79	100%	14,110.57	DIKPORA
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>KESEHATAN</b>			<b>112,448.60</b>				<b>129,311.22</b>		<b>149,198.27</b>		<b>171,261.57</b>		<b>199,454.13</b>		<b>836,430.57</b>		
1	2	1	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Tersedianya puskesmas yang sesuai standar layanan	11 Puskesmas	11 Puskesmas	271,74.36	11 Puskesmas	40,875.47	11 Puskesmas	47,005.10	11 Puskesmas	54,234.11	11 Puskesmas	62,254.20	11 Puskesmas	72,502.30	11 Puskesmas	304,045.54	Dinas Kesehatan



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17			
1	2	7	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Layanan Kesehatan Bagi Bayi dan Balita	97,2 %	97,7%	398.30	98,2 %	599.12	98,7%	688.96	99,2%	794.92	99,7%	912.47	1,062.68	100%	4,456.44	Dinas Kesehatan		
1	2	8	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Cakupan Layanan Gawat Darurat Level 1 yang sesuai standar pelayanan	100%	100%	-	100 %	-	100%	-	100%	-	100%	-	-	100%	-	Dinas Kesehatan		
1	2	9	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa Siaga Aktif	20% Desa Siaga Aktif	30%	363.44	40%	546.68	50%	628.66	60%	725.34	70%	832.61	969.67	70%	4,066.40	Dinas Kesehatan		
1	2	1	0	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penderita DBD yang ditangani	100%	100%	1,706.16	100 %	2,566.39	100%	2,951.25	100%	3,405.12	100%	3,908.67	4,552.10	100%	19,089.70	Dinas Kesehatan	
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PEKERJAAN UMUM</b>																	
1	3	1		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Perda Pengelolaan Air Limbah	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Perda	200	1 Perda	200	Dinas PU, BLH	
1	3	2		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase lembaga pengelolaan air limbah yang berfungsi	10 %	10%	-	30%	2,000	50%	2,000	70%	2,000	90%	2,000	90%	2,000	100%	10,000	Dinas PU, BLH, Kecamatan
1	3	3		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase lahan yang tersedia untuk pengelolaan air limbah	0 %	0%	-	25%	5,000	50%	5,000	75%	5,000	85%	5,000	100 %	5,000	100%	25,000	Dinas PU, BLH, Dinas Kebersihan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17		
1	3	4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan pengelolaan air limbah	85 %	85%	-	89%	4,000	95%	6,000	97%	8,000	99%	10,000	100 %	10,000	100%	38,000	Dinas PU, BLH, Dinas Kebersihan, Kecamatan
1	3	5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan pelayanan air bersih	60 %	65 %	3103	75 %	5000	85 %	7500	100 %	9000	100 %	10000	100 %	10000	100 %	44,603	Dinas PU
1	3	6	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik	93,07 %	95%	5656	96.5 %	10000	97,5%	10000	98,5%	10000	99%	10000	99%	10000	99%	55,656	Dinas PU
1	3	7	Program pembangunan turap/talud/ bronjong	Cakupan kawasan sungai yang terbebas dari banjir	NA	10 ha	2739	15 ha	3500	15 ha	3500	15 ha	3500	15 ha	3500	15 ha	3500	85ha	20,239	Dinas PU
1	3	8	Program Pengendalian Banjir	Cakupan bantaran sungai yang terpelihara	M	49,300	1758	1,7	4000	2.1	5000	2.5	7500	3,03	10000		10000		38,258	Dinas PU
1	3	9	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Presentase penambahan panjang jalan kota	379.733 km	10Km	30,219	10Km	29725	10Km	29925	10Km	30000	10Km	30000	10Km	30000	60Km	179,869	Dinas PU
1	3	10	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Presentase jalan kota yang terpelihara	50%	379.733 km	18,613	18.7	15000	33,02	20000	24.8	20000	14.3	20000		20000	90%	113,613	Dinas PU
1	3	11	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Presentase penambahan jembatan	75%	24	-	5%	5000	5%	1000	5%	1000	5%	1000	5%	1000	100%	9,000	Dinas PU

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17			
1	3	1	2	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Presentase jembatan dalam kondisi baik	95,8 %	0.5%	-	0.5%	10000	1%	5000	1%	5000	0.5%	3000	1%	2000	100%	25,000	Dinas PU
1	3	1	3	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Presentase penambahan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda	N/A	5Km	-	10Km	15000	10Km	15000	10Km	15000	10Km	16100	10Km	18000	55Km	79,100	Dinas PU
1	3	1	4	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Presentase kondisi fasilitas pejalan kaki dan pesepeda dalam kondisi baik	N/A	5Km	-	10Km	5000	10Km	10000	10Km	10000	10Km	12000	10Km	12000	55Km	49,000	Dinas PU
1	3	1	5	Program Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Cakupan layanan irigasi	1713,47Ha	1202Ha	14,741	3600Ha	10000	3600Ha	5000	3600Ha	5000	3600Ha	5000	3600Ha	5000		44,741	Dinas PU
1	3	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan serta Pelayanan IUJK	Persentase bangunan yang layak fungsi (berkualitas)	64,49 %	5%	94	5%	150	5%	200	5%	200	10%	500	10%	500	100%	1,644	Dinas PU
1	3	1	7	Program Peningkatan Jalan & Jembatan (jalan lingkungan)	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	91,43 %	91,43 %	2,545	93 %	3000	95 %	5000	97 %	10000	100 %	15000	100 %	18000		53,545	Dinas PU

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17			
<b>1</b>	<b>4</b>			<b>PERUMAHAN</b>																	
1	4	1		Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan	Cakupan pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh	805 Ha	750 Ha	4,000	600 Ha	15000	400 Ha	17500	300 Ha	19500	200 Ha	20000	100Ha	21475	0 Ha	97,475	Dinas PU
1	4	2		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rumah tangga sanitasi layak	91,30 %	1%	3,887	2%	10000	1%	12000	1%	15000	1%	15000	1%	18000	98 %	73,887	Dinas PU
1	4	3		Program Pengembangan Perumahan	Persentase pengurangan rumah tidak layak huni	25,43 %	2%	1,897	5%	5000	10%	8000	5%	8000	2%	10000	1%	10000	0 %	42,897	Dinas PU
1	4	4		Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial	Presentase rumah yang tertangani akibat bencana	N/A	100 %	46	100 %	200	100 %	500	100 %	500	100 %	1000	100 %	1000	100 %	3,246	Dinas PU
1	4	5		Program Pemeliharaan / Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase luas areal pemakaman dalam kondisi baik	N/A	20%	1,266	20%	1000	20%	1000	20%	1000	20%	1000	100 %	2000	100%	7,266	Dinas Pertamanan
1	4	6		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase kasus yang tertangani	N/A	100 %	144	100 %	50	100 %	50	100 %	100	100 %	200	100 %	200	100 %	744	BLH, Dinas Kebersihan, DISHUBKOMINFO
1	4	7		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pembangunan yang memiliki analisis dampak lingkungan	100 %	100 %	685	100 %	500	100 %	500	100 %	500	100 %	1000	100 %	1000	100 %	4,185	BLH, Dinas Kebersihan, DISHUBKOMINFO

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17			
1	4	8		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase sekolah berwawasan lingkungan	50%	60%	12	70%	200	80%	200	90%	200	100%	200	100%	200	100%	1,012	BLH
1	4	9		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau	22 %	22 %	6,410	23 %	8000	24 %	10000	25 %	10000	26 %	15000	27%	20000	28 %	69,410	BPKAD, Dinas Pertamanan, BLH
<b>1</b>	<b>5</b>			<b>PENATAAN RUANG</b>																	
1	5	1		Program Perencanaan Tata Ruang	Perda Penataan Ruang	1 Perda	1 Perda	Perubahan RTRW	536	1 Perda	RDT R	200	-	-	-	-	-	-	2 Perda	736	BAPPEDA, Dinas Tata Kota
1	5	2		Program Pemanfaatan Tata Ruang	Persentase kesesuaian rencana dengan pemanfaatan ruang	56,56 %	56,56 %	98	62 %	200	68 %	200	74 %	200	80 %	500	80 %	1000	80 %	2,198	BAPPEDA, Dinas Tata Kota, BPMP2T
1	5	3		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase ketidaksesuaian pemanfaatan tata ruang	43,44 %	43,44 %	2,300	38 %	4000	32 %	5000	26 %	5000	20 %	5000	20 %	5000	20 %	26,300	BAPPEDA, Dinas Tata Kota, BPMP2T
1	5	4		Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU	Persentase fasilitas PJU	55 %	55 %	4,113	65 %	4500	75 %	8000	85 %	10000	95 %	10000	98%	15000	100 %	51,613	Dinas Pertamanan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17			
1	5	5		Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame	Persentase reklame yang sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan	NA	25%	1,451	45%	1500	65%	2000	75%	3000	85%	3000	95%	5000	100 %	15,951	Dinas Pertamanan
1	6			PERENCANAAN PEMBANGUNAN				5,478.61		5,752.54		6,040.16		6,342.17		665,927.96		732,520.76		1,422,062.21	
1	6	1		Program Kerjasama Pembangunan	Cakupan koordinasi kerjasama pembangunan	24 kali koordinasi	24 kali koordinasi	111.20	12 kali koordinasi	116.76	12 kali koordinasi	122.60	12 kali koordinasi	128.73	12 kali koordinasi	13,516.42		14,868.07	12 kali koordinasi	28,863.78	BAPPEDA
1	6	2		Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Cakupan koordinasi perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	1 kali koordinasi	1 kali koordinasi	152.40	1 kali koordinasi	160.02	1 kali koordinasi	168.02	2 kali koordinasi	176.42	3 kali koordinasi	18,524.31	20,376.74		4 kali koordinasi	39,557.91	BAPPEDA
1	6	3		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan Pembangunan	9 dok	8 dok	3,198.99	8 dok	3,358.94	8 dok	3,526.88	8 dok	3,703.23	8 dok	388,839.08	427,722.99	8 dok	830,350.11	BAPPEDA	
					Tingkat / Persentase aspirasi masyarakat melalui musrenbang	N/A	≥ 40%		≥ 40%			≥ 40%		≥ 45%		≥ 45%			≥ 45%		BAPPEDA
1	6	4		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	5 dok	5 dok	715.48	5 dok	751.25	5 dok	788.81	5 dok	828.25	5 dok	86,966.76	95,663.44	5 dok	185,714.00	BAPPEDA	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17			
1	6	5		Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Tersedianya Data Kemiskinan	ADA	56	837.55	60	879.43	75	923.40	80	969.57	85	101,804.69	111,985.15	ADA	217,399.78	BAPPEDA	
					Tersedianya Dokumen Penanggulangan Kemiskinan	2 Dok	50	2 Dok	50	2 Dok	50	2 Dok	50	2 Dok	50	2 Dok		2 Dok	50	BAPPEDA	
					Jumlah Organisasi Pemuda yang menjadi Peserta MPBM	100%	300	100%	350	100%	360	100%	375	100%	381	100%		100%	392	BAPPEDA	
1	6	6		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan SDA		24 kali koordinasi	462.99	12 kali koordinasi	486.14	11 kali koordinasi	510.45	12 kali koordinasi	535.97	12 kali koordinasi	56,276.70	61,904.37	12 kali koordinasi	120,176.62	BAPPEDA	
<b>1</b>	<b>7</b>			<b>PERHUBUNGAN</b>																	
1	7	1		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Cakupan wilayah yang terlayani angkutan publik	4 rute	5 rute	1,799	6 rute	2000	10 rute	2000	12 rute	3000	14 rute	4000	14 rute	5000	14 rute	17,799	DISHUBKOMINFO
1	7	2		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase sarpras perhubungan dalam kondisi baik	50 %	50 %	201	80%	1000	85 %	1000	90 %	1000	95 %	1000	98%	1000	100 %	5,201	DISHUBKOMINFO

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17			
1	7	3		Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	58 %	62 %	29	65 %	200	70 %	300	75 %	300	80 %	500	85%	500	90 %	1,829	DISHUBKOMINFO
1	7	4		Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Persentase fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	64 %	64 %	42	70 %	200	75 %	500	80 %	200	85 %	500	90%	500	90%	1,942	DISHUBKOMINFO
1	7	5		Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kendaraan bermotor (angkutan umum) dalam kondisi layak	99 %	99 %	378	99 %	500	99 %	1000	99 %	2000	99 %	2000	100 %	3000	100 %	8,878	DISHUBKOMINFO
1	7	6		Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas	Cakupan ketersediaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan	72 %	74 %	2,956	75 %	3000	76 %	3000	77 %	4000	78 %	4000	80%	5000	85 %	21,956	DISHUBKOMINFO
1	7	7		Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Persentase lokasi parkir yang terkelola	80 %	80 %	332	85 %	500	90 %	1000	95 %	1000	100 %	1000	100 %	1000	100 %	4,832	DISHUBKOMINFO
<b>1</b>	<b>8</b>			<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>																	
1	8	1		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Perda Pengelolaan Sampah	1 Perda	1 Perda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	1 perda perubahan	200	Dinas Kebersihan, Dinas PU, BLH, Kecamatan	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17
1 8 2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase lembaga pengelolaan sampah yang berfungsi	10 %	10 %	-	35 %	500	55%	500	75%	500	100 %	1000	100 %	1000	100 %	3,500	Dinas Kebersihan, Dinas PU, BLH, Kecamatan
1 8 3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan pengelolaan sampah	71,59 %	71,59 %	14,663	78 %	15000	85 %	20000	92 %	22000	100 %	25000	100 %	30000	100 %	126,663	Dinas Kebersihan, Dinas PU, BLH, Kecamatan
1 8 4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Nota Kesepahaman (MoU) dan Naskah Perjanjian Kerjasama	0	0	-	1	100	-	100	-	-	-	-	-	-	1	200	Dinas Kebersihan, Dinas PU, BLH, Kecamatan
1 8 5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah	0 %	0 %	-	1 %	500	2 %	1000	5 %	2000	7 %	3000	10%	4000	10 %	10,500	Dinas Kebersihan, Dinas PU, BLH, Kecamatan
<b>1 9</b>	<b>PERTANAHAN</b>																	
1 9 1	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	Persentase tanah milik daerah yang telah bersertifikat	80 %	80 %	186	85 %	1000	90 %	1000	95 %	1000	100 %	1000	100 %	1000	100 %	5,186	BPKAD, Bagian Pemerintahan
<b>1 10</b>	<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>					<b>1,185.75</b>		<b>1,783.60</b>		<b>2,051.07</b>		<b>2,366.50</b>		<b>2,716.46</b>		<b>3,163.63</b>		<b>13,267.01</b>
1 1 1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil	95,5 %	97%	<b>1,121.83</b>	97,5 %	1,687.45	98%	1,940.50	98,5%	2,238.93	99%	2,570.02		2,993.09	100%	12,551.83	DUKCAPIL
		Kependudukan dan Catatan Sipil	92%	95%		96%		97%		98%		99%		100%		DUKCAPIL		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	
		Kependudukan dan Catatan Sipil	92%	94%		95%		96%		98%		100%			100%			DUKCAPIL	
		Kependudukan dan Catatan Sipil	92%	94%		95%		96%		98%		100%			100%			DUKCAPIL	
1	10	2	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil	90%	91%	63.92	91,5%	96.15	92%	110.57	92,5%	127.57	93%	146.44	170.54	93,5%	715.18	DUKCAPIL
1	11		<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>1,983.40</b>		<b>2983.41</b>		<b>3430.80</b>		<b>3958.43</b>		<b>4543.79</b>		<b>5291.78</b>		<b>22,191.60</b>
1	11	1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kelembagaan Perempuan	80%	82%	<b>1,594.23</b>	84%	2,398.03	86%	2,757.63	88%	3,181.74	90%	3,652.25	4,253.47	92%	17,837.35	BP2KB
1	11	2	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Tersedianya vocal point PUG di SKPD	0%	20%	70.54	40%	106.11	60%	122.02	80%	140.78	100%	161.60	188.20	100%	789.25	BP2KB
1	11	3	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender	Jumlah Lembaga Perempuan yang Aktif	60%	70%	-	80%	-	90%	-	100%	-	100%	-	-	100%	-	BP2KB
1	11	4	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang	Tersosialisasinya bahan informasi pembinaan anak	85%	87%	318.63	89%	479.27	91%	551.14	93%	635.91	95%	729.94	850.10	100%	3,565.00	BP2KB

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17		
	Anak																			
1	11	5	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terbentuknya Kota Layak Anak	60%	70%	-	80%	-	90%	-	100%	-	100%	-	-	100%	-	BP2KB	
<b>1</b>	<b>12</b>		<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>				1,434.72		2,158.09		2,481.72		2,863.39		3,286.82		3,827.89		16,052.62	
1	12	1	Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS menjadi Peserta KB Aktif	100%	100%	<b>899.95</b>	100%	1,353.70	100%	1,556.70	100%	1,796.11	100%	2,061.72		2,401.11	100%	10,069.30	BP2KB
1	12	2	Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan Penyediaan Alat dan Kontrasepsi	98%	98%	<b>518.75</b>	98%	780.30	98%	897.31	98%	1,035.31	98%	1,188.41		1,384.05	98%	5,804.13	BP2KB
1	12	3	Program Pembinaan Peranserta Masyarakat dan Kelompok Usaha dalam Pelayanan KB dan Peningkatan Kesejahteraan	Persentase UPPKS yang berKB	87%	87%	<b>16.02</b>	87%	24.09	87%	27.70	87%	31.96	87%	36.69		42.73	87%	179.19	BP2KB
1	12	4	Program Pembinaan Peranserta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	Terpenuhi nya Advokasi dan KIE tentang KRR	98%	98%	-	98%	-	98%	-	98%	-	98%	-		98%	-	BP2KB	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17		
1	12	5	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Terpenuhinya Advokasi dan KIE tentang KRR	98%	98%	-	98%	-	98%	-	98%	-	98%	-	98%	-	98%	-	BP2KB
1	12	6	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi	90%	90%	-	90%	-	90%	--	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	BP2KB
1	12	7	Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi	90%	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	BP2KB
<b>1</b>	<b>13</b>		<b>SOSIAL</b>				<b>1,423.46</b>		<b>2,141.16</b>		<b>2,462.25</b>		<b>2,840.92</b>		<b>3,261.03</b>		<b>3,797.85</b>		<b>15,926.68</b>	
1	13	1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang ditangani	92%	92%	235.93	93%	354.88	94%	408.10	95%	470.86	96%	540.49	629.46	97%	2,639.71	DISOSNAKER TRANS	
1	13	2	Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah Anak terlantar yang ditangani	95%	96%	638.08	97%	959.79	98%	1,103.72	99%	1,273.46	100%	1,461.78	1,702.41	100%	7,139.22	DISOSNAKER TRANS	
1	13	3	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah Penyandang Penyakit Sosial yang dapat dibina	95%	96%	182.98	97%	275.23	98%	316.50	99%	365.18	100%	419.18	488.18	100%	2,047.25	DISOSNAKER TRANS	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17			
1	13	4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Sosialisasi dan Penguatan Kelembagaan Kessos	97%	97%	97.40	97,5 %	146.51	98%	168.48	98,5%	194.39	99%	223.14	259.87	99%	1,089.78	DISOSNAKER TRANS		
1	13	5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Jumlah Penduduk Miskin yang Mendapat Bantuan	90%	92%	269.09	94%	404.76	96%	465.45	98%	537.04	100%	616.45	717.93	100%	3,010.71	DISOSNAKER TRANS		
1	14		<b>KETENAGAKERJAAN</b>				720,31		<b>1,418.54</b>		<b>1,581.25</b>		<b>1,776.64</b>		<b>1,981.23</b>		<b>2,198.73</b>		<b>9,676.70</b>		
1	14	1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terlatih	2%	2%	85.05	3%	167.50	4%	186.71	5%	209.78	6%	233.94	7%	259.62	7%	1,142.62	DISOSNAKER TRANS	
1	14	3	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Cakupan layanan informasi	25%	25%	258.97	35%	510.00	45%	568.50	55%	638.75	65%	712.30	75%	790.50	75%	3,479.01	DISOSNAKER TRANS	
1	14	2	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan	20%	20%	376.29	30%	741.04	50%	826.04	70%	928.11	85%	1,034.99	100 %	1,148.61	100%	5,055.08	DISOSNAKER TRANS	
1	15		<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>						<b>2,162.85</b>		<b>4,259.43</b>		<b>4,747.97</b>		<b>5,334.68</b>		<b>5,949.00</b>		<b>6,602.09</b>		<b>500,369.69</b>

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17		
1	15	1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	64,88 %	66,56%	1.086,800	68,56 %	2.140.31	70,23%	2.385.79	71,91%	2.680.61	73,58%	2.989.29	75,25%	3.317.46	75,25%	14.600.25	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
1	15	2	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase WUB	2,07 %	2,76%	434,280	3,45 %	855.26	4,14%	953.35	4,83%	1.071.16	5,52%	1.194.51	6,21%	1.325.64	6,21%	5.834.19	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
1	15	3	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	Persentase UKM terfasilitasi	1 %	2 %	641,765	3 %	1.263.87	4 %	1.408.83	5 %	1.582.92	6 %	1.765.20	7 %	1.958.99	7 %	8.621.58	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
<b>1</b>	<b>16</b>		<b>PENANAMAN MODAL</b>				<b>2,160.67</b>		<b>4,255.15</b>		<b>4,743.20</b>		<b>5,329.32</b>		<b>5,943.02</b>		<b>6,595.45</b>		<b>29,026.80</b>	
1	16	1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase nilai investasi	35%	40%	216.62	51%	426.60	68%	475.53	89%	534.30	95%	595.82	100%	661.23	100%	2,910.11	BPMP2T
1	16	2	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perijinan	Persentase standar dan mutu pelayanan	76.16	78.27	501.97	79.02	988.56	79.77	1,101.95	80.52	1,238.12	81.27	1,380.69	82.02	1,532.26	82.02	6,743.55	BPMP2T
1	16	3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan layanan perijinan	30,00 %	30.00%	1,442.08	38,33 %	2,839.98	46,67%	3,165.72	55,00%	3,556.91	63,33%	3,966.50	71,67%	4,401.95	71,67%	19,373.14	BPMP2T
<b>1</b>	<b>17</b>		<b>KEBUDAYAAN</b>				<b>920.32</b>		<b>1,384.34</b>		<b>1,591.94</b>		<b>1,836.76</b>		<b>2,108.38</b>		<b>2,455.46</b>		<b>10,297.20</b>	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	
1	17	1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Teridentifikasinya kelembagaan adat	338 Lembaga Adat	338 Lembaga Adat	668.24	338 Lembaga Adat	1,005.16	338 Lembaga Adat	1,155.89	338 Lembaga Adat	1,333.66	338 Lembaga Adat	1,530.88	1,782.88	338 Lembaga Adat	7,476.70	DINAS BUDPAR
1	17	2	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terbangunnya komunikasi tokoh budaya dengan pemerintah	118 Tokoh budaya	118 Tokoh budaya	252.09	118 Tokoh budaya	379.18	118 Tokoh budaya	436.05	118 Tokoh budaya	503.11	118 Tokoh budaya	577.51	672.57	118 Tokoh budaya	2,820.50	DINAS BUDPAR
1	17	3	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Teridentifikasinya jenis seni dan budaya daerah	90%	92%	150	94%	153	96%	155	98%	160	100%	162		100%	162	DINAS BUDPAR
<b>1</b>	<b>18</b>		<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				<b>950.88</b>		<b>1,430.30</b>		<b>1,644.78</b>		<b>1,897.74</b>		<b>2,178.38</b>		<b>2,536.97</b>		<b>10,639.05</b>
1	18	1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah Organisasi Pemuda yang terdata	85%	88%	300	91%		93%		97%	341	100%	349		100%	351	DIKPORA
1	18	2	Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	85%	87%	229.77	88%	345.62	90%	397.45	93%	458.57	100%	526.38	613.04	100%	2,570.83	DIKPORA
1	18	3	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah Pelatihan Wirausaha yang melibatkan Pemuda	85%	87%	200	88%	200	90%	200	93%	200	100%	200		100%	200	DIKPORA

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17		
1	18	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Cabang Olahraga	75%	77%	721	79%	732	81%	745	83%	768	85%	779			87%	789	DIKPORA
1	18	6	Program Pembinaan dan Pemasaryakatan Olahraga	Tersedianya media pemasyarakat an olahraga	90%	100%	721.11	100%	1,084.68	100%	1,247.34	100%	1,439.17	100%	1,651.99		1,923.94	100%	8,068.22	DIKPORA
1	19		<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>				<b>4,248.45</b>		<b>6,390.42</b>		<b>7,348.71</b>		<b>8,478.89</b>		<b>9,732.74</b>		<b>11,334.91</b>		<b>47,534.06</b>	
1	19	1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Teridentifikasinya Potensi Konflik	80%	95%	123.30	95%	185.47	95%	213.28	95%	246.08	95%	282.47		328.97	95%	1,379.57	BAKESBANG POL & SATPOL PP
1	19	2	Program Penegakan Perundang-undangan Daerah	Cakupan Pelanggaran Perda	90%	100%	94.77	100%	142.55	100%	163.93	100%	189.14	100%	217.11		252.85	100%	1,060.35	BAKESBANG POL & SATPOL PP
1	19	3	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Tersosialisasinya Upaya Pemberantasan Penyakit Masyarakat	90%	100%	866.08	100%	1,302.75	100%	1,498.11	100%	1,728.51	100%	1,984.12		2,310.74	100%	9,690.32	BAKESBANG POL & SATPOL PP
1	19	4	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pertemuan Koordinasi	90%	90%	2,164.25	90%	3,255.45	90%	3,743.63	90%	4,319.37	90%	4,958.12		5,774.31	95%	24,215.13	BAKESBANG POL & SATPOL PP

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	
1	19	5	Program Bantuan Sosial Organisasi Sosial Masyarakat	Tersalurkannya bantuan dana sosial untuk tempat ibadah	574 Lembaga Sosial 1,347 Temp at Ibadah	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	-	-	100%	-	Bagian Kesra	
1	19	6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan	Persentase Pemberian Bantuan Kegiatan Keagamaan, Kessos dan Pendidikan	159 Lembaga Pendi dikan	100%	1,000.05	100%	1,504.19	100%	1,729.76	100%	1,995.78	100%	2,290.92	2,668.04	100%	11,188.69	Bagian Kesra
1	19	7	Program Pencegahan Dini dan Penanggulang an Korban Bencana Alam	Rasio jumlah kelompok peduli bencana terhadap daerah rawan bencana	NA	3:20	-	8 : 20	-	12 : 20	-	15 :20	-	20 :20	-	-	20 :20	-	BPBD
1	19	8	Program Pemulihan Pasca Bencana Alam	Presentase korban bencana yang tertangani	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	-	100%	-	BPBD
1	19	9	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Daya tanggap darurat	15 Menit	15	-	15	-	10	-	10	-	10	-	-	10 Menit	-	PMK
1	20		<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN</b>			41,095.82		<b>64,797.26</b>		<b>73,181.10</b>		<b>83,276.34</b>		<b>347,496.75</b>		<b>386,483.57</b>		<b>996,530.83</b>	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	
1	20	2	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tersedianya gedung pemerintah yang memadai	95%	90%	-	-	-	-	-	-	100%	6.600			100%	6.600	Bagian Umum dan Bagian Pemerintahan
1	20	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya 11 Gedung Kantor Lurah	78%	78%	190.59	85%	286.68	87%	329.67	90%	380.38	95%	436.63	508.50	100%	2,132.45	Bagian Pemerintahan
1	20	4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya dokumen kelebagaan Pemda	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	-	1 Dok	-	Bagian Organisasi
1	20	5	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Pejabat yang mengikuti Diklat	90%	92%	1,193.15	94%	1,794.73	96%	2,063.86	98%	2,381.27	100%	2,733.41	3,183.37	100%	13,349.79	BKD
1	20	6	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terselesaikannya jenis-jenis layanan kepegawaian	95%	95%	1,856.68	97%	2,792.80	98%	3,211.61	99%	3,705.53	100%	4,253.50	4,953.70	100%	20,773.82	BKD
					95%	95%	158	97%	160	98%	165	99%	163	100%	165			100%	165
1	20	7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya kebutuhan pegawai	90%	91%	201.00	92%	302.34	93%	347.68	94%	401.15	95%	460.47	536.28	95%	2,248.93	BKD
1	20	8	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah PERDA yang ditetapkan sesuai kebutuhan	95%	96%	19,268.71	97%	28,983.85	98%	33,330.23	99%	38,456.16	100%	44,143.01	51,409.70	100%	215,591.66	Sekretariat DPRD

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17		
1	20	9	Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tersedianya dokumen LHP	100%	100%	667.49	100%	1,004.04	100%	1,154.60	100%	1,332.17	100%	1,529.17	1,780.90	100%	7,468.36	Inspektorat	
1	20	10	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tersedianya Peluang Penjurangan Fungsional Auditor	75%	80%	900.66	85%	1,354.76	90%	1,557.92	90%	1,797.51	95%	2,063.33	2,402.98	95%	10,077.15	Inspektorat	
1	20	11	Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta PAN	Tersedianya kelembagaan sesuai fungsi	98%	98%	982.55	98,5%	1,477.94	99%	1,699.57	99,5%	1,960.95	100%	2,250.93	2,621.47	100%	10,993.39	Bagian Organisasi	
1	20	12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya fasilitas kegiatan ASN	90%	92%	132.23	94%	198.89	96%	228.72	98%	263.89	100%	302.92	352.78	100%	1,479.42	Sekretariat KORPRI	
1	20	13	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Teridentifikasinya kebutuhan legislasi daerah	85%	87%	1,187.84	90%	1,786.74	93%	2,054.68	95%	2,370.68	97%	2,721.25	3,169.21	98%	13,290.41	Bagian Hukum	
1	20	14	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase validitas data barang milik daerah	90%	90%	6.346,757	92%	<b>12,499.09</b>	94%	<b>13,932.68</b>	96%	<b>15,654.35</b>	98%	<b>17,457.03</b>	100%	<b>19,373.48</b>	100%	<b>85,263.39</b>	BPKAD

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17		
1	20	15	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Peningkatan PAD	34,33 %	26,90%	5.732,154	6,36 %	11,288.71	5,84%	12,583.48	5,84%	14,138.43	6,13%	15,766.54	4,34 %	17,497.41	4,34%	77,006.71	DISPENDA
1	20	16	Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan PER	Persentase Kelompok yang menerima bantuan	100%	100%	533,014	100%	1,049.70	100%	1,170.10	100%	1,314.69	100%	1,466.08	100%	1,627.03	100%	7,160.60	Bagian Ekonomi
1	20	17	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase pejabat pengadaan barang/jasa yang aktif daerah	43,48 %	50%	1,800	60%	1,890.00	65%	1,984.50	70%	2,083.72	75%	2,083.72	80%	240,670.14	80%	467,219.41	Bagian APP
1	20	18	Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian realisasi program SKPD	50%	55%	303	60%	318.15	70%	334.06	80%	350.76	90%	350.76	100 %	40,512.81	100%	78,648.60	Bagian APP
1	21		<b>KETAHANAN PANGAN</b>				<b>1.479,567</b>		<b>2.602,261</b>		<b>2.919,265</b>		<b>3.260,437</b>		<b>3.634,565</b>		<b>4.033,490</b>		<b>17.929,590</b>	
1	21	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Cakupan penanganan daerah rawan pangan	50%	55%	918,982	65%	1,809.81	75%	2,017.39	85%	2,266.68	95%	2,527.70	100 %	2,805.19	100%	12,345.76	Kantor Ketahanan Pangan
1	21	2	Program pemberdayaan penyuluh Pertanian/perkebunan lapangan	Cakupan layanan penyuluh	65%	70%	216,280	75%	425.93	80%	474.79	85%	533.46	90%	594.89	100 %	660.20	100%	2,905.54	BP4K

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17		
1	21	3	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan layanan kelompok tani	69%	72%	344,305	78%	678.06	85%	755.83	90%	849.23	95%	947.03	100%	1,050.99	100%	4,625.45	BP4K
1	22		<b>PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				<b>1,845.90</b>		<b>2,776.59</b>		<b>3,192.97</b>		<b>3,684.02</b>		<b>4,228.81</b>		<b>4,924.94</b>		<b>20,653.24</b>	
1	22	1	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Upaya Pengembangan Ekonomi Kelurahan	50 Pokmas	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	-	100%	-	-	BPM
1	22	2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Tersalurkannya aspirasi masyarakat	80%	80%	<b>1,527.16</b>	80%	2,297.14	80%	2,641.62	80%	3,047.88	80%	3,498.60		4,074.53	80%	17,086.93	BPM
1	22	3	Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	Terbangunnya mekanisme pembangunan partisipatif	3 Lingk.	30%	<b>318.74</b>	30%	479.45	30%	551.35	30%	636.14	30%	730.21		850.42	30%	3,566.31	BPM
1	22	4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terbangunnya administrasi kelurahan yang baik	0%	10%	-	20%	-	40%	-	60%	-	80%	-		-	10%	-	BPM
1	23		<b>STATISTIK</b>				<b>797.53</b>		<b>837.40</b>		<b>879.27</b>		<b>923.23</b>		<b>96,939.62</b>		<b>106,633.59</b>		<b>207,010.64</b>	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17		
1	23	1	Program Pengembangan Data dan Informasi	Tersedianya dokumen data	7 Dok	7 Dok	307.20	7 Dok	322.56	7 Dok	338.69	7 Dok	355.62	7 Dok	37,340.34	41,074.37	7 Dok	79,738.78	BAPPEDA	
1	23	2	Program Pengembangan Data dan Informasi	Tersedia system informasi data	0	1 Sim data	50	1 Sim data	50	1 Sim data	50	1 Sim data	50	1 Sim data	50		1 Sim data	50	BAPPEDA	
1	23	3	Pogram pengembangan data/informasi/statistik daerah	Tersedianya dokumen statistik daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	490.33	7 Dokumen	514.84	7 Dokumen	540.58	7 Dokumen	567.61	7 Dokumen	59,599.29	65,559.22	7 Dokumen	127,271.86	BAPPEDA	
<b>1</b>	<b>24</b>		<b>KEARSIPAN</b>				<b>528.18</b>		<b>794.49</b>		<b>913.63</b>		<b>1,054.14</b>		<b>1,210.03</b>		<b>1,409.22</b>		<b>5,909.69</b>	
1	24	1	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip	Terjaminnya penyimpana dokumen/arsip	85%	86%	<b>441.16</b>	87%	663.59	88%	763.10	90%	880.45	91%	1,010.65	1,177.02	92%	4,935.97	Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah	
1	24	2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tersedianya arsiparis di SKPD	0 Arsiparis	1Arsiparis	-	2Arsiparis	-	2Arsiparis	-	1Arsiparis	-	1Arsiparis	-	-	1 Arsiparis	-	Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah	
1	24	3	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Tersedianya Manajemen Kearsipan Terpadu SKPD (MKT)	5 SKPD	5 SKPD	<b>87.03</b>	5 SKPD	130.91	5 SKPD	150.54	5 SKPD	173.69	5 SKPD	199.37	232.19	5 SKPD	973.72	Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah	
<b>1</b>	<b>25</b>				<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>															

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	
1	25	1		Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa	Persentase penyampaian informasi pembangunan	NA	100 %	500	100 %	500	100 %	500	100 %	500			100 %	2500	DISHUBKOM INFO, PDEI, Humas dan Protokol
1	25	2		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase ASN pengelola komunikasi dan informasi	NA	75 %	200	80 %	200	90 %	200	100 %	200			100 %	1500	PDEI
1	25	3		Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase penyampaian informasi melalui media massa	100%	100 %	500	100 %	500	100 %	500	100 %	500			100 %	2500	Bagian Humas dan Protokol
1	25	4		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Peringkat keterbukaan informasi publik	2	2	250	1	250	1	250	1	250			1	1250	Bagian Humas dan Protokol
1	25	5		Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (hardware)	NA	50 %	500	60%	500	75%	500	80%	500			100%	2500	PDEI
1	25	6		Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase pengembangan TIK pada masyarakat	6 kelompok	15	350	20	200	30	500	40	500			50 kelompok	1900	DISHUBKOM INFO

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)				
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17			
1	26				672.21		1,011.13		1,162.75		1,341.58		1,539.97		1,793.47		7,521.11				
<b>PERPUSTAKAAN</b>																					
1	26	1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Tersedianya gedung perpustakaan	0	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	1.000			1 Unit	1.000	Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah		
1	26	2	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Penyediaan media pembinaan perpustakaan	90%	92%	672.21	94%	1,011.13	96%	1,162.75	98%	1,341.58	100%	1,539.97		1,793.47	100%	7,521.11	Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah	
				Ketersediaan Perpustakaan Rumah Ibadah	70%	72%	-	74%	-	76%	-	78%	-	80%	-			80%	-	Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah	
1	26	3	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tersedianya tenaga pustakawan	7 Orang Pustakawan	7 Orang Pustakawan	--	2Org Pustakawan	-	20 Orang Pustakawan	-	20Org Pustakawan	-	20Org Pustakawan	-		20Org Pustakawan	-	Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah		
<b>2 URUSAN PILIHAN</b>																					
2	1		<b>PERTANIAN</b>					85,675		<b>168.73</b>		<b>188.08</b>		<b>211.32</b>		<b>235.65</b>		<b>261.52</b>		<b>1,150.97</b>	
2	1.	1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Produktifitas tanaman pangan dan hortikultura	100 Ha	100 Ha	85,675	20 Ha	<b>168.73</b>	140 Ha	<b>188.08</b>	160 Ha	<b>211.32</b>	180 Ha	<b>235.65</b>	200 Ha	<b>261.52</b>	200 Ha	<b>1,150.97</b>	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan	
2	4		<b>PARIWISATA</b>					<b>4,124.80</b>		<b>8,123.24</b>		<b>9,054.94</b>		<b>10,173.87</b>		<b>11,345.44</b>		<b>12,590.95</b>		<b>55,413.24</b>	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17		
2	4	1	Program pengembangan destinasi pariwisata	Persentase tingkat kunjungan wisatawan	0	22%	3.125,935	34%	6.156.11	54%	6.862.19	64%	7.710.16	84%	8.598.02	95%	9.541.92	95%	41.994.33	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	4	2	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Cakupan pemasaran pariwisata	10%	15%	610,544	35%	1,202.38	45%	1,340.29	55%	1,505.91	65%	1,679.33	75%	1,863.69	75%	8,202.15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	4	3	Program pengembangan Kemitraan	Persentase gangguan keamanan di lokasi destinasi	5%	5%	388,320	3%	764.74	3%	852.46	2%	957.80	1%	1,068.09	0%	1,185.35	0%	5,216.76	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
<b>2</b>	<b>5</b>		<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>3,123.17</b>		<b>6,150.65</b>		<b>6,856.11</b>		<b>7,703.32</b>		<b>8,590.40</b>		<b>9,533.47</b>		<b>41,957.12</b>	
2	5	2	Program pengembangan budidaya perikanan	Produktifitas perikanan budidaya	298.1 ton	287 ton	1.897,75	294 ton	3,737.36	301 ton	4,166.02	311 ton	4,680.82	318 ton	5,219.84	325 ton	5,792.88	325 ton	25,494.69	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan
2	5	1	Program pengembangan perikanan tangkap	Presentase kelompok yang terfasilitasi	20%	30%	615,650	45%	1,212.44	60%	1,351.50	70%	1,518.51	85%	1,693.37	100%	1,879.27	100%	8,270.74	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan
2	5	3	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan	Persentase produksi hasil olahan perikanan	15%	15%	609,765	25%	1,200.85	35%	1,338.58	45%	1,503.99	55%	1,677.18	65%	1,861.31	65%	8,191.68	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan
<b>2</b>	<b>6</b>		<b>PERDAGANGAN</b>				<b>7,726.45</b>		<b>15,216.20</b>		<b>16,961.43</b>		<b>19,057.37</b>		<b>21,251.92</b>		<b>23,584.98</b>		<b>103,798.35</b>	
2	6	1	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Cakupan Layanan Informasi Harga komoditas	0%	22%	5.620,610	33%	11,069.04	56%	12,338.61	72%	13,863.30	83%	15,459.73	100%	17,156.92	100%	75,508.21	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Juta)			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17		
2	6	2	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Persentase penanganan pasar tradisional	0%	5%	413,850	16%	815.02	37%	908.50	53%	1,020.77	74%	1,138.31	100%	1,263.28	100%	5,559.73	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2	6	3	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Cakupan pengamanan perdagangan dan pemeriksaan tera	40%	50%	1.691,985	75%	3,332.14	85%	3,714.32	90%	4,173.30	95%	4,653.88	100%	5,164.79	100%	22,730.41	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
<b>2</b>	<b>7</b>		<b>PERINDUSTRIAN</b>				<b>887.81</b>		<b>1,748.43</b>		<b>1,948.96</b>		<b>2,189.80</b>		<b>2,441.97</b>		<b>2,710.05</b>		<b>11,927.01</b>	
2	7	1	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase pelaku usaha terlatih	29%	32%	529,85	34%	1,043.47	36%	1,163.15	38%	1,306.88	40%	1,457.38	42%	1,617.37	42%	7,118.09	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2	7	2	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Persentase kelompok penerima bantuan	5%	6.4%	357,962	7.4%	704.96	8.8%	785.81	10.2%	882.92	11.6%	984.59	13%	1,092.68	13%	4,808.92	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

---

### INDIKATOR KINERJA DAERAH

---

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2016-2021 berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2021.

Dalam hal perubahan indikator kinerja daerah, dilakukan penyesuaian dengan mengacu kepada:

1. Sasaran Pembangunan Kota Mataram berdasarkan RPJMN 2010-2014; meliputi indikator pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan angka pendapatan per kapita;
2. Tujuan pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dengan asumsi pencapaian pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan peningkatan pendapatan per kapita yang dalam implementasinya sangat tergantung kepada kebijakan nasional, menyangkut kebijakan fiskal maupun moneter serta investasi, maka penetapan angka indikator turunan harus mengakomodasikan target RPJM Nasional dan RPJM Propinsi selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Pertimbangan aspek-aspek regional dan permasalahan keotonomian layak dikemukakan sebagai materi bahasan dalam upaya pencapaian optimum sasaran pembangunan Kota Mataram yang ditetapkan. Meskipun demikian, mengingat kemampuan realisasi pencapaian target indikator daerah sangat dipengaruhi

kemampuan fiskal daerah dan program pembangunan prioritas, serta ketersediaan ruang fiskal daerah, dengan demikian Sasaran Pembangunan Kota Mataram ditetapkan dengan kisaran skala antara target RPJMN dan target berdasarkan rekomendasi BPS yang mempertimbangkan aspek-aspek tersebut di atas.

Penguatan peran pemerintah daerah dalam menyusun tata kelola pemerintahan di lingkup daerahnya adalah salah satu pemetaan potensi dan pendalaman peran (role position) pemerintahan daerah sebagai pihak yang memiliki nilai strategis dalam menjalankan pembangunan manusia. Otonomi daerah adalah sebuah konsep besar yang memberikan ruang inovasi bagi daerah otonom (Kabupaten/Kota) untuk mengenali, menggali dan memberikan ciri unik pada potensi daerah nya masing-masing. Bertitik tolak dari peran dasar pemerintah daerah tersebut, maka perlu dirumuskan langkah-langkah strategis yang mampu mengusung isu isu sentral daerah kedalam sebuah langkah kebijakan daerah. Isu isu sentral sektoral yang diusung instansi pusat harus mampu diterjemahkan secara menyeluruh dengan tidak meninggalkan isu isu lokal.

Sebagai sebuah daerah otonom, Kota Mataram diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah kota dengan para pemangku kepentingan di Kota Mataram. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik.

Target capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9-1  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Mataram**

(1)	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					TAHUN TRANSISI 2021	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>											
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	7,99	8.06	8.11	8.17	8.20	8.27	8.35	8.35	BAPPEDA	
2.	Laju Inflasi (%)	3,25	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	BAPPEDA	Pertanian, KKP, Bag. Ekonomi, Koperindag, Perhubungan, BPMP2T, Humas
3.	Angka Kemiskinan (%)	10.53*	10.06	9.06	8.06	7.06	6.06	5.06	5.06	BAPPEDA	
4.	Angka Harapan Lama Sekolah	15,28	15,55	15,82	16,09	16,36	16,63	16,90	16,90	DIKPORA	
5.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,05	9,07	9,09	9,11	9,14	9,16	9,18	9,18	DIKPORA	
6.	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (%)	97,05	97,05	97,2	97,8	98,00	98,5	99,5	99,5	DIKPORA	
7.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	94,09	94,09	96,9	97	97,6	98	99	99	BPPKB	
8.	Pendapatan Per Kapita (Rp./kapita)	29.405.765	32.878.932	36.827.151	41.210.279	46.284.582	52.035.210	58.655.461	58.655.461	BAPPEDA	
9.	Angka Indeks Pembangunan Manusia	76,37	77,34	78,31	79,28	80,25	81,22	82,19	82,19	BAPPEDA	
10.	Skor Pola Pangan Harapan (%)	82.13	86.13	88.13	90.13	92.13	94.13	96.13	96.13	KKP	Dinas Pertanian, BP4K
11.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,15	3.52	2.88	2.24	1.61	0.97	0.33	0.33	Disosnakertrans	
12.	Jumlah lembaga ekonomi produktif berbasis keagamaan	8	8	12	16	20	24	28	28	KOPERINDAG	
<b>II. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>											
13	Persentase penduduk ber KTP	87	90	95	100	100	100	100	100	Dukcapil	

	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					TAHUN TRANSISI 2021	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020				
14.	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	2,54	2,49	2,45	2,34	2,33	2,21	2,2	2,2	DIKES	
15.	Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)	9,09	36,36	54,55	72,73	90,91	100	100	100	DIKES	
16.	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	4,00	4,13	4,08	4,03	3,98	3,93	3,88	3,88	DIKES	
17.	Persentase pranata adat terhadap jumlah lingkungan (%)	40/9,34	50	60	70	80	90	100	100	BPM	
18.	Persentase Penanganan Pelanggaran PERDA dan PERWAL (%)	70	75	85	90	98	100	100	100	SETDA	
19.	Cakupan peserta KB aktif (%)	73,90	74	76	78	81	86	87	87	BPPKB	
20.	Cakupan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	13,68	18,51	23,33	28,15	32,97	37,79	42,61	42,61	Disosnaker trans	
21.	Jumlah Perpustakaan pada tempat ibadah	228	248	268	288	308	328	348	348	SETDA	
22.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	87,21	87,21	89	91	93	95	95	95	PU	
23.	Persentase Rumah Tangga Menurut Akses Terhadap Sanitasi Layak (%)	85,90	85,90	90	95	100	100	100	100	PU	BLH, Kebersihan
24.	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih (%)	67,34	67,34	77	87	100	100	100	100	PU	
25.	Persentase Rumah layak huni (%)	98,13	98,13	98,50	99	99,25	99,50	100	100	PU	BPM
26.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	12,50%	12,50 %	15 %	17,50 %	20 %	22,50 %	25 %	25 %	Pertamanan	BPKAD, BLH, PU, T
27.	Persentase kesesuaian Rencana Tata Ruang (%)	56,56	56,56	60	62,5	65	70	75	75	Tata Kota	BAPPEDA, BPMP2T
28.	Persentase penanganan sampah (%)	66,33	66,33	70	75	80	85	95	95	Kebersihan	PU, BLH
<b>III. ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>											
29.	Target opini laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD	

	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					TAHUN TRANSISI 2021	KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDAMPING
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020				
30.	Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	18,93/17,79	20.59	20.60	20.64	20.68	20.72	20.80	20.80	DISPENDA	
31.	Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah (%)	23,16	24,16	25,16	26,16	27,16	28,16	29,16	29,16	BPKAD	
32.	Target penilaian maturitas SPIP (level)	-	persiapan	persiapan	persiapan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	SETDA	
33.	Target penilaian kapabilitas APIP (level)	-	persiapan	persiapan	persiapan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat	
34.	Kunjungan wisatawan (orang)	427.725	512.725	597.725	682.725	767.725	852.725	937.725	937,725	Disbudpar	
35.	Angka kriminalitas (kasus)	1.143	1.119	1.055	959	859	759	659	659	POL-PP	
36.	Cakupan SKPD yg menyelenggarakan informasi publik berbasis IT (%)	10	10	15	20	30	40	50	50	SETDA	
37.	Cakupan SKPD yang berada di zona hijau sesuai standar Ombudsman (%)	69,2	69,2	69,2	100	100	100	100	100	SETDA	
38.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (%)	76.16	76.16	78.27	79.02	79.77	80.52	81.27	81.27	BPMP2T	
39.	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	5	5	8	11	14	17	20	20	BAPPEDA	
40.	Nilai investasi (PMDN/PMA)	PMA : \$7.696.170 PMDN : 972,08 juta	PMA : \$ 285.043 PMDN : 150 milyar	PMA : \$ 285.043 PMDN : 850 milyar	PMA : \$ 285.043 PMDN : 500 milyar	PMA : \$ 285.043 PMDN : 500 milyar	PMA : \$ 285.043 PMDN : 500 milyar	PMA : \$ 285.043 PMDN : 500 milyar	PMA : \$9.046.430 PMDN : 3 trilyun	BPMP2T	
41.	Tingkat perkembangan WUB (unit usaha)	16.212	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	28.212	KOPERINDAG	
42.	Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Bidang)	5	5	6	6	6	6	6	6	SETDA	
43.	Pendaftaran HAKI produk hasil karya daerah	0	0	2	2	2	2	2	10	KOPERINDAG	Bappeda, BPM, Bag Perekonomian

# BAB 10

## PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah Kota Mataram untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan memperhatikan RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 dan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 harus memuat Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

---

### 10.1. PEDOMAN TRANSISI

---

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah RPJMD berakhir ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya;
2. RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1, antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
3. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

---

## 10.2. KAIDAH PELAKSANAAN

---

RPJMD Kota Mataram penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih merupakan pedoman bagi setiap Kepala Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan pedoman untuk menyusun RKPD.

Sehubungan hal tersebut, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

- 1) Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Kota Mataram dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Kota Mataram serta masyarakat dan dunia usaha agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya sehingga arah kebijakan setiap tahunnya dalam lima tahunan dapat dicapai;
- 2) Agar terjadi kesinambungan dan konsistensi dalam penyusunan kebijakan daerah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021;
- 3) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya melalui penyusunan RKPD Kota Mataram, yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
- 4) Penyusunan RKPD Kota Mataram dilakukan melalui proses Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai MPBM Kelurahan, MPBM Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan MPBM Tingkat Kota Mataram;
- 5) RKPD Kota Mataram menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dengan pendekatan pencapaian hasil (*outcomes*);
- 6) Dalam hubungannya dengan penganggaran daerah, RKPD Kota Mataram merupakan dasar dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- 7) Renja yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
- 8) Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021, Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan.
- 9) Terhadap perubahan atau pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi dokumen RPJMD ini maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## KATA PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021, sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Walikota/Wakil Walikota Mataram, disusun melalui pendekatan teknokratik yaitu proses persiapan penyusunan yang dilaksanakan oleh aparaturnya Pemerintah Kota Mataram; *top-down bottom-up* yaitu metode penyusunan yang saling berkaitan antara rancangan RPJMD dengan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah; pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* yaitu melalui proses Jaring Asmara, Konsultasi Publik, *Focus Group Discussion* (FGD)/Diskusi Tematik, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) atau yang dikenal dengan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM); serta pendekatan politis, yaitu proses penetapan di dalam kerangka penetapan RPJMD sebagai Peraturan Daerah.

Untuk menjamin pencapaian visi, misi, program yang telah di susun sebagai wujud komitmen untuk memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat Kota Mataram, pelaksanaan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 menjadi tanggungjawab bersama di antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dengan berikhtiar untuk melanjutkan keberhasilan pembangunan yang merupakan upaya mendasar untuk *“memuliakan kehidupan manusia”* yang ada di Kota Mataram dalam Komitmen **“MATARAM untuk SEMUA”**.

Dengan dukungan berbagai pihak, khususnya warga masyarakat Kota Mataram. Keberhasilan pencapaian RPJMD ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas yang akumulasinya adalah ***Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya.***

WALIKOTA MATARAM,



H. AHYAR ABDUH